Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

BPK Perwakilan Prov Kalsel

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : 5.A/LHP/XIX.BJM/04/2024
Tanggal : 30 April 2024

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPK Perwakilan Kalsel

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
   b. Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
   c. Pernyataan tanggung jawab kepala daerah; dan
   d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan ini memuat:
   a. Resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. Ikhtisar pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

BPK Perwakilan Kalsel

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..... **ii**

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN **1**

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 1
2. Standar Pemeriksaan 1
3. Tujuan Pemeriksaan 1
4. Entitas yang Diperiksa 1
5. Lingkup Pemeriksaan 1
6. Metodologi Pemeriksaan 2
7. Jangka Waktu Pemeriksaan 3
8. Batasan Pemeriksaan 3

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 (*AUDITED)*

BPK Perwakilan Kalsel

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPK Perwakilan Kalsel

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tapin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tapin Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.2.1.3 Utang Belanja dan Catatan 5.3.5.1.4.3 Utang Pengadaan Aset Tetap atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin bahwa pada Tahun 2023 terjadi defisit anggaran yang mengakibatkan utang belanja dengan nilai signifikan sebesar Rp332,41 miliar. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam APBD Tahun 2023 merencanakan adanya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp470.246.732.000,00. Namun, DBH tersebut baru dicairkan pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF), sehingga terjadi penundaan pembayaran kegiatan pada 45 Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Tapin telah berupaya menyelesaikan pembayaran utang melalui pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2024. Pada tanggal 26 dan 27 Maret 2024, sebagian dana TDF telah disalurkan ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp28.477.661.928,00 dan Rp364.817.340.808,00. Namun, sampai dengan tanggal 30 April 2024, Pemkab Tapin belum melaksanakan pembayaran utang karena terdapat kendala pada aplikasi SIPD dan masih melakukan penyesuaian menggunakan aplikasi pendamping. Pembayaran utang direncanakan akan dilakukan pada minggu II bulan Mei 2024. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 5.B/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,

Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631

BPK Perwakilan Prov. Kalsel

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);

c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tapin yang memiliki 45 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2023;

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Arus Kas (LAK);

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023;

BPK Perwakilan Kalsel

b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

BPK Perwakilan Kalsel

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan Interim dilakukan selama 27 hari mulai tanggal 22 Januari s.d. 24 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 14/ST/XIX.BJM/1/2024 tanggal 16 Januari 2024, dan Pemeriksaan Terinci dilakukan selama 25 hari mulai tanggal 12 Maret s.d. 5 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 105/ST/XIX.BJM/3/2024 tanggal 5 Maret 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BPK Perwakilan Kalsel

BUPATI TAPIN

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Peruabahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BPK Perwakilan Kalsel

Rantau, 30 April 2024

Pj. BUPATI TAPIN

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BPK Perwakilan Kalsel

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

AUDITED

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 telah selesai di susun. Laporan keuangan ini di susun dalam rangka memenuhi peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan negara/daerah khususnya Undang undang no 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BPK Perwakilan Kalsel

Laporan Keuangan ini di maksudkan sebagai satu wujud transfarasi dan akuntablitas Pemerintah Kabupaten Tapin dalan rangka melaksanakan *Good Governance* sekaligus implementasi sistem akuntansi Keuangan Daerah seperti yang di atur dalam peraturan tersebut di atas. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini juga untuk memberikan informasi yang relavan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Tapin selama periode tahun anggaran 2023 yang meliputi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, ekuitas Dana dan Aliran Kas.

Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Peruabahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan uraian ringkas di bawah ini.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2023, diketahui Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.568.178.825.031,12 atau mencapai 71,56% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.191.378.634.433,00. Realisasi Belanja Rp1.717.847.616.256,45 atau mencapai 74,66% dari anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp2.300.926.495.433,00 sehingga terjadi defisit sebesar Rp149.668.791.225,33 dibanding defisit anggaran yang di rencanakan sebesar Rp109.547.861.000,00 selanjutnya terdapat selisih lebih pembiayaan netto sebesar Rp152.877.428.456,53 dari anggaran yang semula dirancang berupa Selisih Kurang Pembayaran Netto sebesar Rp109.547.861.000,00 dikarenakan adanya penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp227.687.810.529,53 atas hal tersebut terdapat realisasi Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan sebesar Rp3.208.637.231,20 di banding anggaran SILPA sebesar Rp 0,00.

Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintahan Kabupaten Tapin tahun 2023 menunjukan saldo akhir kas sebesar Rp3.208.637.231,20. Hal ini diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi senilai Rp181.141.401.814,12 selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai Rp346.809.412.100,45 selisih kurang arus kas dari aktivitas pendanaan senilai Rp58.811.163.012,00 selisih lebih arus kas dari aktivitas non anggaran senilai Rp0,00 sehingga terjadi Penurunan Kas sebesar Rp224.479.173.298,33 terhadap saldo awal kas di BUD sebesar Rp 227.687.810.529,53 yang berdampak pada kenaikan pada saldo akhir kas di BUD menjadi Rp 3.208.637.231,20. Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.208.637.231,20 diperoleh dari total saldo akhir kas di BUD sebesar Rp 362.218.868,43 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 391.374.384,77 kas di Bendahara FKTP sebesar Rp 2.194.838.259,00 kas di Bendahara BOS Rp 260.205.719,00.

Neraca Pemerintah Kabupaten Tapin meyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2023. Neraca Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 di tutup dengan jumlah akhir sebesar Rp3.253.642.133.315,24 pada sisi

BPK Perwakilan Kalsel

aktiva, nilai aset tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp 97.409.554.240,30 investasi jangka panjang Rp 164.260.958.162,22 aset tetap Rp2.689.900.689.011,20 dan aset lainnya sebesar Rp302.070.931.901,52 sedangkan dari sisi pasiva, jumlah kewajiban sebesar Rp 410.400.136.462,28 sehingga dengan demikian ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.843.241.996.852,96

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan. Semoga memberikan informasi yang berguna bagi para Stakeholder Pemerintah Kabupaten Tapin maupun pihak pengguna laporan keuangan lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa menyertai dan memberkati pengabdian kita terhadap Nusa dan Bangsa dan memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tapin yaitu Terwujudnya Tapin Mandiri Sejahtera yang Agamis.

BPK Perwakilan Kalsel

Rantau, 30 April 2024

Pj. BUPATI TAPIN

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

Daftar Lampiran xiii

LK Pokok

Bagian I Laporan Realisasi APBD

Bagian II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Bagian III Neraca

Bagian IV Laporan Operasional

Bagian V Laporan Arus Kas

Bagian VI Laporan Perubahan Ekuitas

Bagian VII Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 6

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 20

Bab IV Kebijakan Akuntansi 22

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 58

5.1 Penjelasan Pos-Pos LRA 58

5.2 Penjelasan Pos-Pos LPSAL 102

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 104

5.4 Penjelasan Pos-Pos LO 154

5.5 Penjelasan Pos-Pos LAK 213

5.6 Penjelasan Pos-Pos LPE 220

Bab VI Penutup 226

BPK Perwakilan Kalsel

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin 2021-2023 6
Tabel 2.1.2 Realisasi Pencapaian IKM Tapin 2018-2023 8
Tabel 2.2.1 Proyeksi Anggaran 2021-2023 13
Tabel 2.2.2 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023 14
Tabel 2.2.3 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023 15
Tabel 2.2.4 Anggaran Pembiayaan Penerimaan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023 17
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Keuangan 2023 20
Tabel 4.3.1 Taksiran Piutang Tak Tertagih 26
Tabel 4.3.2 Persentase Penyisihan atas Investasi yang Tidak Dapat Diterima Kembali 31
Tabel 4.3.3 Masa Manfaat Aset Tetap 34
Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 58
Tabel 5.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022 59
Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 59
Tabel 5.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 60
Tabel 5.1.5 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 62
Tabel 5.1.6 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro Tahun 2023 dan 2022 62
Tabel 5.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2023 dan 2022 63
Tabel 5.1.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2023 dan 2022 63
Tabel 5.1.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi DaerahTahun 2023 dan 2022 63
Tabel 5.1.10 Anggaran dan Realisasi BLUD Tahun 2023 dan 2022 63
Tabel 5.1.11 Rincian Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022 64
Tabel 5.1.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Remunarasi Tahun 2023 dan 2022 64
Tabel 5.1.13 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2023 dan 2022 64
Tabel 5.1.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022 65
Tabel 5.1.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 65
Tabel 5.1.16 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 66
Tabel 5.1.17 Rincian Realisasi Dana DBH Tahun 2023 dan 2022 66
Tabel 5.1.18 Anggaran dan Realisasi DAK Tahun 2023 dan 2022 67
Tabel 5.1.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022 69

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.20 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022 69
Tabel 5.1.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 70
Tabel 5.1.22 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dan 2022 70
Tabel 5.1.23 Rincian Realisasi Penerima Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA Tahun 2023 71
Tabel 5.1.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022 71
Tabel 5.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022 72
Tabel 5.1.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 72
Tabel 5.1.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022..... 74
Tabel 5.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 74
Tabel 5.1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022 76
Tabel 5.1.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022..... 81
Tabel 5.1.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 83
Tabel 5.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Uang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 83
Tabel 5.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022 83
Tabel 5.1.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022 ... 84
Tabel 5.1.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022 84
Tabel 5.1.36 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023..... 85
Tabel 5.1.37 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2023 85
Tabel 5.1.38 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 85
Tabel 5.1.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 89
Tabel 5.1.40 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun 2023..... 89
Tabel 5.1.41 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Tahun 2023..... 89
Tabel 5.1.42 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Tahun 2023 90
Tabel 5.1.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 90
Tabel 5.1.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022 91
Tabel 5.1.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 91
Tabel 5.1.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 92
Tabel 5.1.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 93

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 94
Tabel 5.1.49 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022 94
Tabel 5.1.50 Rincian Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 95
Tabel 5.1.51 Rincian Realisasi Pembayaran untuk Penanganan Pengendalaian Dampak Inflasi Tahun 2023 95
Tabel 5.1.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022 96
Tabel 5.1.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 96
Tabel 5.1.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 97
Tabel 5.1.55 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 98
Tabel 5.1.56 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 99
Tabel 5.1.57 Rincian Realisasi Penerimaan LUEP Tahun 2023 dan 2022 100
Tabel 5.1.58 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022..... 100
Tabel 5.1.59 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 dan 2022 101
Tabel 5.1.60 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 dan 2022 101
Tabel 5.2.1 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan Tahun 2022 dan 2023 102
Tabel 5.2.2 Kas Tahun 2022 dan 2023..... 103
Tabel 5.3.1 Aset Lancar tahun 2023 dan 2022 104
Tabel 5.3.2 Kas Setara Kas tahun 2023 dan 2022..... 104
Tabel 5.3.3 Kas di Kas Daerah tahun 2023 dan 2022 105
Tabel 5.3.4 Kas di BLUD tahun 2023 dan 2022..... 106
Tabel 5.3.5 Kas BOS dan BOP tahun 2023 dan 2022..... 106
Tabel 5.3.6 Kas Dana FKTP dan BOK tahun 2023 dan 2022 107
Tabel 5.3.7 Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 dan 2022 107
Tabel 5.3.8 Kas Dana BOK tahun 2023 dan 2022..... 108
Tabel 5.3.9 Piutang PBB 2023 dan 2022..... 109
Tabel 5.3.10 Rincian Saldo Piutang PBB tahun 1994 sampai 2023..... 109
Tabel 5.3.11 Saldo Piutang PBB Netto tahun 2023 110
Tabel 5.3.12 Penyisihan Piutang PBB tahun 2023..... 111
Tabel 5.3.13 Piutang Retribusi tahun 2023 dan 2022 111
Tabel 5.3.14 Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko Netto tahun 2023 112
Tabel 5.3.15 Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah tahun 2023..... 112
Tabel 5.3.16 Piutang Retribusi Netto tahun 2023..... 113
Tabel 5.3.17 Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko tahun 2023 113
Tabel 5.3.18 Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah tahun 2023 . 114
Tabel 5.3.19 Daftar Rincian Piutang BLUD tahun 2023..... 115
Tabel 5.3.20 Rincian Penysihan Piutang BLUD tahun 2023..... 115

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.21 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 dan 2022 116
Tabel 5.3.22 Daftar Rincian Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2023 116
Tabel 5.3.23 Daftar Piutang Lainnya tahun 2023 dan 2022 117
Tabel 5.3.24 Daftar Rincian Piutang LUEP tahun 2023 118
Tabel 5.3.25 Daftar Piutang yang diserahkan ke KPKNL 118
Tabel 5.3.26 Piutang Lainnya Netto tahun 2023 119
Tabel 5.3.27 Penyisihan Piutang LUEP tahun 2023 119
Tabel 5.3.28 Daftar Persediaan tahun 2023 dan 2022 120
Tabel 5.3.29 Daftar Investasi Jangka Panjang tahun 2023 dan 2022 121
Tabel 5.3.30 Daftar Investasi Dana Bergulir tahun 2023 dan 2022 121
Tabel 5.3.31 Daftar Rincian Penyertaan Modal tahun 2023 122
Tabel 5.3.32 Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan tahun 2023 123
Tabel 5.3.33 Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah tahun 2023 124
Tabel 5.3.34 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah tahun 2023 125
Tabel 5.3.35 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah tahun 2023 125
Tabel 5.3.36 Daftar Sengketa Aset Tetap Tanah tahun 2023 125
Tabel 5.3.37 Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 126
Tabel 5.3.38 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 127
Tabel 5.3.39 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 127
Tabel 5.3.40 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 128
Tabel 5.3.41 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 129
Tabel 5.3.42 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 129
Tabel 5.3.43 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 130
Tabel 5.3.44 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 130
Tabel 5.3.45 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 131
Tabel 5.3.46 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2023 dan 2022 131
Tabel 5.3.47 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tahun 2023 132
Tabel 5.3.48 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tahun 2023 132
Tabel 5.3.49 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 132
Tabel 5.3.50 Daftar Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 133
Tabel 5.3.51 Daftar Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 133
Tabel 5.3.52 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 dan 2022 134
Tabel 5.3.53 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 134
Tabel 5.3.54 Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 134
Tabel 5.3.55 Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 135
Tabel 5.3.56 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap SKPD tahun 2023 dan 2022 135
Tabel 5.3.57 Daftar Aset Lainnya tahun 2023 dan 2022 136
Tabel 5.3.58 Daftar Tuntutan Perbendaharaan 2023 dan 2022 137

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.59 Daftar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2023 dan 2022 138
Tabel 5.3.60 Aset Tidak Berwujud SKPD tahun 2023 dan 2022 138
Tabel 5.3.61 Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud SKPD tahun 2023 dan 2022 139
Tabel 5.3.62 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud SKPD tahun 2023 141
Tabel 5.3.63 Aset Lain-lain SKPD tahun 2023 142
Tabel 5.3.64 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain SKPD tahun 2023 dan 2022 144
Tabel 5.3.65 Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 dan 2022 145
Tabel 5.3.66 Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 dan 2022 146
Tabel 5.3.67 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 dan 2022 147
Tabel 5.3.68 Rincian Utang Belanja tahun 2023 dan 2022 147
Tabel 5.3.69 Utang Belanja SKPD tahun 2023 dan 2022 148
Tabel 5.3.70 Utang Badan Layanan Umum Daerah tahun 2023 dan 2022 149
Tabel 5.3.71 Rincian Utang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 dan 2022 151
Tabel 5.3.72 Utang Pengadaan Aset Tetap SKPD tahun 2023 dan 2022 151
Tabel 5.4.1 Surplus/Defisit LO Tahun 2023 dan 2022 154
Tabel 5.4.2 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2023 dan 2022 155
Tabel 5.4.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2023 dan 2022 156
Tabel 5.4.4 Selisih LO dengan LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 156
Tabel 5.4.5 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 156
Tabel 5.4.6 Selisih LO dengan LRA Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 157
Tabel 5.4.7 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 158
Tabel 5.4.8 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 158
Tabel 5.4.9 Selisih LO dengan LRA Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 159
Tabel 5.4.10 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 159
Tabel 5.4.11 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 160
Tabel 5.4.12 Selisih LO dengan LRA Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 160
Tabel 5.4.13 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 161
Tabel 5.4.14 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 161
Tabel 5.4.15 Selisih LO dengan LRA Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 162
Tabel 5.4.16 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 163
Tabel 5.4.17 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022 163
Tabel 5.4.18 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dan 2022 164
Tabel 5.4.19 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 dan 2022 164
Tabel 5.4.20 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 dan 2022 165

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.21 Selisih LO dengan LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 165
Tabel 5.4.22 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 165
Tabel 5.4.23 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2023 dan 2022 166
Tabel 5.4.24 Selisih LO dengan LRA Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023 166
Tabel 5.4.25 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023 167
Tabel 5.4.26 Rincian Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2023 dan 2022 168
Tabel 5.4.27 Selisih LO dengan LRA Dana Alokasi Umum Tahun 2023 168
Tabel 5.4.28 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023 dan 2022 168
Tabel 5.4.29 Selisih LO dengan LRA Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 169
Tabel 5.4.30 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) -LO Tahun 2023 dan 2022 170
Tabel 5.4.31 Selisih LO dengan LRA Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) - LO Tahun 2023 170
Tabel 5.4.32 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO Tahun 2023 dan 2022 171
Tabel 5.4.33 Selisih LO dengan LRA Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 171
Tabel 5.4.34 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 172
Tabel 5.4.35 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 172
Tabel 5.4.36 Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022 173
Tabel 5.4.37 Selisih LO dengan LRA Pendapatan Hibah Tahun 2023 174
Tabel 5.4.38 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Hibah Tahun 2023 174
Tabel 5.4.39 Rincian Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2023 dan 2022 175
Tabel 5.4.40 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 175
Tabel 5.4.41 Selisih LO dengan LRA Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2023 175
Tabel 5.4.42 Rincian Beban-LO Tahun 2023 dan 2022 176
Tabel 5.4.43 Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2023 dan 2022 176
Tabel 5.4.44 Selisih LO dengan LRA Beban Pegawai Tahun 2023 178
Tabel 5.4.45 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Beban Pegawai Tahun 2023 179
Tabel 5.4.46 Rincian Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2023 dan 2022 180
Tabel 5.4.47 Selisih LO dengan LRA Beban Barang Tahun 2023 180
Tabel 5.4.48 Selisih LO dengan LRA Beban Jasa Tahun 2023 182
Tabel 5.4.49 Selisih LO dengan LRA Beban Pemeliharaan Tahun 2023 186
Tabel 5.4.50 Selisih LO dengan LRA Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 187

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.51 Selisih LO dengan LRA Beban Uang/Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 187
Tabel 5.4.52 Selisih LO dengan LRA Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 188
Tabel 5.4.53 Selisih LO dengan LRA Beban dan Jasa BLUD Tahun 2023 188
Tabel 5.4.54 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Beban Barang dan Jasa Tahun 2023..... 188
Tabel 5.4.55 Rincian Beban Bunga-LO Tahun 2023 dan 2022 197
Tabel 5.4.56 Selisih LO dengan LRA Beban Bunga Tahun 2023 197
Tabel 5.4.57 Rincian Beban Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022..... 198
Tabel 5.4.58 Selisih LO dengan LRA Beban Hibah Tahun 2023 198
Tabel 5.4.59 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Rincian Beban Hibah Tahun 2023 198
Tabel 5.4.60 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat -LO Tahun 2023 dan 2022..... 199
Tabel 5.4.61 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik-LO Tahun 2023 dan 2022 199
Tabel 5.4.62 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO Tahun 2023 dan 2022 200
Tabel 5.4.63 Rincian Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023 dan 2022 200
Tabel 5.4.64 Selisih LO dengan LRA Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 201
Tabel 5.4.65 Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2023 dan 2022..... 201
Tabel 5.4.66 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2023 dan 2022..... 202
Tabel 5.4.67 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2023 dan 2022..... 203
Tabel 5.4.68 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun 2023 dan 2022..... 203
Tabel 5.4.69 Rincian Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi-LO Tahun 2023 dan 2022.. 204
Tabel 5.4.70 Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud-LO Tahun 2023 dan 2022..... 204
Tabel 5.4.71 Rincian Beban Transfer -LO Tahun 2023 dan 2022 205
Tabel 5.4.72 Selisih LO dengan LRA Beban Transfer Tahun 2023 205
Tabel 5.4.73 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Beban Transfer Tahun 2023 205
Tabel 5.4.74 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022..... 206
Tabel 5.4.75 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022..... 206
Tabel 5.4.76 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 207
Tabel 5.4.77 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO Tahun 2023 dan 2022 208
Tabel 5.4.78 Rincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa-LO Tahun 2023 dan 2022..... 208
Tabel 5.4.79 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi dan Transfer Tahun 2023 dan 2022 208
Tabel 5.4.80 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 209

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.81 Kenaikan/Penurunan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 209
Tabel 5.4.82 Rincian Beban Tak Terduga -LO Tahun 2023 dan 2022 209
Tabel 5.4.83 Selisih LO dengan LRA Beban Tak Terduga Tahun 2023 210
Tabel 5.4.84 Penjelasan Selisih LO dengan LRA Beban Tak Terduga Tahun 2023 210
Tabel 5.4.85 Rincian Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 dan 2022 212
Tabel 5.5.1 Arus Kas Tahun 2023 213
Tabel 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 214
Tabel 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2023 216
Tabel 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 217
Tabel 5.5.5 Penerimaan PFK dan Pengeluaran PFK Tahun 2023 218
Tabel 5.5.6 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022 dan 2023 219
Tabel 5.5.7 Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan 2023 219
Tabel 5.6.1 Penambahan dan Pengurangan Koreksi Ekuitas Tahun 2023 dan 2022 221
Tabel 5.6.2 Koreksi Ekuitas – Persediaan Tahun 2023 222
Tabel 5.6.3 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun 2023 222
Tabel 5.6.4 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Karena Kesalahan Pencatatan Nilai Aset Tetap Yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya Tahun 2023 223
Tabel 5.6.5 Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 224

BPK Perwakilan Kalsel

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran

Rincian Belanja Barang (LRA) 1
Rincian Belanja Transfer 2.1
Rincian Belanja Bagi Hasil 2.2
Kas BLUD 3
Kas Dana BOS 4.1
Kas Dana BOP 4.2
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP 5.1
Kas Dana BOK 5.2
Rincian Piutang 6.1
Rincian Penyisihan Piutang 6.2
Persediaan 7
Investasi Jk. Panjang Non Permanen – Dana Bergulir 8
Investasi Jk. Panjang Permanen 9
Mutasi Aset Tetap Tanah 10
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 11
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 12
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 13
Mutasi Aset Tetap Lainnya 14
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 15
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 16
Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan 17.1
Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Rugi 17.2
Mutasi Aset Tidak Berwujud 18
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 19
Mutasi Aset Lain-lain (Rusak Berat) 20
Akumulasi penyusutan Lainnya (Rusak Berat) 21
Pendapatan Diterima Dimuka 22
Utang Belanja 23
Utang BLUD 24

BPK Perwakilan Kalsel

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN DAERAH**	5.1.1	**2.191.378.634.433,00**	**1.568.178.825.031,12**	**71,56**	**1.717.931.600.070,93**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	5.1.1.1	**108.997.935.127,00**	**100.127.498.754,12**	**91,86**	**92.886.377.406,93**
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	23.635.000.000,00	28.394.827.563,25	**120,14**	27.427.262.028,47
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	4.695.700.000,00	4.376.818.354,01	**93,21**	4.003.044.421,23
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	**100,00**	5.179.875.915,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	75.262.443.582,00	61.951.061.291,86	**82,31**	56.276.195.042,23
7	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2	**2.073.172.255.024,00**	**1.459.796.209.532,00**	**70,41**	**1.590.277.432.228,00**
8	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	5.1.1.2.1	**1.872.717.744.502,00**	**1.305.466.218.145,00**	**69,71**	**1.455.670.208.493,00**
9	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.775.514.124.502,00	1.208.315.231.559,00	**68,05**	1.357.000.364.733,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	-	-		5.594.207.000,00
11	Dana Desa	5.1.1.2.1.3	97.203.620.000,00	97.150.986.586,00	**99,95**	93.075.636.760,00
12	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	5.1.1.2.2	**200.454.510.522,00**	**154.329.991.387,00**	**76,99**	**134.607.223.735,00**
13	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2	200.454.510.522,00	154.329.991.387,00	**76,99**	134.607.223.735,00
14	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.3	**9.208.444.282,00**	**8.255.116.745,00**	**89,65**	**34.767.790.436,00**
15	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	38.220.000,00	34.400.000,00	**90,01**	9.882.398.701,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	9.170.224.282,00	8.220.716.745,00	**89,65**	24.885.391.735,00
17	**BELANJA DAERAH**	5.1.2	**2.300.926.495.433,00**	**1.717.847.616.256,45**	**74,66**	**1.645.505.852.093,50**
18	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1	**1.415.914.438.212,00**	**1.177.535.380.629,00**	**83,16**	**983.129.650.879,00**
19	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	492.558.132.557,00	462.501.391.423,00	**93,90**	448.969.728.637,00
20	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	758.642.096.470,00	589.859.979.604,00	**77,75**	460.650.110.998,00
21	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	9.500.000.000,00	7.252.202.772,00	**76,34**	7.578.695.680,00
22	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	133.893.009.185,00	98.754.806.830,00	**73,76**	56.698.494.864,00
23	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	21.321.200.000,00	19.167.000.000,00	**89,90**	9.232.620.700,00
24	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2	**597.569.173.099,00**	**331.009.561.591,45**	**55,39**	**483.199.477.506,00**
25	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	11.539.660.000,00	-	**-**	3.450.800.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	73.636.359.116,00	55.122.728.380,00	**74,86**	70.914.035.623,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	145.401.734.749,00	94.152.883.520,90	**64,75**	154.432.756.722,00
28	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	361.826.440.334,00	179.002.281.236,55	**49,47**	252.793.986.263,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.164.978.900,00	2.731.668.454,00	**52,89**	1.607.898.898,00
31	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.1.2.3	**25.000.000.000,00**	**8.943.655.185,00**	**35,77**	**14.038.372.812,00**
32	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	25.000.000.000,00	8.943.655.185,00	**35,77**	14.038.372.812,00
33	**BELANJA TRANSFER**	5.1.2.4	**262.442.884.122,00**	**200.359.018.851,00**	**76,34**	**165.138.350.896,50**
34	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	2.833.070.000,00	2.830.448.193,00	**99,91**	2.519.839.550,50
35	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	259.609.814.122,00	197.528.570.658,00	**76,09**	162.618.511.346,00
36	**SURPLUS / (DEFISIT)**		**(109.547.861.000,00)**	**(149.668.791.225,33)**	**-**	**72.425.747.977,43**
37	**PEMBIAYAAN DAERAH**	5.1.3				
38	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.1	**209.902.861.000,00**	**227.707.810.529,53**	**108,48**	**168.117.818.946,10**
39	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	208.402.861.000,00	227.687.810.529,53	**109,25**	132.792.517.161,10
40	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	-	-	**-**	35.304.861.744,00
41	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	1.500.000.000,00	20.000.000,00	**1,33**	20.440.041,00
42	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.2	**100.355.000.000,00**	**74.830.382.073,00**	**74,57**	**12.855.756.394,00**
43	Penyertaan Modal		30.000.000.000,00	15.999.219.061,00	**53,33**	-
44	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		68.855.000.000,00	58.831.163.012,00	**85,44**	12.855.756.394,00
45	Pemberian Pinjaman Daerah		1.500.000.000,00	-	**-**	-
46	**PEMBIAYAAN NETTO**		**109.547.861.000,00**	**152.877.428.456,53**	**139,55**	**155.262.062.552,10**
47	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	5.1.4	**-**	**3.208.637.231,20**	**-**	**227.687.810.529,53**

(Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BPK Perwakilan Kalsel

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	**227.687.810.529,53**	**132.792.517.161,10**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	227.687.810.529,53	132.792.517.161,10
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	3.208.637.231,20	227.687.810.529,53
Sub Total		3.208.637.231,20	227.687.810.529,53
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.4	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**

(Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BPK Perwakilan Kalsel

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	31-Des-23	31-Des-22
1	**ASET**			
2	**ASET LANCAR**	5.3.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1	362.218.868,43	208.402.861.001,83
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.4	391.374.384,77	18.779.154.443,70
7	Kas Dana BOS	5.3.1.5	260.205.719,00	185.970.156,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.6	2.194.838.259,00	319.824.928,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.7	0,00	0,00
10	Setara Kas	5.3.1.8	0,00	0,00
11	**Piutang Pajak Daerah**	5.3.1.9	12.767.480.363,00	16.596.951.247,00
12	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.3.1.10	(7.447.126.980,71)	(11.235.523.731,75)
13	*Piutang Pajak Daerah (Netto)*		**5.320.353.382,29**	**5.361.427.515,25**
14	**Piutang Retribusi Daerah**	5.3.1.11	5.513.104.069,00	4.442.091.510,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.12	(4.580.423.064,55)	(3.485.174.264,37)
16	*Piutang Retribusi Daerah (Netto)*		**932.681.004,45**	**956.917.245,63**
17	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	5.3.1.13	3.937.054.496,00	3.124.024.698,00
18	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.14	(28.101.458,86)	(16.581.189,19)
19	*Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Netto)*		**3.908.953.037,14**	**3.107.443.508,81**
20	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	5.3.1.15	4.815,00	37.241.117.750,00
21	**Piutang Transfer Antar Daerah**	5.3.1.16	48.081.304.903,60	46.683.411.735,12
22	**Piutang Lainnya**	5.3.1.17	1.723.485.001,00	571.169.553,00
23	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.18	(460.456.130,00)	(474.594.553,00)
24	*Piutang Lainnya (Netto)*		**1.263.028.871,00**	**96.575.000,00**
25	Persediaan	5.3.1.19	34.694.590.995,62	16.158.627.928,52
26	**JUMLAH ASET LANCAR**		**97.409.554.240,30**	**337.293.331.212,86**
27	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.2		
28	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.2.1		
29	Investasi Non Permanen Lainnya		44.850.000,00	44.850.000,00
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		44.850.000,00	44.850.000,00
31	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.2.2		
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		164.216.108.162,22	146.994.566.139,45
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		164.216.108.162,22	146.994.566.139,45
34	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**164.260.958.162,22**	**147.039.416.139,45**
35	**ASET TETAP**	5.3.3		
36	Tanah	5.3.3.1	474.133.911.282,68	468.912.824.582,68
37	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	496.416.977.597,98	444.426.507.203,69
38	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	1.642.429.415.248,50	1.238.106.251.300,05
39	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.3.4	2.444.122.117.136,66	2.093.793.901.246,51
40	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	25.856.194.942,00	23.910.976.872,00
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	62.245.190.027,00	298.905.404.112,00
42	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(2.455.303.117.223,62)	(2.195.173.688.694,22)
43	**JUMLAH ASET TETAP**		**2.689.900.689.011,20**	**2.372.882.176.622,71**
44	**ASET LAINNYA**	5.3.4		
45	Tagihan Jangka Panjang	5.3.4.1	2.225.392.206,00	2.225.392.206,00
46	Aset Tidak Berwujud	5.3.4.2	7.916.427.932,40	7.222.332.973,40
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.4.3	(5.661.365.660,00)	(5.617.094.280,00)
48	*Aset Tidak Berwujud Netto)*		**2.255.062.272,40**	**1.605.238.693,40**
49	Aset Lain-lain	5.3.4.4	42.203.432.624,92	30.291.601.844,27
50	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.4.5	(32.294.194.201,80)	(23.433.501.435,60)
51	*Aset Lain-lain (Netto)*		**9.909.238.423,12**	**6.858.100.408,67**
52	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.4.6	287.681.239.000,00	54.375.846.439,72
53	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**302.070.931.901,52**	**65.064.577.747,79**
54	**JUMLAH ASET**		**3.253.642.133.315,24**	**2.922.279.501.722,81**

BPK Perwakilan Kalsel

NO	URAIAN	Ref	31-Des-23	31-Des-22
55	**KEWAJIBAN**	5.3.5		
56	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	5.3.5.1		
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.5.1.1	58.831.163.012,00	58.831.163.012,00
58	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.5.1.2	192.471.427,52	176.151.232,06
59	Utang Belanja	5.3.5.1.3	142.799.739.231,00	663.627.766,00
60	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.5.1.4	193.868.970.715,76	53.090.534.478,00
61	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**395.692.344.386,28**	**112.761.476.488,06**
62	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	5.3.5.2		
63	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.5.2.1	14.707.792.076,00	73.538.955.088,00
64	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		**14.707.792.076,00**	**73.538.955.088,00**
65	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**410.400.136.462,28**	**186.300.431.576,06**
66	**EKUITAS**	5.3.6		
67	**EKUITAS**		**2.843.241.996.852,96**	**2.735.979.070.146,75**
68	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**		**3.253.642.133.315,24**	**2.922.279.501.722,81**

BPK Perwakilan Kalsel

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
1	**PENDAPATAN - LO**	5.4.1	**1.727.964.769.591,45**	**1.538.954.366.012,28**	**189.010.403.579,17**	**12,28**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	5.4.1.1	**119.545.899.852,97**	**96.549.367.104,06**	**22.996.532.748,91**	**23,82**
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	29.139.484.109,07	27.809.858.714,64	1.329.625.394,43	4,78
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	5.450.736.789,73	4.940.653.674,53	510.083.115,20	10,32
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	6.662.072.038,03	6.299.846.918,94	362.225.119,09	5,75
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	78.293.606.916,14	57.499.007.795,95	20.794.599.120,19	36,17
7	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	5.4.1.2	**1.595.492.998.798,48**	**1.399.133.796.089,02**	**196.359.202.709,46**	**14,03**
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	1.441.633.808.718,00	1.257.160.455.312,00	184.473.353.406,00	14,67
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	153.859.190.080,48	141.973.340.777,02	11.885.849.303,46	8,37
10	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO**	5.4.1.3	**12.925.870.940,00**	**43.271.202.819,20**	**(30.345.331.879,20)**	**(70,13)**
11	Pendapatan Hibah-LO		4.705.154.195,00	18.385.811.084,20	(13.680.656.889,20)	(74,41)
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		8.220.716.745,00	24.885.391.735,00	(16.664.674.990,00)	(66,97)
13	**BEBAN**	5.4.2	**1.627.105.043.306,79**	**1.266.582.617.354,93**	**360.522.425.951,86**	**28,46**
14	Beban Pegawai	5.4.2.1	462.485.466.423,00	448.903.233.637,00	13.582.232.786,00	3,03
15	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	628.826.166.269,58	423.503.613.083,17	205.322.553.186,41	48,48
16	Beban Bunga	5.4.2.3	7.252.202.772,00	7.578.695.680,00	(326.492.908,00)	(4,31)
17	Beban Hibah	5.4.2.4	127.156.889.624,00	56.698.494.864,00	70.458.394.760,00	124,27
18	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	19.167.000.000,00	9.232.620.700,00	9.934.379.300,00	107,60
19	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	1.917.587.397,81	1.205.276.346,31	712.311.051,50	59,10
20	Beban Lain-lain	5.4.2.7	-	-	-	-
21	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.8.1	44.424.547.003,95	37.766.960.994,87	6.657.586.009,08	17,63
22	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.8.2	73.525.787.894,00	63.583.710.321,08	9.942.077.572,92	15,64
23	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.8.3	158.628.967.277,45	145.386.993.199,00	13.241.974.078,45	9,11
24	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.8.4	-	-	-	-
25	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.8.5	-	-	-	-
26	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.8.6	512.396.380,00	660.304.393,00	(147.908.013,00)	(22,40)
27	Beban Bagi Hasil	5.4.2.9.1	2.830.448.193,00	2.519.839.550,50	310.608.642,50	12,33
28	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.9.2	100.377.584.072,00	69.542.874.586,00	30.834.709.486,00	44,34
29	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	5.4.3	**100.859.726.284,66**	**272.371.748.657,35**	**(171.512.022.372,69)**	**(62,97)**
30	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
31	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		3.132.380.988,71	3.119.054.099,00	13.326.889,71	0,43
32	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	-
33	Defisit atas Ekstrakomptabel-LO		-	-	-	-
34	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	5.4.4	**(3.132.380.988,71)**	**(3.119.054.099,00)**	**(13.326.889,71)**	**0,43**
35	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**		**97.727.345.295,95**	**269.252.694.558,35**	**(171.525.349.262,40)**	**(63,70)**
36	**POS LUAR BIASA**	5.4.5				
37	Beban Tak Terduga		3.465.567.862,00	2.159.404.542,00	1.306.163.320,00	60,49
38	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**	5.4.6	**(3.465.567.862,00)**	**(2.159.404.542,00)**	**1.306.163.320,00**	**(60,49)**
39	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.4.7	**94.261.777.433,95**	**267.093.290.016,35**	**(172.831.512.582,40)**	**(64,71)**

(Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

BPK Perwakilan Provinsi Kalsel

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Kas Masuk**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	28.394.827.563,25	27.427.262.028,47
4	Penerimaan Retribusi Daerah	4.376.818.354,01	4.003.044.421,23
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.404.791.545,00	5.179.875.915,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	61.751.692.739,86	55.738.374.042,23
7	Penerimaan Dana Perimbangan	1.208.315.231.559,00	1.357.000.364.733,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	5.594.207.000,00
9	Penerimaan Dana Desa	97.150.986.586,00	93.075.636.760,00
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil	154.329.991.387,00	134.607.223.735,00
11	Penerimaan Hibah	34.400.000,00	9.882.398.701,00
12	Penerimaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.220.716.745,00	24.885.391.735,00
13	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**1.567.979.456.479,12**	**1.717.393.779.070,93**
14	**Arus Kas Keluar**		
15	Pembayaran Pegawai	462.501.391.423,00	448.969.728.637,00
16	Pembayaran Barang dan Jasa	589.859.979.604,00	460.650.110.998,00
17	Pembayaran Bunga	7.252.202.772,00	7.578.695.680,00
18	Pembayaran Hibah	98.754.806.830,00	56.698.494.864,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial	19.167.000.000,00	9.232.620.700,00
20	Pembayaran Tak Terduga	8.943.655.185,00	14.038.372.812,00
21	Pembayaran Bagi Hasil	2.830.448.193,00	2.519.839.550,50
22	Pembayaran Bantuan Keuangan	197.528.570.658,00	162.618.511.346,00
23	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**1.386.838.054.665,00**	**1.162.306.374.587,50**
24	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	**181.141.401.814,12**	**555.087.404.483,43**
25	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
26	**Arus Masuk Kas**		
27	Hasil Penjualan Peralatan Mesin	165.537.352,00	534.498.000,00
28	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	33.831.200,00	3.323.000,00
29	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-
30	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**199.368.552,00**	**537.821.000,00**
31	**Arus Keluar Kas**		
32	Perolehan Tanah		3.450.800.000,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin	55.122.728.380,00	70.914.035.623,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan	94.152.883.520,90	154.432.756.722,00
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.002.281.236,55	252.793.986.263,00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.731.668.454,00	1.607.898.898,00
37	Penyertaan Modal Daerah	15.999.219.061,00	-
38	Perolehan Aset Lainnya	-	-
39	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**347.008.780.652,45**	**483.199.477.506,00**
40	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	**(346.809.412.100,45)**	**(482.661.656.506,00)**
41	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
42	**ARUS KAS MASUK**		
43	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi / Penyertaan Modal	-	-
44	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	35.304.861.744,00
45	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	20.000.000,00	20.440.041,00
46	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**20.000.000,00**	**35.325.301.785,00**
47	**Arus Keluar Kas**		
48	Pembayaran Pokok Utang	58.831.163.012,00	12.855.756.394,00
49	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
50	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**58.831.163.012,00**	**12.855.756.394,00**
51	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	**(58.811.163.012,00)**	**22.469.545.391,00**

Bpk Perwakilan Tapsel

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
52	**Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran**		
53	**Arus Masuk Kas**		
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.481.690.568,00	89.625.108.207,00
55	Penerimaan transfer	-	-
56	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**83.481.690.568,00**	**89.625.108.207,00**
57	**Arus Keluar Kas**		
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.481.690.568,00	89.625.108.207,00
59	Pengeluaran transfer	-	0,00
60	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**83.481.690.568,00**	**89.625.108.207,00**
61	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran**	**-**	**-**
62	**Kenaikan/(Penurunan Kas)**	**(224.479.173.298,33)**	**94.895.293.368,43**
63	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP dan	227.687.810.529,53	132.792.517.161,10
64	Bendahara BOS		
65	**Saldo Akhir Kas**	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**
66	**Terdiri dari :**		
67	**Kas di BUD (Kas Daerah)**	**362.218.868,43**	**208.402.861.001,83**
68	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**-**	**-**
69	**Kas di BLUD**	**391.374.384,77**	**18.779.154.443,70**
70	**Kas di Bendahara FKTP**	**2.194.838.259,00**	**319.824.928,00**
71	**Kas di Bendahara BOS**	**260.205.719,00**	**185.970.156,00**
72	**Kas Lainnya**	**-**	**-**
73	**Setara Kas**	**-**	**-**

(Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

BPK Perwakilan Kalsel

Plt. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	**EKUITAS AWAL**	5.6.1	**2.735.979.070.146,75**	**2.249.460.756.434,27**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.6.2	**94.261.777.433,95**	**267.093.290.016,35**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	5.6.3	**13.001.149.272,26**	**219.425.023.696,13**
4	Koreksi Ekuitas - Piutang	5.6.3.1	(35.372.418.460,00)	197.058.336.053,00
5	Koreksi Ekuitas - Persediaan	5.6.3.2	4.211.740,00	(250.504.620,00)
6	Koreksi Ekuitas - Investasi Non Permanen		-	-
7	Koreksi Ekuitas - Investasi Permanen	5.6.3.3	(34.957.531,26)	21.552.089.250,73
8	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.4	865.451.192,52	(5.515.722.892,00)
9	Koreksi Ekuitas - Penyusutan dan Amortisasi	5.6.3.5	21.528.103,00	(15.889.000,00)
10	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.6	47.517.334.228,00	10.122.776.678,00
11	Koreksi Ekuitas - Lainnya		-	-
12	Koreksi Ekuitas - Atas Saldo Awal	5.6.3.7	-	(3.526.061.773,60)
13	**EKUITAS AKHIR**	5.6.4	**2.843.241.996.852,96**	**2.735.979.070.146,75**

(Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

BPK Perwakilan Kalsel

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dan seluruh sumber daya yang dikuasainya. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi yang berlaku.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk

a. Transparansi dan akuntabilitas:

   Laporan keuangan pemerintah kabupaten bertujuan untuk memberikan transparansi atas penggunaan dana publik serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menciptakan rasa percaya dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif.

b. Penilaian kinerja keuangan:

   Laporan keuangan pemerintah kabupaten memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, legislatif, dan pemangku

BPK Perwakilan Kalsel

kepentingan eksternal lainnya, untuk mengukur sejauh mana tujuan keuangan pemerintah daerah telah tercapai

c. Membantu pengambilan keputusan:

Laporan keuangan pemerintah kabupaten dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi pengambilan keputusan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan keuangan yang lebih baik, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau realokasi anggaran.

d. Memenuhi persyaratan hukum dan peraturan:

Penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten harus mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKPD). Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi, keandalan, dan komparabilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

e. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan:

Laporan keuangan pemerintah kabupaten menjadi dasar untuk pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana publik. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dapat memudahkan proses pengawasan dan audit terhadap kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten yang baik, diharapkan dapat tercapai transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

BPK Perwakilan Kalsel

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 5);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023;

r. Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrual;

s. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

t. Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 171 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

BPK Perwakilan Kalsel

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam enam bab yaitu:

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1 Pendapatan-LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Transfer
  - 5.1.4 Pembiayaan
  - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
  - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
  - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA/SiKPA)
  - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Neraca
  - 5.3.1 Aset Lancar
  - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
  - 5.3.3 Aset Tetap
  - 5.3.4 Dana Cadangan
  - 5.3.5 Aset Lainnya
  - 5.3.6 Kewajiban
  - 5.3.7 Ekuitas
- 5.4 Laporan Operasional
  - 5.4.1 Pendapatan-LO
  - 5.4.2 Beban

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
5.4.5 Pos Luar Biasa
5.4.6 Surplus/Defisit
5.5 Laporan Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas
5.5.6 Saldo Awal Kas
5.5.7 Saldo Akhir Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Ekuitas Awal
5.6.2 Surplus/Defisit-LO
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
5.6.4 Ekuitas Akhir
BAB VI Penutup

BPK Perwakilan Kalsel

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BPK Perwakilan Kalsel

2.1. Ekonomi Makro

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi regional merupakan serangkaian aktivitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan distribusi pendapatan, serta meningkatkan hubungan ekonomi regional antar daerah.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota pada periode tertentu.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Berikut perkembangan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Tapin dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 :

Tabel 2.1.1
Perkembangan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin 2021-2023

Variabel kemiskinan	Nilai Variabel		
	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan	459.160	484.113	516.532
Jumlah Penduduk Miskin	6.925	6.982	6.224

Variabel kemiskinan	Nilai Variabel		
	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin (P0)	3.60	3.60	3.19
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.28	0.33	0.31
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0.04	0.07	0.08

Sumber : BPS Kabupaten Tapin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapin pada Tahun 2022 sebesar 3,60 % dan pada Tahun 2023 turun menjadi sebesar 3,19 % atau mengalami penurunan secara persentase sebesar 0,41 %.

Sedangkan Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 0,33 % ke Tahun 2023 menjadi sebesar 0,31 % atau mengalami penurunan sebesar 0,02 %.. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan.

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 sebesar 0,01 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin meningkat.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari:

(a) mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan;

(b) mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha; dan

(c) mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebesar 3,93%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,15%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,93% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022.

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

BPK Perwakilan Kalsel

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin untuk Tahun 2023 belum ada data. Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tapin yang diukur oleh Gini Ratio di tahun 2022 adalah di angka 0,29.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60 ≤ IPM <70)
c. Tinggi (70 ≤ IPM < 80)
d. Sangat Tinggi (> 80)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebesar 71,02 dengan kategori tinggi, dan Tahun 2023 adalah sebesar 72,00 dengan kategori yang masih tinggi.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebesar 72,00, yang jika dibandingkan dengan pencapaian IPM Tahun 2022 adalah sebesar 71,02 mengalami kenaikan sebesar 0,98. Berikut realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tapin Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 :

Tabel 2.1.2
Realisasi Pencapaian IKM Tapin 2018-2023

Tahun	IPM
2018	69,53
2019	70,13
2020	70,11
2021	70,31
2022	71,02
2023	72,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapin

BPK Perwakilan Kalsel

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi batubara yang diprakirakan lebih rendah seiring dengan perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja net ekspor yang lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan harga komoditas global yang terus menurun. Selain itu, impor juga diprakirakan melambat seiring dengan penurunan impor barang modal seperti alat berat dan kapal.

Pada triwulan IV 2023, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 4,69 % (y-o-y), meski lebih rendah atau melambat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,12% (y-o-y). tumbuh -0,18 persen (q-to-q), dan tumbuh 4,84 persen (c-to-c).

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 11/02/63/Th.XXVIII, 5 Februari 2024

Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertambangan sejalan dengan termoderasinya permintaan negara mitra dagang Kalimantan Selatan di tengah harga batu bara yang terus menunjukkan tren penurunan. Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari net ekspor yang melambat seiring dengan melandainya harga komoditas dan permintaan negara mitra dagang utama.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, diperlukan beberapa tahapan mulai dari kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat. Dalam tahapan perencanaan pembangunan ekonomi, diperlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi kebijakan. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif berguna untuk memberikan gambaran keadaan masa lalu dan masa sekarang, serta sasaran yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Salah satu indikator statistik yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

BPK Perwakilan Kalsel

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Nilai PDRB Kabupaten Tapin atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 12,77 triliun rupiah (Rp 12.770.255,04). Nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,38 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021.

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB Kabupaten Tapin juga meningkat dari 6,58 triliun di tahun 2021 menjadi hampir 6,90 triliun (Rp 6.898.883,24) pada tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi barang dan jasa yang terjadi hampir di seluruh lapangan usaha dengan mengabaikan terjadinya faktor kenaikan harga.

Angka PDRB Per Kapita tahun 2022 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp65,61 juta rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 35,45 juta rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2022 sebagaimana data dari BPS Kabupaten Tapin adalah sebesar 4,91 persen, meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang cuma sebesar 3,43 persen.

BPK Perwakilan Kalsel

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

a. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;

b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;

c. Inflasi Berat (*High Inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Secara tahunan, inflasi gabungan tiga kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2023 tercatat sebesar 4,30% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan I 2022 sebesar 6,56% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,52% (yoy) maupun rata-rata inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,88% (yoy). Adapun inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan.

Prospek inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran 3%±1% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang terkendali, penurunan tekanan harga migas dunia, tekanan imported inflation yang menurun, terjaganya ketersediaan pasokan yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan barang dan jasa, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung ketersediaan pasokan, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPID terutama dalam mengantisipasi risiko El-Nino, dan semakin masifnya implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada tahun 2023.

(*Sumber :www.bi.go.id*)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik (Nasional), tingkat inflasi Kabupaten Tapin Tahun 2023 tidak tersedia (*not available).*

Pada bulan September 2023 terjadi inflasi Year on Year (YoY) di Kota Banjarmasin sebesar 2,68 persen, Kota Tanjung sebesar 2,12 persen, dan Kotabaru sebesar 3,66 persen.

Kabupaten Tapin memakai data inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi Kota Rantau memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama dengan Kota Banjarmasin. Tingkat inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif berada pada tahun 2017 sebesar 3,82%, tahun 2018 sebesar 2,63%, tahun 2019 sebesar 4,15%, tahun 2020 sebesar 1,67% dan tahun 2021 sebesar 2,52%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, rata-rata pertumbuhan inflasi kota Banjarmasin sebesar 2,96%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Tapin

Struktur perekonomian di Tapin Tahun 2023 sebagaimana tahun 2022 masih didominasi oleh beberapa sektor besar yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Reparasi, dan Transportasi. Hal ini tercermin dari sumbangan sektor-sektor ini terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku yang cukup besar.

Kontributor terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Tapin tahun 2022 adalah kategori lapangan usaha pertambangan batubara, yakni menyumbang peningkatan sebesar 45,41 persen di tahun 2022 dari yang awalnya 31,03 persen di tahun 2021.

BPK Perwakilan Kalsel

Selanjutnya diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar kedua walaupun kontribusinya menurun menjadi 13,89 persen.

Komposisi perekonomian Kabupaten Tapin masih tetap, yaitu agraris (primer) dimana kategori yang berperan besar adalah usaha yang bercirikan banyak memanfaatkan sumber daya alam.

2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapin diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tapin dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan

BPK Perwakilan Kalsel

anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Sedangkan pembiayaan daerah diarahkan ke pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA dan penarikan pinjaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.2.1
Proyeksi Anggaran 2021-2023

URAIAN	ANGGARAN		
	2021	2022	2023
PENDAPATAN	**982.674.369.778,00**	**1.101.005.112.260,00**	**857.858.945.526,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.897.510.578,00	76.958.155.200,00	95.982.220.526,00
PENDAPATAN TRANSFER	871.916.790.000,00	988.012.669.000,00	761.876.725.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.860.069.200,00	36.034.288.060,00	0,00

Sumber : KUA dan PPAS series 2021-2023

Berdasarkan tabel diatas Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.243.146.166.734,00 dibanding tahun 2022. Pendapatan Daerah tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf C poin 1 bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, pendapatan daerah terdiri atas:

BPK Perwakilan Kalsel

a. Pendapatan Asli Daerah;
Target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai akhir tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp108.997.935.127,00 tidak ada perubahan apabila dibandingkan dengan target awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Tahun 2023.

b. Pendapatan Transfer;
Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Jumlah pendapatan transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.630.692.000,00 yang semula sebesar Rp2.069.541.563.024,00 menjadi Rp2.073.172.255.024,00 atau naik sebesar 0,18 %.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp9.208.444.282,00.

Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2
Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
4	PENDAPATAN	2.187.747.942.433,00	2.191.378.634.433,00	3.630.692.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	108.997.935.127,00	108.997.935.127,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	2.069.541.563.024,00	2.073.172.255.024,00	3.630.692.000,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.208.444.282,00	9.208.444.282,00	0,00

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mencukupi rencana belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023. Penerimaan dalam rencana pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan terhadap obyek-obyek PAD yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek PAD yang bersangkutan dan diupayakan untuk tidak menjadikan beban bagi masyarakat, serta penerimaan pendapatan daerah tersebut didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

BPK Perwakilan Kalsel

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah Kabupaten Tapin mengalami kenaikan sebesar Rp 3.630.692.000,00 yang semula sebesar Rp2.297.295.803.433,00 menjadi sebesar Rp2.300.926.495.433,00 atau naik sebesar 0,16 %.

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terjadi pada Belanja Operasi. Dimana Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp1.643.270.618,00 yang semula Rp1.417.557.708.830,00 menjadi Rp1.415.914.438.212,00 atau turun sebesar 0,12 %.

Belanja Modal dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.643.270.618,00 dari semula Rp595.925.902.481,00 menjadi Rp597.569.173.099,00 atau naik sebesar 0,28 %.

Belanja Tidak Terduga dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp25.000.000.000,00.

Belanja Transfer dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.630.692.000,00 dari semula Rp258.812.192.122,00 menjadi sebesar Rp262.442.884.122,00 atau bertambah 1,40 %.

Perubahan Prioritas Belanja Daerah dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3
Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
5	**BELANJA**	**2.297.295.803.433,00**	**2.300.926.495.433,00**	**3.630.692.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.417.557.708.830,00**	**1.415.914.438.212,00**	**(1.643.270.618,00)**
5.1.01	Belanja Pegawai	493.557.966.442,00	492.558.132.557,00	(999.833.885,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.250.533.203,00	758.642.096.470,00	(608.436.733,00)
5.1.03	Belanja Bunga	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	133.928.009.185,00	133.893.009.185,00	(35.000.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.321.200.000,00	21.321.200.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**595.925.902.481,00**	**597.569.173.099,00**	**1.643.270.618,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.539.660.000,00	11.539.660.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.607.321.274,00	73.636.359.116,00	29.037.842,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.794.501.973,00	145.401.734.749,00	1.607.232.776,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	361.826.440.334,00	361.826.440.334,00	0,00

BPK Perwakilan Kalsel

NO.	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.123.013.900,00	5.164.978.900,00	41.965.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	34.965.000,00	0.00	(34.965.000,00)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**258.812.192.122,00**	**262.442.884.122,00**	**3.630.692.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.833.070.000,00	2.833.070.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.979.122.122,00	**259.609.814.122,00**	**3.630.692.000,00**

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

   Ketentuan 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

   1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
   2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
   3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

   Proporsi Penerimaan Pembiayaan di tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

   Penerimaan Pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebesar Rp208.402.861.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
   Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2023 juga tidak mengalami perubahan, yang terdiri Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp30.000.000.000,00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp68.855.000.000,00, sedangkan untuk Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00.

   Perbandingan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 2.2.4
Anggaran Pembiayaan Penerimaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
Tahun 2023

NO.	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
6	**Pembiayaan Netto**	**109.547.861.000,00**	**109.547.861.000,00**	**-**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**209.902.861.000,00**	**209.902.861.000,00**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	208.402.861.000,00	208.402.861.000,00	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**100.355.000.000,00**	**100.355.000.000,00**	**-**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	68.855.000.000,00	68.855.000.000,00	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-

(Sumber : Lampiran I Perda Kabupaten Tapin No. 04 Tahun 2023)

BPK Perwakilan Kalsel

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yaitu, “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”.

Prioritas pembangunan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing . Kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan indeks pembangunan pemuda, penurunan penyakit melalui GERMAS, pengendalian pravelensi stunting, penurunan angka pernikahan anak, peningkatan indeks pembangunan kebudayaan dan peningkatan prestasi olah raga.
2. Optimalisasi sektor indsutri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan nilai tambah, daya saing hasil indsutri, UMKM dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis geopark, peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital dan peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah.
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan yang dilakukan yaitu pemenuhan pencapaian infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, serta pengembangan kawasan prioritas dan pedesaan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada palayanan publik dengan kebijakan yaitu penguatan reformasi birokrasi, perencanaan penganggaran yang responsif *gender* dan inklusif.

5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana. Adapun kebijakanya adalah pengelolaandan perlindungan lingkungan hidup
6. Mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan sebagai Pendukung *Food Estate*. Kebijakanya yaitu peningkatan peran Kalsel sebagai lumbung pangan Ibu Kota Negara (IKN) dan peningkatan konektivitas menuju *Food Estate* dan IKN.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapin tahun 2023 mengacu ke prioritas pembangunan Provinsi, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Sesuai dengan RKP Tahun 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan" maka arah kebijakan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Untuk Perekonomian Berkelanjutan". Tema tersebut dijabarkan pada empat prioritas daerah yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mendukung Pelayanan Publik
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar dan perekonomian berkelanjutan
4. Pengembangan kawasan strategis potensial.

Prioritas Daerah Kabupaten Tapin dirumuskan dengan berpedoman terhadap prioritas nasional, prioritas provinsi Kalimantan selatan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sinkronisasi prioritas Kabupaten Tapin dengan prioritas nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Tapin maka disusun program pembangunan berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah dan SKPD pelaksana pada Tahun 2023.

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

BPK Perwakilan Kalsel

Kabupaten Tapin dalam Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

Penjabaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tapin di atas dituangkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 171 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, serta pada tiap-tiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BPK Perwakilan Kalsel

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2023.

Secara ringkas capaian kinerja keuangan pada masing-masing urusan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Keuangan 2023

No.	JENIS URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	**1.298.032.597.752,00**	**922.876.739.550,55**	**71,10**
1	Pendidikan	282.306.370.948,00	254.583.728.055,00	90,18
2	Kesehatan	252.928.797.426,00	242.181.414.327,00	95,75
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	655.007.325.256,00	334.668.567.845,55	51,09
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	67.842.227.287,00	56.646.387.714,00	83,50
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19.578.464.037,00	18.351.771.400,00	93,73
6	Sosial	20.369.412.798,00	16.444.870.209,00	80,73
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	**251.168.087.014,00**	**219.921.458.661,00**	**87,56**
1	Tenaga Kerja	15.840.429.862,00	13.289.199.642,00	83,89
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.813.787.120,00	7.058.554.643,00	90,33
3	Pangan	6.542.364.866,00	6.080.112.118,00	92,93
4	Lingkungan Hidup	29.290.647.602,00	22.399.693.907,00	76,47
5	Administrasi Kependudukan dan Capil	8.751.521.659,00	8.534.210.258,00	97,52
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	65.773.761.790,00	65.240.621.963,00	99,19
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.632.439.527,00	14.309.227.441,00	91,54
8	Perhubungan	18.303.405.804,00	13.247.333.196,00	72,38
9	Komunikasi dan Informatika	12.792.805.746,00	10.780.061.376,00	84,27
10	Penanaman Modal	10.747.366.105,00	9.855.326.682,00	91,70
11	Kepemudaan dan Olah Raga	43.419.975.359,00	35.197.174.747,00	81,06
12	Kebudayaan	10.329.113.219,00	8.568.952.683,00	82,96
13	Perpustakaan	5.930.468.355,00	5.360.990.005,00	90,40
	URUSAN PILIHAN	**118.701.248.108,00**	**76.196.262.732,90**	**64,19**
1	Kelautan dan Perikanan	10.510.279.075,00	9.030.882.705,00	85,92
2	Pertanian	90.330.090.444,00	52.354.239.094,00	57,96
3	Perdagangan	10.891.441.047,00	9.293.312.708,90	85,33
4	Perindustrian	6.969.437.542,00	5.517.828.225,00	79,17

BPK Perwakilan Kalsel

No.	JENIS URUSAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**1.103.192.097.419,00**	**864.920.543.331,00**	**78,40**
1	Sekretariat Daerah	110.960.390.676,00	92.607.618.076,00	83,46
2	Sekretariat DPRD	51.896.637.023,00	40.178.253.443,00	77,42
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**356.674.126.793,00**	**265.014.383.095,00**	**74,30**
1	Perencanaan	15.692.805.823,00	13.154.194.467,00	83,82
2	Keuangan	327.814.520.852,00	242.465.296.861,00	73,96
3	Kepegawaian	13.166.800.118,00	9.394.891.767,00	71,35
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**17.845.840.426,00**	**14.852.907.888,00**	**83,23**
1	Inspektorat	17.845.840.426,00	14.852.907.888,00	83,23
	UNSUR KEWILAYAHAN	**60.825.538.063,00**	**53.774.994.488,00**	**88,41**
1	Kecamatan	60.825.538.063,00	53.774.994.488,00	88,41
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**34.822.029.578,00**	**32.425.050.435,00**	**93,12**
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	34.822.029.578,00	32.425.050.435,00	93,12
	PEMBIAYAAN DAERAH	**109.547.861.000,00**	**152.877.428.456,53**	**139,55**
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**109.547.861.000,00**	**152.877.428.456,53**	**139,55**
1	Keuangan	109.547.861.000,00	152.877.428.456,53	139,55

BPK Perwakilan Kalsel

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

BPK Perwakilan Kalsel

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pengukuran aset lancar sebagai berikut:

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya;
2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
4) Persediaan disajikan sebesar:
   a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

   Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable*

BPK Perwakilan Kalsel

value), yaitu dengan cara mengurangi nilai nominal (bruto) piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih. Karena Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih, oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai piutang dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material yang mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

a) Penilaian Kualitas Piutang; dan
b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan kualitas piutang dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar;
b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c) Kualitas Piutang Diragukan;
d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

a) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
b) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
    4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

BPK Perwakilan Kalsel

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   1) Umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
   1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
   4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
   3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   1) Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
   1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
   2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan

BPK Perwakilan Kalsel

d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Untuk taksiran piutang tak tertagih Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 4.3.1
Taksiran Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

BPK Perwakilan Kalsel

d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c) 50% (limapuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

BPK Perwakilan Kalsel

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan lebih sampai dengan 12 bulan;
2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu diatas tiga bulan sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu tiga bulan atau kurang dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1) Deposito berjangka waktu diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan non permanen.

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

   Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

   Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

   Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

   Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

   a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;

BPK Perwakilan Kalsel

b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengukuran investasi jangka pendek

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga

(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;

b) Investasi jangka panjang non permanen

(1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

(2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

(3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga;

c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga

BPK Perwakilan Kalsel

perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;

d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi;

e) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;

f) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 4.3.2
Persentase Penyisihan atas Investasi yang Tidak Dapat Diterima Kembali

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	25%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

BPK Perwakilan Kalsel

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum**.**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya;
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan/tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
6) Tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat/pihak lain; dan
7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) biaya perencanaan;
2) biaya lelang;
3) biaya pengawasan;
4) biaya persiapan tempat;

BPK Perwakilan Kalsel

5) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
6) biaya pemasangan (*instalation cost*);
7) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
8) biaya konstruksi.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah sama dengan atau lebih dari Rp1,00;
2) Peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
3) Bangunan sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00;
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan sama dengan atau lebih dari Rp1,00;
5) Aset tetap lainnya:
   a) Barang bercorak budaya/kesenian dan aset tetap lainnya sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00;
   b) Hewan/ternak dan tanaman dikapitalisasi tanpa melihat nilai satuan minimum atas perolehan aset tetap tersebut;
      (1) Untuk hewan/ternak yang digolongkan dalam aset tetap lainnya adalah jenis ternak besar dan ternak kecil;
      (2) Tanaman pertanian yang digolongkan dalam aset tetap lainnya yaitu jenis tanaman hortikultura;
      (3) Sedangkan untuk tanaman perkebunan yaitu jenis tanaman keras (tahunan).
   c) Buku perpustakaan sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset

BPK Perwakilan Kalsel

tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan aset tetap dihitung secara bulanan sejak tanggal pembukuan dari aset tetap dimaksud. Oleh karena aset milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.3
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	8
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	7
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	5
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	6
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	4
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	7
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	30
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	6
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	4
1	3	2	11	Alat Ukur	4
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	7
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	5
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	4
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	8
1	3	2	21	Alat Kedokteran	7
1	3	2	22	Alat Kesehatan	7
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	4
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	8
1	3	2	28	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	5
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5
1	3	2	31	Senjata Api	8
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3

BPK Perwakilan Prov. Kalsel

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10
1	3	3	03	Bangunan Menara	20
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	20
1	3	3	05	Tugu Peringatan	25
1	3	3	06	Candi	25
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	25
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	25
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10
1	3	3	10	Rambu-Rambu	10
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	15
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	10
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	10
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	10
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	10
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	10

BPK Pemakluan Kalsel

Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman tidak disusutkan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan agar ditinjau secara periodik, dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang agar dilakukan penyesuaian.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas, dan manfaat, tetapi hanya memperbaiki kondisi dan menjadi normal kembali, maka tidak dikapitalisasi.

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus, jika setelah Perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

Renovasi Aset Tetap

Suatu satuan kerja (pada K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Namun demikian pada prakteknya banyak satuan kerja yang melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang bukan miliknya, jika hal ini terjadi renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya (Aset Tetap Renovasi).

Renovasi aset tetap berdasarkan obyeknya dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi seperti ini akan dicatat sebagai penambah nilai

BPK Perwakilan Kalsel

perolehan aset tetap. Namun jika renovasi tersebut belum selesai pengerjaannya sampai dengan tanggal pelaporan maka akan dicatat sebagai KDP.

2) Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkungan entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir tahun anggaran aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.

   Renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. (Misalnya SKPD meminjam/ menyewa gedung milik K/L). Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir masa perjanjian pinjam/sewa, aset renovasi seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.

3) Renovasi aset tetap bukan milik di luar entitas pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. (Misalnya SKPD meminjam/ menyewa gedung milik K/L) Renovasi seperti ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap tetapi dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi. Pada akhir masa perjanjian pinjam/sewa, aset renovasi seyogyanya diserahkan kepada pemilik mengikuti peraturan yang berlaku.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4) Aset Tidak Berwujud;
5) Aset Lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaan-nya berpindah.

BPK Perwakilan Kalsel

Pengukuran Aset Lainnya

1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
3) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
4) Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
5) Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
6) Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
    a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
    b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Penyajian Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 tahun untuk Lisensi, Hak Cipta dan Hak Paten sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud seperti *software*, *website*, *database*, hasil kajian/penelitian dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

BPK Perwakilan Kalsel

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

a. barang yang dibeli sudah diterima, atau

b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau

BPK Perwakilan Kalsel

c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

DPRD Perwakilan Kalsel

f. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), kecuali pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah daerah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah;
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LRA dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan-LRA juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan-LRA.

Pengungkapan Pendapatan-LRA

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan – LRA adalah:

1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten, dinas pemerintah tingkat kabupaten, dan lembaga teknis daerah kabupaten.

BPK Perwakilan Kalsel

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) atau SP2D Nihil.
3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Belanja

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1) Belanja Operasi;
2) Belanja Modal;
3) Belanja Tak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran

Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1) rincian belanja per SKPD;
2) penjelasan atas unsur–unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
3) penjelasan sebab–sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

BPK Perwakilan Kalsel

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

h. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

BPK Perwakilan Kalsel

Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Penyajian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Pembiayan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
2) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda; dan

BPK Perwakilan Kalsel

3) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

i. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO;
2) Pendapatan Transfer-LO;
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
4) Pendapatan Non Operasional-LO; dan
5) Pos Luar Biasa-LO.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak pemerintah daerah atas suatu pendapatan (*earned*); atau
2) Telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan; dan
2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

BPK Perwakilan Kalsel

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

1) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak–LO. PPK-SKPD mencatat "Piutang Pajak Daerah" di debit dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit;
2) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap "Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)"; dan
3) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

1) Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek

   Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

   Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara

BPK Perwakilan Kalsel

pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/ pengakuan pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.

Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak

BPK Perwakilan Kalsel

Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

2) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

3) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

BPK Perwakilan Kalsel

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah-LO;
b. Dana Darurat-LO; dan
c. Pendapatan Lainnya-LO.

Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Pendapatan yang Sah-LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.

Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.

Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah (basis kas).

Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:

1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO;
2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO; dan
3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

BPK Perwakilan Kalsel

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Non Operasional-LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian dan PengungkapanPendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.

Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pendapatan Luar Biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

j. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BPK Perwakilan Kalsel

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

BPK Perwakilan Kalsel

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada:

1) Saat timbulnya kewajiban;
2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi

BPK Perwakilan Kalsel

kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yaitu:

1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
2) Beban Transfer;
3) Beban Non Operasional;
4) Beban Luar Biasa.

Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

BPK Perwakilan Kalsel

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

BPK Perwakilan Kalsel

Pengakuan Beban Operasi

1) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
2) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
3) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
4) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/ jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
7) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
8) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
9) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
10) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
11) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

BPK Perwakilan Kalsel

Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Non Operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Non Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BPK Perwakilan Kalsel

Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pengakuan dan Pengukuran Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BPK Perwakilan Kalsel

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. Pendapatan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.191.378.634.433,00	**1.568.178.825.031,12**	**1.717.931.600.070,93**

Struktur Pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan secara keseluruhan periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp2.191.378.634.433,00 dan terealisasi sebesar Rp1.568.178.825.031,12 atau mencapai 71,56%. Realisasi Pendapatan Tahun 2023 menurun sebesar Rp149.752.775.039,81 atau mencapai 8,72% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun lalu sebesar Rp1.717.931.600.070,93 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	108.997.935.127,00	100.127.498.754,12	92.886.377.406,93
2	Pendapatan Transfer	2.073.172.255.024,00	1.459.796.209.532,00	1.590.277.432.228,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.208.444.282,00	8.255.116.745,00	34.767.790.436,00
	Jumlah	**2.191.378.634.433,00**	**1.568.178.825.031,12**	**1.717.931.600.070,93**

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
108.997.935.127,00	**100.127.498.754,12**	**92.886.377.406,93**

Realisasi PAD Tahun 2023 sebesar Rp100.127.498.754,12 atau mencapai 91,86% dari anggaran PAD Tahun 2023 sebesar Rp108.997.935.127,00. Realisasi PAD tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,80% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp92.886.377.406,93. Adapun rincian terdiri dari:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.635.000.000,00	28.394.827.563,25	27.427.262.028,47
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.695.700.000,00	4.376.818.354,01	4.003.044.421,23
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	5.179.875.915,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	75.262.443.582,00	61.951.061.291,86	56.276.195.042,23
	Jumlah	**108.997.935.127,00**	**100.127.498.754,12**	**92.886.377.406,93**

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
23.635.000.000,00	**28.394.827.563,25**	**27.427.262.028,47**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp28.394.827.563,25 atau mencapai 120,14% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp23.635.000.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,53% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp27.427.262.028,47 dengan rician yang terdiri dari:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	123.577.700,00	119.725.200,00
2	Pajak Restoran	3.475.000.000,00	5.087.981.514,00	3.874.588.848,00
3	Pajak Hiburan	60.000.000,00	89.589.400,00	73.229.175,00
4	Pajak Reklame	575.000.000,00	425.321.334,40	542.382.055,49
5	Pajak Penerangan Jalan	12.900.000.000,00	13.724.549.129,00	12.022.163.886,00
6	Pajak Parkir	50.000.000,00	49.577.400,00	48.047.700,00
7	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	27.320.600,00	29.775.400,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.604.325.952,85	4.348.958.255,98
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.100.000.000,00	1.447.013.051,00	1.809.578.521,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.750.000.000,00	5.806.071.482,00	4.549.312.987,00
Jumlah		**23.635.000.000,00**	**28.394.827.563,25**	**27.427.262.028,47**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
4.695.700.000,00	**4.376.818.354,01**	**4.003.044.421,23**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp4.376.818.354,01 atau mencapai 93,21% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp4.695.700.000,00. Realisasi Pendapatan retribusi daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,34% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.003.044.421,23 dengan rician yang terdiri dari:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	**Retribusi Pelayanan kesehatan**	**951.500.000,00**	**679.086.500,00**	**503.281.000,00**
	- Dinas Kesehatan	951.500.000,00	679.086.500,00	503.281.000,00
2	**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**	**730.000.000,00**	**750.732.000,00**	**579.717.000,00**
	- Dinas Lingkungan Hidup	730.000.000,00	750.732.000,00	579.717.000,00
3	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**30.000.000,00**	**38.300.000,00**	**47.450.000,00**
	- Dinas Perhubungan	30.000.000,00	38.300.000,00	47.450.000,00
4	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**	**75.000.000,00**	**73.355.500,00**	**51.972.000,00**
	- Dinas Perdagangan	75.000.000,00	73.355.500,00	51.972.000,00
5	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**80.000.000,00**	**134.043.000,00**	**145.827.000,00**
	- Dinas Komunikasi & Informatika	80.000.000,00	134.043.000,00	145.827.000,00
6	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**787.050.000,00**	**1.033.603.000,00**	**923.122.000,00**
	- Badan Pendapatan Daerah	120.000.000,00	157.369.000,00	313.342.000,00
	- Dinas Perhubungan	20.050.000,00	22.050.000,00	0,00
	- Dinas Pertanian	5.000.000,00	9.800.000,00	6.300.000,00
	- Dinas Perdagangan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	- Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	217.000.000,00	0,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	220.000.000,00	265.230.000,00	248.830.000,00
	- Sekretariat Daerah	0,00	21.004.000,00	11.000.000,00
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.000.000,00	6.700.000,00	8.400.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300.000.000,00	322.450.000,00	323.250.000,00
7	**Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan**	**1.100.000.000,00**	**748.419.641,00**	**923.889.108,00**
	- Dinas Perdagangan	1.100.000.000,00	748.419.641,00	923.889.108,00
8	**Retribusi Terminal**	**412.150.000,00**	**481.242.000,00**	**396.552.000,00**
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	43.150.000,00	42.222.000,00	37.648.000,00
	- Dinas Perdagangan	369.000.000,00	439.020.000,00	358.904.000,00
9	**Retribusi Tempat Khusus Parkir**	**100.000.000,00**	**126.800.000,00**	**109.600.000,00**
	- Dinas Perhubungan	100.000.000,00	126.800.000,00	109.600.000,00
10	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**15.500.000,00**	**8.450.000,00**	**10.875.000,00**
	- Dinas Pertanian	15.500.000,00	8.450.000,00	10.875.000,00
11	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**70.000.000,00**	**10.960.000,00**	**6.200.000,00**
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.000.000,00	5.960.000,00	5.000.000,00
	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	55.000.000,00	5.000.000,00	1.200.000,00
12	**Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah**	**43.500.000,00**	**76.964.500,00**	**42.504.000,00**
	- Dinas Perikanan	18.000.000,00	18.000.000,00	16.099.000,00
	- Dinas Pertanian	25.500.000,00	58.964.500,00	26.405.000,00
13	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**	**300.000.000,00**	**214.862.213,01**	**261.805.313,23**
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000,00	214.862.213,01	261.805.313,23
14	**Retribusi Izin Trayek**	**1.000.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
	- Dinas Perhubungan	1.000.000,00	0,00	250.000,00
	Jumlah	**4.695.700.000,00**	**4.376.818.354,01**	**4.003.044.421,23**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.404.791.545,00	**5.404.791.545,00**	**5.179.875.915,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.404.791.545,00 merupakan realisasi penerimaan Bagian Laba (dividen) Tahun 2023 atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin kepada BUMD Bank Kalsel yang telah ditransfer pada rekening Kasda PAD dan Penerimaan Lainnya, Nomor Rekening 006.00.03.00001.7 tanggal 13 Februari 2023. Realisasi penerimaan tersebut berdasarkan

pernyataan keputusan RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah No.05 Tanggal 08 Februari 2023. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 100% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp5.404.791.545,00. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,34% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.179.875.915,00.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
75.262.443.582,00	**61.951.061.291,86**	**56.276.195.042,23**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp61.951.061.291,86 atau mencapai 82,31% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp75.262.443.582,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,08% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp56.276.195.042,23 Adapun rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	537.821.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro	7.500.000.000,00	6.594.991.807,32	3.478.514.285,95
3	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	218.960.826,60	1.170.891.202,33
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	247.321.562,00	401.385.750,00
5	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	7.446.380,00	31.290.120,00
6	Pendapatan Hasil Esekusi atas Jaminan	0,00	0,00	247.062.500,00
7	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	270.980.926,00
8	Pendapatan BLUD	67.762.443.582,00	50.182.071.111,07	41.766.456.725,46
9	Remunerasi	0,00	1.341.382.637,00	0,00
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	3.358.886.967,87	8.371.792.532,49
	Jumlah	**75.262.443.582,00**	**61.951.061.291,86**	**56.276.195.042,23**

Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Jasa Giro Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	7.500.000.000,00	6.557.407.664,57	3.373.186.935,18
2	Jasa Giro Bendahara	0,00	0,00	74.636.995,64
3	Jasa Giro pada Rek. Dana BOK Puskesmas	0,00	16.518.319,00	0,00
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	6.853.251,00	5.563.327,00
5	Jasa Giro pada Rek. Dana BOS	0,00	14.212.572,75	25.127.028,13
	Jumlah	**7.500.000.000,00**	**6.594.991.807,32**	**3.478.514.285,95**

BPK Perwakilan Kalsel

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – Dinas PUPR	0,00	218.960.826,60	1.107.310.840,33
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – Dinas Kesehatan	0.00	0.00	63.580.362,00
	Jumlah	**0,00**	**218.960.826,60**	**1.170.891.202,33**

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan denda PBB - P2	0,00	247.321.562,00	401.385.750,00
	Jumlah	**0,00**	**247.321.562,00**	**401.385.750,00**

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	0,00	7.446.380,00	31.290.120,00
	Jumlah	**0,00**	**7.446.380,00**	**31.290.120,00**

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.10
Anggaran dan Realisasi BLUD Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Umum BLUD	67.762.443.582,00	50.182.071.111,07	41.766.456.725,46
	Jumlah	**67.762.443.582,00**	**50.182.071.111,07**	**41.766.456.725,46**

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.182.071.111,07 dan Rp41.766.456.725,46 yang dapat dirinci sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.11
Rincian Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Triwulan I	11.548.004.379,95	7.883.276.684,47
2	Triwulan II	12.708.377.053,00	8.486.690.419,36
3	Triwulan III	12.461.495.207,26	12.246.568.636,30
4	Triwulan IV	13.464.194.470,86	13.149.920.985,33
	Jumlah	**50.182.071.111,07**	**41.766.456.725,46**

Realisasi Pendapatan Remunarasi Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Remunarasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	1.341.382.637,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**1.341.382.637,00**	**0,00**

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.13
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Fisik	0,00	1.100.763.243,32	5.650.714.336,88
2	Pendapatan Dari Pengembalian Sisa Dana Hibah	0,00	383.361.845,00	314.902.892,00
3	Pendapatan Dari Pengembalian Kegiatan	0,00	18.816.618,00	60.697.497,00
4	Pendapatan Dari Denda Keterlamatan Pekerjaan Kegiatan Fisik	0,00	106.218.441,44	147.098.691,90
5	RJTP BPJS	0,00	382.216.700,00	269.835.400,00
6	Pengembalian Hasil Pemeriksaan BPK	0,00	1.131.523.182,50	0,00
7	Hasil Penjualan Aset Yang Tidak dipisahkan	0,00	199.368.552,00	0,00
8	Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi	0,00	4.619.128,00	1.337.471,00
9	Pengembalian TASPEN	0,00	31.815.818,00	0,00
10	Pendapatan Dari Pencairan Jaminan atas Pelaksanaa Pekerjaan Fisik	0,00	0,00	1.665.329.600,00
11	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	183.439,61	261.876.643,71
	Jumlah	**0,00**	**3.358.886.967,87**	**8.371.792.532,49**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.073.172.255.024,00	**1.459.796.209.532,00**	**1.590.277.432.228,00**

Pendapatan Transfer secara keseluruhan periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp2.073.172.255.024,00 dan terealisasi sebesar Rp1.459.796.209.532,00 atau mencapai 70,41%. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 menurun sebesar Rp130.481.222.696,00 atau mencapai 8,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.590.277.432.228,00 dengan rician sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.872.717.744.502,00	1.305.466.218.145,00	1.455.670.208.493,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.454.510.522,00	154.329.991.387,00	134.607.223.735,00
	Jumlah	**2.073.172.255.024,00**	**1.459.796.209.532,00**	**1.590.277.432.228,00**

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.872.717.744.502,00	**1.305.466.218.145,00**	**1.455.670.208.493,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.305.466.218.145,00 atau mencapai 69,71% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.872.717.744.502,00 Realisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,32% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.455.670.208.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.775.514.124.502,00	1.208.315.231.559,00	1.357.000.364.733,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	5.594.207.000,00
3	Dana Desa	97.203.620.000,00	97.150.986.586,00	93.075.636.760,00
	Jumlah	**1.872.717.744.502,00**	**1.305.466.218.145,00**	**1.455.670.208.493,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.775.514.124.502,00	**1.208.315.231.559,00**	**1.357.000.364.733,00**

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.208.315.231.559,00 atau mencapai 68,05% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.775.514.124.502,00, Realisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,96% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.357.000.364.733,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.16
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.191.608.685.223,00	634.360.966.841,00	812.527.669.430,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	432.453.256.000,00	432.333.645.608,00	414.513.383.682,00
3	Dana Akokasi Khusus (DAK)	151.452.183.279,00	141.620.619.110,00	129.959.311.621,00
	Jumlah	**1.775.514.124.502,00**	**1.208.315.231.559,00**	**1.357.000.364.733,00**

5.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.191.608.685.223,00	**634.360.966.841,00**	**812.527.669.430,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 sebesar Rp634.360.966.841,00 dari Anggaran DBH Tahun 2023 sebesar Rp1.191.608.685.223,00 atau mencapai 53,24%. Realisasi DBH pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 21,93% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp812.527.669.430,00. Adapun rincian Realisasi DBH terdiri dari:

Tabel 5.1.17
Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	77.041.116.417,00	34.959.418.583,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.977.562.495,00	7.225.320.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	37.975,00	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	180.114.300,00	363.567.992,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	538.831.453.419,00	767.915.114.855,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.832.180.024,00	105.937.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.498.502.211,00	1.958.311.000,00
	Jumlah	**634.360.966.841,00**	**812.527.669.430,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.1.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
432.453.256.000,00	**432.333.645.608,00**	**414.513.383.682,00**

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp432.333.645.608,00 dari Anggaran DAU Tahun 2023 sebesar Rp432.453.256.000,00 atau mencapai 99,97%. Realisasi DAU pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,30% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp414.513.383.682,00.

5.1.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
151.452.183.279,00	**141.620.619.110,00**	**129.959.311.621,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp141.620.619.110,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023. Realisasi Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 96,62% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp151.452.183.279,00. Realisasi DAK pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,97% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp129.959.311.621,00. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.18
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	8.082.636.000,00	6.936.745.548,00	6.071.385.947,00
2	DAK Reguler Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Air minum dan Sanitasi	11.262.863.000,00	11.118.437.000,00	12.320.887.993,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan (DAK Reguler	15.795.070.000,00	15.637.230.000,00	18.204.197.400,00
4	DAK Bidang Pendidikan (DAK Reguler)	5.135.426.000,00	5.022.997.727,00	11.850.013.700,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK Reguler)	0,00	0,00	3.635.543.250,00
6	DAK Bidang Sanitasi (DAK Reguler)	5.851.117.000,00	5.851.117.000,00	0,00
7	DAK Bidang Pertanian (DAK Reguler)	0,00	0,00	20.493.087.365,00
8	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.146.880.000,00	20.879.531.649,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	950.000.000,00	1.070.000.000,00	0,00
10	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.714.000.000,00	3.983.850.000,00	382.800.000,00
11	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	51.716.091.000,00	49.171.104.900,00	45.186.139.260,00
12	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1.479.250.000,00	1.348.979.068,00	1.431.999.500,00
13	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	603.441.000,00	512.578.200,00	577.919.400,00
14	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	16.011.092.348,00	11.803.736.877,00	6.362.831.833,00
15	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	4.333.170.000,00	3.810.064.990,00	2.259.544.973,00

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
16	DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	459.100.000,00	246.282.351,00	234.481.000,00
17	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	173.588.800,00	451.800.000,00
18	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	663.575.000,00	651.275.000,00	377.880.000,00
19	DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	406.571.931,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.403.100.000,00	3.403.100.000,00	118.800.000,00
	Jumlah	**151.452.183.279,00**	**141.620.619.110,00**	**129.959.311.621,00**

5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
0,00	**0,00**	**5.594.207.000,00**

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau tidak ada realisasi, dan anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Berdasarkan PMK No.14/PMK.07/2019 tentang DID Pasal 7 ayat (1) disebutkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan pemerintah. Dan pada ayat (2) disebutkan Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapin tidak mendapatkan salur Dana Insentif Daerah hal ini karena salah satu dari kategori kinerja kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang Kesehatan yang tidak terpenuhi.

5.1.1.2.1.3. Dana Desa

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
97.203.620.000,00	**97.150.986.586,00**	**93.075.636.760,00**

Realisasi Dana Desa sebesar Rp97.150.986.586,00 merupakan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat ke Desa selama Tahun 2023. Realisasi Dana Desa tahun 2023 mencapai 99,95% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp97.203.620.000,00. Realisasi Dana Desa pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,38% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp93.075.636.760,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
200.454.510.522,00	**154.329.991.387,00**	**134.607.223.735,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp154.329.991.387,00 dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp200.454.510.522,00 atau mencapai 76,99%. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,65% dari realisasi

Bpkp Perwakilan Kalsel

tahun 2022 sebesar Rp134.607.223.735,00. Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.672.572.000,00	14.692.833.769,00	12.931.196.456,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.919.980.000,00	10.118.534.577,00	13.183.653.170,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	161.839.286.522,00	115.752.558.556,00	95.203.932.548,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	282.740.000,00	617.974.937,00	288.510.399,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	12.739.932.000,00	13.148.089.548,00	12.999.931.162,00
	Jumlah	**200.454.510.522,00**	**154.329.991.387,00**	**134.607.223.735,00**

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
9.208.444.282,00	**8.255.116.745,00**	**34.767.790.436,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar sebesar Rp9.208.444.282,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.255.116.745,00 atau mencapai 89,65%. Realisasi Tahun 2023 menurun sebesar Rp26.512.673.691,00 atau mencapai 76,26% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp34.767.790.436,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.20
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	38.220.000,00	34.400.000,00	9.882.398.701,00
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.170.224.282,00	8.220.716.745,00	24.885.391.735,00
	Jumlah	**9.208.444.282,00**	**8.255.116.745,00**	**34.767.790.436,00**

Penjelasan masing-masing jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
38.220.000,00	**34.400.000,00**	**9.882.398.701,00**

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp34.400.000,00 dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp38.220.000,00 atau mencapai 90,01%. Realisasi Pendapatan Hibah pada

BPK Perwakilan Kalsel

tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 99,65% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.882.398.701,00. Adapun rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 5.1.21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	38.220.000,00	34.400.000,00	9.882.398.701,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**38.220.000,00**	**34.400.000,00**	**9.882.398.701,00**

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp34.400.000,00 seluruhnya merupakan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) tahap XVIII selama Tahun 2023. IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan Kabupaten.

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
9.170.224.282,00	**8.220.716.745,00**	**24.885.391.735,00**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 sebesar Rp8.220.716.745,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN selama Tahun 2023. Realisasi Tahun 2023 tercapai sebesar 89,65% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp9.170.224.282,00. Realisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 66,97% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp24.885.391.735,00. Pada Tahun 2023 Pendapatan Hibah Dana BOS tidak lagi disajikan pada Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi disajikan pada Pendapatan Transper Pemerintah Pusat pada Akun DAK Non Fisik-BOS. Adapun rincian terdiri dari:

Tabel 5.1.22
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana Bos	0,00	0,00	18.851.610.265,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.170.224.282,00	8.220.716.745,00	6.033.781.470,00
	Jumlah	**9.170.224.282,00**	**8.220.716.745,00**	**24.885.391.735,00**

Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA Tahun 2023 masing-masing puskesmas adalah sebagai berikut:

PPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.23
Rincian Realisasi Penerima Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA
Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Realisasi 2023 (Rp)
1	Puskesmas Tapin Utara	1.138.266.670,00
2	Puskesmas Binuang	1.135.609.121,00
3	Puskesmas Hatungun	359.398.878,00
4	Puskesmas Tambarangan	784.132.671,00
5	Puskesmas Salam Babaris	461.387.953,00
6	Puskesmas Banua Padang	583.963.038,00
7	Puskesmas Bakarangan	615.836.308,00
8	Puskesmas Pandahan	399.401.616,00
9	Puskesmas Tambaruntung	599.282.788,00
10	Puskesmas Baringin	585.877.935,00
11	Puskesmas Margasari	686.959.056,00
12	Puskesmas Lokpaikat	478.886.696,00
13	Puskesmas Piani	391.714.015,00
Jumlah		**8.220.716.745,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.2. Belanja Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.300.926.495.433,00	**1.717.847.616.256,45**	**1.645.505.852.093,50**

Struktur Belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp2.300.926.495.433,00 dan terealisasi sebesar sebesar Rp1.717.847.616.256,45 atau mencapai 74,66%. Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 meningkat sebesar Rp72.341.764.162,95 atau mencapai 4,40% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.645.505.852.093,50 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Operasi	1.415.914.438.212,00	1.177.535.380.629,00	983.129.650.879,00
2	Belanja Modal	597.569.173.099,00	331.009.561.591,45	483.199.477.506,00
3	Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	8.943.655.185,00	14.038.372.812,00
4	Belanja Transfer	262.442.884.122,00	200.359.018.851,00	165.138.350.896,50
Jumlah		**2.300.926.495.433,00**	**1.717.847.616.256,45**	**1.645.505.852.093,50**

5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.415.914.438.212,00	**1.177.535.380.629,00**	**983.129.650.879,00**

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.177.535.380.629,00 atau mencapai 83,16% dari anggaran sebesar Rp1.415.914.438.212,00 Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp194.405.729.750,00 atau mencapai 19,77% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp983.129.650.879,00. Adapun rincian belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	492.558.132.557,00	462.501.391.423,00	448.969.728.637,00
2	Belanja Barang dan Jasa	758.642.096.470,00	589.859.979.604,00	460.650.110.998,00
3	Belanja Bunga	9.500.000.000,00	7.252.202.772,00	7.578.695.680,00
4	Belanja Hibah	133.893.009.185,00	98.754.806.830,00	56.698.494.864,00
5	Belanja Bantuan Sosial	21.321.200.000,00	19.167.000.000,00	9.232.620.700,00
Jumlah		**1.415.914.438.212,00**	**1.177.535.380.629,00**	**983.129.650.879,00**

Penjelasan untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
492.558.132.557,00	**462.501.391.423,00**	**448.969.728.637,00**

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp462.501.391.423,00 dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp492.558.132.557,00 atau mencapai 93,90%. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,01% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp448.969.728.637,00. Adapun rincian belanja pegawai merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan pengeluaran lainnya terdiri dari:

Tabel 5.1.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	193.275.889.031,00	185.759.475.634,00	185.156.764.383,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.540.505.160,00	15.276.321.407,00	15.325.847.953,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	7.663.262.684,00	6.620.972.496,00	7.077.402.777,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional	17.016.385.485,00	16.012.136.074,00	13.380.920.100,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	1.986.159.988,00	1.331.640.919,00	1.751.926.604,00
6	Belanja Tunjangan Beras	10.498.973.504,00	9.626.928.793,00	9.696.281.540,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	923.211.287,00	620.944.809,00	638.618.200,00
8	Belanja Pembulatan Gaji	52.327.524,00	3.142.220,00	2.664.804,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	15.297.252.753,00	14.127.295.319,00	16.755.593.412,00
10	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM)	3.627.200.000,00	1.502.753.183,00	1.511.652.243,00
11	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	148.751.791.730,00	141.968.362.763,00	128.963.488.640,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
12	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	746.248.975,00	606.587.680,00	653.971.055,00
13	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	189.105.455,00	117.921.991,00	102.683.070,00
14	Belanja Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	51.716.091.000,00	48.252.776.300,00	48.954.381.400,00
15	Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD	603.441.000,00	523.687.800,00	574.531.800,00
16	Belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	1.479.250.000,00	1.462.500.000,00	1.303.750.000,00
17	Belanja Honorarium	4.941.397.500,00	3.630.710.000,00	2.396.090.000,00
18	Belanja Uang Representasi DPRD	567.700.000,00	561.540.000,00	563.115.000,00
19	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	79.909.200,00	55.125.000,00	54.734.400,00
20	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00	62.788.140,00	64.598.640,00
21	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	834.233.000,00	814.233.000,00	814.233.000,00
22	Belanja Uang Paket DPRD	58.132.000,00	48.132.000,00	47.029.500,00
23	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.522.600,00	73.445.400,00	68.466.825,00
24	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	259.357.700,00	13.702.500,00	20.964.825,00
25	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	777.000.000,00	787.500.000,00
26	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	106.001.528,00	80.180.130,00	270.396,00
27	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.895.564.700,00	4.757.615.000,00	4.392.175.000,00
28	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.092.000.000,00	3.300.000.000,00	3.312.500.000,00
29	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	52.500.000,00	6.300.000,00	0,00
30	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	3.878.640.000,00	3.350.800.000,00	3.353.750.000,00
31	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	42.900.000,00	54.600.000,00
32	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.606.600,00	4.290.000,00	5.460.000,00
33	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.220.000,00	98.280.000,00
34	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.013.636,00	2.896.800,00	3.476.160,00
35	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.040.970,00	1.567.850,00	1.714.000,00
36	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000.000,00	1.200,00	1.440,00
37	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	312.564.379,00	223.659.375,00	276.671.875,00
38	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	64.835.168,00	37.444.640,00	34.559.595,00
39	Belanja Dana Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	355.543.000,00	398.530.000,00
40	Belanja Pegawai BLUD	507.250.000,00	410.850.000,00	370.530.000,00
	Jumlah	**492.558.132.557,00**	**462.501.391.423,00**	**448.969.728.637,00**

Bpk Perwakilan Kalsel

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
758.642.096.470,00	**589.859.979.604,00**	**460.650.110.998,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp589.859.979.604,00 atau mencapai 77,75% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp758.642.096.470,00. Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 28,05% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp460.650.110.998,00. Adapun rincian belanja barang dan jasa merupakan belanja uang/jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD untuk menunjang kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapin yang terdiri dari:

Tabel 5.1.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	173.019.052.986,00	144.382.365.919,00	91.285.365.700,00
2	Belanja Jasa	259.657.375.072,00	197.712.901.372,00	176.190.734.250,00
3	Belanja Pemeliharaan	133.373.897.790,00	73.994.954.496,00	51.058.011.352,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	96.043.383.506,00	85.349.347.601,00	60.476.937.582,00
5	Belanja Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	37.566.364.972,00	20.876.581.424,00	17.537.246.558,00
6	Belanja Barang dan Jasa Bos	10.466.760.000,00	15.896.600.914,00	15.140.082.563,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	48.515.262.144,00	51.647.227.878,00	48.961.732.993,00
	Jumlah	**758.642.096.470,00**	**589.859.979.604,00**	**460.650.110.998,00**

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 disajikan dalam tabel -tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022

No.	Belanja Barang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.287.409.185,00	5.317.210.487,00	4.350.240.850,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	251.399.428,00	246.529.625,00	393.544.964,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.703.894.516,00	23.944.853.576,00	15.074.655.319,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	171.262.038,00	133.806.284,00	2.094.006.700,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.255.439.940,00	4.065.848.281,00	2.289.030.532,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	4.800.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	66.963.600,00	44.798.700,00	8.955.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	89.294.790,00	67.446.375,00	182.260.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.794.762.639,00	4.094.220.672,00	2.550.816.297,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.888.280.036,00	1.452.282.112,00	960.256.625,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	1.000.000,00

Bpk. Perwakilan Kalsel

No.	Belanja Barang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	322.500,00	0,00	24.437.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	276.345.326,00	187.616.356,00	607.136.595,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.966.752.695,00	2.510.428.681,00	4.265.882.447,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.571.061.732,00	1.372.217.931,00	1.958.332.179,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.890.811.251,00	9.796.833.435,00	6.384.619.845,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	746.312.183,00	614.862.107,00	520.003.800,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.727.622.336,00	1.521.151.015,00	0,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	176.638.148,00	164.713.690,00	32.156.800,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.221.978.178,00	1.822.096.969,00	1.621.639.653,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	811.859.778,00	758.498.893,00	7.700.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	54.750.096,00	48.468.468,00	0,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	641.790.674,00	547.308.950,00	327.164.278,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.396.622.161,00	3.188.158.316,00	1.387.716.096,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.768.762.276,00	2.568.690.560,00	3.657.997.149,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.053.050.031,00	2.790.490.687,00	614.330.236,00
27	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.395.587.199,00	9.199.152.071,00	5.539.388.132,00
28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	31.006.104.304,00	20.659.998.648,00	0,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Natura	42.134.010,00	16.297.018,00	0,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	194.490.000,00	174.690.000,00	118.115.000,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	482.477.492,00	392.998.870,00	0,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.576.279.312,00	14.439.965.334,00	10.074.206.253,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.194.586.300,00	5.027.065.350,00	4.773.397.617,00
34	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26.987.904,00	26.181.100,00	102.947.967,00
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	180.000.000,00	166.500.000,00	0,00
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.330.432.300,00	3.155.616.800,00	482.467.000,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.797.630.500,00	14.773.924.539,00	12.567.798.650,00
39	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	857.930.196,00	550.305.000,00	1.075.505.000,00
40	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	121.025.000,00	116.550.000,00	116.550.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	529.320.914,00	509.991.000,00	316.722.750,00
42	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.905.329.794,00	1.840.186.000,00	1.868.870.500,00
43	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.160.239.978,00	1.128.700.069,00	1.106.365.742,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Belanja Barang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
44	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	404.209.831,00	365.287.500,00	59.662.500,00
45	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.291.424,00	0,00	9.275.000,00
46	Belanja Pakaian Siaga	23.215.582,00	22.135.000,00	0,00
47	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	305.159.120,00	264.869.000,00	493.445.200,00
48	Belanja Pakaian KORPRI	12.259.472,00	12.215.000,00	23.630.000,00
49	Belanja Pakaian Adat Daerah	487.415.535,00	404.694.390,00	67.650.000,00
50	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.851.043.842,00	1.751.804.473,00	1.152.139.652,00
51	Belanja Pakaian Olahraga	1.872.098.000,00	1.719.320.587,00	1.773.746.160,00
52	Belanja Pakaian Paskibraka	426.420.000,00	392.776.000,00	242.770.212,00
53	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	13.999.440,00	12.610.000,00	2.030.000,00
JUMLAH		**173.019.052.986,00**	**144.382.365.919,00**	**91.285.365.700,00**

Rincian belanja barang dapat dilihat pada lampiran 1.

Tabel 5.1.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.444.821.200,00	5.744.321.200,00	4.320.431.621,00
2	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.839.825.000,00	5.092.825.000,00	5.864.535.550,00
3	Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.000.000,00	3.600.000,00	46.770.000,00
4	Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.936.770.000,00	2.891.670.000,00	2.065.590.000,00
5	Belanja Honorarium Rohaniwan	1.900.000,00	600.000,00	4.200.000,00
6	Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*	48.000.000,00	47.800.000,00	7.800.000,00
7	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Ujian	35.400.000,00	31.300.000,00	1.500.000,00
8	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	169.650.000,00	103.200.000,00	5.600.000,00
9	Belanja Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	132.000.000,00	90.000.000,00	92.400.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.107.525.000,00	3.107.182.000,00	1.981.687.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.115.381.993,00	13.483.002.888,00	9.187.570.444,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	513.849.000,00	434.388.584,00	229.824.164,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.310.628.207,00	15.886.613.477,00	18.059.036.579,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	943.100.000,00	898.181.250,00	2.574.643.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	190.650.000,00	181.738.750,00	206.625.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	75.000.000,00	63.850.000,00	404.300.000,00

Salinan Perwakilan Kalsel

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	730.715.000,00	681.440.000,00	602.695.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	643.302.600,00	627.189.000,00	872.395.600,00
19	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.612.300.000,00	2.536.800.000,00	2.498.700.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	39.000.000,00	35.000.000,00	256.050.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.237.582.200,00	17.687.138.450,00	10.879.514.676,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.284.991.000,00	1.267.591.000,00	2.143.991.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.970.182.000,00	6.664.086.000,00	5.328.990.511,00
24	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.806.841.000,00	3.552.270.400,00	2.917.797.809,00
25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.424.725.600,00	10.684.350.600,00	9.860.694.400,00
26	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.997.310.000,00	2.820.010.000,00	3.354.771.900,00
27	Belanja Jasa Tenaga Caraka	30.000.000,00	28.200.000,00	21.600.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	636.060.000,00	544.200.000,00	675.528.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	634.500.000,00	526.145.000,00	259.200.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	170.416.000,00	131.352.015,00	351.886.793,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	161.100.000,00	125.700.000,00	145.500.000,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	157.500.000,00	144.250.000,00	359.450.000,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	761.250.000,00	615.030.000,00	1.195.970.263,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	884.428.010,00	696.963.300,00	166.538.000,00
35	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7.320.000,00	4.320.000,00	0,00
36	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	40.000.000,00	38.300.000,00	0,00
37	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	61.500.000,00	0,00	0,00
38	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.978.750.040,00	1.491.262.377,00	427.892.292,00
39	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.628.300.000,00	1.535.090.810,00	1.558.850.000,00
40	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.608.225.000,00	3.457.946.660,00	1.383.425.000,00
41	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	58.451.000,00
42	Belanja Jasa Kalibrasi	219.086.489,00	189.394.500,00	21.352.500,00
43	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	38.850.000,00
44	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	104.975.000,00	95.815.000,00	166.855.000,00
45	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	170.850.000,00	82.159.000,00	0,00
46	Belanja Jasa Jalan/Tol	23.600.000,00	10.400.000,00	0,00
47	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.388.272.500,00	4.143.575.592,00	3.911.870.921,00
48	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	0,00	547.919.106,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
49	Belanja Tagihan Air	1.230.530.790,00	792.188.456,00	741.043.396,00
50	Belanja Tagihan Listrik	10.410.044.689,00	9.182.640.286,00	7.436.370.868,00
51	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	342.060.000,00	336.363.000,00	308.944.000,00
52	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.253.342.050,00	3.002.044.225,00	1.513.217.595,00
53	Belanja Paket/Pengiriman	8.183.350,00	2.258.000,00	0,00
54	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00
55	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	786.300.000,00	441.171.619,00	346.892.574,00
56	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.724.932.912,00	1.711.933.936,00	1.561.966.176,00
58	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	23.205.512.400,00	23.121.277.800,00	15.247.899.500,00
59	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	0,00	1.498.131.600,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	87.220.320,00	51.299.499,00	12.904.748,00
61	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	421.300.480,00	400.587.005,00	103.824.720,00
62	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	427.410.800,00	365.401.267,00	110.073.600,00
63	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	728.503.332,00	671.663.333,00	211.050.000,00
64	Belanja Sewa *Grader*	90.000.000,00	90.000.000,00	2.444.891.191,00
65	Belanja Sewa *Excavator*	13.018.090.614,00	13.016.497.000,00	9.803.988.716,00
66	Belanja Sewa *Asphalt Equipment*	2.248.750.000,00	2.247.600.000,00	564.115.000,00
67	Belanja Sewa *Compacting Equipment*	150.000.000,00	150.000.000,00	5.370.389.219,00
68	Belanja Sewa *Loader*	0,00	0,00	253.170.000,00
69	Belanja Sewa *Electric Generating Set*	0,00	0,00	17.500.000,00
70	Belanja Sewa Alat Pengangkat	8.508.000,00	4.250.000,00	0,00
71	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.785.451.702,00	4.763.679.450,00	0,00
72	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.675.980.000,00	2.498.334.900,00	88.610.000,00
73	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	73.750.000,00	47.352.000,00	38.887.000,00
74	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	9.000.000,00	0,00	15.000.000,00
75	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	983.330,00	983.000,00	0,00
76	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	808.315.000,00	763.053.382,00	1.397.836.080,00
77	Belanja Sewa Mebel	849.444.222,00	708.965.272,00	0,00
78	Belanja Sewa Alat Pendingin	144.475.000,00	115.304.954,00	37.650.000,00
79	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.680.894,00	0,00	0,00
80	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	60.000.000,00	39.500.000,00	642.577.189,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
81	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	155.400.000,00	139.639.639,00	125.136.600,00
82	Belanja Sewa Peralatan Cetak	180.600,00	0,00	0,00
83	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	955.628.798,00	827.546.610,00	0,00
84	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	86.850.000,00
85	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	75.583.244,00
86	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	0,00	192.000.000,00
87	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	682.867.000,00	513.023.313,00	0,00
88	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	9.300.000,00	9.200.000,00	0,00
89	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	946.271.300,00	325.363.800,00	113.125.000,00
90	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	24.000.000,00
91	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.800.000,00	17.450.000,00	393.062.200,00
92	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	25.000.000,00
93	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	912.600.000,00	826.951.000,00	580.811.500,00
94	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	96.000.000,00	70.000.000,00	82.488.700,00
95	Belanja Sewa Asrama	85.050.000,00	84.100.000,00	0,00
96	Belanja Sewa Hotel	2.167.582.668,00	1.810.664.819,00	198.692.800,00
97	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	0,00	0,00	22.000.000,00
98	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	79.250.000,00
99	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	518.500.000,00	339.920.000,00	0,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	850.000.000,00	641.356.300,00	464.065.785,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	10.810.811,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	6.086.039.166,00	2.835.849.590,00	1.572.353.060,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.870.700.000,00	1.326.620.826,00	2.629.348.259,00
104	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	7.525.000.000,00	3.683.714.200,00	3.402.940.106,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	8.408.877.800,00	4.183.373.318,00	2.917.694.250,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Kontruksi	90.000.000,00	84.655.540,00	40.344.144,00
107	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2.439.933.928,00	321.101.880,00	1.223.088.046,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
108	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	2.077.500.000,00	1.048.196.000,00	691.113.000,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	99.178.000,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.898.790.000,00	432.907.283,00	863.142.066,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.729.367.580,00	1.154.134.120,00	2.508.451.067,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	4.824.349.348,00	359.892.000,00	2.854.765.100,00
113	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	8.400.000.000,00	567.747.800,00	3.255.860.690,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	0,00	701.814.090,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	90.000.000,00	0,00	69.541.500,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	1.000.000.000,00	92.468.800,00	0,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.655.000.000,00	776.504.200,00	1.736.842.200,00
118	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	97.008.000,00
119	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	0,00	1.347.723.000,00
120	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	0,00	0,00	49.145.000,00
121	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	1.151.859.160,00	582.609.775,00	109.310.000,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.442.525.000,00	92.000.000,00	340.552.800,00
123	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	0,00	0,00
124	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	400.000.000,00	49.485.000,00	0,00
125	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
126	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	162.900.000,00	51.192.900,00	621.354.844,00
127	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	22.050.000,00
128	Belanja Bimbingan Teknis	1.138.000.000,00	793.975.000,00	1.146.370.087,00
129	Belanja Diklat Kepemimpinan	475.500.000,00	433.025.000,00	322.232.000,00
130	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.800.000,00	905.629,00	745.399,00
131	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	27.000.000,00	24.927.132,00	21.158.618,00

Salinan Perwakilan Kalsel

No.	Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
132	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	600.000,00	391.506,00	148.838,00
133	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.300.000,00	1.115.646,00	3.780.300,00
134	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	99.000.000,00	93.346.486,00	76.843.898,00
135	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	600.000,00	263.032,00	302.426,00
136	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	300.000,00	137.855,00	103.682,00
137	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	900.000,00	0,00	91.338,00
138	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39.000.000,00	8.518.282,00	24.799.666,00
139	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.400.000,00	9.375.000,00	12.614.239,00
140	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	30.000.000,00	22.009.875,00	27.865.885,00
141	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.400.000,00	1.640.979,00	995.711,00
JUMLAH		**259.657.375.072,00**	**197.712.901.372,00**	**176.190.734.250,00**

BKK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.30
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	180.000.000,00	0,00	2.147.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	6.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	0,00	0,00	185.700.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	19.096.200,00	1.800.000,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	786.908.612,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.477.620.000,00	1.025.659.888,00	39.360.656,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	86.575.000,00	0,00	1.290.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	25.750.000,00	20.940.000,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	12.360.000,00	12.250.000,00	1.200.000,00

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
10	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	0,00	0,00	8.657.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	9.000.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.120.000,00	1.120.000,00	447.770,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.300.091.290,00	2.674.736.345,00	562.400.188,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	69.552.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	1.500.000,00	32.109.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	7.900.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	11.988.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.600.000,00	5.100.000,00	200.970.100,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	80.000.000,00	76.541.500,00	96.579.896,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	67.000.000,00	66.100.000,00	65.028.900,00
22	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	12.500.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.315.952.300,00	7.629.194.713,00	8.233.652.310,00
24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	63.906.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	162.330.000,00	31.071.000,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	1.081.531.754,00
27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	35.985.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	463.980.000,00	227.852.000,00	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.306.100.000,00	515.936.472,00	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	492.485.650,00
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	404.196.000,00	45.611.000,00	207.280.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.200.000.000,00	2.194.376.550,00	1.246.462.400,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	750.000.000,00	352.390.000,00	153.957.800,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	111.415.000.000,00	59.025.810.028,00	37.419.291.316,00
35	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	42.127.000,00	41.965.000,00	8.720.000,00
JUMLAH		**133.373.897.790,00**	**73.994.954.496,00**	**51.058.011.352,00**

Tabel 5.1.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.533.364.647,00	75.911.371.887,00	54.273.121.172,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.402.068.859,00	9.354.485.714,00	6.203.816.410,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	107.950.000,00	83.490.000,00	0,00
JUMLAH		**96.043.383.506,00**	**85.349.347.601,00**	**60.476.937.582,00**

Tabel 5.1.32
Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Uang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Tahun 2023 dan 2022

No.	Belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	893.632.256,00	795.988.270,00	609.222.828,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	499.065.515,00	419.065.515,00	69.000.000,00
3	Belanja Beasiswa	470.000.000,00	465.000.000,00	0,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.900.000,00	3.000.000,00	994.800.000,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000,00	299.919.000,00	1.225.000.000,00
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	34.800.000,00	34.800.000,00	109.850.000,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	35.364.967.201,00	18.858.808.639,00	14.529.373.730,00
JUMLAH		**37.566.364.972,00**	**20.876.581.424,00**	**17.537.246.558,00**

Tabel 5.1.33
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022

No.	Belanja Barang dan Jasa Bos	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.466.760.000,00	15.896.600.914,00	15.140.082.563,00
JUMLAH		**10.466.760.000,00**	**15.896.600.914,00**	**15.140.082.563,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.34
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022

No.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	48.515.262.144,00	51.647.227.878,00	48.961.732.993,00
JUMLAH		**48.515.262.144,00**	**51.647.227.878,00**	**48.961.732.993,00**

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
9.500.000.000,00	**7.252.202.772,00**	**7.578.695.680,00**

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp7.252.202.772,00 atau mencapai 76,34% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp9.500.000.000,00. Realisasi belanja bunga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,31% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.578.695.680,00. Realisasi belanja bunga 2023 merupakan realisasi atas pembayaran biaya fasilitasi pinjaman pembiayaan kepada PT. SMI atas pembiayaan pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka pembangunan RSUD Baru Kabupaten Tapin. Adapun jumlah fasilitas menyesuaikan dengan akta pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp148.657.565.500,00.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
133.893.009.185,00	**98.754.806.830,00**	**56.698.494.864,00**

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp98.754.806.830,00 atau mencapai 73,76% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp133.893.009.185,00. Realisasi belanja hibah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 74,18% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp56.698.494.864,00. Realisasi belanja hibah merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.35
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.140.137.800,00	18.065.137.800,00	2.437.048.100,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	114.660.101.385,00	79.636.679.030,00	53.168.676.764,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.092.770.000,00	1.052.990.000,00	1.092.770.000,00
Jumlah		**133.893.009.185,00**	**98.754.806.830,00**	**56.698.494.864,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Realisasi belanja hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp18.065.137.800,00 adalah realisasi belanja hibah Kepada Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.36
Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Hibah Uang kepada BAWASLU Kabupaten Tapin	6.362.081.600,00
2	Hibah Uang Kepada KPU Kabupaten Tapin	11.703.056.200,00
Jumlah		**18.065.137.800,00**

Realisasi belanja hibah kepada partai politik sebesar Rp1.052.990.000,00 adalah realisasi belanja hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.37
Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2023

No	Nama Penerima	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
1	Partai Demokrat	05-06-2023	1511/SP2D/2023	97.540.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	05-06-2023	1510/SP2D/2023	97.990.000,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	05-06-2023	1508/SP2D/2023	97.980.000,00
4	Partai Persatuan Pembangunan (P3)	05-06-2023	1509/SP2D/2023	57.920.000,00
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	05-06-2023	1504/SP2D/2023	87.880.000,00
6	Partai Gerindra	05-06-2023	1506/SP2D/2023	89.080.000,00
7	Partai Nasdem	05-06-2023	1512/SP2D/2023	87.660.000,00
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	05-06-2023	1507/SP2D/2023	61.310.000,00
9	Partai Golongan Karya (Golkar)	05-06-2023	1505/SP2D/2023	375.630.000,00
	Jumlah			**1.052.990.000,00**

Realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Tahun 2023 sebesar Rp79.636.679.030,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.38
Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023

No	Nama Penerima	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	
	- BOP PAUD Swasta	3.592.050.000,00
	- BOP Pendidikan Kesetaraan Swasta	3.224.600.000,00
	- BOS SD dan SMP Swasta	1.158.550.171,00
2	Dinas Kesehatan	
	- Palang Merah Indonesia Tapin	300.000.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informasi	
	- LPPL Tapin TV	150.000.000,00
	- Orari Lokal Tapin	140.000.000,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	- Poldarwis Sirang Pitu	347.000.000,00
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Tapin	655.738.000
	- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab.Tapin	250.000.000
	- Kepolisian Daerah (POLDA) Kal-Sel	3.500.000.000
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama Penerima	Jumlah
	- KONI Kab. Tapin	5.489.294.195,00
	- KORMI Kab. Tapin	4.209.300.000,00
	- KNPI Kab. Tapin	550.000.000
	- Gerakan Pramuka Kwartir Cab. Tapin	450.000.000,00
	- National Paralympic Committee (NPC) Kab.Tapin	1.689.318.000,00
7	Dinas Perikanan	
	- Kel. Maju Bersama - Desa Baringin A	49.414.000,00
	- Kel. LATHIFATUL KHABIR - Kel Rantau Kiwa	123.853.000,00
	- KT. Tunas Muda - Desa Kembang Kuning	
	- Kel. Karang Taruna - Desa Marampiau	199.528.000,00
	- Kel. Bina Muda Jaya - Desa Pantai Cabe	
	- KUB. Sungai Puyan - Desa Pabaungan Hulu	52.422.000,00
	- KUB. Tamba Keramat Jaya - Desa Pabaungan Hulu	
	- Kel. Rekan - Desa Gunung Batu	16.918.000,00
	- Kel. Ramania Besar - Ds.Pabaungan Pantai	99.885.000,00
	- Kel. Bina Karya Makmur - Ds. Papagan Makmur	103.000.000,00
	- Kel. Jaya Abadi - Desa Antasari	100.000.000,00
	- Kel. Penangkar Ikan Papadaan - Ds. Kambang Habang Lama	170.336.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	
	- BPK Darul Musthafa	250.000.000,00
9	Dinas Sosial	
	- LKSA Budi Taqwa	250.000.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	- Kel. Katana Binuang	295.519.500,00
	- Kel. Destana Margasari Hulu	149.794.500,00
	- Kel. Relawan TRT	49.950.000,00
11	Dinas Perhubungan	
	- Kepala Kepolisian Resor Tapin	1.641.356.000,00
12	Dinas Pertanian	
	- Perkebunan	5.287.538.958,00
	- Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	2.954.475.000,00
	- Peternakan	1.007.329.189,00
	- Prasarana dan Sarana Pertanian	16.254.009.517,00
13	Sekretariat Daerah	
	- Badan Amil Zakat Kab Tapin	850.000.000,00
	- MUI KAB TAPIN	800.000.000,00
	- PENGURUS CABANG NU KAB TAPIN	500.000.000,00
	- BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA	200.000.000,00
	- BADAN WAKAF INDONESIA KAB TAPIN	150.000.000,00
	- YAYASAN AT-TAQWA RANTAU	250.000.000,00
	- YAYASAN DARUL QUTHNI	75.000.000,00
	- YAYASAN ALMADANI TAPIN	70.000.000,00
	- YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL JAN	150.000.000,00
	- SIRAJUL MUNIR TAPIN	100.000.000,00
	- YAYASAN SULLAMUTTAFIQ	70.000.000,00
	- YAYASAN AL-MUKHLISHIN	70.000.000,00
	- BADAN AMIL ZAKAT KAB TAPIN	350.000.000,00
	- MUI KAB TAPIN	200.000.000,00
	- Kepengurusan LPTQ Kab. Tapin	1.045.000.000,00
	- LANGGAR DARUSSALAM	800.000.000,00
	- GROUP MAULID AL-HABSYI AL-IHSAN	45.000.000,00
	- PONDOK PESANTREN SITI KHADIJATUL KUBRA	3.600.000.000,00
	- TPA AL-IHYA	250.000.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama Penerima	Jumlah
	- LANGGAR NURUL AIN	80.000.000,00
	- DPC FKDT	50.000.000,00
	- PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA AZ-ZAHRA DESA SERAWI	300.000.000,00
	- DTA AZHARUL ULUM	100.000.000,00
	- MAJELIS TA'LIM HABIB ZEIN AL-HABSY	225.000.000,00
	- LANGGAR AL-KARAMAH	200.000.000,00
	- RUMAH TAHFIDZ AL-QUR'AN UMMUL QURA 'AMALIYAH	100.000.000,00
	- LANGGAR AT TAUBAH	100.000.000,00
	- PANITIA PEMBANGUNAN MESJID AS SALAAM TAM	3.000.000.000,00
	- KARANG TARUNA KAB TAPIN	350.000.000,00
	- LANGGAR HUSNUL KHATIMAH	160.000.000,00
	- PENGURUS RUKUN KEMATIAN IKHWANUL MUSLIMIN DESA SER	50.000.000,00
	- LANGGAR DARUSSALAM	75.000.000,00
	- RUKUN KEMATIAN NURUL FALAH DULANG	200.000.000,00
	- LANGGAR NURUL ISLAM	100.000.000,00
	- PANITIA MUSHOLLA ZAKIRIN	180.000.000,00
	- MUSHOLA AR-RAHMAN	100.000.000,00
	- MAULID AL HABSYI BABUSSALAM	30.000.000,00
	- PENGELOLA KUBURAN MUSLIMIN H. GAZALI	100.000.000,00
	- RUKUN KEMATIAN HUSNUL KHATIMAH	150.000.000,00
	- MASJID DARUL MUTTAQIN	150.000.000,00
	- MASJID JAMI DARUSSALAM	100.000.000,00
	- BADAN PENGELOLA MASJID RIADHUL JANNAH	100.000.000,00
	- PANITIA MASJID DARUL AMAN	220.000.000,00
	- MESJID DARUL FALAH	220.000.000,00
	- LANGGAR RAUDHATUL HASANAH	150.000.000,00
	- LANGGAR RAUDHATUL JANNAH	150.000.000,00
	- PANITIA MASJID RAHMATULLAH	75.000.000,00
	- MUSHOLA MIFTAHUL JANNAH	150.000.000,00
	- MADRASAH DINIYAH TAHDIRIYAH	75.000.000,00
	- MESJID AT-TAQWA	60.000.000,00
	- PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DA'WATUL HA	60.000.000,00
	- MASJID JAMIATUL KHAIR	60.000.000,00
	- MAJELIS TA'LIM DARUL MAHABBAH	50.000.000,00
	- IPQAH KAB.TAPIN	50.000.000,00
	- MAJLIS TA'LIM BURDATUL MUKHTAR	200.000.000,00
	- PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QUR'AN AT-TAZKIAH RANTAU	50.000.000,00
	- LANGGAR BAITURRAHMAN	100.000.000,00
	- LANGGAR HIDAYATUTTAQWA DESA BAGAK	75.000.000,00
	- MESJID JAMI AL WUSTHA	70.000.000,00
	- MAN 1 TAPIN	50.000.000,00
	- MUSHOLLA IBADURRAHMAN	100.000.000,00
	- LANGGAR AL-AMAN	150.000.000,00
	- LANGGAR NURUDDIN	100.000.000,00
	- MESJID KERAMAT AL MUKARROMAH	250.000.000,00
	- MUSHOLLA AR RAUDAH	400.000.000,00
	- MADRASAH DINIYAH DARUL MAGFIRAH	150.000.000,00
	- LANGGAR SYEKH SALMAN AL FARISI	30.000.000,00
	- GROUP MAULID HABSYI AL MUNAWARAH	50.000.000,00
	- PANITIA LANGGAR DARUSSALIHIN	100.000.000,00
	- MDTA SULLAMUL 'ULUM	100.000.000,00
	- MASJID BAITUNNUR	400.000.000,00
	- MUSHOLA AL IKHLAS	75.000.000,00

Bkk Pemkab Tapin Kalsel

No	Nama Penerima	Jumlah
	- LANGGAR DARUL HUDA	100.000.000,00
	- BADAN PENGELOLA LANGGAR DARUL AMAN	65.000.000,00
	- MASJID ASSHIDIQ	50.000.000,00
	- TPA DARUT THAYYIBAH	70.000.000,00
	- MAJELIS SHOLAWAT DAN DZIKIR AL-ISTIQOMAH	150.000.000,00
	- MUSHALLA DARUL IKHLAS	60.000.000,00
	- MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AW	60.000.000,00
	- SERIKAT KEMATIAN AL HIDAYAH	75.000.000,00
	- PENGELOLA LANGGAR DARUL HAMDI	50.000.000,00
	- GROUP MAULID AL-HABSYI AL-WUSTHA DESA SERAWI	33.000.000,00
	- GRUP MAULID HABSYI SULLAMUL ULUM	50.000.000,00
	- LANGGAR BABUSSALAM	50.000.000,00
	- MAJELIS TA'LIM BAITURRAHMAN	50.000.000,00
	- PONDOK PESANTREN MIFTAHUSSALAM	1.700.000.000,00
	- LANGGAR DARUL MUTAWADHI'IN	75.000.000,00
	- MESJID AL ISTIQLAL	150.000.000,00
	- MAJELIS TA'LIM AR RAYYAN	100.000.000,00
	- KHADIJATUL KHUBRA	50.000.000,00
	- PANITIA MASJID DARUS SALAMAH	150.000.000,00
	- MDTA NURUSSALAM DS BUNGUR	50.000.000,00
	- PANITIA PEMBANGUNAN TKA/TPA HIDAYATUL KHAIR UNIT 116	200.000.000,00
	- LANGGAR AR RAUDAH DESA BARINGIN A	100.000.000,00
	- MUSHOLA AL INAYAH	70.000.000,00
	- MADRASAH IBTIDAIYAH ABDAN SYAKURA	50.000.000,00
	- MASJID JAMI NURUL ISTIQAMAH	150.000.000,00
	- MASJID AL MUHAJIRIN	260.000.000,00
	- MIN 6 TAPIN	50.000.000,00
	- LANGGAR DARUL HIDAYAH	100.000.000,00
	- MADRASAH DINIYAH AWALIYAH NURUL JANNAH	100.000.000,00
	- MASJID BAITUL HUDA	100.000.000,00
	- MUSHOLLA DARUL FALLAH	75.000.000,00
	- LANGGAR AL KAWAKIB	22.500.000,00
	- PANITIA LANGGAR DARUL MUSTAGHFIRIN	75.000.000,00
	- MAJELIS TA'LIM DARUSSALAMAH	100.000.000,00
	- PENGELOLA KUBUR MUSLIMIN DESA BAKARANGAN RT.01	125.000.000,00
	- TPA BAHRURROHMAH	80.000.000,00
	- LANGGAR DARUL HUDA	60.000.000,00
	- MASJID JAMI AR-RAUDHAH	100.000.000,00
	- LANGGAR NURUL YAKIN	100.000.000,00
	- LANGGAR MISBAHUL MUNIR	100.000.000,00
	- TPA BAITUL HASANAH	100.000.000,00
	- LANGGAR AL MUNAWWAR	50.000.000,00
	- MAJELIS TA'LIM AL-LATHIF	75.000.000,00
	- RUKUN KEMATIAN MANDARAHAN	150.000.000,00
	Jumlah	**79.636.679.030,00**

Salinan Perwakilan Kalsel

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
21.321.200.000,00	**19.167.000.000,00**	**9.232.620.700,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp19.167.000.000,00 atau mencapai 89,90% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp21.321.200.000,00. Realisasi bantuan sosial tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 107,60% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.232.620.700,00. Adapun rincian belanja bantuan sosial tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.39
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	11.701.900.000,00	11.589.400.000,00	4.279.598.100,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.013.200.000,00	4.971.500.000,00	2.240.700.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	55.122.600,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	2.606.100.000,00	2.606.100.000,00	2.657.200.000,00
Jumlah		**21.321.200.000,00**	**19.167.000.000,00**	**9.232.620.700,00**

Realisasi belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp11.589.400.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.40
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun 2023

No	URAIAN	JUMLAH
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kemiskinan Ektrem/Lokus Stunting/Musrenbang/RTLH Diluar Kawasan Kumuh/RTLH Dikawasan Kumuh (404 Individu)	10.302.000.000,00
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (3 Individu)	76.500.000,00
	- Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat WC Individu (20 Individu)	200.000.000,00
2	Dinas Sosial	
	- Bantuan Sosial untuk Lansia	747.000.000,00
	- Bantuan sosial untuk Warga eks kusta	129.000.000,00
	- Bantuan sosial untuk Disabilitas Berat	50.400.000,00
	- Bantuan sosial untuk Disabilitas Terlantar	65.000.000,00
	- Bantuan sosial untuk Anak Terlantar	18.000.000,00
	- Bantuan sosial untuk Gepeng	1.500.000,00
JUMLAH		**11.589.400.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Tahun 2023 disalurkan melalui Dinas Sosial sebesar Rp4.971.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.41
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bantuan Sosial Tunai Inflasi (BST-Inflasi) untuk 2.848 KK	1.708.800.000,00
2	Bantuan Sosial Tunai Kemiskinan Ekstrem (BST-KE) untuk 4.661 Jiwa	3.262.700.000,00
Jumlah		**4.971.500.000,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Realisasi belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan adalah realisasi belanja bantuan sosial yang diberikan kepada Panti Asuhan di Kabupaten Tapin yang disalurkan melalui Dinas Sosial yang terdiri dari:

Tabel 5.1.42
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Tahun 2023

No	NAMA PANTI ASUHAN	JUMLAH
1	Panti Asuhan Budi Taqwa	248.200.000,00
2	Panti Asuhan Budi Akhlaqul Karimah	211.700.000,00
3	Panti Asuhan Mi'rajul Ulum	350.400.000,00
4	Panti Asuhan Miftahussalam	445.300.000,00
5	Panti Asuhan Budi Utomo	124.100.000,00
6	Panti Asuhan Izzul Hasan	605.900.000,00
7	Panti Asuhan Siti Khadijah	620.500.000,00
JUMLAH		**2.606.100.000,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
597.569.173.099,00	**331.009.561.591,45**	**483.199.477.506,00**

Belanja Modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp597.569.173.099,00 dan terealisasi sebesar Rp331.009.561.591,45 atau mencapai 55,39%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 menurun sebesar Rp152.189.915.914,55 atau mencapai 31,50% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp483.199.477.506,00. Dengan rincian Realisasi Belanja Modal 2023 terdiri dari:

Tabel 5.1.43
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	11.539.660.000,00	0,00	3.450.800.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.636.359.116,00	55.122.728.380,00	70.914.035.623,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.401.734.749,00	94.152.883.520,90	154.432.756.722,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	361.826.440.334,00	179.002.281.236,55	252.793.986.263,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.164.978.900,00	2.731.668.454,00	1.607.898.898,00
	Jumlah	**597.569.173.099,00**	**331.009.561.591,45**	**483.199.477.506,00**

Penjelasan masing-masing jenis Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
11.539.660.000,00	**0,00**	**3.450.800.000,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp 0,00 atau tidak ada realisasi dari yang telah dianggarkan untuk belanja modal tanah tahun 2023 sebesar Rp11.539.660.000,00. Realisasi belanja modal tanah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 100% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.450.800.000,00. Realisasi belanja modal tahun 2023 yang sudah dianggarkan terdiri dari:

Tabel 5.1.44
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Non Persil	89.660.000,00	0,00	3.450.800.000,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Lapangan	11.450.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**11.539.660.000,00**	**0,00**	**3.450.800.000,00**

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
73.636.359.116,00	**55.122.728.380,00**	**70.914.035.623,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.122.728.380,00 atau mencapai 74,86% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp73.636.359.116,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 22,27% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp70.914.035.623,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari APBD, BLUD, dan Dana BOS oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023, yang terdiri dari:

Tabel 5.1.45
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.139.600.000,00	1.898.220.000,00	1.786.400.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	1.388.048.892,00	200.435.416,00	1.457.785.600,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.251.213.226,00	4.043.819.500,00	3.189.397.200,00
4	Belanja Modal Alat Angkut Apung Bermotor	769.500.000,00	0,00	25.000.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tidak Bermesin	0,00	0,00	56.233.460,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	1.272.840.414,00	84.999.000,00	141.271.000,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	328.882.508,00	307.126.000,00	829.079.525,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	11.467.684.918,00	7.058.771.688,00	1.366.860.464,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.675.831.353,00	7.090.943.435,00	11.007.610.699,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.551.336.560,00	1.313.447.157,00	1.935.213.442,00
11	Belanja Modal Alat Studio	708.409.000,00	702.559.000,00	3.263.585.221,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	53.169.400,00	41.990.000,00	216.250.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	421.276.798,00	407.122.324,00	18.413.423.781,00
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	19.975.063.972,00	20.201.820.930,00	9.597.258.095,00
15	Belanja Modal Unit Laboratorium	45.359.346,00	44.849.550,00	262.541.680,00
16	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	70.704.964,00	53.025.000,00	262.639.841,00
17	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	517.294.833,00	260.674.450,00	744.554.000,00
18	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	323.503.160,00	109.867.334,00	33.450.000,00
19	Belanja Modal Komputer	13.145.582.614,00	10.083.136.746,00	14.167.759.765,00
20	Belanja Modal Alat Eksplorasi	129.257.000,00	127.643.650,00	96.899.000,00
21	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	142.106.640,00	142.106.000,00	0,00
22	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	48.479.900,00
23	Belanja Modal Alat Peraga	360.000.000,00	349.260.000,00	626.538.225,00
24	Belanja Modal Alat Rambu-Rambu	899.693.518,00	600.911.200,00	1.339.774.725,00
25	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	46.030.000,00
	Jumlah	**73.636.359.116,00**	**55.122.728.380,00**	**70.914.035.623,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
145.401.734.749,00	**94.152.883.520,90**	**154.432.756.722,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp94.152.883.520,90 atau mencapai 64,75% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp145.401.734.749,00. Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 39,03% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp154.432.756.722,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan gedung dan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023, berupa:

Tabel 5.1.46
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	145.051.734.749,00	94.003.842.420,90	153.538.305.722,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	350.000.000,00	149.041.100,00	724.851.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	169.600.000,00
	Jumlah	**145.401.734.749,00**	**94.152.883.520,90**	**154.432.756.722,00**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
361.826.440.334,00	**179.002.281.236,55**	**252.793.986.263,00**

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp179.002.281.236,55 atau mencapai 49,47% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp361.826.440.334,00. Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 29,19% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp252.793.986.263,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023, berupa:

Tabel 5.1.47
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja modal Jalan	203.800.930.937,00	83.849.080.437,55	174.165.262.741,00
2	Belanja modal Jembatan	65.907.056.485,00	26.301.644.016,00	25.368.156.948,00
3	Belanja modal Bangunan Air Irigasi	5.974.760.000,00	3.228.871.260,00	7.832.045.980,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	5.300.000.000,00	2.392.861.630,00	4.231.722.544,00
5	Belanja modal Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	37.475.000.000,00	25.400.723.462,00	21.205.213.550,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.309.565.000,00	1.290.000.000,00	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	961.500.000,00	905.000.000,00	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	831.856.000,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	10.170.553.000,00	10.028.823.000,00	12.031.565.000,00
10	Belanja modal Jaringan Listrik	30.927.074.912,00	25.605.277.431,00	7.128.163.500,00
	Jumlah	**361.826.440.334,00**	**179.002.281.236,55**	**252.793.986.263,00**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.164.978.900,00	**2.731.668.454,00**	**1.607.898.898,00**

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.731.668.454,00 atau mencapai 52,89% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp5.164.978.900,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 69,89% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.607.898.898,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya merupakan realisasi pengadaan/pembelian aset tetap lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Bpk Perwakilan Kalsel

Tabel 5.1.48
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan	401.109.100,00	216.175.225,00	1.501.527.898,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	577.165.800,00	507.239.459,00	100.050.000,00
3	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	6.321.000,00
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.186.704.000,00	2.008.253.770,00	0,00
	Jumlah	**5.164.978.900,00**	**2.731.668.454,00**	**1.607.898.898,00**

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
25.000.000.000,00	**8.943.655.185,00**	**14.038.372.812,00**

Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.943.655.185,00 atau mencapai 35,77%. Realisasi BTT Tahun 2023 menurun sebesar Rp5.094.717.627,00 atau mencapai 36,29% jika dibandingkan dengan realisasi BTT tahun lalu sebesar Rp14.038.372.812,00. Adapun Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga terdiri dari:

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah Kepada Pemerintah Desa	622.361.920,00	1.212.277.970,00
2	Pembayaran Penanganan Kasus ODGJ	160.078.592,00	6.956.814,00
3	Pembayaran dalam Rangka Pencegahan, Penanganan Gangguan Serta Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat & Ketertiban Umum	599.811.000,00	443.358.000,00
4	Pembayaran Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan & Lahan	734.733.000,00	0,00
5	Pengendalaian Dampak Inflasi Daerah	3.023.766.323,00	90.000.000,00
6	Pembayaran Jasa Insentif Vaksin Covid-19	2.187.000.000,00	0,00
7	Pembayaran dalam rangka Kejuaran Nasional *Rally* 2023 di Kab. Tapin	243.097.400,00	0,00
8	Pembayaran kegiatan Operasi Katarak bagi Lanjut Usia	32.104.050,00	0,00
9	Pembayaran perbaikan Madrasah Ibtida'iyah (MIN) 6 Tapin	150.000.000,00	0,00
10	Pembayaran dalam rangka kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ke Kabupaten Tapin	205.179.500,00	0,00
11	Pembayaran kegiatan siap siaga bencana dampak kemarau Panjang (ELNINO)	953.550.000,00	0,00
12	Pembayaran Bantuan Konsumsi dan Pembangunan Pos Pam dan Pos Yan	31.973.400,00	0,00
13	Pembayaran BANSOS Tidak Direncanakan	0,00	69.505.476,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
14	Pembayaran Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian Piutang DPM-LUEP	0,00	57.607.263,00
15	Pembayaran Provisi dan Keterlambatan Pemkab Tapin kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	0,00	131.249.019,00
16	Pembayaran Bimtek Penyusunan TPP tahun 2023	0,00	60.450.000,00
17	Pembayaran BTT Rumah Informasi Desa (Rumindes)	0,00	76.000.000,00
18	Pembayaran Belanja Pemindahan Gedung Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV	0,00	12.000.000,00
19	Penanganan Wabah Virus *Disease* 2019 (Covid-19)	0,00	11.878.968.270,00
	Jumlah	**8.943.655.185,00**	**14.038.372.812,00**

Dari Realisasi Belanja Tak Terduga untuk Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 sebesar Rp622.361.920,00 telah disalurkan ke beberapa desa dalam 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Tapin dengan rician sebagai berikut:

Tabel 5.1.50
Rincian Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023

No	URAIAN	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi
1	Desa pada Kec. Bakarangan	15.510.801,00	13.478.617,00
2	Desa pada Kec. Binuang	27.815.942,00	17.412.985,00
3	Desa pada Kec. Bungur	30.651.824,00	17.135.902,00
4	Desa pada Kec. Candi Laras Selatan	21.106.132,00	13.386.131,00
5	Desa pada Kec. Candi Laras Utara	58.873.123,00	21.287.966,00
6	Desa pada Kec. Hatungun	21.759.342,00	12.648.837,00
7	Desa pada Kec. Lokpaikat	27.230.130,00	13.227.000,00
8	Desa pada Kec. Piani	36.298.783,00	12.999.392,00
9	Desa pada Kec. Salam Babaris	0,00	17.049.068,00
10	Desa pada Kec. Tapin Selatan	96.351.935,00	21.950.319,00
11	Desa pada Kec. Tapin Tengah	94.065.173,00	32.122.518,00
JUMLAH		**429.663.185,00**	**192.698.735,00**

Dari Realisasi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalaian Dampak Inflasi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.023.766.323,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.51
Rincian Realisasi Pembayaran untuk Penanganan Pengendalaian Dampak Inflasi Tahun 2023

No	URAIAN	JUMLAH
1	Dinas Perdagangan	2.823.766.323,00
2	Dinas Perhubungan	200.000.000,00
JUMLAH		**3.023.766.323,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.2.4. Belanja Transfer

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
262.442.884.122,00	**200.359.018.851,00**	**165.138.350.896,50**

Realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp262.442.884.122,00 dan terealisasi sebesar Rp200.359.018.851,00 atau mencapai 76,34%. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 35.220.667.954,50 atau mencapai 21,33% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp165.138.350.896,50. Adapun Rincian Realisasi Belanja Transfer terdiri dari:

Tabel 5.1.52
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	2.833.070.000,00	2.830.448.193,00	2.519.839.550,50
2	Belanja Bantuan Keuangan	259.609.814.122,00	197.528.570.658,00	162.618.511.346,00
	Jumlah	**262.442.884.122,00**	**200.359.018.851,00**	**165.138.350.896,50**

Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada lampiran 2.1.

Penjelasan masing-masing transfer adalah sebagai berikut:

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.833.070.000,00	**2.830.448.193,00**	**2.519.839.550,50**

Realisasi Belanja Bagi Hasil selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.830.448.193,00 atau mencapai 99,91% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp2.833.070.000,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,33% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.519.839.550,50. Realisasi Belanja Bagi Hasil merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari:

Tabel 5.1.53
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	2.363.500.000,00	2.363.464.246,00	2.267.224.672,50
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	469.570.000,00	466.983.947,00	252.614.878,00
	Jumlah	**2.833.070.000,00**	**2.830.448.193,00**	**2.519.839.550,50**

Rincian Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada Lampiran 2.2.

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.2.4.1.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.363.500.000,00	**2.363.464.246,00**	**2.267.224.672,50**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.363.464.246,00 atau mencapai 100% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp2.363.500.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,24% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.267.224.672,50. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.

5.1.2.4.1.2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
469.570.000,00	**466.983.947,00**	**252.614.878,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp466.983.947,00 atau mencapai 99,45% dari anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp469.570.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 84,86% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp252.614.878,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2023 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
259.609.814.122,00	**197.528.570.658,00**	**162.618.511.346,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp197.528.570.658,00 atau mencapai 76,09% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp259.609.814.122,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 21,47% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp162.618.511.346,00 Realisasi tahun 2023 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari:

Tabel 5.1.54
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (DD)	0,00	97.150.986.586,00	93.075.636.760,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (ADD)	259.609.814.122,00	100.377.584.072,00	69.542.874.586,00
	Jumlah	**259.609.814.122,00**	**197.528.570.658,00**	**162.618.511.346,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (DD)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
0,00	**97.150.986.586,00**	**93.075.636.760,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp97.150.986.586,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,38% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp93.075.636.760,00.

5.1.2.4.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (ADD)

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
259.609.814.122,00	**100.377.584.072,00**	**69.542.874.586,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp100.377.584.072,00 atau mencapai 38,66% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp259.609.814.122,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 44,34% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp69.542.874.586,00.

5.1.3. Pembiayaan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
109.547.861.000,00	**152.877.428.456,53**	**155.262.062.552,10**

Struktur Pembiayaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Neto secara keseluruhan dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp109.547.861.000,00 dan terealisasi sebesar Rp152.877.428.456,53 mencapai 139,55%. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.384.634.095,57 atau mencapai 1,54% jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan neto tahun lalu sebesar Rp155.262.062.552,10. Adapun rincian terdiri dari:

Tabel 5.1.55
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	209.902.861.000,00	227.707.810.529,53	168.117.818.946,10
2	Pengeluaran Pembiayaan	(100.355.000.000,00)	(74.830.382.073,00)	(12.855.756.394,00)
Pembiayaan Neto		**109.547.861.000,00**	**152.877.428.456,53**	**155.262.062.552,10**

BPK Perwakilan Kalsel

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
209.902.861.000,00	**227.707.810.529,53**	**168.117.818.946,10**

Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar Rp209.902.861.000,00 dan terealisasi sebesar Rp227.707.810.529,53 atau mencapai 108,48%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 59.589.991.583,43 atau mencapai 35,45% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun lalu sebesar Rp168.117.818.946,10. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.56
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	208.402.861.000,00	227.687.810.529,53	132.792.517.161,10
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	35.304.861.744,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	20.000.000,00	20.440.041,00
	Jumlah	**209.902.861.000,00**	**227.707.810.529,53**	**168.117.818.946,10**

Penjelasan masing-masing jenis Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.3.1.1. Penggunaan SiLPA

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
208.402.861.000,00	**227.687.810.529,53**	**132.792.517.161,10**

Dalam tahun anggaran 2023 dianggarkan penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp208.402.861.000,00 dan realisasi penggunaannya sebesar Rp227.687.810.529,53 atau mencapai 109,25%. Realisasi pengunaan silpa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar mencapai 71,46% jika dibandingkan dengan realisasi pengunaan silpa tahun lalu sebesar Rp132.792.517.161,10.

5.1.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
0,00	**0,00**	**35.304.861.744,00**

Penerimaan pinjaman daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 100% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp35.304.861.744,00

Pada Tahun 2023 penerimaan pinjaman Kabupaten Tapin dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (BUMN) yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur yang diperuntukkan untuk pembangunan RSUD Baru di Kabupaten Tapin, telah berakhir pada tahun anggaran 2022

BPK Perwakilan Provinsi

yang lalu. Sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapin sudah tidak lagi realisasi penerimaan Pinjaman Daerah.

5.1.3.1.3. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.500.000.000,00	**20.000.000,00**	**20.440.041,00**

Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000,00 atau mencapai 1,33% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,15% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp20.440.041,00. Adapun Realisasi Tahun 2023 dan 2022 merupakan hasil penerimaan atas pemberian dana talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.57
Rincian Realisasi Penerimaan LUEP Tahun 2023 dan 2022

No	Tanggal	Uraian	Realisasi 2023 (RP)	Realisasi 2022 (Rp)
1	11-01-2022	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU	0,00	906.190,00
2	30-03-2022	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU	0,00	906.190,00
3	21-04-2022	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU	0,00	906.190,00
4	24-05-2022	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU	0,00	906.190,00
5	17-11-2022	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2014 an. H. Sibransyah LUEP PP AU	0,00	1.815.281,00
6	29-11-2023	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2015 an. Hj. Maisarah LUEP PP Berkat Hijrah	15.000.000,00	15.000.000,00
7	01-11-2023	Pengembalian Pinjaman Daerah DPM-LUEP Tahun 2015 an. Aberansyah LUEP PP Doa Ibu	5.000.000,00	0,00
Jumlah			**20.000.000,00**	**20.440.041,00**

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
100.355.000.000,00	**74.830.382.073,00**	**12.855.756.394,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp74.830.382.073,00 atau mencapai 74,57% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp100.355.000.000,00. Adapun rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 terdiri:

Tabel 5.1.58
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	15.999.219.061,00	0,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok UJT	68.855.000.000,00	58.831.163.012,00	12.855.756.394,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**100.355.000.000,00**	**74.830.382.073,00**	**12.855.756.394,00**

Realisasi Penyertaan Modal Tahun 2023 sebesar Rp15.999.219.061,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PT Bank Pembangunann Daerah Kalimantan Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
Dan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp58.831.163.012,00 merupakan pembayaran kewajiban pokok pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapin kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atas pembangunan RSUD baru di Kabupaten Tapin.

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
0,00	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.208.637.231,20 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.1.59
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan-LRA	1.568.178.825.031,12	1.717.931.600.070,93
Belanja	(1.717.847.616.256,45)	(1.645.505.852.093,50)
Surplus/(Defisit)	**(149.668.791.225,33)**	**72.425.747.977,43**
Penerimaan Pembiayaan	227.707.810.529,53	168.117.818.946,10
Pengeluaran Pembiayaan	(74.830.382.073,00)	(12.855.756.394,00)
Pembiayaan Netto	**152.877.428.456,53**	**155.262.062.552,10**
SiLPA Tahun Berjalan	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**

SiLPA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.208.637.231,20 dan Rp 227.687.810.529,53 terdiri dari:

Tabel 5.1.60
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Kas di Kasda (a+b)	362.218.868,43	208.402.861.001,83
	a. RKUD Bank Kalsel (PAD dan Penerimaan Lainnya)	171.103.996,02	20.361.890.249,75
	b. RKUD Bank Kalsel (DAU)	191.114.872,41	188.040.970.752,08
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di BLUD	391.374.384,77	18.779.154.443,70
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	473.438.575,00	319.824.928,00
5	Kas Dana BOSP	260.205.719,00	185.970.156,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.721.399.684,00	0,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas (1+2+3+4+5)	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**

Pada Kas di Kasda per 31 Desember 2023 sebesar Rp362.218.868,43 terdapat dana yang akan ditentukan alokasi pemanfaatannya ditahun berikutnya.

BPK Perwakilan Kalsel

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
227.687.810.529,53	**132.792.517.161,10**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp227.687.810.529,53.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
227.687.810.529,53	**132.792.517.161,10**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp227.687.810.529,53.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.208.637.231,00	**227.687.810.529,53**

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp3.208.637.231,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Surplus/Defisit Anggaran	(149.668.791.225,33)	72.425.747.977,43
Pembiayaan Netto	152.877.428.456,53	155.262.062.552,10
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.208.637.231,20	**227.687.810.529,53**

BPK Perwakilan Kalse

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp3.208.637.231,20 dan Tahun 2022 sebesar Rp227.687.810.529,53 merupakan nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2

Kas Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	362.218.868.43	208.402.861.001,83
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	260.205.719,00	185.970.156,00
Kas di BLUD	391.374.384,77	18.779.154.443,70
Kas di Bendahara FKTP	2.194.838.259,00	319.824.928,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**

BPK Perwakilan Kalsel

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. Aset Lancar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
97.409.554.240,30	**337.293.331.212,86**

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp97.409.554.240,30 dan Rp337.293.331.212,86. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 turun sebesar Rp239.883.776.972,56 atau sebesar 246,26% dari Saldo Aset lancar per 31 Desember 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Aset Lancar tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas dan Bank	3.208.637.231,20	227.687.810.529,53
3	Piutang	72.022.433.647,60	108.658.766.493,12
4	Penyisihan Piutang	(12.516.107.634,12)	(15.211.873.738,31)
5	Persediaan	34.694.590.995,62	16.158.627.928,52
Jumlah		**97.409.554.240,30**	**337.293.331.212,86**

BMK Perwakilan Kalsel

Kas dan Bank

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.208.637.231,20 dan Rp227.687.810.529,53 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas di Bendahara FKTP rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Kas Setara Kas tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	362.218.868,43	208.402.861.001,83
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	391.374.384,77	18.779.154.443,70
5	Kas Dana BOSP	260.205.719,00	185.970.156,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.194.838.259,00	319.824.928,00
7	Kas Lainnya	0,00	0,00
8	Setara Kas	0,00	0,00
	Jumlah	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**

5.3.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
362.218.868,43	**208.402.861.001,83**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp362.218.868,43 dan Rp208.402.861.001,83. Rincian saldo Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Rekening	Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Rekening Giro Bank Kalsel	Kasda PAD dan Penerimaan Lainya	006.00.03.00001.7	171.103.996,02	20.361.890.249,75
2	Rekening Giro Bank Kalsel	RKUD Kab. Tapin	006.00.03.00003.9	191.114.872,41	188.040.970.752,08
Jumlah				**362.218.868,43**	**208.402.861.001,83**

Pada saldo per 31 Desember 2023 terdapat selisih antara Kas di Kasda (PAD dan Penerimaan Lainnya) dengan rekening koran sebesar Rp243.243 disebabkan kesalahan setor oleh pihak Bank Kalsel yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Desa Bitahan Baru.

5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 pada 45 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

5.3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 pada 45 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

5.3.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
391.374.384,77	**18.779.154.443,70**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp391.374.384,77 dan Rp18.779.154.443,70 merupakan saldo kas pada

BPK Perwakilan Kalsel

BLUD RSUD Datu Sanggul. Rincian saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas di BLUD tahun 2023 dan 2022

No	Jenis dan Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bank Mandiri – Bend. Penerimaan RSUD	031-00-5544556-6	192.354.916,07	9.352.693.552,87
2	Bank Mandiri – Bendahara Pengeluaran	031-00-4455665-5	1.987.271,17	1.466.387,72
3	Bank Mandiri – BLUD RSU Datu Sanggul Rantau	006.00.05.00001.1	197.032.197,53	9.424.994.503,11
Saldo Kas di Bendahara BLUD			**391.374.384,77**	**18.779.154.443,70**

Rincian mutasi Kas di BLUD terdapat pada Lampiran 3.

5.3.1.5. Kas Dana BOSP

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
260.205.719,00	**185.970.156,00**

Kas Di Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp260.205.719,00 dan Rp185.970.156,00. Kas di Bendahara BOSP terdiri dari Kas dana BOS dan Kas dana BOP. Kas dana BOS merupakan saldo Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat yang berada pada rekening Bendahara BOS pada 197 sekolah terdiri dari 175 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 22 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Kas dana BOP merupakan saldo Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP) dari Pemerintah Pusat yang berada pada rekening Bendahara BOP terdiri dari 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 9 sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.5
Kas BOS dan BOP tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas dana BOS	260.015.719,00	185.780.156,00
2	Kas dana BOP	190.000,00	190.000,00
	Jumlah	**260.205.719,00**	**185.970.156,00**

Rincian Kas di Bendahara BOS dan BOP pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2.

5.3.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.194.838.259,00	**319.824.928,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.194.838.259,00 dan Rp319.824.928,00. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Kas Dana FKTP dan BOK tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	473.438.575,00	319.824.928,00
2	Kas Dana BOK Puskesmas	1.721.399.684,00	0,00
	Jumlah	**2.194.838.259,00**	**319.824.928,00**

5.3.1.6.1. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp473.438.575,00 dan Rp319.824.928,00. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 pada 13 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 dan 2022

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
		BNI		
1	Puskesmas Tapin Utara	345077845	94.799.427,00	1.111.436,00
2	Puskesmas Binuang	344939540	74.296.177,00	55.160,00
3	Puskesmas Hatungun	344922162	71.372.424,00	3.812.975,00
4	Puskesmas Tambarangan	345081998	33.851.136,00	7.663.376,00
5	Puskesmas Salam Babaris	345050652	29.880.577,00	1.069.770,00
6	Puskesmas Banua Padang	344926280	32.608.765,00	9.603.045,00
7	Puskesmas Bakarangan	344933117	62.069.106,00	82.443.890,00
8	Puskesmas Pandahan	345071616	1.092.553,00	4.889.086,00
9	Puskesmas Tambaruntung	345577485	1.060.817,00	96.432.623,00
10	Puskesmas Baringin	345089953	38.535.074,00	96.853.261,00
11	Puskesmas Margasari	345092467	1.017.468,00	2.182.201,00
12	Puskesmas Lokpaikat	345067962	10.639.488,00	1.028.003,00
13	Puskesmas Piani	344901425	22.215.563,00	12.680.102,00
Jumlah			**473.438.575,00**	**319.824.928,00**

Rincian mutasi Kas di Bendahara FKTP terdapat pada Lampiran 5.1.

5.3.1.6.2. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.721.399.684,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 pada 13 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.8
Kas Dana BOK tahun 2023 dan 2022

No	Nama Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
		BNI		
1	Puskesmas Tapin Utara	1589990384	291.314.894,00	0,00
2	Puskesmas Bakarangan	1589990328	121.336.342,00	0,00
3	Puskesmas Banua Padang	1589990351	145.495.400,00	0,00
4	PuskesmasTambaruntung	1589990293	53.642.509,00	0,00
5	PuskesmasPandahan	1589990259	94.533.237,00	0,00
6	Puskesmas Lokpaikat	1589990306	150.042.299,00	0,00
7	Puskesmas Tambarangan	1589990362	250.217.635,00	0,00
8	Puskesmas Salam Babaris	1589990260	85.579.990,00	0,00
9	Puskesmas Piani	1589990271	58.741.605,00	0,00
10	Puskesmas Binuang	1589990373	153.907.346,00	0,00
11	Puskesmas Hatungun	1589990282	73.063.149,00	0,00
12	Puskesmas Baringin	1589990340	154.443.703,00	0,00
13	Puskesmas Margasari	1589990339	89.081.575,00	0,00
Jumlah			**1.721.399.684,00**	**0,00**

Rincian mutasi Kas di Bendahara BOK terdapat pada Lampiran 5.2.

5.3.1.7. Kas Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Kas lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.8. Setara Kas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.9. Piutang Pajak

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
12.767.480.363,00	**16.596.951.247,00**

Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.767.480.363,00 dan Rp16.596.951.247,00 yang terdiri dari:

BPK Perwakilan Kalsel

5.3.1.9.1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
12.767.480.363,00	**16.596.951.247,00**

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp12.767.480.363,00 dan Rp16.596.951.247,00. Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Piutang PBB 2023 dan 2022

Saldo Awal Tahun 2023 (Rp)	Penetapan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)		Penghapusan Piutang (Rp)	Penerimaan Kembali Piutang yg Telah Dihapuskan	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
		Piutang Tahun 2022 dan tahun sebelumnya	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7=(1+2)-(3+4)-5+6
16.596.951.247,00	2.210.895.669,00	583.328.704,00	863.684.347,00	4.594.520.540,00	1.167.038,00	12.767.480.363,00

Pada tahun 2023 mutasi penambah diperoleh dari penetapan tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk mutasi pengurang terdiri dari realisasi pembayaran PBB tahun 2023 dan piutang tahun 2022 sampai 2022 serta penghapusan piutang PBB. Penghapusan piutang tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/063/KUM/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluwarsa Secara Bersyarat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp4.594.520.540,00.

Untuk Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp12.767.480.363,00 dan Rp16.596.951.247,00 merupakan saldo Piutang dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Rincian Saldo Piutang PBB tahun 1994 sampai 2023

No	Tahun	Saldo Piutang PBB 2023 (Rp)	Saldo Piutang PBB 2022 (Rp)
1	1994	0,00	6.498.723,00
2	1995	0,00	14.076.258,00
3	1996	0,00	17.913.052,00
4	1997	0,00	12.509.825,00
5	1998	0,00	18.957.634,00
6	1999	0,00	24.115.319,00
7	2000	0,00	23.865.306,00
8	2001	0,00	21.920.276,00
9	2002	0,00	7.476.901,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Tahun	Saldo Piutang PBB 2023 (Rp)	Saldo Piutang PBB 2022 (Rp)
10	2003	0,00	59.247.237,00
11	2004	0,00	180.609.651,00
12	2005	0,00	476.510,00
13	2006	0,00	416.590.919,00
14	2007	0,00	95.926.473,00
15	2008	0,00	856.983.113,00
16	2009	0,00	857.931.804,00
17	2010	0,00	955.153.595,00
18	2011	0,00	1.024.267.944,00
19	2012	1.008.970.714,00	1.076.664.294,00
20	2013	903.540.342,00	971.761.416,00
21	2014	633.016.592,00	676.269.811,00
22	2015	907.635.071,00	955.373.661,00
23	2016	888.607.254,00	925.149.021,00
24	2017	1.096.088.635,00	1.135.714.305,00
25	2018	1.147.133.494,00	1.189.519.068,00
26	2019	1.184.659.290,00	1.228.744.548,00
27	2020	1.178.935.398,00	1.231.542.892,00
28	2021	1.222.942.754,00	1.290.350.322,00
29	2022	1.248.739.497,00	1.321.341.369,00
30	2023	1.347.211.322,00	0,00
Total		**12.767.480.363,00**	**16.596.951.247,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.3.1.10. Penyisihan Piutang Pajak

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(7.447.126.980,71)	**(11.235.523.731,75)**

Dari Piutang Pajak Tahun 2023 sebesar 12.767.480.363,00 diperoleh penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp7.447.126.980,71 sehingga nilai Piutang Pajak setelah penyisihan adalah sebesar Rp5.320.353.382,29. Rincian Penyisihan Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Saldo Piutang PBB Netto tahun 2023

No	Uraian	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak (Rp)	Piutang Pajak Netto (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5 = 3+4**
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	12.767.480.363,00	(7.447.126.980,71)	5.320.353.382,29
Jumlah		**12.767.480.363,00**	**(7.447.126.980,71)**	**5.320.353.382,29**

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Penyisihan Piutang PBB tahun 2023

Tahun Piutang	Nilai Piutang	Kualitas Piutang				Piutang Netto
		Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
		(P<1 th)	(1 th<P<2 th)	(2 th<P<5 th)	(5 th<P)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 - (3+4+5+6)
2012	1.008.970.714,00	0,00	0,00	0,00	1.008.970.714,00	0,00
2013	903.540.342,00	0,00	0,00	0,00	903.540.342,00	0,00
2014	633.016.592,00	0,00	0,00	0,00	633.016.592,00	0,00
2015	907.635.071,00	0,00	0,00	0,00	907.635.071,00	0,00
2016	888.607.254,00	0,00	0,00	0,00	888.607.254,00	0,00
2017	1.096.088.635,00	0,00	0,00	0,00	1.096.088.635,00	0,00
2018	1.147.133.494,00	0,00	0,00	573.566.747,00	0,00	573.566.747,00
2019	1.184.659.290,00	0,00	0,00	592.329.645,00	0,00	592.329.645,00
2020	1.178.935.398,00	0,00	0,00	589.467.699,00	0,00	589.467.699,00
2021	1.222.942.754,00	0,00	122.294.275,40	0,00	0,00	1.100.648.478,60
2022	1.248.739.497,00	0,00	124.873.949,70	0,00	0,00	1.123.865.547,30
2023	1.347.211.322,00	6.736.056,61	0,00	0,00	0,00	1.340.475.265,39
Jumlah	**12.767.480.363,00**	**6.736.056,61**	**247.168.225,10**	**1.755.364.091,00**	**5.437.858.608,00**	**5.320.353.382,29**

BPK Perwakilan Kalsel

5.3.1.11. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.513.104.069,00	**4.442.091.510,00**

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.513.104.069,00 dan Rp4.442.091.510,00 merupakan tunggakan Wajib Retribusi Daerah (WRD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Piutang Retribusi tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Retribusi Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko	5.258.087.401,00	4.175.505.842,00
2	Retribusi Sewa Rumah Dinas	255.016.668,00	266.585.668,00
Jumlah		**5.513.104.069,00**	**4.442.091.510,00**

Penjelasan masing-masing Piutang adalah sebagai berikut:

5.3.1.11.1. Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.258.087.401,00	**4.175.505.842,00**

Saldo Piutang Retribusi Sewa Kios/Sewa Toko per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.258.087.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko Neto tahun 2023

Saldo Awal Tahun 2023	Penetapan Tahun 2023	Realisasi		Saldo Akhir Tahun 2023
		Tahun 2023	Piutang Tahun 2022 dan tahun sebelumnya	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 = 1+2-3-4
4.175.505.842,00	2.066.074.200,00	697.648.415,00	285.844.226	5.258.087.401,00

5.3.1.11.2. Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
255.016.668,00	**266.585.668,00**

Saldo Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp255.016.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.15
Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah tahun 2023

Saldo Awal Tahun 2023	Penetapan Tahun 2023	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2023
		Tahun 2023	Piutang Tahun 2022 dan tahun sebelumnya	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 = 1+2-3-4
266.585.668,00	145.800.000,00	142.475.000,00	14.894.000,00	255.016.668,00

5.3.1.12. Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(4.580.423.064,55)	**(3.485.174.264,37)**

BPK Perwakilan Kalsel

Dari Piutang Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp5.513.104.069,00 dapat diperoleh Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp4.580.423.064,55 sehingga nilai piutang setelah penyisihan adalah sebesar Rp932.681.004,45. Rincian dari Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
Piutang Retribusi Netto tahun 2023

No	Uraian	Piutang Retribusi	Penyisihan Piutang Retribusi	Piutang Retribusi Netto
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Retribusi Sewa Kios Pasar/sewa toko	5.258.087.401,00	(4.340.100.771,55)	917.986.629,45
2	Retribusi Sewa Rumah Dinas	255.016.668,00	(240.322.293,00)	14.694.375,00
Jumlah		**5.513.104.069,00**	**(4.580.423.064,55)**	**932.681.004,45**

Untuk masing-masing Penyisihan Piutang Retribusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko

Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Toko/Sewa Kios Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5.3.17
Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar/Sewa Toko tahun 2023

Tahun Piutang	Nilai Piutang	Kualitas Piutang				Piutang Netto
		Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
		(P<1 Bln)	(1 Bln<P<3 Bln)	(3 Bln<P<12 Bln)	(12 Bln<P)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	(Rp)	0,50%	10%	50%	100%	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 2-(3+4+5+6)
2012	67.305.000,00	0,00	0,00	0,00	67.305.000,00	0,00
2013	102.845.000,00	0,00	0,00	0,00	102.845.000,00	0,00
2014	142.970.000,00	0,00	0,00	0,00	142.970.000,00	0,00
2015	226.645.000,00	0,00	0,00	0,00	226.645.000,00	0,00
2016	304.350.000,00	0,00	0,00	0,00	304.350.000,00	0,00
2017	359.265.000,00	0,00	0,00	0,00	359.265.000,00	0,00
2018	399.135.000,00	0,00	0,00	0,00	399.135.000,00	0,00
2019	348.770.000,00	0,00	0,00	0,00	348.770.000,00	0,00
2020	345.990.000,00	0,00	0,00	0,00	345.990.000,00	0,00
2021	417.970.000,00	0,00	0,00	0,00	417.970.000,00	0,00
2022	1.174.416.616,00	0,00	0,00	0,00	1.174.416.616,00	0,00
2023	1.368.425.785,00	1.358.003,15	24.832.856,40	424.248.296,00	0,00	917.986.629,46
Jumlah	**5.258.087.401,00**	**1.358.003,15**	**24.832.856,40**	**424.248.296,00**	**3.889.661.616,00**	**917.986.629,46**

BPK Perwakilan Kalsel

b. **Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah**

Penyisihan Piutang Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.18
Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas dan Tanah Daerah tahun 2023

Tahun Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang				Piutang Netto (Rp)
		Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
		(P < 1 Bln)	(1 Bln<P<3 Bln) (Rp)	(3 Bln<P<12 Bln)	(12 Bln<P)	
		(Rp)		(Rp)	(Rp)	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 - (3+4+5+6)
2009	25.553.400,00	0,00	0,00	0,00	25.553.400,00	0,00
2010	9.011.730,00	0,00	0,00	0,00	9.011.730,00	0,00
2011	16.895.320,00	0,00	0,00	0,00	16.895.320,00	0,00
2012	18.843.938,00	0,00	0,00	0,00	18.843.938,00	0,00
2013	22.727.760,00	0,00	0,00	0,00	22.727.760,00	0,00
2014	25.165.780,00	0,00	0,00	0,00	25.165.780,00	0,00
2015	23.717.640,00	0,00	0,00	0,00	23.717.640,00	0,00
2016	21.807.120,00	0,00	0,00	0,00	21.807.120,00	0,00
2017	4.947.120,00	0,00	0,00	0,00	4.947.120,00	0,00
2018	7.028.120,00	0,00	0,00	0,00	7.028.120,00	0,00
2019	6.159.120,00	0,00	0,00	0,00	6.159.120,00	0,00
2020	7.611.120,00	0,00	0,00	0,00	7.611.120,00	0,00
2021	39.451.500,00	0,00	0,00	0,00	39.451.500,00	0,00
2022	22.772.000,00	0,00	0,00	11.386.000,00	0,00	11.386.000,00
2023	3.325.000,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	3.308.375,00
Jumlah	**255.016.668,00**	**16.625,00**	**0,00**	**11.386.000,00**	**228.919.668,00**	**14.694.375,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.3.1.13. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.937.054.496,00	**3.124.024.698,00**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.937.054.496,00 dan Rp3.124.024.698,00 merupakan Piutang Pelayanan BLUD pada RSUD Datu Sanggul. Rincian Piutang Pelayanan BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.3.19
Daftar Rincian Piutang BLUD tahun 2023

No	Uraian	Saldo Awal Tahun 2023	Penetapan Tahun 2023	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)	Tahun 2023	Piutang Tahun 2022	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4) - (5+6)
1	PT. Hasnur Riung Sinergi (BRE)	19.337.772,00	12.724.396,00	6.464.356,00	19.337.772,00	6.260.040,00
2	PT. Hasnur Riung Sinergi (EBL)	0,00	4.624.665,00	1.550.951,00	0,00	3.073.714,00
3	PT. Hasnur Riung Sinergi (AGM)	3.039.793,00	16.273.443,00	10.004.911,00	3.039.793,00	6.268.532,00
4	PT. Kalimantan Prima Persada	21.003.164,00	48.903.096,00	42.985.865,00	21.003.164,00	5.917.231,00
5	PT. Trakindo Utama	12.807.341,00	28.148.613,00	16.707.912,00	12.807.341,00	11.440.701,00
6	PT. Cipta Kridatama	51.649.094,00	237.829.141,00	142.928.298,00	51.649.094,00	94.900.843,00
7	BPJS	2.948.938.900,00	45.396.290.474,00	41.680.640.290,00	2.948.938.900,00	3.715.650.184,00
8	BPJS (Covid-19)	43.139.000,00	0,00	0,00	43.139.000,00	0,00
9	PT. Adhi Luthfiatama	18.778.884,00	0,00	0,00	0,00	18.778.884,00
10	PT. Jasa Raharja (Persero)	0,00	13.449.344,00	0,00	0,00	13.449.344,00
11	BPJS Ketenaga Kerjaan	5.330.750,00	80.159.329,00	18.844.306,00	5.330.750,00	61.315.023,00
	Jumlah	**3.124.024.698,00**	**45.838.402.501,00**	**41.920.126.889,00**	**3.105.245.814,00**	**3.937.054.496,00**

BPK Perwakilan Kaltara

5.3.1.14. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(28.101.458,86)	**(16.581.189,19)**

Penyisihan Piutang Pelayanan BLUD Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5.3.20
Rincian Penysihan Piutang BLUD tahun 2023

Tahun Piutang	Nilai Piutang	Kualitas Piutang				Piutang Netto
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		(P<Tgl Jatuh Tempo)	(1 Bln Surat Tagihan ke-1<P)	1 Bln Surat Tagihan ke-2<P)	(1 Bln Surat Tagihan ke-3<P)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 2- (3+4+5+6)
2021	16.580.481,00	0,00	0,00	8.290.240,50	0,00	8.290.240,50
2022	2.198.403,00	0,00	219.840,30	0,00	0,00	1.978.562,70
2023	3.918.275.612,00	19.591.378,06	0,00	0,00	0,00	3.898.684.233,94
Jumlah	**3.937.054.496,00**	**19.591.378,06**	**219.840,30**	**8.290.240,50**	**0,00**	**3.908.953.037,14**

5.3.1.15. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.815,00	**37.241.117.750,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.815,00 dan Rp37.241.117.750,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2023 adalah Rp0 sesuai dengan KMK NO.38 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Daftar Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Bagi Hasil	Piutang Dana Transfer Tahun 2023 (Rp)	Piutang Dana Transfer Tahun 2022(Rp)
1	DBH PBB	731,00	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	135,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	348,00	0,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	810,00	9.810,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	645,00	0,00
6	DBH SDA Mineral dan Batubara	922,00	37.160.322.440,00
7	DBH SDA Kehutanan	1.224,00	80.785.500,00
Jumlah		**4.815,00**	**37.241.117.750,00**

5.3.1.16. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
48.081.304.903,60	**46.683.411.735,12**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp48.081.304.903,60 dan Rp46.683.411.735,12 merupakan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun berjalan namun sampai dengan per 31 Desember 2023 belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.22
Daftar Rincian Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2023

Jenis Bagi Hasil	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penetapan Tahun 2023	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2023
	(Rp)		(Rp)	Tahun 2023	Piutang 2022	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(2+3+4)-(5+6)
DBH Pajak Kendaraan Bermotor	3.259.167.017,55	0,00	11.198.478.413,72	8.223.294.522,00	3.259.167.018,00	2.975.183.891,27
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.312.760.392,01	0,00	13.140.597.404,06	10.016.146.414,00	3.312.760.392,00	3.124.450.990,07

BPK Perwakilan Kalsel

Jenis Bagi Hasil	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penetapan Tahun 2023	Realisasi (Rp)		Saldo Akhir Tahun 2023
	(Rp)		(Rp)	Tahun 2023	Piutang 2022	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(2+3+4)-(5+6)
117DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.532.554.517,40	0,00	117.886.941.894,40	78.220.004.039,00	37.532.554.517,00	39.666.937.855,80
DBH Pajak Air Permukaan (AP)	162.046.018,16	0,00	585.481.650,30	455.928.919,00	162.046.018,00	129.552.731,46
DBH Pajak Rokok	2.416.883.790,00	1.868.694.475,00	11.047.690.718,00	8.862.511.283,00	4.285.578.265,00	2.185.179.435,00
Jumlah	**46.683.411.735,12**	**1.868.694.475,00**	**153.859.190.080,48**	**105.777.885.177,00**	**48.552.106.210,00**	**48.081.304.903,60**

5.3.1.17. Piutang Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.723.485.001,00	**571.169.553,00**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.723.485.001,00 dan Rp571.169.553,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.23
Daftar Piutang Lainnya tahun 2023 dan 2022

No	Jenis Piutang	Piutang Lainnya Tahun 2023	Piutang Lainnya Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	551.169.553,00	571.169.553,00
2	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	1.172.315.448,00	0,00
Jumlah		1.723.485.001,00	571.169.553,00

5.3.1.17.1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
551.169.553,00	**571.169.553,00**

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat merupakan saldo piutang kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) atas pemberian Dana Talangan sebagai Dana Penguatan Modal. Rincian atas saldo Piutang kepada LUEP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.24
Daftar Rincian Piutang LUEP tahun 2023

No	Uraian	Pokok Piutang (Rp)	Denda (Rp)	Realisasi 2023	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5	7
1	PP Bina Usaha	26.368.636,00	0,00	0,00	26.368.636,00	Diserahkan ke KPKNL
2	PP AU	92.719.917,00	6.930.000,00	0,00	99.649.917,00	Diserahkan ke KPKNL
3	PP Doa Ibu	148.925.000,00	9.076.000,00	5.000.000,00	153.001.000,00	
4	PP Berkat Hijrah	94.000.000,00	0,00	15.000.000,00	79.000.000,00	
5	PP UD Surya	150.000.000,00	7.450.000,00	0,00	157.450.000,00	
6	PP Akhmad	34.000.000,00	1.700.000,00	0,00	35.700.000,00	
Jumlah		**546.013.553,00**	**25.156.000,00**	**20.000.000,00**	**551.169.553,00**	

Rincian saldo akhir Piutang kepada LUEP Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari Saldo Piutang kepada LUEP Tahun 2023 sebesar Rp551.169.553,00 termasuk nilai Piutang yang diserahkan ke KPKNL sebesar Rp126.018.533,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.25
Daftar Piutang yang diserahkan ke KPKNL

No	Nama LUEP	Tanggal Penyerahan	Nilai (Rp)	Alasan
1	PP Bina Usaha	18 Oktober 2010	26.368.636,00	Sesuai dengan SPK, Pasal 6 ayat (2) bahwa apabila dalam waktu yang telah ditetapkan debitur tidak mengembalikan pinjamannya maka agunan akan diserahkan ke KPKNL untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
2	PP AU	13 Juni 2016	99.649.917,00	
Jumlah			**126.018.553,00**	

5.3.1.17.2. Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.172.315.448,00	**0,00**

Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa merupakan saldo piutang kepada pihak ketiga atas pembayaran uang muka Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.172.315.448,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa tahun 2023 adalah saldo piutang uang muka dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.18. Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(460.456.130,00)	**(474.594.553,00)**

BPK Perwakilan Kalsel

Dari nilai Piutang Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp1.723.485.001,00 dapat diperoleh Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp460.456.130,00 sehingga nilai Piutang Lainnya setelah penyisihan adalah sebesar Rp1.263.028.871,00. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya yaitu:

Tabel 5.3.26
Piutang Lainnya Netto tahun 2023

No	Uraian	Piutang lainnya (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya (Rp)	Piutang Lainnya Netto (Rp)
1	Piutang Kepada LUEP	551.169.553,00	(454.594.553,00)	96.575.000,00
2	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	1.172.315.448,00	(5.861.577,00)	1.166.453.871,00
Jumlah		**1.723.485.001,00**	**(460.456.130,00)**	**1.263.028.871,00**

Penyisihan Piutang Kepada LUEP Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5.3.27
Penyisihan Piutang LUEP tahun 2023

Tahun Piutang	Nilai Piutang	Kualitas Piutang				Piutang Netto
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		(P<Tgl Jatuh Tempo)	(1 Bln Surat Tagihan ke-1<P)	1 Bln Surat Tagihan ke-2<P)	(1 Bln Surat Tagihan ke-3<P)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	(Rp)	0,50%	10%	50%	100%	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 2+3+4+5+6
2009	26.368.636,00	0,00	0,00	0,00	(26.368.636,00)	0,00
2014	99.649.917,00	0,00	0,00	0,00	(99.649.917,00)	0,00
2015	232.001.000,00	0,00	0,00	0,00	(232.001.000,00)	0,00
2019	193.150.000,00	0,00	0,00	(96.575.000,00)	0,00	96.575.000,00
Jumlah	**551.169.553,00**	**0,00**	**0,00**	**(96.575.000,00)**	**(358.019.553,00)**	**96.575.000,00**

Rincian Piutang dapat dilihat pada Lampiran 6.1 dan rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada lampiran 6.2.

5.3.1.19. Persediaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
34.694.590.995,62	**16.158.627.928,52**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp34.694.590.995,62 dan Rp16.158.627.928,52 terdiri dari persediaan yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan persediaan yang diperoleh untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.28
Daftar Persediaan tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	**Barang atau Perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah**		
	Alat Tulis Kantor	533.267.943,00	541.694.700,00
	Kertas dan Cover	19.049.917,00	0,00
	Benda Pos, Cukai, Karcis,	0,00	19.197.000,00
	Bahan Cetak	133.161.428,00	71.965.098,00
	Bahan Komputer	10.438.716,00	0,00
	Obat/Alat Kesehatan Habis Pakai	1.949.850,00	4.290.000,00
	Bahan Kimia	164.774.517,00	69.064.368,00
	Lainnya	113.827.615,00	1.178.167.553,00
	Sub Jumlah 1	**976.469.986,00**	**1.884.378.719,00**
2	**Persediaan yang diperoleh untuk dijual atau diserahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan**		
	Obat/Alkes Habis Pakai	9.585.150.649,62	13.573.283.118,52
	Bahan Kimia	124.358.500,00	0,00
	Bibit Ternak/Tanaman	91.130.000,00	328.505.305,00
	Lainnya	23.500.265.183,00	269.391.286,00
	Sub Jumlah 2	**33.300.904.332,62**	**14.171.179.709,52**
3	**Persediaan yang digunakan dalam proses produksi**		
	Pupuk, Obat-obatan untuk Tanaman	417.216.677,00	103.069.500,00
	Sub Jumlah 3	**417.216.677,00**	**103.069.500,00**
Jumlah		**34.694.590.995,62**	**16.158.627.928,52**

BPK Perwakilan Kalsel

Dari nilai Persediaan sebesar Rp34.741.055.995,62 diantaranya merupakan Persediaan barang yang dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp33.300.904.332,62.

Rincian Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 7.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
164.260.958.162,22	**147.039.416.139,45**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp164.260.958.162,22 dan Rp147.039.416.139,45 terdiri dari:

Tabel 5.3.29
Daftar Investasi Jangka Panjang tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Investasi Non Permanen Lainnya	44.850.000,00	44.850.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	164.216.108.162,22	146.994.566.139,45
Jumlah		**164.260.958.162,22**	**147.039.416.139,45**

Penjelasan masing-masing jenis Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

5.3.2.1. Investasi Non Permanen

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
44.850.000,00	**44.850.000,00**

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.850.000,00 merupakan Investasi Non Permanen – Lainnya berupa penyaluran dana bergulir yang diberikan kepada kelompok peternak sapi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan, yang terdiri dari:

Tabel 5.3.30
Daftar Investasi Dana Bergulir tahun 2023 dan 2022

No	Nama Penerima Ternak Guliran	Tahun Perguliran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			(Rp)	(Rp)
1	Ilham	2019	16.000.000,00	16.000.000,00
2	Hairil Anwar	2020	13.700.000,00	13.700.000,00
3	Fitri Ramadhani	2020	6.150.000,00	6.150.000,00
4	Adi Yannor	2021	9.000.000,00	9.000.000,00
Jumlah			**44.850.000,00**	**44.850.000,00**

Rincian dari mutasi Investasi Non Permanen Lainnya dan Penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.3.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
164.216.108.162,22	**146.994.566.139,45**

Investasi Permanen Kabupaten Tapin berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Nilai Investasi Permanen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 dan 2022 pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah Kabupaten Tapin masing-masing sebesar Rp164.216.108.162,22 dan Rp146.994.566.139,45 dengan rincian sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.31
Daftar Rincian Penyertaan Modal tahun 2023

No	Nama BUMD	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2022	Tambah / (Kurang) Tahun 2023	31 Desember 2023	Metode Perhitungan
		(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Bank Kalsel	3,10	42.442.328.939,00	15.999.219.061,00	58.441.548.000,00	Biaya
2	BPR Tapin Selatan	65,05	7.932.008.543,65	659.039.000,96	8.591.047.544,61	Ekuitas
3	PDAM Kab. Tapin	91,32	96.620.228.656,80	563.283.960,81	97.183.512.617,61	Ekuitas
Jumlah			**146.994.566.139,45**	**17.221.542.022,77**	**164.216.108.162,22**	

Untuk masing-masing penyertaan modal ke BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tapin pada Bank Kalimantan Selatan (Bank Kalsel). Penyertaan Modal telah disetorkan pada tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp15.999.219.061,00, sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp58.441.548.000,00. Pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Kalsel menggunakan metode biaya perolehan (*cost method*) dengan persentase kepemilikan senilai 3,10 %. Pencatatan atas penyertaan modal kepada Bank Kalsel menggunakan metode biaya perolehan (*cost method*) dimana penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya, sedangkan dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Pada tahun 2023 berdasarkan hasil RUPS atas Laporan Keuangan Tahun 2022 audited, Bank Kalsel telah memberikan deviden tunai sebesar Rp5.404.791.545,00 yang ditransfer pada tanggal 13 Februari 2023 yang telah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah – Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

2. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tapin Selatan Mandiri Sejahtera (PT BPR Tapin Selatan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 juncto Nomor 9 Tahun 1996. Nomor 5 tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan, dan terakhir Peraturan Daerah No.14 Tahun 2017 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin yang sudah disertakan sebesar Rp1.767.411.122,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2010. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapin ke PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera pada tahun 2023 senilai 65,05% pencatatan atas penyertaan modal menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin pada PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.747.141.585,11.

BPK Perwakilan Kalsel

Laporan Keuangan PT BPR Tapin Selatan Tahun 2023 telah diperiksa oleh Erfan dan Rakhmawan dan tahun 2022 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan

3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin (PDAM Kabupaten Tapin) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1990. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin yang sudah disertakan adalah sebesar Rp 99.973.330.241,00 yang terdiri dari penyerahan aset dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 4.580.705.241,00 yang kemudian menjadi penyertaan modal dari Kabupaten Tapin sebesar Rp 95.392.625.000,00 berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 tahun 2009, Peraturan daerah Kabupaten tapin Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 pjs Tahun 2012 dan Peraturan daerah Kabupaten tapin Nomor 8 Tahun 2015. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapin tidak menambah penyertaan modalnya pada PDAM Kabupaten Tapin. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapin ke PDAM Kabupaten Tapin sebesar 91,32%. Pencatatan atas penyertaan modal menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tapin maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapin pada PDAM Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.183.512.617,61.

   Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tapin Tahun 2023 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan dan 2022 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang sama.

Rincian mutasi dari Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Lampiran 9.

5.3.3. Aset Tetap

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.689.900.689.011,20	**2.372.882.176.622,71**

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Tapin Per 31 Desember 2023 senilai Rp2.689.900.689.011,20 berasal dari nilai aset tetap per 31 Desember 2022 dan mutasi aset tetap selama tahun anggaran 2023. Penjelasan mutasi nilai aset tetap selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.32
Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Saldo 31 - 12 - 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo 31 - 12 - 2023 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Tanah	468.912.824.582,68	9.671.636.700,00	4.450.550.000,00	474.133.911.282,68
Peralatan dan Mesin	444.426.507.203,69	70.755.878.701,76	18.765.408.307,47	496.416.977.597,98
Gedung dan Bangunan	1.238.106.251.300,05	539.650.844.163,90	135.327.680.215,45	1.642.429.415.248,50
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.093.793.901.246,51	399.546.186.007,15	49.217.970.117,00	2.444.122.117.136,66

BPK Perwakilan Kalsel

Jenis Aset Tetap	Saldo 31 - 12 - 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023 (Rp)		Saldo 31 - 12 - 2023 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tetap Lainnya	23.910.976.872,00	3.120.068.454,00	1.174.850.384,00	25.856.194.942,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	298.905.404.112,00	56.926.941.677,00	293.587.155.762,00	62.245.190.027,00
Akumulasi Penyusutan	(2.195.173.688.694,22)	(276.579.302.175,40)	16.449.873.646,00	(2.455.303.117.223,62)
Jumlah	**2.372.882.176.622,71**	**801.250.679.405,41**	**486.073.741.139,92**	**2.689.900.689.011,20**

5.3.3.1. Tanah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
474.133.911.282,68	**468.912.824.582,68**

Aset tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp474.133.911.282,68 dan Rp468.912.824.582,68. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap Tanah tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.33
Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Saldo Awal	**468.912.824.582,68**	**459.531.680.582,68**
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	0,00	3.450.800.000,00
b. Hibah	4.331.156.700,00	3.936.368.000,00
c. Pencatatan kembali aset tetap tanah	667.555.000,00	1.196.852.000,00
d. Kapitalisasi	0,00	69.354.000,00
e. Reklasifikasi	0,00	1.289.660.000,00
f. Mutasi Unit Kerja	3.442.750.000,00	16.734.705.000,00
g. Tukar Menukar	1.230.175.000,00	0,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**9.671.636.700,00**	**26.677.739.000,00**
3. Mutasi Pengurangan		
a. Hibah	(824.800.000,00)	(561.890.000,00)
b. Penghapusan	(183.000.000,00)	(0,00)
c. Mutasi Unit Kerja	(3.442.750.000,00)	(16.734.705.000,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	**(4.450.550.000,00)**	**(17.296.595.000,00)**
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	**474.133.911.282,68**	**468.912.824.582,68**

Rincian mutasi aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 10.

Mutasi penambahan nilai aset tetap Tanah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kaltara

Tabel 5.3.34
Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Hibah	4.331.156.700,00	Hibah dari masyarakat
2.	Koreksi aset tetap yang tidak tercatat	667.555.000,00	Disdik
3.	Mutasi aset tetap antar SKPD	3.442.750.000,00	Setda
4.	Aset tetap tanah pengganti tukar menukar	1.230.175.000,00	Tanah pengganti tukar menukar dari PT.AGM
Jumlah		**9.671.636.700,00**	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai aset tetap Tanah tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.35
Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Hibah	824.800.000,00	Hibah ke Kejaksaan Negeri Tapin dan ke Pemerintah Desa Hatungun
2.	Aset tetap yang ditukar menukar	183.000.000,00	Tanah yang ditukar menukar dengan PT.AGM
3.	Mutasi aset tetap antar SKPD	3.442.750.000,00	RSUD Datu Sanggul
Jumlah		**4.450.550.000,00**	

Informasi tambahan :
Terdapat satu persil aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapin yang bermasalah/ tumpang tindih kepemilikan antara sertipikat Hak Pakai Nomor 07 Tahun 1995 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Tapin dengan sertipikat Hak Milik Nomor 166 Tahun 1985 atas nama pemegang hak Hj.Norsehan binti Abdul Wahab (Alm). Tanah tersebut tercatat pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, sebagaimana data di bawah ini :

Tabel 5.3.36
Daftar Sengketa Aset Tetap Tanah tahun 2023

No.	Nama Barang	Luas (m2)	Tahun	Letak/Alamat	Sertipikat		Penggunaan	Asal Usul	Harga (RP)
					Tanggal	Nomor			
1.	Tanah Bangunan Terminal Darat	6.194	1995	Jl.Jend.Sudirman Rantau	21/9/1995	07	Terminal angkutan antar kota	Pembelian	371.640.000,00
	Jumlah								**371.640.000,00**

Dalam hal sengketa tanah daerah tersebut, pihak ahli waris Hj.Norsehan binti Abdul Wahab (Alm) selaku penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Tapin ke Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 24 Juni 2021. Setelah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Rantau, akhirnya diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rta. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rta, antara lain :

BPK Perwakilan Kalsel

1. Menyatakan sebidang tanah berdasarkan gambar situasi surat ukur Nomor 39/1974 dalam sertifikat Hak Milik Nomor 166 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapin adalah milik para penggugat;
2. Menghukum tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan mendapat hak dari sebidang tanah hak milik penggugat/objek sengketa yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh tergugat sebagai terminal angkutan umum yang terletak di jalan Jend. Sudirman Rantau Kabupaten Tapin, untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sejumlah Rp457.596.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), apabila tergugat dan atau siapa pun yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya tidak menyerahkan tanah tersebut kepada para penggugat.

Proses hukum terhadap tanah tersebut saat ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung.

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
496.416.977.597,98	**444.426.507.203,69**

Aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp496.416.977.597,98 dan Rp444.426.507.203,69.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.37
Daftar Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Saldo Awal	**444.426.507.203,69**	**384.302.483.962,49**
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	55.122.728.380,00	70.914.035.623,00
b. Hutang Daerah	10.740.831.548,00	0,00
c. Hibah	0,00	77.625.748,00
d. Kapitalisasi	358.911.076,00	34.265.000,00
e. Reklasifikasi	1.911.337.459,00	121.940.000,00
f. Mutasi Unit Kerja	2.622.070.238,76	3.073.017.315,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**70.755.878.701,76**	**74.220.883.686,00**
3. Mutasi Pengurangan		
a. Hibah	(218.498.000,00)	(0,00)
b. Koreksi	(0,00)	(1.183.033.500,00)
c. Reklasifikasi	(12.455.050.112,00)	(5.344.130.330,80)
d. Mutasi Unit Kerja	(2.622.070.238,76)	(3.073.017.315,00)
e. Aset Ekstrakompatabel	(2.140.645.671,00)	(2.830.445.299,00)
f. Kelebihan bayar	(0,00)	(2.432.000,00)

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
g. Penghapusan aset	(1.329.144.285,71)	(1.663.802.000,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	**(18.765.408.307,47)**	**(14.096.860.444,80)**
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	**496.416.977.597,98**	**444.426.507.203,69**

Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 11.

Mutasi penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.38
Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	55.122.728.380,00	Sebanyak 44 SKPD
2.	Beban hutang	10.740.831.548,00	Sebanyak 17 SKPD
3.	Kapitalisasi	315.744.694,00	Sebanyak 7 SKPD
4.	Beban hutang kapitalisasi	43.166.382,00	Diskominfo dan DPUPR
5.	Reklas dari aset tetap JIJ	1.153.900.000,00	Dinkes dan Diskominfo
6.	Reklas beban hutang dari aset tetap JIJ	199.264.000,00	Disbudpar
7.	Reklas dari aset tetap lainnya	492.239.459,00	Dispora
8.	Reklas dari aset lainnya (aset yang belum dihibahkan)	65.934.000,00	DLH
9.	Mutasi aset tetap antar SKPD	2.622.070.238,76	Sebanyak 10 SKPD
Jumlah		**70.755.878.701,76**	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.39
Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Hibah	218.498.000,00	Setda dan Kec.Hatungun
2.	Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan	520.875.315,00	Disperkimtan dan Kec.CLS
3.	Reklas beban hutang ke aset tetap gedung dan bangunan	555.315.315,00	Disdik dan Disperkimtan
4.	Reklas ke aset tetap JIJ	15.400.000,00	Disperkimtan
5.	Reklas ke aset tidak berwujud	129.850.000,00	Diskominfo
6.	Reklas ke aset lain-lain (aset rusak berat)	11.233.609.482,00	Sebanyak 21 SKPD
7.	Mutasi aset tetap antar SKPD	2.622.070.238,76	Sebanyak 5 SKPD

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
8.	Barang ekstrakompatabel	2.076.567.170,00	Sebanyak 35 SKPD
9.	Beban hutang barang Ekstrakompatabel	64.078.501,00	Disnaker, Distan dan Kec.Binuang
10.	Penghapusan aset tetap	1.329.144.285,71	RSUD Datu Sanggul dan Setda
Jumlah		**18.765.408.307,47**	

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.642.429.415.248,50	**1.238.106.251.300,05**

Aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp1.642.429.415.248,50 dan Rp1.238.106.251.300,05. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.40
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Saldo Awal	**1.238.106.251.300,05**	**1.115.184.145.989,58**
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	94.152.883.520,90	154.432.756.722,00
b. Hutang Daerah	43.201.622.270,00	0,00
c. Hibah	0,00	3.734.796.100,00
d. Kapitalisasi	11.883.856.843,00	7.066.560.697,00
e. Reklasifikasi	276.216.518.545,00	67.169.721.496,47
f. Mutasi Unit Kerja	114.195.962.985,00	106.357.045.331,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**539.650.844.163,90**	**338.760.880.346,47**
3. Mutasi Pengurangan		
a. Hibah	(0,00)	(913.589.000,00)
b. Reklasifikasi	(21.131.717.230,45)	(108.568.140.705,00)
c. Mutasi Unit Kerja	(114.195.962.985,00)	(106.357.045.331,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	**(135.327.680.215,45)**	**(215.838.775.036,00)**
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	**1.642.429.415.248,50**	**1.238.106.251.300,05**

Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan lampiran 12.

Mutasi penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.41
Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	94.152.883.520,90	Sebanyak 20 SKPD
2.	Beban hutang	43.201.622.270,00	Sebanyak16 SKPD
3.	Kapitalisasi	6.371.544.573,00	Sebanyak 23 SKPD
4.	Beban hutang Kapitalisasi	5.512.312.270,00	Sebanyak 18 SKPD
5.	Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin	520.875.315,00	Disperkimtan dan Kec.CLS
6.	Reklas beban hutang aset tetap peralatan dan mesin	555.315.315,00	Disdik dan Disperkimtan
7.	Reklas dari aset tetap JIJ	384.843.070,00	Dinkes dan Dishub
8.	Reklas beban hutang aset tetap JIJ	6.481.800,00	Dinkes
9.	Reklas dari aset tetap KDP	274.749.003.045,00	Dinkes dan DPUPR
10.	Mutasi aset tetap antar SKPD	114.195.962.985,00	Sebanyak 7 SKPD
Jumlah		**539.650.844.163,90**	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.42
Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Reklas ke aset tetap KDP	9.876.603.618,00	DPUPR, Dishub dan Dispora
2.	Reklas beban hutang ke aset tetap KDP	5.253.989.970,00	DPUPR, Dishub, Dispora dan Disbudpar
3.	Reklas ke aset lain-lain (aset rusak berat)	6.001.123.642,45	Sebanyak 7 SKPD
4.	Mutasi aset tetap antar SKPD	114.195.962.985,00	Sebanyak 4 SKPD
Jumlah		**135.327.680.215,45**	

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.444.122.117.136,66	**2.093.793.901.246,51**

Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp2.444.122.117.136,66 dan Rp2.093.793.901.246,51.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 terdiri dari :

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.43
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Saldo Awal	**2.093.793.901.246,51**	**1.806.019.963.294,51**
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	179.002.281.236,55	252.793.986.263,00
b. Hutang Daerah	135.951.041.202,08	0,00
c. Kapitalisasi	45.339.631.991,00	39.261.098.365,00
d. Reklasifikasi	18.853.552.717,00	7.026.848.839,00
e. Hibah	1.134.941.192,52	0,00
f. Tukar Menukar	14.292.525.425,00	0,00
g. Mutasi Unit Kerja	4.972.212.243,00	3.549.676.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**399.546.186.007,15**	**302.631.609.467,00**
3. Mutasi Pengurangan		
a. Reklasifikasi	(42.972.501.409,00)	(11.307.995.515,00)
b. Penghapusan	(1.273.256.465,00)	(0,00)
c. Mutasi Unit Kerja	(4.972.212.243,00)	(3.549.676.000,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	**(49.217.970.117,00)**	**(14.857.671.515,00)**
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	**2.444.122.117.136,66**	**2.093.793.901.246,51**

BPK Perwakilan Kalsel

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 13

Mutasi penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.44
Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	179.002.281.236,55	Sebanyak 12 SKPD
2.	Beban hutang	135.951.041.202,08	Sebanyak 7 SKPD
3.	Kapitalisasi	41.604.335.861,00	DPUPR, Disperkimtan, Dispemdes dan Setda
4.	Beban hutang kapitalisasi	3.735.296.130,00	DPUPR, Disperkimtan, Dispora dan Disperindustrian
5.	Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin	15.400.000,00	Disperkimtan
6.	Reklas dari aset tetap KDP	18.838.152.717,00	DPUPR
7.	Hibah	1.134.941.192,52	Disperkimtan
8.	Tukar Menukar	14.292.525.425,00	DPUPR
9.	Mutasi aset tetap antar SKPD	4.972.212.243,00	Disperkimtan, DLH dan Setda
Jumlah		**399.546.186.007,15**	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 5.3.45
Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin	1.153.900.000,00	Dinkes dan Diskominfo
2.	Reklas beban hutang ke aset tetap peralatan dan mesin	199.264.000,00	Disbudpar
3.	Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan	384.843.070,00	Dinkes dan Dishub
4.	Reklas beban hutang ke aset tetap gedung dan bangunan	6.481.800,00	Dinkes
5.	Reklas ke aset tetap KDP	8.572.914.479,00	DPUPR
6.	Reklas beban hutang ke aset tetap KDP	32.655.098.060,00	DPUPR
7.	Penghapusan	1.273.256.465,00	DPUPR
8.	Mutasi aset tetap antar SKPD	4.972.212.243,00	RSUD Datu Sanggul dan DPUPR
Jumlah		**49.217.970.117,00**	

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
25.856.194.942,00	**23.910.976.872,00**

Aset tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp25.856.194.942,00 dan Rp23.910.976.872,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap Lainnya tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.46
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Saldo Awal	**23.910.976.872,00**	**22.713.071.083,00**
2. Mutasi Penambahan		
a. Pembelian/Realisasi Belanja Modal	2.731.668.454,00	1.607.898.898,00
b. Kapitalisasi	198.900.000,00	1.020.000,00
c. Koreksi	189.500.000,00	0,00
d. Hibah	0,00	98.468.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**3.120.068.454,00**	**1.707.386.898,00**
3. Mutasi Pengurangan		
a. Koreksi	(158.765.000,00)	(0,00)
b. Reklasifikasi	(1.016.085.384,00)	(162.513.109,00)
c. Penghapusan	(0,00)	(346.968.000,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	**(1.174.850.384,00)**	**(509.481.109,00)**
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	**25.856.194.942,00**	**23.910.976.872,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 14.
Mutasi penambahan nilai aset tetap Lainnya tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.47
Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pengadaan yang diperoleh melalui belanja modal	2.731.668.454,00	Sebanyak 4 SKPD
2.	Kapitalisasi	198.900.000,00	Disdukcapil
3.	Koreksi nilai	10.000.000,00	Distan
4.	Koreksi aset tetap tidak tercatat	179.500.000,00	Distan
Jumlah		**3.120.068.454,00**	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai aset tetap Lainnya tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 5.3.48
Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin	492.239.459,00	Dispora
2.	Reklas ke aset lain-lain (rusak berat)	481.521.000,00	Disdik, DLH dan Distan
3.	Reklas ke aset tidak berwujud	42.324.925,00	RSUD Datu Sanggul
4.	Koreksi aset tetap	158.765.000,00	Distan (sapi ternak mati)
Jumlah		**1.174.850.384,00**	

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
62.245.190.027,00	**298.905.404.112,00**

Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp62.245.190.027,00 dan Rp298.905.404.112,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.3.49
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Saldo Awal	**298.905.404.112,00**	**254.795.701.634,47**
2. Mutasi Penambahan		
a. Kapitalisasi	568.335.550,00	2.481.048.100,00
b. Reklasifikasi	56.358.606.127,00	112.879.760.834,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**56.926.941.677,00**	**115.360.808.934,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3. Mutasi Pengurangan		
a. Reklasifikasi	(293.587.155.762,00)	(71.251.106.456,47)
Jumlah Mutasi Pengurangan	**(293.587.155.762,00)**	**(71.251.106.456,47)**
4. Saldo Per 31 Desember (1+2-3)	**62.245.190.027,00**	**298.905.404.112,00**

Rician mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 15.
Mutasi penambahan nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.50
Daftar Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kapitalisasi	172.006.000,00	DPUPR, Disbudpar dan Setda
2.	Beban hutang kapitalisasi	396.329.550,00	DPUPR dan DLH
3.	Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan	9.876.603.618,00	DPUPR, Dishub dan Dispora
4.	Reklas beban hutang aset tetap gedung dan bangunan	5.253.989.970,00	DPUPR, Dishub, Dispora dan Disbudpar
5.	Reklas dari aset tetap JIJ	8.572.914.479,00	DPUPR
6.	Reklas beban hutang aset tetap JIJ	32.655.098.060,00	DPUPR
Jumlah		**56.926.941.677,00**	

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.3.51
Daftar Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan	274.749.003.045,00	Dinkes dan DPUPR
2.	Reklas ke aset tetap JIJ	18.838.152.717,00	DPUPR
Jumlah		**293.587.155.762,00**	

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(2.455.303.117.223,62)	**(2.195.173.688.694,22)**

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp2.455.303.117.223,62) dan sebesar (Rp2.195.173.688.694,22) dengan rincian sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.52
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(324.225.833.148,94)	(292.560.311.841,99)
2.	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(654.660.698.092,80)	(584.368.096.009,80)
3.	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	(1.476.416.585.981,88)	(1.318.245.280.842,43)
4.	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	(0,00)	(0,00)
	Jumlah	**(2.455.303.117.223,62)**	**(2.195.173.688.694,22)**

Penyusutan aset tetap dimulai tahun 2015, saldo penyusutan sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar (Rp2.195.173.688.694,22), penyusutan tersebut merupakan penyusutan s.d. 31 Desember 2022. Penyusutan s.d 31 Desember 2022 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2023 ditambah mutasi tambah dan dikurang mutasi kurang, sehingga saldo penyusutan tahun 2023 menjadi sebesar (Rp2.455.303.117.223,62). Untuk metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rincian akumulasi penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.53
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan s.d tahun 2022	(2.195.173.688.694,22)
2.	Beban penyusutan tahun 2023	(276.579.302.175,40)
3.	Mutasi tambah/Mutasi kurang	16.449.873.646,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023		**(2.455.303.117.223,62)**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 16.

a. Akumulasi penyusutan aset tetap setelah penambahan beban penyusutan dan mutasi tambah tahun 2023

Tabel 5.3.54
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023

No	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2022	Beban Penyusutan Tahun 2023	Mutasi Tambah	Akumulasi Penyusutan (setelah ditambah Beban Penyusutan dan Mutasi Tambah)
1.	Peralatan dan Mesin	292.560.311.841,99	44.424.547.003,95	0,00	336.984.858.845,94
2.	Gedung dan Bangunan	584.368.096.009,80	73.525.787.894,00	0,00	657.893.883.903,80
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.318.245.280.842,43	158.628.967.277,45	0,00	1.476.874.248.119,88
Jumlah		**2.195.173.688.694,22**	**276.579.302.175,40**	**0,00**	**2.471.752.990.869,62**

BPK Perwakilan Kalsel

b. Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember tahun 2023

Tabel 5.3.55
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023

No	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan (setelah ditambah Beban Penyusutan dan Mutasi Tambah)	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
1.	Peralatan dan Mesin	336.984.858.845,94	12.759.025.697,00	324.225.833.148,94
2.	Gedung dan Bangunan	657.893.883.903,80	3.233.185.811,00	654.660.698.092,80
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.476.874.248.119,88	457.662.138,00	1.476.416.585.981,88
Jumlah		**2.471.752.990.869,62**	**16.449.873.646,00**	**2.455.303.117.223,62**

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.56
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap SKPD tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan	236.684.577.426,81	217.192.742.198,81
2	Dinas Kesehatan	73.002.632.543,26	63.247.665.831,05
3	RSUD Datu Sanggul	65.947.948.747,00	94.675.262.482,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.428.171.777.405,79	1.279.333.698.858,34
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23.507.032.618,85	21.322.813.016,85
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.824.185.323,00	2.819.328.172,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.633.192.633,00	8.288.084.258,00
8	Dinas Sosial	2.225.434.508,00	1.830.134.093,00
9	Dinas Tenaga Kerja	2.427.175.499,00	2.212.355.610,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.201.542.171,00	3.099.716.646,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	5.107.248.389,68	4.943.781.738,60
12	Dinas Lingkungan Hidup	27.176.218.129,15	24.834.280.918,15
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.874.693.126,00	3.851.718.329,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.353.673.335,00	5.470.319.080,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.885.115.914,00	7.231.165.383,00
16	Dinas Perhubungan	31.641.784.470,00	26.960.535.461,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.451.439.207,00	2.586.957.569,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.146.578.980,00	18.705.067.760,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	94.134.092.293,67	86.039.575.970,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.133.685.114,66	4.322.858.848,99
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.791.890.924,00	3.812.309.365,00
22	Dinas Perikanan	14.123.540.807,95	13.051.523.171,95
23	Dinas Pertanian	38.948.350.803,35	34.896.350.451,43
24	Dinas Perdagangan	85.936.660.347,40	76.952.971.383,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
25	Dinas Perindustrian	2.542.323.410,00	2.615.765.777,00
26	KDH & Wakil KDH	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	174.209.767.469,05	128.241.115.127,05
28	Sekretariat DPRD	14.249.914.170,00	12.454.606.687,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	6.171.113.672,00	5.732.099.836,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.102.401.408,00	3.391.798.589,00
31	Badan Pendapatan Daerah	2.141.791.345,00	2.022.246.387,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.215.041.562,00	7.557.267.451,00
33	Inspektorat	3.860.349.365,00	3.529.470.146,00
34	Kecamatan Lokpaikat	1.454.972.476,00	1.277.181.863,00
35	Kecamatan Piani	1.982.708.319,00	1.643.438.684,00
36	Kecamatan Hatungun	1.478.933.430,00	1.403.383.127,00
37	Kecamatan Tapin Utara	2.118.577.510,00	1.897.280.714,00
38	Kecamatan Binuang	3.849.657.239,00	2.905.002.538,00
39	Kecamatan Bakarangan	2.087.024.979,00	1.698.351.557,00
40	Kecamatan Candi Laras Selatan	1.545.671.372,00	931.829.974,00
41	Kecamatan Candi Laras Utara	2.275.602.605,00	1.987.008.151,00
42	Kecamatan Tapin Selatan	2.553.829.734,00	2.243.191.041,00
43	Kecamatan Salam Babaris	2.071.675.214,00	1.852.487.052,00
44	Kecamatan Tapin Tengah	1.434.296.416,00	1.168.052.942,00
45	Kecamatan Bungur	2.672.851.632,00	2.209.194.232,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	954.143.179,00	731.700.224,00
Jumlah		**2.455.303.117.223,62**	**2.195.173.688.694,22**

Bpk perwakilan Kalsel

5.3.4. Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
302.070.931.901,52	**65.064.577.747,79**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp302.070.931.901,52 dan Rp65.064.577.747,79 terdiri dari:

Tabel 5.3.57
Daftar Aset Lainnya tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Tagihan Jangka Panjang	**2.225.392.206,00**	**2.225.392.206,00**
	- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.225.392.206,00	2.225.392.206,00
3.	Aset Tidak Berwujud	7.916.427.932,40	7.222.332.973,40
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.661.365.660,00)	(5.617.094.280,00)
	Aset Tidak Berwujud (Netto)	**2.255.062.272,40**	**1.605.238.693,40**
4.	Aset Lain-lain	42.203.432.624,92	30.291.601.844,27
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(32.294.194.201,80)	(23.433.501.435,60)

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Aset Lain-Lain (Neto)	**9.909.238.423,12**	**6.858.100.408,67**
5	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*	**287.681.239.000,00**	**54.375.846.439,72**
Jumlah		**302.070.931.901,52**	**65.064.577.747,79**

5.3.4.1. Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.225.392.206,00	**2.225.392.206,00**

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.225.392.206,00 merupakan saldo Tagihan/Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp1.564.500.292,00 dan Tagihan Ganti Kerugian Daerah karena adanya penyimpangan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp660.891.914,00.

5.3.4.1.1. Tuntutan Perbendaharaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.564.500.292,00	**1.564.500.292,00**

Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.564.500.292,00 dan Rp1.564.500.292,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.3.58
Daftar Tuntutan Perbendaharaan 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pemotongan dana operasional Puskesmas dan Biaya Lainnya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor 700/06-LHP-RiksusTim/INSP/2008 tanggal 14 April 2008	28.614.507,00	28.614.507,00
2	Kerugian Daerah pada pengeluaran keuangan Tahun Anggaran 2007 di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, sesuai Surat Penetapan Kasus Kerugian Daerah dari BPK-RI Nomor: 46/S/II/06/2020 tanggal 30 Juni 2020	1.535.885.785,00	1.535.885.785,00
Jumlah		**1.564.500.292,00**	**1.564.500.292,00**

Rincian dari mutasi Tuntutan Perbendaharaan dapat dilihat pada Lampiran 17.1

5.3.4.1.2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
660.891.914,00	**660.891.914,00**

Tuntutan ganti kerugian keuangan daerah adalah tagihan atas adanya penyimpangan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan daerah dengan rincian sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.59
Daftar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pengeluaran honorarium tim/panitia yang diberikan lebih dari dua kegiatan tidak disertai bukti pertanggungjawaban, sesuai LHP BPK Tahun 2006.	80.000.000,00	80.000.000,00
2	Pengeluaran Kegiatan Muspida tidak sesuai ketentuan, sesuai LHP BPK tahun 2006.	245.642.714,00	245.642.714,00
3	Realisasi biaya pungut upah PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tidak sesuai ketentuan, sesuai LHP BPK Tahun 2006.	335.249.200,00	335.249.200,00
Jumlah		**660.891.914,00**	**660.891.914,00**

Rincian dari mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada Lampiran 17.2

5.3.4.2. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.916.427.932,40	**7.222.332.973,40**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.916.427.932,40 dan Rp7.222.332.973,40 merupakan saldo Aset Tidak Berwujud berupa Lisensi, *Software, Website, Database* dan Hasil Kajian (DED) yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.60
Aset Tidak Berwujud SKPD tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	RSUD Datu Sanggul	77.499.925,00	503.300.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	422.461.500,00	422.461.500,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	520.235.000,00	520.235.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	772.268.986,00	644.508.986,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	110.260.000,00	110.260.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	87.355.000,00	87.355.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.000.000,00	38.000.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70.000.000,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	233.482.482,00	233.482.482,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	603.308.559,00	205.050.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	138.817.514,00	138.817.514,00
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	370.185.342,00	370.185.342,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.850.000,00	47.850.000,00
16	Dinas Perdagangan	34.788.000,00	34.788.000,00
17	Sekretariat Daerah	508.046.531,00	186.490.000,00
18	Sekretariat DPRD	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.536.285.049,40	1.536.285.049,40
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	289.610.899,00	186.960.000,00
21	Badan Pendapatan Daerah	287.786.100,00	287.786.100,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	393.775.000,00	393.775.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	16.160.000,00	16.160.000,00
24	Dinas Pertanian	116.500.000,00	116.500.000,00
25	Dinas Perindustrian	36.688.000,00	36.688.000,00
26	Dinas Perikanan	49.395.000,00	49.395.000,00
27	Kecamatan Piani	20.724.000,00	0,00
28	Kecamatan Tapin Selatan	45.045.045,00	0,00
29	Kecamatan Salam Babaris	33.900.000,00	0,00
Jumlah		**7.916.427.932,40**	**7.222.332.973,40**

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 18.

Rincian jenis Aset Tidak Berwujud pada beberapa SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.61
Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud SKPD tahun 2023 dan 2022

No.	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Goodwill		
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	RSUD Datu Sanggul	0,00	129.395.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	110.260.000,00	110.260.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	7.500.000,00	7.500.000,00
5	Dinas Perhubungan	95.370.000,00	95.370.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	129.706.250,00	129.706.250,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.350.000,00	26.350.000,00
8	Dinas Perdagangan	22.788.000,00	22.788.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	722.742.300,00	722.742.300,00
Sub jumlah		**1.114.716.550,00**	**1.244.111.550,00**
	Lisensi dan *Franchise*		
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00
Sub jumlah		**13.500.000,00**	**13.500.000,00**
	Software		
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	RSUD Datu Sanggul	77.499.925,00	373.905.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	327.590.500,00	327.590.500,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10.000.000,00	10.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	16.160.000,00	16.160.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.732.486,00	25.732.486,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.000.000,00	38.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70.000.000,00	0,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	603.308.559,00	205.050.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.111.264,00	9.111.264,00
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	211.742.342,00	211.742.342,00
13	Dinas Pertanian	116.500.000,00	116.500.000,00
14	Sekretariat Daerah	508.046.531,00	186.490.000,00
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	276.110.899,00	173.460.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	287.786.100,00	287.786.100,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	393.775.000,00	393.775.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	74.855.000,00	74.855.000,00
19	Dinas Perdagangan	12.000.000,00	12.000.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.500.000,00	21.500.000,00
21	Dinas Perindustrian	36.688.000,00	36.688.000,00
22	Dinas Perikanan	49.395.000,00	49.395.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	44.834.749,40	44.834.749,40
24	Kecamatan Piani	20.724.000,00	0,00
25	Kecamatan Tapin Selatan	45.045.045,00	0,00
26	Kecamatan Salam Babaris	33.900.000,00	0,00
Sub jumlah		**3.316.305.400,40**	**2.620.575.441,40**
	Kajian		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.871.000,00	94.871.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	746.536.500,00	618.776.500,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	158.443.000,00	158.443.000,00
5	Sekretariat DPRD	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	768.708.000,00	768.708.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	510.235.000,00	510.235.000,00
8	Dinas Perhubungan	138.112.482,00	138.112.482,00
Sub jumlah		**3.471.905.982,00**	**3.344.145.982,00**
Jumlah semua		**7.916.427.932,40**	**7.222.332.973,40**

BPK Perwakilan Kalsel

5.3.4.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(5.661.365.660,00)	**(5.617.094.280,00)**

Saldo nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp5.661.365.660,00 dan Rp5.617.094.280,00. Perhitungan nilai amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 tahun untuk Lisensi, Hak Cipta dan Hak Paten, sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud seperti *Software, Website, Database,* Hasil Kajian/Penelitian dengan masa manfaat selama 5 tahun. Penyajian nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 pada beberapa SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.62
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud SKPD tahun 2023

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2022	Beban Amortisasi	Mutasi Kurang	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	RSUD Datu Sanggul	497.641.666,00	5.658.334,00	468.125.000,00	35.175.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.494.208,00	56.654.500,00	0,00	227.148.708,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	324.644.917,00	102.047.000,00	0,00	426.691.917,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	599.217.578,00	36.406.300,00	0,00	635.623.878,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	110.260.000,00	0,00	0,00	110.260.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	62.403.333,00	7.485.500,00	0,00	69.888.833,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8	Dinas Perhubungan	180.539.363,00	27.622.497,00	0,00	208.161.860,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	113.580.000,00	0,00	0,00	113.580.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	138.817.514,00	0,00	0,00	138.817.514,00
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	226.496.333,00	32.380.000,00	0,00	258.876.333,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.875.000,00	4.300.000,00	0,00	38.175.000,00
14	Dinas Perdagangan	28.588.000,00	2.400.000,00	0,00	30.988.000,00
15	Sekretariat Daerah	152.215.001,00	20.250.000,00	0,00	172.465.001,00
16	Sekretariat DPRD	740.000.001,00	112.500.000,00	0,00	852.500.001,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Peneltian dan Pengembangan	1.481.816.968,00	0,00	0,00	1.481.816.968,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	135.255.667,00	32.925.649,00	0,00	168.181.316,00
19	Badan Pendapatan Daerah	239.452.767,00	0,00	0,00	239.452.767,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	260.714.417,00	46.519.000,00	0,00	307.233.417,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	13.466.667,00	2.693.333,00	0,00	16.160.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2022	Beban Amortisasi	Mutasi Kurang	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
22	Dinas Pertanian	90.233.333,00	15.216.667,00	0,00	105.450.000,00
23	Dinas Perindustrian	9.781.547,00	7.337.600,00	0,00	17.119.147,00
Jumlah		**5.617.094.280,00**	**512.396.380,00**	**468.125.000,00**	**5.661.365.660,00**

Aset tidak berwujud per tahun perolehan serta akumulasi amortisasinya disajikan pada Lampiran 19.

5.3.4.4. Aset Lain-Lain

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
42.203.432.624,92	**30.291.601.844,27**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp42.203.432.624,92 dan Rp30.291.601.844,27 yang merupakan nilai aset yang berasal dari hasil reklasifikasi aset tetap yang sudah tidak berfungsi mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tapin, antara lain karena kondisi rusak berat dengan rincian per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.63
Aset Lain-lain SKPD tahun 2023

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan	10.312.690.711,00	9.228.220.322,00
2	Dinas Kesehatan	4.989.487.363,00	4.265.747.436,00
3	RSUD Datu Sanggul	9.183.819.724,45	462.503.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.107.000,00	49.107.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	763.474.290,00	674.891.381,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	524.677.453,00	326.657.480,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	211.671.005,00
8	Dinas Sosial	82.712.000,00	82.712.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	66.215.000,00	30.238.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.557.000,00	21.932.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	680.307.500,00	680.307.500,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	769.198.000,00	182.462.750,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	19.996.750,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91.396.000,00	91.396.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.296.867.811,00	1.147.547.082,00
16	Dinas Perhubungan	920.210.700,00	920.210.700,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	103.109.700,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	462.353.197,00	277.514.197,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	725.660.890,67	574.230.726,67

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	533.044.819,00	533.044.819,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.119.227,00	99.119.227,00
22	Dinas Perikanan	1.486.776.663,80	1.295.123.163,80
23	Dinas Pertanian	1.926.822.726,00	2.356.903.514,80
24	Dinas Perdagangan	1.199.063.318,00	1.199.063.318,00
25	Dinas Perindustrian	69.272.000,00	123.547.000,00
26	KDH & Wakil KDH	253.112.338,00	876.294.354,00
27	Sekretariat Daerah	1.496.201.629,00	1.496.201.629,00
28	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	249.870.858,00	249.870.858,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	673.850.500,00	518.570.470,00
31	Badan Pendapatan Daerah	51.250.000,00	0,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200.568.200,00	200.568.200,00
33	Inspektorat	227.946.324,00	172.142.279,00
34	Kecamatan Lokpaikat	186.886.727,00	186.886.727,00
35	Kecamatan Piani	160.436.000,00	83.020.000,00
36	Kecamatan Hatungun	252.801.000,00	238.051.000,00
37	Kecamatan Tapin Utara	259.761.500,00	42.343.000,00
38	Kecamatan Binuang	218.788.705,00	64.002.705,00
39	Kecamatan Bakarangan	95.548.000,00	95.548.000,00
40	Kecamatan Candi Laras Selatan	192.165.550,00	192.165.550,00
41	Kecamatan Candi Laras Utara	117.341.000,00	218.021.000,00
42	Kecamatan Tapin Selatan	127.286.000,00	144.124.000,00
43	Kecamatan Salam Babaris	204.353.200,00	189.378.200,00
44	Kecamatan Tapin Tengah	92.530.000,00	92.530.000,00
45	Kecamatan Bungur	290.038.000,00	290.038.000,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	450.754.000,00	87.699.000,00
Jumlah		**42.203.432.624,92**	**30.291.601.844,27**

BPK Perwakilan Kalsel

Rincian mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 20.

5.3.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(32.294.194.201,80)	**(23.433.501.435,60)**

Saldo akumulasi penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp32.294.194.201,80 dan Rp23.433.501.435,60. Rincian akumulasi penyusutan Aset Lain-lain per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.64
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain SKPD tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan	(5.191.493.273,00)	(4.582.222.884,00)
2	Dinas Kesehatan	(4.606.254.799,00)	(3.814.690.446,00)
3	RSUD Datu Sanggul	(6.534.770.849,00)	(432.408.944,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(49.107.000,00)	(49.107.000,00)
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(646.831.156,00)	(558.248.247,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	(518.477.453,00)	(325.357.480,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(161.253.005,00)
8	Dinas Sosial	(79.545.334,00)	(79.545.334,00)
9	Dinas Tenaga Kerja	(30.238.000,00)	(30.238.000,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(66.058.876,00)	(21.805.959,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	(677.971.146,00)	(677.971.146,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(767.177.666,00)	(115.593.416,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	(19.996.750,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(91.396.000,00)	(91.396.000,00)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1.257.292.095,00)	(1.133.289.714,00)
16	Dinas Perhubungan	(775.297.676,00)	(775.297.676,00)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(97.889.483,00)	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(367.623.210,00)	(277.514.197,00)
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	(716.298.988,00)	(566.250.699,00)
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(279.433.113,00)	(279.433.113,00)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(99.119.227,00)	(99.119.227,00)
22	Dinas Perikanan	(1.346.638.556,80)	(1.154.985.056,80)
23	Dinas Pertanian	(1.588.386.726,00)	(1.987.251.514,80)
24	Dinas Perdagangan	(1.130.638.568,00)	(1.130.638.568,00)
25	Dinas Perindustrian	(19.212.950,00)	(73.487.950,00)
26	Sekretariat Daerah	(1.544.149.630,00)	(2.089.587.479,00)
27	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(243.245.858,00)	(243.245.858,00)
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(658.276.139,00)	(506.967.483,00)
30	Badan Pendapatan Daerah	(51.250.000,00)	0,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(196.130.492,00)	(196.130.492,00)
32	Inspektorat	(227.946.324,00)	(171.697.604,00)
33	Kecamatan Lokpaikat	(186.886.727,00)	(186.886.727,00)
34	Kecamatan Piani	(150.577.222,00)	(80.532.889,00)
35	Kecamatan Hatungun	(246.988.500,00)	(232.238.500,00)
36	Kecamatan Tapin Utara	(259.411.500,00)	(41.993.000,00)

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
37	Kecamatan Binuang	(218.788.705,00)	(64.002.705,00)
38	Kecamatan Bakarangan	(95.448.000,00)	(95.448.000,00)
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	(163.041.740,00)	(163.041.740,00)
40	Kecamatan Candi Laras Utara	(117.341.000,00)	(160.969.000,00)
41	Kecamatan Tapin Selatan	(127.286.000,00)	(143.257.332,00)
42	Kecamatan Salam Babaris	(201.545.388,00)	(189.378.200,00)
43	Kecamatan Tapin Tengah	(53.285.100,00)	(53.285.100,00)
44	Kecamatan Bungur	(290.038.000,00)	(290.038.000,00)
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(325.405.732,00)	(87.699.000,00)
Jumlah		**(32.294.194.201,80)**	**(23.433.501.435,60)**

Rincian mutasi tambah, mutasi kurang dan akumulasi penyusutan aset lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.3.4.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
287.681.239.000,00	**54.375.846.439,72**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp287.681.239.000,00 dan Rp54.375.846.439,72. Aset Lainnya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat yang dibayarkan secara non-tunai yang disimpan pada *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia serta remunerasi dari saldo DBH non-tunai pada Rekening TDF Bank Indonesia. Sebelumnya saldo DBH non-tunai dicatat sebagai setara Kas kemudian dicatat sebagai Aset Lainnya sesuai dengan SE Kemendagri no. 900.1.14.1/7481/Keuda tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.65
Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	DBH non-tunai Pemerintah Pusat pada TDF	287.681.239.000,00	54.362.661.841,00
2	Remunerasi TDF	0,00	13.184.598,72
Jumlah		**287.681.239.000,00**	**54.375.846.439,72**

Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp287.681.239.000,00 telah masuk ke Rekening Kab. Tapin di Bank Indonesia tanggal 29 Desember 2023. Pada tanggal 26 dan 27 Maret 2024 dana TDF tersebut telah dicairkan dan masuk ke Rekening RKUD Kabupaten Tapin.

BPK Perwakilan Kalsel

5.3.5. Kewajiban

5.3.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
395.692.344.386,28	**112.761.476.488,06**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp395.692.344.386,28 dan Rp112.761.476.488,06 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.66
Kewajiban Jangka Pendek tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	58.831.163.012,00	58.831.163.012,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	192.471.427,52	176.151.232,06
3	Utang Belanja	142.799.739.231,00	663.627.766,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	193.868.970.715,76	53.090.534.478,00
Jumlah		**395.692.344.386,28**	**112.761.476.488,06**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada tahun 2023 jauh lebih besar dari tahun sebelumnya terutama pada Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga. Berdasarkan hasil rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pusat (DBH) yang diadakan di Makasar menayatakab bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin akan menerima sebesar Dana Bagi Hasil sebesar Rp298.167.268.482 sesuai dengan KMK Nomor 38 tahun 2023. Akan tetapi Dana Bagi Hasil tersebut disalurkan Pemerintah Pusat pada tanggal 29 Desember 2023 dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang mengakibatkan penundaan pembayaran terhadap pihak ketiga yg disampaikan pada tanggal 29 Desember 2023 kepada para pihak terkait oleh Kepala BKAD.

Sebagai tindak lanjut pembayaran Utang Jangka Pendek tersebut maka Pemerintah Kab. Tapin melakukan pergeseran anggran, yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kemudian SKPD terkait melakukan penyesuaian Renacana Anggaran Kas (RAK) untuk melakukan pembayaran utang yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

Penjelasan untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

5.3.5.1.1. Bagian Lancar-Utang Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
58.831.163.012,00	**58.831.163.012,00**

Saldo Bagian Lancar-Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp58.831.163.012,00 dan Rp58.831.163.012,00. Saldo Bagian Lancar-

BPK Perwakilan Kalsel

Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 seluruhnya merupakan bagian dari Utang Jangka Panjang kepada Lembaga keuangan bukan bank atau BUMN yaitu ke PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI).

5.3.5.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
192.471.427,52	**176.151.232,06**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp192.471.427,52 dan Rp176.151.232,06 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.67
Daftar Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	Ijin Reklame	185.028.824,78	165.802.752,60
		Pemakaian Kekayaan Daerah	2.534.794,52	3.929.794,53
2	Dinas Perhubungan	Ijin Trayek dan KIR	907.808,22	2.418.684,93
3	RSUD Datu Sanggul	Pemakaian Kekayaan Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah			**192.471.427,52**	**176.151.232,06**

Rincian dari mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 22.

5.3.5.1.3. Utang Belanja

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
142.799.739.231,00	**663.627.766,00**

Utang Belanja merupakan kewajiban yang timbul sampai dengan namun belum diselesaikan pembayarannya 31 Desember 2023. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp142.799.739.231,00 dan Rp663.627.766,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.68
Rincian Utang Belanja tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Belanja Barang	11.462.699.207,00	0,00
2	Utang Belanja Jasa	32.804.215.042,00	663.627.766,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	53.684.985.018,00	0,00
4	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.210.787.170,00	0,00
5	Utang Belanja Hibah	32.637.052.794,00	0,00
Jumlah		**142.799.739.231,00**	**663.627.766,00**

Rincian mutasi Utang Belanja dari seluruh SKPD dapat dilihat pada Lampiran 23.

BPK Perwakilan Kalsel

Saldo Utang Belanja pada tahun 2023 jauh lebih besar dari tahun sebelumnya karena adanya keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga. Berdasarkan hasil rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pusat (DBH) Pemerintah Kabupaten Tapin akan menerima sebesar Rp298.167.268.482 sesuai dengan KMK Nomor 38 tahun 2023. Akan tetapi Dana Bagi Hasil tersebut baru disalurkan pada tanggal 29 Desember 2023 dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang mengakibatkan penundaan pembayaran terhadap pihak ketiga.

Tabel 5.3.69
Utang Belanja SKPD tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan	4.107.793.164,00	2.753.482,00
2	Dinas Kesehatan	574.951.773,00	163.339.800,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	232.249.796,00	287.562.909,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	94.684.393.499,00	17.863.370,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.397.399.479,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.206.800,00	1.750.604,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.589.998,00	4.427.541,00
8	Dinas Sosial	299.000,00	59.500,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.286.771.281,00	423.800,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	59.500,00	59.500,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	2.876.182,00	2.790.582,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	934.011.900,00	8.595.300,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.409.926,00	19.235.118,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	259.500,00	316.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	18.211.494,00	9.829.109,00
16	Dinas Perhubungan	205.538.198,00	4.774.940,00
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	320.479.161,00	9.715.935,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.708.500,00	497.500,00
19	Dinas Pemuda Dan Olahraga	842.230.932,00	15.861.042,00
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	113.753.078,00	4.919.544,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.994.000,00	699.500,00
22	Dinas Perikanan	56.925.518,00	323.500,00
23	Dinas Pertanian	29.921.569.398	11.237.469,00
24	Dinas Perdagangan	288.542.577,00	12.075.626,00
25	Dinas Perindustrian	391.317.238,00	4.934.042,00
26	Sekretariat Daerah	5.628.239.463,00	30.611.800,00
27	Inspektorat	699.500,00	215.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	364.500,00	173.500,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	392.000,00	458.500,00
30	Badan Pendapatan Daerah	7.681.750,00	7.880.043,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	8.368.825,00	8.935.412,00
32	Sekretariat DPRD	149.280.653,00	14.780.907,00
33	Kecamatan Piani	403.710.086,00	95.500,00
34	Kecamatan Tapin Selatan	194.508.864,00	1.190.576,00
35	Kecamatan Binuang	132.244.489,00	3.656.006,00
36	Kecamatan Bungur	7.300.230,00	1.352.637,00
37	Kecamatan Tapin Utara	399.436.903,00	1.010.046,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
38	Kecamatan Bakarangan	909.404,00	946.294,00
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	22.717.434,00	679.864,00
40	Kecamatan Candi Laras Utara	816.518,00	1.035.906,00
41	Kecamatan Hatungun	414.285.000,00	203.500,00
42	Kecamatan Salam Babaris	5.518.084,00	398.854,00
43	Kecamatan Tapin Tengah	1.869.780,00	1.143.840,00
44	Kecamatan Lokpaikat	1.410.597,00	1.410.597,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.443.259,00	3.403.271,00
Jumlah		**142.799.739.231,00**	**663.627.766,00**

5.3.5.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
193.868.970.715,76	**53.090.534.478,00**

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp193.868.970.715,76 dan Rp53.090.534.478,00.

Rincian dari Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

5.3.5.1.4.1. Utang Badan Layanan Umum Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.265.780.531,68	**5.583.140.086,00**

Saldo Utang Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.265.780.531,68 dan Rp5.583.140.086,00. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.265.780.531,68 merupakan saldo Utang BLUD pada RSUD Datu Sanggul yang terdiri atas utang pembelian obat, utang jasa pelayanan medis dan BBM untuk mobil *ambulance*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.70
Utang Badan Layanan Umum Daerah tahun 2023 dan 2022

No	Kreditur	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	3.094.125,00	28.871.100,00
2	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	79.193.733,00	199.669.645,00
3	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	271.573.388,00	158.762.702,00
5	PT. AYAZKAMED DUA PUTERA	24.833.630,00	0,00
6	PT. BANYU ANYAR IDAMAN	15.585.510,00	0,00
7	PT. BANUA INSAN MANDIRI	16.656.620,00	150.629.220,00
8	PT. BANUA INSAN MANDIRI	0,00	150.629.220,00
9	PT. BERKAH KARUNIA PUTRA	0,00	0,00
10	PT. BINA SAN PRIMA	92.463.743,00	62.760.074,00
11	PT. BORNEO PERKASA MEDIKA	26.039.490,00	29.274.030,00
12	PT. BORNEO SEJAHTERA MEDIKA	0,00	6.339.210,00
13	PT. DAYA MUDA AGUNG	0,00	11.225.238,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Kreditur	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
15	PT. EDHA MANDIRI SUKSES	6.005.100,00	0,00
16	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	87.371.298,00	54.756.466,00
17	PT. EUREKA SUKSES ABADI	181.485.000,00	9.157.500,00
18	PT. GLOPER PRIMA MANDIRI	30.555.643,00	6.646.707,00
19	PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI	94.269.168,00	45.238.704,00
20	PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	1.165.500,00	12.953.397,00
21	PT. INDOBAARIQ	17.149.500,00	0,00
22	PT. KALIMANTAN JAYA MEDIKA	82.617.300,00	21.318.660,00
23	PT. KALLISTA PRIMA	12.639.014,00	0,00
24	PT. KEBAYORAN PHARMA	3.141.300,00	15.966.950,00
25	PT. KIMIA FARMA	63.423.076,00	37.252.877,00
28	PT. MENSA BINA SUKSES	6.797.459,00	72.924.641,00
29	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	41.154.675,00	70.719.221,00
30	PT. MILLENNIUM PHARMACONT INT	0,00	87.736.966,00
32	PT. PANCARAYA KRISNAMANDIRI	0,00	42.779.400,00
33	PT. PANDA MITRA SETIA	29.304.000,00	0,00
34	PT. PARIT PADANG GLOBAL	103.151.250,00	24.997.124,00
35	PT. PENTAVALENT	73.479.966,00	27.111.595,00
36	PT. RAJAWALI NUSINDO	129.638.987,00	63.582.158,00
37	PT. SAMATOR	161.616.000,00	68.154.000,00
38	PT. SAPTA SARI TAMA	4.141.238,00	21.345.046,00
39	PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA	0,00	66.167.100,00
40	PT. TIGAMAS PUTERA	0,00	106.628.265,00
41	PT. TRI SAPTA JAYA	25.887.122,00	1.690.235,00
42	PT. UNITED DICO CITAS	14.199.120,00	0,00
43	PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI	14.765.564,00	0,00
44	Jasa Pelayanan Umum	335.367.363,68	562.267.670,00
45	Jasa Pelayanan BPJS	2.208.665.049,00	3.088.042.925,00
46	Jasa Pelayanan BPJS (Covid-19)	0,00	272.758.910,00
47	BBM Ambulance	8.350.600,00	4.783.130,00
Jumlah		**4.265.780.531,68**	**5.583.140.086,00**

Rincian dari Utang Badan Layanan Umum Daerah dapat dilihat pada Lampiran 24.1.

5.3.5.1.4.2. Utang Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.164,00	**47.507.394.392,00**

Saldo Utang Lebih Salur Dana Transfer per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.164,00 dan Rp47.507.394.392,00. Utang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 adalah sebesar Rp10.164,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Rincian saldo Utang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.3.71
Rincian Utang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	DBH SDA Minerba	1.469,00	46.828.560.956,00
2	DBH PBB	5.983,00	502.635.572,00
3	DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	0,00
4	DBH SDA Perikanan	1.545,00	173.472.924,00
5	DBH CHT	227,00	0,00
6	DBH SDA Kehutanan	940,00	2.724.940,00
Jumlah		**10.164,00**	**47.507.394.392,00**

5.3.5.1.4.3. Utang Pengadaan Aset Tetap

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
189.603.180.020,08	**0,00**

Saldo Utang Pengadaan Asset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp189.603.180.020,08 dan Rp0,00. Utang pengadaan asset tetap merupakan saldo utang kepada pihak ketiga atas pengadaan aset tetap tahun 2023. Rincian saldo utang penagadaan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.3.72
Utang Pengadaan Aset Tetap SKPD tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	10.146.421.734,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.888.331.649,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143.597.149.225,08	0,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.199.818.515,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	3.827.922.160,00	0,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.601.608,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	1.912.249.258,00	0,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	990.000.000,00	0,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.697.067.115,00	0,00
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	289.185.054,00	0,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.350.000,00	0,00
12	Dinas Tenaga Kerja	193.998.423,00	0,00
13	Dinas Perikanan	1.031.156.676,00	0,00
14	Dinas Pertanian	3.248.401.296,00	0,00
15	Dinas Perdagangan	1.055.412.572,00	0,00
16	Dinas Perindustrian	142.266.665,00	0,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
17	Sekretariat Daerah	6.236.298.384,00	0,00
18	Kecamatan Tapin Tengah	81.500.000,00	0,00
19	Kecamatan Piani	208.697.436,00	0,00
20	Kecamatan Hatungun	293.300.000,00	0,00
21	Kecamatan Binuang	33.369.250,00	0,00
22	Kecamatan Candi Laras Selatan	359.683.000,00	0,00
Jumlah		**189.603.180.020,08**	**0,00**

Rincian dari Utang Badan Layanan Umum Daerah dapat dilihat pada Lampiran 24.2.

5.3.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
14.707.792.076,00	**73.538.955.088,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp14.707.792.076,00 dan Rp73.538.955.088,00. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 seluruhnya merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5.3.5.2.1. Utang Jangka Panjang Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
14.707.792.076,00	**73.538.955.088,00**

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai 14.707.792.076,00 dan Rp73.538.955.088,00. Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 seluruhnya merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pinjaman daerah kepada Lembaga keuangan bukan bank atau BUMN yaitu ke PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) dengan tujuan Pembangunan Rumah Sakit Umum Baru Kelas C. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 8 Tanggal 25 Februari 2020, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pinjaman kepada PT. SMI dengan plafond sebesar Rp148.657.565.500,00 yang terdiri dari:

a. Konstruksi Bangunan (Fisik) sebesar Rp125.000.000.000,00; dan
b. Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) sebesar Rp23.657.565.500,00.

Selanjutnya berdasarkan perubahan perjanjian terakhir yaitu Perubahan Ketiga Perjanjian Pinjaman Pembiayaan No. PERJ-115/SMI/0922 tanggal 14 September 2022, posisi pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp145.225.874.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

a.	Saldo utang tahun 2022	:	132.370.118.100,00
b.	Penambahan di tahun 2023	:	0,00
c.	Total (a+b)	:	132.370.118.100,00
d.	Pembayaran pokok di tahun 2023	:	58.831.163.012,00
e.	Saldo utang tahun 2022 (c-d)	:	73.538.955.088,00
	Terdiri dari:		
	- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	:	58.831.163.012,00
	- Utang Jangka Panjang	:	14.707.792.076,00

5.3.6. Ekuitas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.843.241.996.852,96	**2.735.979.070.146,75**

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapin yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimilik/dikuasai setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak Pihak Ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

BPK Perwakilan Kalsel

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) ini disusun untuk menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah Kabupaten Tapin yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tapin mengalami surplus sebesar Rp94.261.777.433,95 atau mengalami penurunan sebesar Rp172.831.512.582,40 atau turun 64,71% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengalami surplus sebesar Rp267.093.290.016,35. Adapun surplus defisit LO tahun 2023 dan 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1
Surplus/Defisit LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	100.859.726.284,66	272.371.748.657,35
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.132.380.988,71)	(3.119.054.099,00)
3	**Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**	**97.727.345.295,95**	**269.252.694.558,35**
4	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(3.465.567.862,00)	(2.159.404.542,00)
5	**Surplus/Defisit-LO**	**94.261.777.433,95**	**267.093.290.016,35**

Masing-masing uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Surplus-LO dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp100.859.726.284,66.

   Jumlah tersebut merupakan selisih dari Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.727.964.769.591,45 dengan beban kegiatan operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.627.105.043.306,79.

b. Defisit dari kegiatan Non Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.132.380.988,71.

   Jumlah tersebut merupakan selisih antara penjumlahan Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.132.380.988,71 pada Tahun 2023 dengan penjumlahan Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, Defisit atas Ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

c. Surplus sebelum Pos Luar Biasa Rp97.727.345.295,95.

   Jumlah tersebut merupakan penjumlahan Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp100.859.726.284,66 dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.132.380.988,71.

d. Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp3.465.567.862,00.

   Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa-LO sebesar Rp0,00 dengan Beban Luar Biasa-LO sebesar Rp3.465.567.862,00 selama Tahun 2023.

e. Defisit-LO sebesar Rp94.261.777.433,95.

BPK Perwakilan Kalsel

Jumlah tersebut merupakan penjumlahan Surplus sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp97.727.345.295,95 dengan Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp3.465.567.862,00.

Penjelasan untuk masing-masing Pos Laporan Operasional akan diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan Operasional

5.4.1. Pendapatan-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.727.964.769.591,45	**1.538.954.366.012,28**

Rincian Pendapatan-LO Tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.2
Rincian Pendapatan-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	119.545.899.852,97	96.549.367.104,06	22.996.532.748,91
2	Pendapatan Transfer-LO	1.595.492.998.798,48	1.399.133.796.089,02	196.359.202.709,46
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	12.925.870.940,00	43.271.202.819,20	(30.345.331.879,20)
Jumlah		**1.727.964.769.591,45**	**1.538.954.366.012,28**	**189.010.403.579,17**

Kenaikan Pendapatan Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp 189.010.403.579,17 disebabkan adanya penurunan dan kenaikan pendapatan sebagai berikut:

1. Kenaikan Pendapatan Pajak daerah sebesar Rp1.329.625.394,43;
2. Kenaikan Pendapatan Retribusi daerah sebesar Rp510.083.115,20;
3. Kenaikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp362.225.119,09;
4. Kenaikan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp20.794.599.120,19;
5. Kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp184.473.353.406,00;
6. Kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp11.885.849.303,46;
7. Penurunan Pendapatan Hibah sebesar Rp13.680.656.889,20; dan
8. Penurunan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp16.664.674.990,00.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
119.545.899.852,97	**96.549.367.104,06**

PAD Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp119.545.899.852,97 dan Rp96.549.367.104,06. Terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023

BPK Perwakilan Kalsel

sebesar Rp22.996.532.748,91 atau naik 23,82%. Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	29.139.484.109,07	27.809.858.714,64	1.329.625.394,43
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.450.736.789,73	4.940.653.674,53	510.083.115,20
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.662.072.038,03	6.299.846.918,94	362.225.119,09
4	Lain-lain PAD Yang Sah	78.293.606.916,14	57.499.007.795,95	20.794.599.120,19
Jumlah		**119.545.899.852,97**	**96.549.367.104,06**	**22.996.532.748,91**

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Selisih LO dengan LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA
		LO	LRA	(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	29.139.484.109,07	28.394.827.563,25	744.656.545,82
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.450.736.789,73	4.376.818.354,01	1.073.918.435,72
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.662.072.038,03	5.404.791.545,00	1.257.280.493,03
4	Lain-lain PAD Yang Sah	78.293.606.916,14	61.951.304.534,86	16.342.302.381,28
Jumlah		**119.545.899.852,97**	**100.127.741.997,12**	**19.418.157.855,85**

Penjelasan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah -LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
29.139.484.109,07	**27.809.858.714,64**

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.139.484.109,07 dan Rp27.809.858.714,64. Terdapat kenaikan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.329.625.394,43 atau 4,78%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.5
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel	123.577.700,00	119.725.200,00	3.852.500,00
2	Pajak Restoran	5.087.981.514,00	3.874.588.848,00	1.213.392.666,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
3	Pajak Hiburan	89.589.400,00	73.229.175,00	16.360.225,00
4	Pajak Reklame	406.095.262,22	512.713.267,66	(106.618.005,44)
5	Pajak Penerangan Jalan	13.724.549.129,00	12.022.163.886,00	1.702.385.243,00
6	Pajak Parkir	49.577.400,00	48.047.700,00	1.529.700,00
7	Pajak Air Tanah	27.320.600,00	29.775.400,00	(2.454.800,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.604.325.952,85	4.348.958.255,98	(2.744.632.303,13)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.210.895.669,00	2.221.843.995,00	(10.948.326,00)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.806.071.482,00	4.549.312.987,00	1.256.758.495,00
	Jumlah	**29.139.484.109,07**	**27.809.858.714,64**	**1.329.625.394,43**

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Pajak Daerah- LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Selisih LO dengan LRA Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

No	Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Pajak Hotel	123.577.700,00	123.577.700,00	0,00
2	Pajak Restoran	5.087.981.514,00	5.087.981.514,00	0,00
3	Pajak Hiburan	89.589.400,00	89.589.400,00	0,00
4	Pajak Reklame	406.095.262,22	425.321.334,40	(19.226.072,18)
5	Pajak Penerangan Jalan	13.724.549.129,00	13.724.549.129,00	0,00
6	Pajak Parkir	49.577.400,00	49.577.400,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	27.320.600,00	27.320.600,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.604.325.952,85	1.604.325.952,85	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.210.895.669,00	1.447.013.051,00	763.882.618,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.806.071.482,00	5.806.071.482,00	0,00
Jumlah		**29.139.484.109,07**	**28.394.827.563,25**	**744.656.545,82**

Selisih lebih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp744.656.545,82 terdiri dari:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.7
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah LRA			**28.394.827.563,25**
1. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2022 Pada Pajak Reklame	165.802.752,60	(185.028.824,78)	(19.226.072,18)
2. Penambahan Piutang Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2022 Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan	1.347.211.322,00	(583.328.704,00)	763.882.618,00
Pendapatan Pajak Daerah LO	**1.513.014.074,60**	**(768.357.528,78)**	**29.139.484.109,07**

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.450.736.789,73	**4.940.653.674,53**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.450.736.789,73 dan Rp4.940.653.674,53. Terdapat kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah –LO Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp510.083.115,20 atau 10,32%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.8
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	679.086.500,00	503.281.000,00	175.805.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.732.000,00	579.717.000,00	171.015.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.300.000,00	47.450.000,00	(9.150.000,00)
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	73.355.500,00	51.972.000,00	21.383.500,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	134.043.000,00	145.827.000,00	(11.784.000,00)
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.023.429.000,01	902.373.356,15	121.055.643,86
7	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.831.001.200,00	1.880.152.950,00	(49.151.750,00)
8	Retribusi Terminal	481.242.000,00	396.552.000,0	84.690.000,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	126.800.000,00	109.600.000,00	17.200.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	8.450.000,00	10.875.000,00	(2.425.000,00)
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.960.000,00	6.200.000,00	4.760.000,00
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	76.964.500,00	42.504.000,00	34.460.500,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	214.862.213,01	261.805.313,23	(46.943.100,22)
14	Retribusi Izin Trayek	1.510.876,71	2.344.055,15	(833.178,44)
	Jumlah	**5.450.736.789,73**	**4.940.653.674,53**	**510.083.115,20**

BPK Perwakilan Kalsel

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Selisih LO dengan LRA Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	679.086.500,00	679.086.500,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	750.732.000,00	750.732.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	73.355.500,00	73.355.500,00	0,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	134.043.000,00	134.043.000,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.023.429.000,01	1.033.603.000,00	(10.173.999,99)
7	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.831.001.200,00	748.419.641,00	1.082.581.559,00
8	Retribusi Terminal	481.242.000,00	481.242.000,00	0,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	126.800.000,00	126.800.000,00	0,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00
12	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	76.964.500,00	76.964.500,00	0,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	214.862.213,01	214.862.213,01	0,00
14	Retribusi Izin Trayek	1.510.876,71	0,00	1.510.876,71
Jumlah		**5.450.736.789,73**	**4.376.818.354,01**	**1.073.918.435,72**

BPK Perwakilan Kalsel

Selisih lebih Pendapatan Retribusi Daerah LO dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp1.073.918.435,72 terdiri dari:

Tabel 5.4.10
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah LRA			**4.376.818.354,01**
1. Penambahan Piutang Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2022 Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.325.000,00	(14.894.000,00)	(11.569.000,00)
2. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2022 Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah	3.929.794,53	(2.534.794,52)	1.395.000,01
3. Penambahan Piutang tahun 2023 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d	1.368.425.785,00	(285.844.226,00)	1.082.581.559,00

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tahun 2022 Pada Retribusi Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan			
4. Penambahan atas Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka s/d Tahun 2023 dan Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 Pada Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.510.876,71	(4.000.000,00)	1.510.876,71
Pendapatan Retribusi Daerah LO	**1.381.191.456,24**	**(307.273.020,52)**	**5.450.736.789,73**

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6.662.072.038,03	**6.299.846.918,94**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.662.072.038,03 dan Rp6.299.846.918,94. Terdapat kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp362.225.119,09 atau naik 5,75%. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Bank Kalsel	5.404.791.545,00	5.179.875.915,00	224.915.630,00
2	BPR Tapin Selatan	715.343.294,52	553.270.055,12	162.073.239,40
3	PDAM Tapin	541.937.198,51	566.700.948,82	(24.763.750,31)
	Jumlah	**6.662.072.038,03**	**6.299.846.918,94**	**362.225.119,09**

Perbandingan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.12
Selisih LO dengan LRA Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2023

No	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.120.134.839,52	5.404.791.545,00	715.343.294,52

BPK Perwakilan Kalsel

2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	541.937.198,51	0,00	541.937.198,51
	Jumlah	**6.662.072.038,03**	**5.404.791.545,00**	**1.257.280.493,03**

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp1.257.280.493,03 terdiri dari:

Tabel 5.4.13
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA			**5.404.791.545,00**
1. Penambahan Pengakuan atas kenaikan nilai investasi pada BPR Tapin Selatan Tahun 2023 Pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	715.343.294,52	(0,00)	715.343.294,52
2. Penambahan Pengakuan atas kenaikan nilai investasi pada PDAM Tapin Tahun 2022 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	541.937.198,51	(0,00)	541.937.198,51
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO	**1.257.280.493,03**	**(0,00)**	**6.662.072.038,03**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
78.293.606.916,14	**57.499.007.795,95**

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp78.293.606.916,14 dan Rp57.499.007.795,95. Terdapat kenaikan Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp20.794.599.120,19 atau naik 36,17%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	15.522.700.425,00	537.821.000,00	14.984.879.425,00
2	Penerimaan Jasa Giro	6.594.991.807,32	3.478.514.285,95	3.116.477.521,37
3	Pendapatan Bunga	0,00	13.184.598,72	(13.184.598,72)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	218.960.826,60	1.170.891.202,33	(951.930.375,73)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	247.321.562,00	401.385.750,00	(154.064.188,00)
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.446.380,00	31.290.120,00	(23.843.740,00)
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	247.062.500,00	(247.062.500,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	270.980.926,00	(270.980.926,00)
9	Pendapatan dari BLUD	50.995.100.909,07	43.210.025.780,46	7.785.075.128,61
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.358.886.967,87	8.137.851.632,49	(4.778.964.664,62)
12	Remunerasi	1.328.198.038,28	0,00	1.328.198.038,28
	Jumlah	**78.293.606.916,14**	**57.499.007.795,95**	**20.794.599.120,19**

Penjelasan atas selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Selisih LO dengan LRA Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023

No	Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	15.522.700.425,00	0,00	15.522.700.425,00
2	Penerimaan Jasa Giro	6.594.991.807,32	6.594.991.807,32	0,00
3	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	218.960.826,60	218.960.826,60	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	247.321.562,00	247.321.562,00	0,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.446.380,00	7.446.380,00	0,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari BLUD	50.995.100.909,07	50.182.071.111,07	813.029.798,00
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.358.886.967,87	3.358.886.967,87	0,00
12	Remunerasi	1.328.198.038,28	1.341.382.637,00	(13.184.598,72)
Jumlah		**78.293.606.916,14**	**61.951.061.291,86**	**16.342.545.624,28**

Selisih Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp16.342.545.624,28 terdiri dari:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.16
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah LRA			**61.951.061.291,86**
1. Penambahan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan Berupa Aset Tetap Tanah dan JIJ dengan PT Antang Gunung Meratus Berdasarkan BAST No. 000.2.1/06/BKAD-PBMD/TM/VIII/2023	15.522.700.425,00	(0,00)	15.522.700.425,00
2. Penambahan Piutang Tahun 2023 serta Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan Pengurangan Atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2022 serta Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 Pada Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	3.941.054.496,00	(3.128.024.698,00)	813.029.798,00
3. Penambahan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir DPM LUEP APBD Tahun 2015 (LUEP PP Berkat Hijrah dan LUEP PP Doa Ibu) pada Dinas Ketahanan Pangan	20.000.000,00	(0,00)	20.000.000,00
4. Pengurangan Pendapatan Bunga atas Remunerasi Pada Rekening TDF-TKD karena Pencairan Dana Remunerasi Tahun 2023	0,00	(13.184.598,72)	(13.184.598,72)
Lain-lain PAD yang Sah LO	**19.470.305.577,00**	**(3.141.209.296,72)**	**78.293.606.916,14**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.595.492.998.798,48	**1.399.133.796.089,02**

Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.595.492.998.798,48 dan Rp1.399.133.796.089,02. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp196.359.202.709,46 atau naik 14,03%. Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.17
Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.441.633.808.718,00	1.257.160.455.312,00	184.473.353.406,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.859.190.080,48	141.973.340.777,02	11.885.849.303,46
	Jumlah	**1.595.492.998.798,48**	**1.399.133.796.089,02**	**196.359.202.709,46**

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.441.633.808.718,00	**1.257.160.455.312,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.441.633.808.718,00 dan Rp1.257.160.455.312,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp184.473.353.406,00 atau naik 14,67%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.18
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.441.633.808.718,00	1.251.566.248.312,00	190.067.560.406,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	0,00	5.594.207.000,00	(5.594.207.000,00)
	Jumlah	**1.441.633.808.718,00**	**1.257.160.455.312,00**	**184.473.353.406,00**

Penjelasan masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.441.633.808.718,00 dan Rp1.251.566.248.312,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp190.067.560.406,00 atau naik 13,18%. Rincian Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.19
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	867.679.544.000,00	707.093.553.009,00	160.585.990.991,00
2	Dana Alokasi Umum	432.333.645.608,00	414.513.383.682,00	17.820.261.926,00
3	Dana Alokasi Khusus	141.620.619.110,00	129.959.311.621,00	11.661.307.489,00
	Jumlah	**1.441.633.808.718,00**	**1.251.566.248.312,00**	**190.067.560.406,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.441.633.808.718,00 merupakan pendapatan bagi hasil dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp867.679.544.000,00 dan Rp707.093.553.009,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp160.585.990.991,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

1) Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp81.564.068.000,00 dan Rp38.087.825.737,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp43.476.242.263,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.20
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Bagi Hasil Pajak	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	74.480.277.000,00	29.968.696.267,00	44.511.580.733,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	7.083.791.000,00	8.119.091.495,00	(1.035.300.495,00)
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	37.975,00	(37.975,00)
	Jumlah	**81.564.068.000,00**	**38.087.825.737,00**	**43.476.242.263,00**

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.21
Selisih LO dengan LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023

No	Bagi Hasil Pajak	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	74.480.277.000,00	77.041.116.417,00	(2.560.839.417,00)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	7.083.791.000,00	7.977.562.495,00	(893.771.495,00)
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	37.975,00	(37.975,00)
	Jumlah	**81.564.068.000,00**	**85.018.716.887,00**	**(3.454.648.887,00)**

Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dengan LRA tahun 2023 sebesar -Rp3.454.648.887,00 terdiri dari:

Tabel 5.4.22
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA			**85.018.716.887,00**
1. Pengurangan atas Pendapatan DBH-PBB Karena Pencairan Dana *Treasury Deposit Facility* BI Tahun 2023	0,00	(2.560.839.417,00)	(2.560.839.417,00)
2. Pengurangan atas Pendapatan DBH PPh Pasal 21 Karena Pencairan Dana *Treasury Deposit Facility* BI Tahun 2023	0,00	(893.771.495,00)	(893.771.495,00)
3. Pengurangan atas Pendapatan DBH CHT Karena Pencairan Dana *Treasury Deposit Facility* BI Tahun 2023	0,00	(37.975,00)	(37.975,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO	**0,00**	**(3.454.648.887,00)**	**81.564.068.000,00**

BPK Perwakilan Kalsel

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp786.115.476.000,00 dan Rp669.005.727.272,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp117.109.748.728,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.23
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	8.847.448.000,00	117.392.024,00	8.730.055.976,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	775.809.913.000,00	666.628.617.737,00	109.181.295.263,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.286.749.000,00	2.170.064.211,00	(883.315.211,00)
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	171.366.000,00	89.653.300,00	81.712.700,00
	Jumlah	**786.115.476.000,00**	**669.005.727.272,00**	**117.109.748.728,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.24
Selisih LO dengan LRA Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023

No	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	8.847.448.000,00	8.832.180.024,00	15.267.976,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	775.809.913.000,00	538.831.453.419,00	236.978.459.581,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.286.749.000,00	1.498.502.211,00	(211.753.211,00)
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	171.366.000,00	180.114.300,00	(8.748.300,00)
	Jumlah	**786.115.476.000,00**	**549.342.249.954,00**	**236.773.226.046,00**

Selisih Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LO dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp236.773.226.046,00 terdiri dari:

Tabel 5.4.25
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LRA			**549.342.249.954,00**
1. Penambahan atas Pendapatan DBH Transfer Pusat Non-Tunai *Treasury Deposit Facility* BI Berdasarkan KMK No.38 Tahun 2023 dan Pengurangan Karena Pencairan Dana *Treasury Deposit Facility* BI Tahun 2023 pada DBH SDA Daya Kehutanan	26.723.000,00	(11.455.024,00)	15.267.976,00
2. Penambahan atas Pendapatan DBH Transfer Pusat Non-Tunai *Treasury Deposit Facility* BI Berdasarkan KMK No.38 Tahun 2023 dan Pengurangan Karena Pencairan Dana *Treasury Deposit Facility* BI Tahun 2023 pada DBH SDA Mineral dan Batubara-*Royalty*	287.654.516.000,00	(50.676.056.419,00)	236.978.459.581,00
3. Pengurangan Karena Pencairan Dana *Treasury Deposit Facility* BI Tahun 2023 pada DBH SDA Perikanan	0,00	(211.753.211,00)	(211.753.211,00)
4. Pengurangan Karena Pencairan Dana *Treasury Deposit Facility* BI Tahun 2023 pada DBH SDA Minyak Bumi	0,00	(8.748.300,00)	(8.748.300,00)
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam LO	**287.681.239.000,00**	**(50.908.012.954,00)**	**786.115.476.000,00**

BPK Perwakilan Kalsel

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp432.333.645.608,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp414.513.383.682,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp17.820.261.926,00. Pendapatan operasional yang berasal dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kabupaten Tapin telah diterima seluruhnya pada Tahun 2023. Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.26
Rincian Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
Dana Alokasi Umum	432.333.645.608,00	414.513.383.682,00	17.820.261.926,00
Jumlah	**432.333.645.608,00**	**414.513.383.682,00**	17.820.261.926,00

Perbandingan antara Dana Alokasi Umum (DAU) LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.27
Selisih LO dengan LRA Dana Alokasi Umum Tahun 2023

Dana Alokasi Umum (DAU)	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
	LO	LRA	
Dana Alokasi Umum	432.333.645.608,00	432.333.645.608,00	0,00
Jumlah	**432.333.645.608,00**	**432.333.645.608,00**	**0,00**

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun 2023, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp141.620.619.110,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp129.959.311.621,00. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp11.661.307.489,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.28
Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**44.566.527.275,00**	**72.575.115.655,00**	**(28.008.588.380,00)**
	a. Pendidikan	5.022.997.727,00	11.850.013.700,00	(6.827.015.973,00)
	b. Jalan	15.637.230.000,00	18.204.197.400,00	(2.566.967.400,00)
	c. Irigasi	0,00	3.635.543.250,00	(3.635.543.250,00)
	d. Air Minum	11.118.437.000,00	7.237.459.000,00	3.880.978.000,00
	e. Sanitasi	5.851.117.000,00	5.083.428.993,00	767.688.007,00
	f. Kesehatan	6.936.745.548,00	6.071.385.947,00	865.359.601,00
	g. Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
	h. Pertanian	0,00	20.493.087.365,00	(20.493.087.365,00)
2	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**97.054.091.835,00**	**57.384.195.966,00**	**39.669.895.869,00**
	a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	3.983.850.000,00	0,00	3.983.850.000,00
	b. Tunjangan Profesi Guru	49.171.104.900,00	45.186.139.260,00	3.984.965.640,00
	c. Tambahan Penghasilan Guru	1.348.979.068,00	1.431.999.500,00	(83.020.432,00)

BPK Perwakilan Kalsel

No	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
	d. Bantuan Operasional Kesehatan	11.803.736.877,00	6.362.831.833,00	5.440.905.044,00
	e. Bidang Keluarga Berencana	3.810.064.990,00	2.259.544.973,00	1.550.520.017,00
	f. Tunjangan Khusus Guru	512.578.200,00	577.919.400,00	(65.341.200,00)
	g. BOP Pendidikan Kesetaraan	3.403.100.000,00	501.600.000,00	2.901.500.000,00
	h. Fasilitasi Penanaman Modal	246.282.351,00	234.481.000,00	11.801.351,00
	i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	173.588.800,00	451.800.000,00	(278.211.200,00)
	j. Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	651.275.000,00	377.880.000,00	273.395.000,00
	k. BOS Reguler	20.879.531.649,00	0,00	20.879.531.649,00
	l. BOS Kinerja	1.070.000.000,00	0,00	1.070.000.000,00
	Jumlah	**141.620.619.110,00**	**129.959.311.621,00**	**11.661.307.489,00**

Perbandingan antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.29
Selisih LO dengan LRA Dana Alokasi Khusus Tahun 2023

No	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**44.566.527.275,00**	**44.566.527.275,00**	**0,00**
	a. Pendidikan	5.022.997.727,00	5.022.997.727,00	0,00
	b. Jalan	15.637.230.000,00	15.637.230.000,00	0,00
	c. Irigasi	0,00	0,00	0,00
	d. Air Minum	11.118.437.000,00	11.118.437.000,00	0,00
	e. Sanitasi	5.851.117.000,00	5.851.117.000,00	0,00
	f. Kesehatan	6.936.745.548,00	6.936.745.548,00	0,00
	g. Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
	h. Pertanian	0,00	0,00	0,00
2	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**97.054.091.835,00**	**97.054.091.835,00**	**0,00**
	a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)	3.983.850.000,00	3.983.850.000,00	0,00
	b. Tunjangan Profesi Guru	49.171.104.900,00	49.171.104.900,00	0,00
	c. Tambahan Penghasilan Guru	1.348.979.068,00	1.348.979.068,00	0,00
	d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	11.803.736.877,00	11.803.736.877,00	0,00
	e. Bidang Keluarga Berencana (BOKB)	3.810.064.990,00	3.810.064.990,00	0,00
	f. Tunjangan Khusus Guru	512.578.200,00	512.578.200,00	0,00
	g. BOP Pendidikan Kesetaraan	3.403.100.000,00	3.403.100.000,00	0,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
	h. Fasilitasi Penanaman Modal	246.282.351,00	246.282.351,00	0,00
	i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	173.588.800,00	173.588.800,00	0,00
	j. Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	651.275.000,00	651.275.000,00	0,00
	k. BOS Reguler	20.879.531.649,00	20.879.531.649,00	0,00
	l. BOS Kinerja	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	0,00
	Jumlah	**141.620.619.110,00**	**141.620.619.110,00**	**0,00**

5.4.1.2.1.2. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	**5.594.207.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.594.207.000,00. Terdapat penurunan DID Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp5.594.207.000,00 atau turun sebesar 100,00%. Rincian DID pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.30
Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) -LO
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	5.594.207.000,00	(5.594.207.000,00)
	Jumlah	**0,00**	**5.594.207.000,00**	**(5.594.207.000,00)**

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.31
Selisih LO dengan LRA Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) -LO
Tahun 2023

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
153.859.190.080,48	**141.973.340.777,02**

Pendapatan Transfer Antar Daerah periode tahun anggaran 2023 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pada Tahun 2023 sebesar Rp153.859.190.080,48 dan Tahun 2022 sebesar Rp141.973.340.777,02. Terdapat kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp11.885.849.303,46 atau naik 8,37%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.32
Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.408.850.642,72	11.037.913.085,76	3.370.937.556,96
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.930.225.175,06	11.587.353.314,58	(1.657.128.139,52)
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	117.886.941.894,40	107.359.545.434,70	10.527.396.459,70
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	585.481.650,30	423.073.725,98	162.407.924,32
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.047.690.718,00	11.565.455.216,00	(517.764.498,00)
	Jumlah	**153.859.190.080,48**	**141.973.340.777,02**	**11.885.849.303,46**

BPK Perwakilan Kalsel

Penjelasan atas selisih antara Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33
Selisih LO dengan LRA Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023

No	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.408.850.642,72	14.692.833.769,00	(283.983.126,28)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.930.225.175,06	10.118.534.577,00	(188.309.401,94)
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	117.886.941.894,40	115.752.558.556,00	2.134.383.338,40
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	585.481.650,30	617.974.937,00	(32.493.286,70)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.047.690.718,00	13.148.089.548,00	(2.100.398.830,00)
	Jumlah	**153.859.190.080,48**	**154.329.991.387,00**	**(470.801.306,52)**

Selisih Kurang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp470.801.306,52 terdiri dari:

Tabel 5.4.34
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA			**154.329.991.387,00**
1. Penambahan Piutang Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2022 pada Pajak Kendaraan Bermotor	2.975.183.891,27	(3.259.167.017,55)	(283.983.126,28)
2. Penambahan Piutang Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2022 pada Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.124.450.990,07	(3.312.760.392,01)	(188.309.401,94)
3. Penambahan Piutang Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2022 pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.666.937.855,80	(37.532.554.517,40)	2.134.383.338,40
4. Penambahan Piutang Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan Piutang s/d Tahun 2022 pada Pajak Air Permukaan	129.552.731,46	(162.046.018,16)	(32.493.286,70)
5. Penambahan Piutang Tahun 2023 dan Pengurangan atas pelunasan piutang s/d tahun 2022 pada Pajak Rokok	2.185.179.435,00	(4.285.578.265,00)	(2.100.398.830,00)
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO	**48.081.304.903,60**	**(48.552.106.210,12)**	**153.859.190.080,48**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
12.925.870.940,00	**43.271.202.819,20**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp12.925.870.940,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp43.271.202.819,20. Terdapat penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp30.345.331.879,20 atau turun sebesar 70,13%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.35
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah	4.705.154.195,00	18.385.811.084,20	(13.680.656.889,20)
2	Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.220.716.745,00	24.885.391.735,00	(16.664.674.990,00)
	Jumlah	**12.925.870.940,00**	**43.271.202.819,20**	**(30.345.331.879,20)**

Penjelasan masing-masing jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp4.705.154.195,00 dan Rp18.385.811.084,20. Terdapat penurunan Pendapatan Hibah Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp13.680.656.889,20 atau turun sebesar 74,41%. Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.36
Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**414.017.495,00**	**14.396.478.154,20**	**(13.982.460.659,20)**
	Hibah Persediaan dari BKKBN Tahun 2023 (DPPKB)	160.706.495,00	377.503.930,20	(216.797.435,20)
	Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian Perhubungan (Dinas Perhubungan)	0,00	3.734.796.100,00	(3.734.796.100,00)
	Hibah IPDMIP	34.400.000,00	9.882.398.701,00	(9.847.998.701,00)
	Hibah Persediaan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (BPBD)	11.438.400,00	29.326.975,00	(17.888.575,00)
	Hibah Persediaan dari Provinsi dan Pusat Tahun 2023 (Disdukcapil)	207.472.600,00	204.358.700,00	3.113.900,00
	Hibah Aset Tetap Lainnya dari Perpusnas RI (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	0,00	168.093.748,00	(168.093.748,00)
2	**Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri**	**4.291.136.700,00**	**1.704.501.000,00**	**2.586.635.700,00**
	Hibah Aset Tetap Tanah (Kecamatan Lokpaikat)	0,00	1.575.517.000,00	(1.575.517.000,00)
	Hibah Aset Tetap Tanah (Dinsos)	0,00	120.984.000,00	(120.984.000,00)
	Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Dishub)	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
	Hibah Aset Tetap Tanah (DPMD)	4.291.136.700,00	0,00	4.291.136.700,00
3	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri**	**0,00**	**44.964.930,00**	**(44.964.930,00)**
	Hibah Persediaan dari Dinkes Tahun 2022 (RSUD Datu Sanggul)	0,00	44.964.930,00	(44.964.930,00)
4	**Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri**	**0,00**	**2.239.867.000,00**	**(2.239.867.000,00)**
	Hibah Aset Tetap Tanah (Disperkimtan)	0,00	2.239.867.000,00	(2.239.867.000,00)
	Jumlah	**4.705.154.195,00**	**18.385.811.084,20**	**(13.680.656.889,20)**

Penjelasan atas selisih antara Pendapatan Hibah LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.37
Selisih LO dengan LRA Pendapatan Hibah Tahun 2023

No	Pendapatan Hibah	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**414.017.495,00**	**34.400.000,00**	**379.617.495,00**
	Hibah Persediaan dari BKKBN Tahun 2023 (DPPKB)	160.706.495,00	0,00	160.706.495,00
	Hibah IPDMIP	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00
	Hibah Persediaan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (BPBD)	11.438.400,00	0,00	11.438.400,00
	Hibah Persediaan dari Provinsi dan Pusat Tahun 2023 (Disdukcapil)	207.472.600,00	0,00	207.472.600,00
2	**Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri**	**4.291.136.700,00**	**0,00**	**4.291.136.700,00**
	Hibah Aset Tetap Tanah (DPMD)	4.291.136.700,00	0,00	4.291.136.700,00
	Jumlah	**4.705.154.195,00**	**34.400.000,00**	**4.670.754.195,00**

Selisih Lebih Pendapatan Hibah LO dengan LRA tahun 2023 sebesar Rp4.670.754.195,00 terdiri dari:

Tabel 5.4.38
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Pendapatan Hibah Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah LRA			**34.400.000,00**
1. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Persediaan dari BKKBN (DPPKB)	160.706.495,00	0,00	160.706.495,00
2. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Persediaan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD)	11.438.400,00	0,00	11.438.400,00
3. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Persediaan dari Provinsi dan Pusat Kependudukan (Disdukcapil)	207.472.600,00	0,00	207.472.600,00
4. Penambahan Pendapatan Hibah Berupa Aset Tetap Tanah (DPMD)	4.291.136.700,00	0,00	4.291.136.700,00
Pendapatan Hibah LO	**4.670.754.195,00**	**0,00**	**4.705.154.195,00**

b. Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp8.220.716.745,00 dan Rp24.885.391.735,00. Terdapat penurunan Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp16.664.674.990,00. Rincian Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.39
Rincian Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah (Dana BOS)	0,00	18.851.610.265,00	(18.851.610.265,00)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.220.716.745,00	6.033.781.470,00	2.186.935.275,00
	Jumlah	**8.220.716.745,00**	**24.885.391.735,00**	**(16.664.674.990,00)**

Adapun rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2023 masing-masing puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.40
Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Tahun 2023 (Rp)
1	Puskesmas Tapin Utara	1.138.266.670,00
2	Puskesmas Binuang	1.135.609.121,00
3	Puskesmas Hatungun	359.398.878,00
4	Puskesmas Tambarangan	784.132.671,00
5	Puskesmas Salam Babaris	461.387.953,00
6	Puskesmas Banua Padang	583.963.038,00
7	Puskesmas Bakarangan	615.836.308,00
8	Puskesmas Pandahan	399.401.616,00
9	Puskesmas Tambaruntung	599.282.788,00
10	Puskesmas Baringin	585.877.935,00
11	Puskesmas Margasari	686.959.056,00
12	Puskesmas Lokpaikat	478.886.696,00
13	Puskesmas Piani	391.714.015,00
	Jumlah	**8.220.716.745,00**

Penjelasan selisih antara Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO dan Pendapatan LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.41
Selisih LO dengan LRA Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Pendapatan Hibah (Dana BOS)	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.220.716.745,00	8.220.716.745,00	0,00
	Jumlah	**8.220.716.745,00**	**8.220.716.745,00**	**0,00**

5.4.2. Beban

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.627.105.043.306,79	**1.266.582.617.354,93**

BPK perwakilan Kalsel

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.627.105.043.306,79 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.266.582.617.354,93. Terdapat kenaikan Beban Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp360.522.425.951,86 atau naik 28,46%. Rincian realisasi Beban Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.4.42
Rincian Beban-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Pegawai	462.485.466.423,00	448.903.233.637,00	13.582.232.786,00
2	Beban Barang dan Jasa	628.826.166.269,58	423.503.613.083,17	205.322.553.186,41
3	Beban Bunga	7.252.202.772,00	7.578.695.680,00	(326.492.908,00)
4	Beban Hibah	127.156.889.624,00	56.698.494.864,00	70.458.394.760,00
5	Beban Bantuan Sosial	19.167.000.000,00	9.232.620.700,00	9.934.379.300,00
6	Beban Penyisihan Piutang	1.917.587.397,81	1.205.276.346,31	712.311.051,50
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44.424.547.003,95	37.766.960.994,87	6.657.586.009,08
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	73.525.787.894,00	63.583.710.321,08	9.942.077.572,92
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	158.628.967.277,45	145.386.993.199,00	13.241.974.078,45
10	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	512.396.380,00	660.304.393,00	(147.908.013,00)
11	Beban Bagi Hasil	2.830.448.193,00	2.519.839.550,50	310.608.642,50
12	Beban Bantuan Keuangan	100.377.584.072,00	69.542.874.586,00	30.834.709.486,00
	Jumlah	**1.627.105.043.306,79**	**1.266.582.617.354,93**	**360.522.425.951,86**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
462.485.466.423,00	**448.903.233.637,00**

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp462.485.466.423,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp448.903.233.637,00. Terdapat kenaikan Beban Pegawai Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp13.582.232.786,00 atau naik 3,03%. Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.43
Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	185.759.475.634,00	185.156.764.383,00	602.711.251,00
2	Beban Tunjangan Keluarga	15.276.321.407,00	15.325.847.953,00	(49.526.546,00)
3	Beban Tunjangan Jabatan	6.620.972.496,00	7.077.402.777,00	(456.430.281,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional	16.012.136.074,00	13.380.920.100,00	2.631.215.974,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	1.331.640.919,00	1.751.926.604,00	(420.285.685,00)
6	Beban Tunjangan Beras	9.626.928.793,00	9.696.281.540,00	(69.352.747,00)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	620.944.809,00	638.618.200,00	(17.673.391,00)
8	Beban Pembulatan Gaji	3.142.220,00	2.664.804,00	477.416,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	14.127.295.319,00	16.755.593.412,00	(2.628.298.093,00)
10	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM)	1.502.753.183,00	1.511.652.243,00	(8.899.060,00)
11	Beban Tambahan Penghasilan ASN	141.968.362.763,00	128.963.488.640,00	13.004.874.123,00
12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	606.587.680,00	653.971.055,00	(47.383.375,00)
13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	117.921.991,00	102.683.070,00	15.238.921,00
14	Beban Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	48.252.776.300,00	48.954.381.400,00	(701.605.100,00)
15	Beban Tunjangan Khusus Guru	523.687.800,00	574.531.800,00	(50.844.000,00)
16	Beban Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1.462.500.000,00	1.303.750.000,00	158.750.000,00
17	Beban Honorarium	3.614.785.000,00	2.329.595.000,00	1.285.190.000,00
18	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	563.115.000,00	(1.575.000,00)
19	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	55.125.000,00	54.734.400,00	390.600,00
20	Beban Tunjangan Beras DPRD	62.788.140,00	64.598.640,00	(1.810.500,00)
21	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00
22	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.029.500,00	1.102.500,00
23	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	73.445.400,00	68.466.825,00	4.978.575,00
24	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00	20.964.825,00	(7.262.325,00)
25	Beban Tunjangan Reses DPRD	777.000.000,00	787.500.000,00	(10.500.000,00)
26	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	80.180.130,00	270.396,00	79.909.734,00
27	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.757.615.000,00	4.392.175.000,00	365.440.000,00
28	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00	3.312.500.000,00	(12.500.000,00)
29	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
30	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	3.350.800.000,00	3.353.750.000,00	(2.950.000,00)
31	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	54.600.000,00	(11.700.000,00)
32	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.290.000,00	5.460.000,00	(1.170.000,00)
33	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	98.280.000,00	(21.060.000,00)
34	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.896.800,00	3.476.160,00	(579.360,00)
35	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.567.850,00	1.714.000,00	(146.150,00)
36	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00	1.440,00	(240,00)
37	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	223.659.375,00	276.671.875,00	(53.012.500,00)

BPK Perwakilan Kalsel

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
38	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	37.444.640,00	34.559.595,00	2.885.045,00
39	Beban Dana Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	355.543.000,00	398.530.000,00	(42.987.000,00)
40	Beban Pegawai BLUD	410.850.000,00	370.530.000,00	40.320.000,00
	Jumlah	**462.485.466.423,00**	**448.903.233.637,00**	**13.582.232.786,00**

Perbandingan Beban Pegawai LO dengan belanja LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.44
Selisih LO dengan LRA Beban Pegawai Tahun 2023

No	Beban/belanja Pegawai	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Gaji Pokok PNS	185.759.475.634,00	185.759.475.634,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga	15.276.321.407,00	15.276.321.407,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan	6.620.972.496,00	6.620.972.496,00	0,00
4	Beban Tunjangan Fungsional	16.012.136.074,00	16.012.136.074,00	0,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	1.331.640.919,00	1.331.640.919,00	0,00
6	Beban Tunjangan Beras	9.626.928.793,00	9.626.928.793,00	0,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	620.944.809,00	620.944.809,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji	3.142.220,00	3.142.220,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	14.127.295.319,00	14.127.295.319,00	0,00
10	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM)	1.502.753.183,00	1.502.753.183,00	0,00
11	Beban Tambahan Penghasilan ASN	141.968.362.763,00	141.968.362.763,00	0,00
12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	606.587.680,00	606.587.680,00	0,00
13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	117.921.991,00	117.921.991,00	0,00
14	Beban Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	48.252.776.300,00	48.252.776.300,00	0,00
15	Beban Tunjangan Khusus Guru	523.687.800,00	523.687.800,00	0,00
16	Beban Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1.462.500.000,00	1.462.500.000,00	0,00
17	Beban Honorarium	3.614.785.000,00	3.630.710.000,00	(15.925.000,00)
18	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00
19	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	55.125.000,00	55.125.000,00	0,00
20	Beban Tunjangan Beras DPRD	62.788.140,00	62.788.140,00	0,00
21	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00
22	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00
23	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	73.445.400,00	73.445.400,00	0,00
24	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500,00	13.702.500,00	0,00
25	Beban Tunjangan Reses DPRD	777.000.000,00	777.000.000,00	0,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Beban/belanja Pegawai	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
26	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	80.180.130,00	80.180.130,00	0,00
27	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.757.615.000,00	4.757.615.000,00	0,00
28	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00
29	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
30	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	3.350.800.000,00	3.350.800.000,00	0,00
31	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00
32	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00
33	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	77.220.000,00	0,00
34	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.896.800,00	2.896.800,00	0,00
35	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.567.850,00	1.567.850,00	0,00
36	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00	1.200,00	0,00
37	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	223.659.375,00	223.659.375,00	0,00
38	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	37.444.640,00	37.444.640,00	0,00
39	Beban Dana Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	355.543.000,00	355.543.000,00	0,00
40	Beban Pegawai BLUD	410.850.000,00	410.850.000,00	0,00
	Jumlah	**462.485.466.423,00**	**462.501.391.423,00**	**(15.925.000,00)**

Bkad Perwakilan Kalsel

Penjelasan atas selisih Beban Pegawai LO dengan Belanja LRA tahun 2023 sebesar Rp15.925.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.4.45
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Beban Pegawai Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Pegawai LRA			**462.501.391.423,00**
1. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	(1.020.000,00)	(1.020.000,00)
2. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	(2.040.000,00)	(2.040.000,00)
3. Pengurangan Beban Honorarium karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023 Pada DPPKB	0,00	(12.865.000,00)	(12.865.000,00)
Beban Pegawai LO	**0,00**	**(15.925.000,00)**	**462.485.466.423,00**

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
628.826.166.269,58	**423.503.613.083,17**

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp628.826.166.269,58 dan Tahun 2022 sebesar Rp423.503.613.083,17. Terdapat kenaikan Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp205.322.553.186,41 atau naik 48,48%. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.46
Rincian Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Barang	130.742.814.601,90	89.243.309.533,17	41.499.505.068,73
2	Beban Jasa	192.153.330.534,00	147.689.414.748,00	44.463.915.786,00
3	Beban Pemeliharaan	122.261.703.826,00	46.572.313.480,00	75.689.390.346,00
4	Beban Perjalanan Dinas	85.526.794.924,00	60.476.937.582,00	25.049.857.342,00
5	Beban Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	31.915.053.146,00	17.537.246.558,00	14.377.806.588,00
6	Beban Barang dan Jasa Bos	15.896.600.914,00	15.140.082.563,00	756.518.351,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	50.329.868.323,68	46.844.308.619,00	3.485.559.704,68
	Jumlah	**628.826.166.269,58**	**423.503.613.083,17**	**205.322.553.186,41**

Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja LRA Tahun 2023 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4.47
Selisih LO dengan LRA Beban Barang Tahun 2023

No.	Beban/belanja Barang	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.865.502.793,00	5.317.210.487,00	(451.707.694,00)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	44.958.676,00	246.529.625,00	(201.570.949,00)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.068.280.136,00	23.944.853.576,00	(12.876.573.440,00)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	133.806.284,00	133.806.284,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.124.552.081,00	4.065.848.281,00	58.703.800,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	43.598.700,00	44.798.700,00	(1.200.000,00)
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	121.848.741,00	67.446.375,00	54.402.366,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.175.653.972,00	4.094.220.672,00	2.081.433.300,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.452.282.112,00	1.452.282.112,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	187.616.356,00	187.616.356,00	0,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.519.740.438,00	2.510.428.681,00	9.311.757,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*	1.371.480.014,00	1.372.217.931,00	(737.917,00)

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Beban/belanja Barang	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.976.537.245,00	9.796.833.435,00	179.703.810,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	618.212.107,00	614.862.107,00	3.350.000,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.462.654.299,00	1.521.151.015,00	(58.496.716,00)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	164.713.690,00	164.713.690,00	0,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.863.525.008,00	1.822.096.969,00	41.428.039,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	760.643.893,00	758.498.893,00	2.145.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	48.468.468,00	48.468.468,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	570.027.250,00	547.308.950,00	22.718.300,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.237.254.341,00	3.188.158.316,00	49.096.025,00
22	Beban Obat-Obatan-Obat	6.324.683.068,90	2.568.690.560,00	3.755.992.508,90
23	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	738.495.537,00	2.790.490.687,00	(2.051.995.150,00)
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.700.492.841,00	9.199.152.071,0	1.501.340.770,00
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.477.599.321,00	20.659.998.648,00	(6.182.399.327,00)
26	Beban Natura dan Pakan-Natura	16.297.018,00	16.297.018,00	0,00
27	Beban Natura dan Pakan-Pakan	174.690.000,00	174.690.000,00	0,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	392.998.870,00	392.998.870,00	0,00
29	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.508.220.334,00	14.439.965.334,00	68.255.000,00
30	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.027.065.350,00	5.027.065.350,00	0,00
31	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	26.181.100,00	26.181.100,00	0,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	166.500.000,00	166.500.000,00	0,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.155.616.800,00	3.155.616.800,00	0,00
34	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.124.993.739,00	14.773.924.539,00	351.069.200,00
35	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	550.305.000,00	550.305.000,00	0,00
36	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	116.550.000,00	116.550.000,00	0,00
37	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	509.991.000,00	509.991.000,00	0,00
38	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.840.186.000,00	1.840.186.000,00	0,00
39	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.134.880.069,00	1.128.700.069,00	6.180.000,00
40	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	365.287.500,00	365.287.500,00	0,00
41	Belanja Pakaian Siaga	22.135.000,00	22.135.000,00	0,00
42	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	264.869.000,00	264.869.000,00	0,00
43	Beban Pakaian KORPRI	12.215.000,00	12.215.000,00	0,00
44	Beban Pakaian Adat Daerah	404.694.390,00	404.694.390,00	0,00
45	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.751.804.473,00	1.751.804.473,00	0,00
46	Beban Pakaian Olahraga	1.719.320.587,00	1.719.320.587,00	0,00
47	Beban Pakaian Paskibraka	392.776.000,00	392.776.000,00	0,00
48	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	12.610.000,00	12.610.000,00	0,00
JUMLAH		**130.742.814.601,90**	**144.382.365.919,00**	**(13.639.551.317,10)**

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.48
Selisih LO dengan LRA Beban Jasa Tahun 2023

No.	Beban/belanja Jasa	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.873.921.200,00	5.744.321.200,00	129.600.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.092.825.000,00	5.092.825.000,00	0,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.891.670.000,00	2.891.670.000,00	0,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	600.000,00	600.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Ujian	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	3.107.182.000,00	3.107.182.000,00	0,00
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	15.566.389.801,00	13.483.002.888,00	2.083.386.913,00
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	434.388.584,00	434.388.584,00	0,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.995.306.484,00	15.886.613.477,00	(10.891.306.993,00)
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	898.181.250,00	898.181.250,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	181.738.750,00	181.738.750,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	681.440.000,00	681.440.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	627.189.000,00	627.189.000,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.536.800.000,00	2.536.800.000,00	0,00
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	17.687.138.450,00	17.687.138.450,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.267.591.000,00	1.267.591.000,00	0,00
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.685.786.000,00	6.664.086.000,00	21.700.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.364.886.400,00	3.552.270.400,00	(187.384.000,00)
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.700.550.600,00	10.684.350.600,00	16.200.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.260.660.000,00	2.820.010.000,00	440.650.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Caraka	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Beban/belanja Jasa	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
28	Beban Jasa Tenaga Supir	544.200.000,00	544.200.000,00	0,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	526.145.000,00	526.145.000,00	0,00
30	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	131.352.015,00	131.352.015,00	0,00
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	125.700.000,00	125.700.000,00	0,00
32	Beban Jasa Tata Rias	144.250.000,00	144.250.000,00	0,00
33	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	615.030.000,00	615.030.000,00	0,00
34	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	576.963.300,00	696.963.300,00	(120.000.000,00)
35	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
36	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
37	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	61.216.500,00	0,00	61.216.500,00
38	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	738.800.443,00	1.491.262.377,00	(752.461.934,00)
39	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.535.090.810,00	1.535.090.810,00	0,00
40	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	3.457.946.660,00	3.457.946.660,00	0,00
41	Beban Jasa Kalibrasi	189.394.500,00	189.394.500,00	0,00
42	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	82.159.000,00	82.159.000,00	0,00
43	Belanja Jasa Jalan/Tol	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
44	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	95.815.000,00	95.815.000,00	0,00
45	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.150.575.592,00	4.143.575.592,00	7.000.000,00
46	Beban Tagihan Telepon	(7.726.041,00)	0,00	(7.726.041,00)
47	Beban Tagihan Air	790.752.756,00	792.188.456,00	(1.435.700,00)
48	Beban Tagihan Listrik	9.153.642.775,00	9.182.640.286,00	(28.997.511,00)
49	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	336.363.000,00	336.363.000,00	0,00
50	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.292.086.230,00	3.002.044.225,00	290.042.005,00
51	Belanja Paket/Pengiriman	2.258.000,00	2.258.000,00	0,00
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	441.171.619,00	441.171.619,00	0,00
53	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.711.933.936,00	1.711.933.936,00	0,00
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	23.121.277.800,00	23.121.277.800,00	0,00
55	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	51.299.499,00	51.299.499,00	0,00
56	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	400.587.005,00	400.587.005,00	0,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Beban/belanja Jasa	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
57	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	365.401.267,00	365.401.267,00	0,00
58	Beban Sewa Lapangan Lainnya	671.663.333,00	671.663.333,00	0,00
59	Beban Sewa *Grader*	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
60	Belanja Sewa *Excavator*	7.885.453.000,00	13.016.497.000,00	(5.131.044.000,00)
61	Beban Sewa *Asphalt Equipment*	0,00	2.247.600.000,00	(2.247.600.000,00)
62	Beban Sewa *Compacting Equipment*	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
63	Belanja Sewa Alat Pengangkat	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
64	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	15.200.000,00	4.763.679.450,00	(4.748.479.450,00)
65	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	210.334.900,00	2.498.334.900,00	(2.288.000.000,00)
66	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	104.552.000,00	47.352.000,00	57.200.000,00
67	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	983.000,00	983.000,00	0,00
68	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	763.053.382,00	763.053.382,00	0,00
69	Belanja Sewa Mebel	708.965.272,00	708.965.272,00	0,00
70	Beban Sewa Alat Pendingin	115.304.954,00	115.304.954,00	0,00
71	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
72	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	98.919.000,00	0,00	98.919.000,00
73	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	139.639.639,00	139.639.639,00	0,00
74	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	827.546.610,00	827.546.610,00	0,00
75	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	513.023.313,00	513.023.313,00	0,00
76	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
77	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	325.363.800,00	325.363.800,00	0,00
78	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00
79	Beban Sewa Bangunan Terbuka	826.951.000,00	826.951.000,00	0,00
80	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
81	Beban Sewa Hotel	1.810.664.819,00	1.810.664.819,00	0,00
82	Belanja Sewa Asrama	84.100.000,00	84.100.000,00	0,00
83	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	339.920.000,00	339.920.000,00	0,00
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	516.656.300,00	641.356.300,00	(124.700.000,00)
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.839.951.929,00	2.835.849.590,00	4.102.339,00
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	1.350.638.880,00	1.326.620.826,00	24.018.054,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Beban/belanja Jasa	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
	Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan			
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.073.143.680,00	3.683.714.200,00	1.389.429.480,00
88	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.694.554.618,00	4.183.373.318,00	3.511.181.300,00
89	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Kontruksi	84.655.540,00	84.655.540,00	0,00
90	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.760.717.773,00	321.101.880,0	1.439.615.893,00
91	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.048.196.000,00	1.048.196.000,00	0,00
92	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	744.898.740,00	432.907.283,00	311.991.457,00
93	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.338.882.180,00	1.154.134.120,00	184.748.060,00
94	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.790.125.589,00	359.892.000,00	3.430.233.589,00
95	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	5.224.047.951,00	567.747.800,00	4.656.300.151,00
96	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	89.743.500,00	0,00	89.743.500,00
97	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	940.903.000,00	92.468.800,00	848.434.200,00
98	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.310.839.050,00	776.504.200,00	534.334.850,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	979.782.775,00	582.609.775,00	397.173.000,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.034.344.500,00	92.000.000,00	942.344.500,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	49.485.000,00	49.485.000,00	0,00
102	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
103	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	51.192.900,00	51.192.900,00	0,00
104	Beban Bimbingan Teknis	793.975.000,00	793.975.000,00	0,00
105	Beban Diklat Kepemimpinan	433.025.000,00	433.025.000,00	0,00
106	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	905.629,00	905.629,00	0,00
107	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	24.927.132,00	24.927.132,00	0,00
108	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	391.506,00	391.506,00	0,00
109	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.115.646,00	1.115.646,00	0,00

BPK perwakilan Kalsel

No.	Beban/belanja Jasa	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
110	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	93.346.486,00	93.346.486,00	0,00
111	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	263.032,00	263.032,00	0,00
112	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	137.855,00	137.855,00	0,00
113	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.518.282,00	8.518.282,00	0,00
114	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00
115	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	22.009.875,00	22.009.875,00	0,00
116	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.640.979,00	1.640.979,00	0,00
JUMLAH		**192.153.330.534,00**	**197.712.901.372,00**	**(5.559.570.838,00)**

Tabel 5.4.49
Selisih LO dengan LRA Beban Pemeliharaan Tahun 2023

No.	Beban/belanja Pemeliharaan	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.025.659.888,00	1.025.659.888,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.940.000,00	20.940.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.530.950.081,00	2.674.736.345,00	(143.786.264,00)
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal *Computer*	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	76.541.500,00	76.541.500,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.379.485.797,00	7.629.194.713,00	(1.249.708.916,00)
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	162.271.000,00	31.071.000,00	131.200.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No.	Beban/belanja Pemeliharaan	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar			
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(199.894.000,00)	0,00	(199.894.000,00)
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	(133.617.117,00)	0,00	(133.617.117,00)
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	409.653.905,00	227.852.000,00	181.801.905,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	645.247.132,00	515.936.472,00	129.310.660,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	204.373.000,00	45.611.000,00	158.762.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.194.376.550,00	2.194.376.550,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	352.390.000,00	352.390.000,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	108.418.491.090,00	59.025.810.028,00	49.392.681.062,00
22	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	41.965.000,00	41.965.000,00	0,00
JUMLAH		**122.261.703.826,00**	**73.994.954.496,00**	**48.266.749.330,00**

Tabel 5.4.50
Selisih LO dengan LRA Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023

No.	Beban/belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	75.974.744.210,00	75.911.371.887,00	63.372.323,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.468.560.714,00	9.354.485.714,00	114.075.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	83.490.000,00	83.490.000,00	0,00
JUMLAH		**85.526.794.924,00**	**85.349.347.601,00**	**177.447.323,00**

Tabel 5.4.51
Selisih LO dengan LRA Beban Uang/Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023

No.	Beban/belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	795.988.270,00	795.988.270,00	0,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	419.065.515,00	419.065.515,00	0,00
3	Belanja Beasiswa	465.000.000,00	465.000.000,00	

Bupati Perwakilan Kalsel

No.	Beban/belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	299.919.000,00	299.919.000,00	0,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
7	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	29.897.280.361,00	18.858.808.639,00	11.038.471.722,00
JUMLAH		**31.915.053.146,00**	**20.876.581.424,00**	**11.038.471.722,00**

Tabel 5.4.52
Selisih LO dengan LRA Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023

No.	Beban/belanja Barang dan Jasa Bos	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Barang dan Jasa BOS	15.896.600.914,00	15.896.600.914,00	0,00
JUMLAH		**15.896.600.914,00**	**15.896.600.914,00**	**0,00**

Tabel 5.4.53
Selisih LO dengan LRA Beban dan Jasa BLUD Tahun 2023

No.	Beban/belanja Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	50.329.868.323,68	51.647.227.878,00	(1.317.359.554,32)
JUMLAH		**50.329.868.323,68**	**51.647.227.878,00**	**(1.317.359.554,32)**

Penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja LRA tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.4.54
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa LRA			**589.859.979.604,00**
Beban Barang			
1. Penambahan Karena Adanya Utang Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Tahun 2023 Pada Kecamatan Binuang, Penambahan Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan tanggap darurat bencana serta Pengurangan Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023 Pada DPMD, Bappelitbang, Satpol PP, dan Kecamatan CLU	63.511.104,00	(515.218.798,00)	(451.707.694,00)
2. Penambahan Beban Bahan-Bahan Kimia Tahun 2022 dan Pengurangan Beban Bahan-Bahan Kimia Tahun 2023 pada	87.562.068,00	(289.133.017,00)	(201.570.949,00)

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian			
3. Penambahan Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2022 pada RSUD Datu Sanggul, Penambahan Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan tanggap darurat bencana serta pengurangan Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.842.618,00	(12.905.416.058,00)	(12.876.573.440,00)
4. Penambahan Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Tahun 2022 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Tahun 2023 Pada Dinas Pertanian	60.003.800,00	(1.300.000,00)	58.703.800,00
5. Penambahan Beban Bahan-Isi Tabung Gas Tahun 2023 dan pengurangan Beban Bahan-Isi Tabung Gas Tahun 2022 pada RSUD Datu Sanggul	6.600.000,00	(7.800.000,00)	(1.200.000,00)
6. Penambahan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Tahun 2023 dan pengurangan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Tahun 2022 pada Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian	306.473.305,00	(252.070.939,00)	54.402.366,00
7. Penambahan Beban Bahan-Bahan Lainnya dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan tanggap darurat bencana dan Pengurangan Beban Bahan-Bahan Lainnya Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian	2.144.633.300,00	(63.200.000,00)	2.081.433.300,00
8. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Tahun 2023 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Tahun 2022	283.321.700,00	(274.009.943,00)	9.311.757,00
9. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Tahun 2022 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan *Cover* Tahun 2023	17.614.000,00	(18.351.917,00)	(737.917,00)
10. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2023 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Tahun 2022	263.472.810,00	(83.769.000,00)	179.703.810,00

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
11. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Tahun 2023 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD dan Satpol PP	3.470.000,00	(120.000,00)	3.350.000,00
12. Pengurangan Karena Adanya Utang Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Tahun 2023 pada Kecamatan CLS dan Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Tahun 2022	3.200.000,00	(61.696.716,00)	(58.496.716,00)
13. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Tahun 2023 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Tahun 2022	113.489.715,00	(72.061.676,00)	41.428.039,00
14. Pengurangan Karena Adanya Utang Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Tahun 2023 Pada Dinas Pendidikan dan Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.545.000,00	(11.400.000,00)	2.145.000,00
15. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Tahun 2023 Dinas Perindustrian	22.718.300,00	(0,00)	22.718.300,00
16. Penambahan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2023 dan pengurangan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Tahun 2022	648.042.800,00	(598.946.775,00)	49.096.025,00
17. Penambahan Beban Obat-Obatan Tahun 2023 dan pengurangan Beban Obat-Obatan Tahun 2022	13.235.285.916,32	(9.479.293.407,42)	3.755.992.508,90
18. Penambahan Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Tahun 2023 dan pengurangan Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Tahun 2022	714.342.658,00	(2.766.337.808,00)	(2.051.995.150,00)
19. Penambahan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan pengurangan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022	1.692.512.495,00	(191.171.725,00)	1.501.340.770,00
20. Penambahan Utang Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan DPUPR	9.885.482.673,00	(16.067.882.000,00)	(6.182.399.327,00)

DPRD Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
21. Penambahan Beban Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	68.255.000,00	(0,00)	68.255.000,00
22. Penambahan Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	351.069.200,00	(0,00)	351.069.200,00
23. Penambahan Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	6.180.000,00	(0,00)	6.180.000,00
Beban Jasa			
1. Penambahan Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	129.600.000,00	(0,00)	129.600.000,00
2. Penambahan Beban Jasa Tenaga Kesehatan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan tanggap darurat bencana dan Pengurangan Pelunasan Utang Beban Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2021	2.236.236.913,00	(152.850.000,00)	2.083.386.913,00
3. Penambahan Utang Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	640.382.000,00	(11.531.688.993,00)	(10.891.306.993,00)
4. Penambahan Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	21.700.000,00	(0,00)	21.700.000,00
5. Pengurangan Beban Jasa Tenaga Ahli karena Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023	0,00	(187.384.000,00)	(187.384.000,00)
6. Penambahan Beban Jasa Tenaga Kebersihan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	16.200.000,00	(0,00)	16.200.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7. Penambahan Beban Jasa Tenaga Keamanan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	440.650.000,00	(0,00)	440.650.000,00
8. Penambahan Utang Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	19.980.000,00	(139.980.000,00)	(120.000.000,00)
9. Penambahan Utang Beban Jasa Pelayanan Kearsipan Tahun 2023	61.216.500,00	(0,00)	61.216.500,00
10. Penambahan Utang Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	109.823.100,00	(862.285.034,00)	(752.461.934,00)
11. Penambahan Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	7.000.000,00	(0,00)	7.000.000,00
12. Penambahan Utang Beban Tagihan Telepon Tahun 2023 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Telepon Tahun 2022	7.206.100,00	(14.932.141,00)	(7.726.041,00)
13. Penambahan Utang Beban Tagihan Air Tahun 2023 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Air Tahun 2022	61.513.800,00	(62.949.500,00)	(1.435.700,00)
14. Penambahan Utang Beban Tagihan Listrik Tahun 2023 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Tagihan Listrik Tahun 2022	361.187.007,00	(390.184.518,00)	(28.997.511,00)
15. Penambahan Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2023 dan Pengurangan Atas Pelunasan Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Tahun 2022	322.600.112,00	(32.558.107,00)	290.042.005,00
16. Pengurangan Beban Sewa Excavator karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	0,00	(5.131.044.000,00)	(5.131.044.000,00)
17. Pengurangan Beban Beban Sewa Asphalt Equipment karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	0,00	(2.247.600.000,00)	(2.247.600.000,00)

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
18. Pengurangan Beban Sewa Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	0,00	(4.748.479.450,00)	(4.748.479.450,00)
19. Pengurangan Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	0,00	(2.288.000.000,00)	(2.288.000.000,00)
20. Penambahan Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan tanggap darurat bencana	57.200.000,00	(0,00)	57.200.000,00
21. Penambahan Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan tanggap darurat bencana	98.919.000,00	(0,00)	98.919.000,00
22. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	73.720.650,00	(198.420.650,00)	(124.700.000,00)
23. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	2.711.105.233,00	(2.707.002.894,00)	4.102.339,00
24. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	1.193.237.080,00	(1.169.219.026,00)	24.018.054,00
25. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	3.511.402.480,00	(2.121.973.000,00)	1.389.429.480,00
26. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	3.716.937.300,00	(205.756.000,00)	3.511.181.300,00

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023			
27. Pengurangan Beban Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	1.439.615.893,00	(0,00)	1.439.615.893,00
28. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	974.529.478,00	(662.538.021,00)	311.991.457,00
29. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	3.210.646.876,00	(3.025.898.816,00)	184.748.060,00
30. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	3.703.192.889,00	(272.959.300,00)	3.430.233.589,00
31. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	7.704.728.081,00	(3.048.427.930,00)	4.656.300.151,00
32. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Tahun 2023	89.743.500,00	(0,00)	89.743.500,00
33. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta Tahun 2023	848.434.200,00	(0,00)	848.434.200,00

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
34. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan Tahun 2023	534.334.850,00	(0,00)	534.334.850,00
35. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	421.659.000,00	(24.486.000,00)	397.173.000,00
36. Penambahan Utang Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Tahun 2023	942.344.500,00	(0,00)	942.344.500,00
Beban Pemeliharaan			
1. Penambahan karena adanya Utang Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	1.193.293.689,00	(1.337.079.953,00)	(143.786.264,00)
2. Penambahan karena adanya Utang Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023 dan Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	2.183.628.702,00	(3.433.337.618,00)	(1.249.708.916,00)
3. Penambahan karena adanya Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Tahun 2023	131.200.000,00	(0,00)	131.200.000,00
4. Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	0,00	(199.894.000,00)	(199.894.000,00)
5. Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	0,00	(133.617.117,00)	(133.617.117,00)
6. Penambahan karena adanya Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Tahun 2023	181.801.905,00	(0,00)	181.801.905,00

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7. Penambahan karena adanya Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II Tahun 2023 dan Pengurangan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II karena Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023	443.617.660,00	(314.307.000,00)	129.310.660,00
8. Penambahan karena adanya Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama Tahun 2023	158.762.000,00	(0,00)	158.762.000,00
9. Penambahan karena adanya Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Tahun 2023	49.392.681.062,00	(0,00)	49.392.681.062,00
Beban/belanja Perjalanan Dinas			
1. Penambahan Beban Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	63.372.323,00	(0,00)	63.372.323,00
2. Penambahan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Atribusi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana	114.075.000,00	(0,00)	114.075.000,00
Beban/belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat			
1. Penambahan Utang Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Tahun 2023 Pada DPUPR	11.038.471.722,00	(0,00)	11.038.471.722,00
Beban Barang dan Jasa BLUD			
1. Penambahan Beban Barang Dan Jasa dikarenakan adanya penyesuaian utang BLUD Tahun 2023 dan Pengurangan atas Pelunasan utang BLUD Tahun 2022	4.288.277.602,68	(5.605.637.157,00)	(1.317.359.554,32)
Beban Barang dan Jasa LO	**134.875.856.670,00**	**(95.909.670.004,42)**	**628.826.166.269,58**

5.4.2.3 Beban Bunga

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7.252.202.772,00	**7.578.695.680,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Beban Bunga Tahun 2023 sebesar Rp7.252.202.772,00 adalah beban bunga dalam rangka pembayaran biaya fasilitas pinjaman pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank atau BUMN yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan RSUD baru di Kabupaten Tapin. Beban Bunga Tahun 2023 sebesar Rp7.252.202.772,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.578.695.680,00. Terdapat penurunan Beban Bunga Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp326.492.908,00 atau turun 4,31%. Rincian Beban Bunga Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.55
Rincian Beban Bunga-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.252.202.772,00	7.578.695.680,00	(326.492.908,00)
	Jumlah	**7.252.202.772,00**	**7.578.695.680,00**	**(326.492.908,00)**

Perbandingan Beban Bunga LO dengan Belanja LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.56
Selisih LO dengan LRA Beban Bunga Tahun 2023

No	Beban/belanja Bunga	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.252.202.772,00	7.252.202.772,00	0,00
	Jumlah	**7.252.202.772,00**	**7.252.202.772,00**	**0,00**

5.4.2.4 Beban Hibah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
127.156.889.624,00	**56.698.494.864,00**

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan, negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp127.156.889.624,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp56.698.494.864,00. Terdapat kenaikan Beban Hibah Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp70.458.394.760,00 atau naik sebesar 124,27%. Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.57
Rincian Beban Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.065.137.800,00	2.437.048.100,00	15.628.089.700,00
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.052.990.000,00	1.092.770.000,00	(39.780.000,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	108.038.761.824,00	53.168.676.764,00	54.870.085.060,00
	Jumlah	**127.156.889.624,00**	**56.698.494.864,00**	**70.458.394.760,00**

Perbandingan Beban Hibah LO dengan Belanja LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.58
Selisih LO dengan LRA Beban Hibah Tahun 2023

No	Beban/belanja Hibah	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	18.065.137.800,00	18.065.137.800,00	0,00
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.052.990.000,00	1.052.990.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	108.038.761.824,00	79.636.679.030,00	28.402.082.794,00
	Jumlah	**127.156.889.624,00**	**98.754.806.830,00**	**28.402.082.794,00**

Penjelasan atas selisih Beban Hibah LO dengan Belanja LRA tahun 2023 sebesar Rp28.402.082.794,00 terdiri dari:

Tabel 5.4.59
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Rincian Beban Hibah Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Hibah LRA			**98.754.806.830,00**
1. Penambahan Karena Adanya Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 Pada Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan Sekretariat Daerah	28.402.082.794,00	(0,00)	28.402.082.794,00
Beban Hibah LO	**28.402.082.794,00**	**(0,00)**	**127.156.889.624,00**

Penjelasan masing-masing jenis Beban Hibah adalah sebagai berikut:

a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp18.065.137.800,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.437.048.100,00. Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.60
Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat -LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Pembangunan Rumah Dinas BPN Kabupaten Tapin	0,00	753.423.000,00	(753.423.000,00)
2	Pembangunan Kantor KORAMIL Candi Laras Utara	0,00	89.315.100,00	(89.315.100,00)
3	Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapin	0,00	1.096.938.000,00	(1.096.938.000,00)
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Polsek Candi Laras Utara	0,00	497.372.000,00	(497.372.000,00)
5	Hibah Uang kepada BAWASLU Kabupaten Tapin	6.362.081.600,00	0,00	6.362.081.600,00
6	Hibah Uang Kepada KPU Kabupaten Tapin	11.703.056.200,00	0,00	11.703.056.200
	Jumlah	**18.065.137.800,00**	**2.437.048.100,00**	**15.628.089.700,00**

b. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023 sebesar Rp1.052.990.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.092.770.000,00. Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.61
Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik-LO
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Partai PDI Perjuangan	97.990.000,00	97.990.000,00	0,00
2	Partai Golkar	375.630.000,00	375.630.000,00	0,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	87.880.000,00	87.880.000,00	0,00
4	Partai Persatuan Pembangunan (P3)	57.920.000,00	57.920.000,00	0,00
5	Partai DEMOKRAT	97.540.000,00	97.540.000,00	0,00
6	Partai BERKARYA	0,00	39.780.000,00	(39.780.000,00)
7	Partai NASDEM	87.660.000,00	87.660.000,00	0,00
8	Partai GERINDRA	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	61.310.000,00	61.310.000,00	0,00
10	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	97.980.000,00	97.980.000,00	0,00
	Jumlah	**1.052.990.000,00**	**1.092.770.000,00**	**(39.780.000,00)**

BPK Perwakilan Kalsel

c. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 sebesar Rp108.038.761.824,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp53.168.676.764,00. Terdapat kenaikan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp54.870.085.060,00. Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.62
Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.629.562.195,00	15.134.761.900,00	8.494.800.295,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	82.081.937.129,00	36.432.859.864,00	45.649.077.265,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.327.262.500,00	1.601.055.000,00	726.207.500,00
	Jumlah	**108.038.761.824,00**	**53.168.676.764,00**	**54.870.085.060,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
19.167.000.000,00	**9.232.620.700,00**

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp19.167.000.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp9.232.620.700,00. Terdapat kenaikan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp9.934.379.300,00 atau naik sebesar 107,60%. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.63
Rincian Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	11.589.400.000,00	4.279.598.100,00	7.309.801.900,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.971.500.000,00	2.240.700.000,00	2.730.800.000,00

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	55.122.600,00	(55.122.600,00)
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	2.606.100.000,00	2.657.200.000,00	(51.100.000,00)
	Jumlah	**19.167.000.000,00**	**9.232.620.700,00**	**9.934.379.300,00**

Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.64
Selisih LO dengan LRA Beban Bantuan Sosial Tahun 2023

No	Beban/belanja Bantuan Sosial	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	11.589.400.000,00	11.589.400.000,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.971.500.000,00	4.971.500.000,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	2.606.100.000,00	2.606.100.000,00	0,00
	Jumlah	**19.167.000.000,00**	**19.167.000.000,00**	**0,00**

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.917.587.397,81	**1.205.276.346,31**

Penyisihan Piutang merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan sesuai nilai yang diharapkan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Perhitungan Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan metode umur piutang (*aging schedule*). Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.917.587.397,81 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.205.276.346,31. Terdapat kenaikan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp712.311.051,50 atau naik sebesar 59,10%. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.65
Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	804.956.750,96	720.396.088,97	84.560.661,99
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pajak	1.095.248.800,18	476.761.346,37	618.487.453,81
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	11.520.269,67	8.118.910,97	3.401.358,70
4	Beban Penyisihan Uang Muka	5.861.577,00	0,00	5.861.577,00
	Jumlah	**1.917.587.397,81**	**1.205.276.346,31**	**712.311.051,50**

BPK Perwakilan Kalsel

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada Tahun 2016 diakui penyisihan piutang.

5.4.2.7 Beban Lain-lain

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Beban Lain-Lain Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat penurunan/kenaikan Beban Lain-lain Tahun 2023 dibanding Tahun 2022.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
277.091.698.555,40	**247.397.968.907,95**

Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu Aset Tetap dan Aset Tetap Tidak Berwujud selama masa manfaat aset bersangkutan. Hal ini sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp277.091.698.555,40 dan Tahun 2022 sebesar Rp247.397.968.907,95. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp29.693.729.647,45 atau naik 12,00%. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.66
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin	44.424.547.003,95	37.766.960.994,87	6.657.586.009,08
2	Gedung Dan Bangunan	73.525.787.894,00	63.583.710.321,08	9.942.077.572,92
3	Jalan Jaringan Dan Irigasi	158.628.967.277,45	145.386.993.199,00	13.241.974.078,45
4	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tak Berwujud	512.396.380,00	660.304.393,00	(147.908.013,00)
	Jumlah	**277.091.698.555,40**	**247.397.968.907,95**	**29.693.729.647,45**

Perhitungan Beban Penyusutan diberlakukan mulai Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Metode penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus selain Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Lainnya (hewan ternak, buku, dan tanaman);
b. Nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu; dan
c. Nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan.

BPK Perwakilan Kalsel

Penjelasan masing-masing jenis Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

5.4.2.8.1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
44.424.547.003,95	**37.766.960.994,87**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp44.424.547.003,95 dan Tahun 2022 sebesar Rp37.766.960.994,87. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp6.657.586.009,08 atau naik 17,63%. Adapun rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.67
Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00	1.913.428.834,00	(1.913.428.834,00)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	44.424.547.003,95	35.167.732.020,87	9.256.814.983,08
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	139.035.373,00	(139.035.373,00)
9	Beban Penyusutan Komputer	0,00	546.764.767,00	(546.764.767,00)
	Jumlah	**44.424.547.003,95**	**37.766.960.994,87**	**6.657.586.009,08**

5.4.2.8.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
73.525.787.894,00	**63.583.710.321,08**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp73.525.787.894,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp63.583.710.321,08. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp9.942.077.572,92 atau naik 15,64%. Adapun rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.68
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	73.525.787.894,00	63.583.710.321,08	9.942.077.572,92
	Jumlah	**73.525.787.894,00**	**63.583.710.321,08**	**9.942.077.572,92**

5.4.2.8.3. Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
158.628.967.277,45	**145.386.993.199,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp158.628.967.277,45 dan Tahun 2022 sebesar Rp145.386.993.199,00. Terdapat kenaikan Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp13.241.974.078,45 atau naik 9,11%. Adapun rincian Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.69
Rincian Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	158.628.967.277,45	145.386.993.199,00	13.241.974.078,45
	Jumlah	**158.628.967.277,45**	**145.386.993.199,00**	**13.241.974.078,45**

5.4.2.8.4. Beban Penyusutan Aset Lain-lain

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Beban Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat penurunan/kenaikan Beban Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 dibanding Tahun 2022.

5.4.2.8.5. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat penurunan/kenaikan Beban Penyusutan Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 dibanding Tahun 2022.

5.4.2.8.6. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
512.396.380,00	**660.304.393,00**

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp512.396.380,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp660.304.393,00. Terdapat penurunan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp147.908.013,00 atau turun 22,40%. Adapun rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.70
Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	512.396.380,00	660.304.393,00	(147.908.013,00)
	Jumlah	**512.396.380,00**	**660.304.393,00**	**(147.908.013,00)**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.2.9 Beban Transfer

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
103.208.032.265,00	**72.062.714.136,50**

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Beban Transfer terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.4.71
Rincian Beban Transfer -LO Tahun 2023 dan 2022

No	Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bagi Hasil	2.830.448.193,00	2.519.839.550,50	310.608.642,50
2	Beban Bantuan Keuangan	100.377.584.072,00	69.542.874.586,00	30.834.709.486,00
	Jumlah	**103.208.032.265,00**	**72.062.714.136,50**	**31.145.318.128,50**

Perbandingan Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.72
Selisih LO dengan LRA Beban Transfer Tahun 2023

No	Beban/Belanja Transfer	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LRA dengan LO (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Bagi Hasil	2.830.448.193,00	2.830.448.193,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan	100.377.584.072,00	197.528.570.658,00	(97.150.986.586,00)
	Jumlah	**103.208.032.265,00**	**200.359.018.851,00**	**(97.150.986.586,00)**

Penjelasan selisih Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA tahun 2023 sebesar Rp97.150.986.586,00 terdiri dari:

Tabel 5.4.73
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Beban Transfer Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Transfer LRA			**200.359.018.851,00**
1. Pengurangan Beban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBN Karena Pelaksanaan kegiatannya di Pemerintahan Desa dan Pendapatannya pun langsung di transfer dari RKUD ke RKD	0,00	(97.150.986.586,00)	(97.150.986.586,00)
Beban Transfer LO	**0,00**	**(97.150.986.586,00)**	**103.208.032.265,00**

Penjelasan masing-masing jenis Beban Transfer adalah sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.2.9.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.830.448.193,00	**2.519.839.550,50**

Beban Transfer Bagi Hasil terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.4.74
Rincian Beban Transfer Bagi Hasil-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.363.464.246,00	2.267.224.672,50	96.239.573,50
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	466.983.947,00	252.614.878,00	214.369.069,00
	Jumlah	**2.830.448.193,00**	**2.519.839.550,50**	**310.608.642,50**

Penjelasan masing-masing jenis Beban Transfer Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.363.464.246,00	**2.267.224.672,50**

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 sebesar Rp2.363.464.246,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.267.224.672,50. Terdapat kenaikan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp96.239.573,50. Beban transfer bagi hasil pajak daerah merupakan beban transfer yang dianggarkan minimal 10% dari pendapatan pajak daerah. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.75
Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Kecamatan	Banyaknya Desa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Binuang	8	212.331.262,00	154.955.524,50	57.375.737,50
2.	Tapin Selatan	10	166.673.452,00	167.114.151,00	(440.699,00)
3.	Tapin Tengah	17	229.479.592,00	370.044.558,50	(140.564.966,50)
4.	Tapin Utara	12	187.210.428,00	139.260.364,50	47.950.063,50
5.	Candi Laras Selatan	12	191.527.329,00	194.443.897,50	(2.916.568,50)
6.	Candi Laras Utara	13	254.546.117,00	255.063.089,00	(516.972,00)
7.	Bakarangan	12	182.116.047,00	211.435.315,00	(29.319.268,00)
8.	Piani	8	117.804.633,00	130.777.064,50	(12.972.431,50)
9.	Bungur	12	209.945.314,00	179.339.306,50	30.606.007,50
10.	Lokpaikat	8	172.517.351,00	134.824.270,00	37.693.081,00
11.	Salam Babaris	6	248.769.005,00	153.009.061,50	95.759.943,50
12.	Hatungun	8	190.543.716,00	176.958.070,00	13.585.646,00
Jumlah			**2.363.464.246,00**	**2.267.224.672,50**	**96.239.573,50**

BPK Perwakilan Kalsel

b. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
466.983.947,00	**252.614.878,00**

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 sebesar Rp466.983.947,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp252.614.878,00. Terdapat kenaikan Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp214.369.069,00. Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya daerah merupakan beban transfer bagi hasil retribusi yang dianggarkan minimal 10% dari pendapatan retribusi daerah. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.76
Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Kecamatan	Banyaknya Desa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Binuang	8	38.693.398,00	17.189.898,00	21.503.500,00
2.	Tapin Selatan	10	39.739.205,00	21.626.198,00	18.113.007,00
3.	Tapin Tengah	17	51.206.103,00	26.971.791,00	24.234.312,00
4.	Tapin Utara	12	36.782.719,00	15.977.133,00	20.805.586,00
5.	Candi Laras Selatan	12	37.712.022,00	22.336.951,50	15.375.070,50
6.	Candi Laras Utara	13	53.354.080,00	31.159.721,50	22.194.358,50
7.	Bakarangan	12	33.062.225,00	17.631.233,00	15.430.992,00
8.	Piani	8	23.521.448,00	14.875.978,00	8.645.470,00
9.	Bungur	12	39.826.884,00	23.048.097,00	16.778.787,00
10.	Lokpaikat	8	33.984.846,00	18.174.251,00	15.810.595,00
11.	Salam Babaris	6	41.499.979,00	19.806.676,00	21.693.303,00
12.	Hatungun	8	37.601.038,00	23.816.950,00	13.784.088,00
Jumlah			**466.983.947,00**	**252.614.878,00**	**214.369.069,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.2.9.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
100.377.584.072,00	**69.542.874.586,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 sebesar Rp100.377.584.072,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp69.542.874.586,00. Terdapat kenaikan Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp30.834.709.486,00 atau naik 44,34%. Beban Transfer Bantuan Keuangan adalah beban transfer yang dianggarkan minimal 10% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Beban Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.4.77
Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	100.377.584.072,00	69.542.874.586,00	30.834.709.486,00
	Jumlah	**100.377.584.072,00**	**69.542.874.586,00**	**30.834.709.486,00**

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.4.78
Rincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Kecamatan	Banyaknya Desa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
1.	Binuang	8	6.488.148.738,00	4.409.029.013,00	2.079.119.725,00
2.	Tapin Selatan	10	8.132.753.600,00	5.493.240.636,00	2.639.512.964,00
3.	Tapin Tengah	17	13.641.054.072,00	9.419.155.014,00	4.221.899.058,00
4.	Tapin Utara	12	9.020.994.096,00	6.431.348.644,00	2.589.645.452,00
5.	Candi Laras Selatan	12	9.465.211.513,00	6.521.947.245,00	2.943.264.268,00
6.	Candi Laras Utara	13	10.900.591.463,00	7.450.560.861,00	3.450.030.602,00
7.	Bakarangan	12	9.377.243.151,00	6.489.825.723,00	2.887.417.428,00
8.	Piani	8	6.386.069.505,00	4.463.474.113,00	1.922.595.392,00
9.	Bungur	12	9.405.707.815,00	6.552.273.522,00	2.853.434.293,00
10.	Lokpaikat	8	6.155.622.873,00	4.355.192.838,00	1.800.430.035,00
11.	Salam Babaris	6	4.733.159.818,00	3.253.197.026,00	1.479.962.792,00
12.	Hatungun	8	6.243.043.944,00	4.313.482.401,00	1.929.561.543,00
13.	Iuran BPJS (Kepala Desa dan Perangkat Desa)		427.983.484,00	390.147.550,00	37.835.934,00
Jumlah			**100.377.584.072,00**	**69.542.874.586,00**	**30.834.709.486,00**

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi dan Transfer

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
100.859.726.284,66	**272.371.748.657,35**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp100.859.726.284,66 dan Tahun 2022 sebesar Rp 272.371.748.657,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.79
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi dan Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan	1.727.964.769.591,45	1.538.954.366.012,28
2	Beban	(1.627.105.043.306,79)	(1.266.582.617.354,93)
	Jumlah	**100.859.726.284,66**	**272.371.748.657,35**

BPK Perwakilan Kalsel

5.4.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(3.132.380.988,71)	**(3.119.054.099,00)**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar (Rp3.132.380.988,71) dan Tahun 2022 sebesar (Rp 3.119.054.099,00) sebagai berikut:

Tabel 5.4.80
Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00
2	Jumlah Defisit Non Operasional	(3.132.380.988,71)	(3.119.054.099,00)
	Jumlah	**(3.132.380.988,71)**	**(3.119.054.099,00)**

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.81
Kenaikan/Penurunan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Defisit Atas Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non lancar	3.132.380.988,71	3.119.054.099,00	13.326.889,71
	Jumlah	**3.132.380.988,71**	**3.119.054.099,00**	**13.326.889,71**

5.4.5 Pos Luar Biasa

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.465.567.862,00	**2.159.404.542,00**

Pos Luar Biasa merupakan beban tak terduga Tahun 2023 sebesar Rp3.465.567.862,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.159.404.542,00. Terdapat kenaikan Beban Luar Biasa Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.306.163.320,00 atau naik 60,49%.

Tabel 5.4.82
Rincian Beban Tak Terduga -LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Beban Tak Terduga	3.465.567.862,00	2.159.404.542,00	1.306.163.320,00
	Jumlah	**3.465.567.862,00**	**2.159.404.542,00**	**1.306.163.320,00**

Perbandingan Beban Tak Terduga LO dengan Belanja Transfer LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.4.83
Selisih LO dengan LRA Beban Tak Terduga Tahun 2023

No	Beban/Belanja Tak Terduga	Tahun 2023 (Rp)		Selisih LO dengan LRA (Rp)
		LO	LRA	
1	Beban Tak Terduga	3.465.567.862,00	8.943.655.185,00	(5.478.087.323,00)
	Jumlah	**3.465.567.862,00**	**8.943.655.185,00**	**(5.478.087.323,00)**

Penjelasan selisih Beban Tak Terduga LO dengan Belanja LRA tahun 2023 sebesar Rp5.478.087.323,00 terdiri dari:

Tabel 5.4.84
Penjelasan Selisih LO dengan LRA Beban Tak Terduga Tahun 2023

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Tak Terduga LRA			**8.943.655.185,00**
1. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(8.996.000,00)	(8.996.000,00)
2. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(16.500.000,00)	(16.500.000,00)
3. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Lainnya dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(1.843.300.000,00)	(1.843.300.000,00)
4. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(29.215.800,00)	(29.215.800,00)
5. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(3.120.000,00)	(3.120.000,00)
6. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(3.735.000,00)	(3.735.000,00)
7. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)
8. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(68.255.000,00)	(68.255.000,00)
9. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(351.069.200,00)	(351.069.200,00)
10. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(6.180.000,00)	(6.180.000,00)
11. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dalam Rangka untuk	0,00	(129.600.000,00)	(129.600.000,00)

BPK Perwakilan Kalsel

Uraian	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023			
12. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(2.187.000.000,00)	(2.187.000.000,00)
13. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
14. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(21.700.000,00)	(21.700.000,00)
15. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Kebersihan dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(16.200.000,00)	(16.200.000,00)
16. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Tenaga Keamanan dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(440.650.000,00)	(440.650.000,00)
17. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(7.000.000,00)	(7.000.000,00)
18. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(57.200.000,00)	(57.200.000,00)
19. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(98.919.000,00)	(98.919.000,00)
20. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(63.372.323,00)	(63.372.323,00)
21. Pengurangan Beban Tak Terduga ke Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka untuk Penanganan Pengendalian Inflasi Daerah dan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023	0,00	(114.075.000,00)	(114.075.000,00)
Beban Tak Terduga LO	**0,00**	**(5.478.087.323,00)**	**3.465.567.862,00**

5.4.6 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(3.465.567.862,00)	**(2.159.404.542,00)**

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar (Rp3.465.567.862,00) dan Tahun 2022 sebesar (Rp2.159.404.542,00).

Bpk. Perwakilan Kalsel

5.4.7 Surplus/Defisit-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
94.261.777.433,95	**267.093.290.016,35**

Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp94.261.777.433,95 dan Tahun 2022 sebesar Rp267.093.290.016,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.85
Rincian Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Surplus /Defisit dari Kegiatan Operasional	100.859.726.284,66	272.371.748.657,35
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.132.380.988,71)	(3.119.054.099,00)
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Pos Luar Biasa	(3.465.567.862,00)	(2.159.404.542,00)
	Surplus/Defisit- LO	**94.261.777.433,95**	**267.093.290.016,35**

BPK Perwakilan Kalsel

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Komponen-Komponen Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung. Laporan Arus Kas Tahun 2023 menunjukkan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp3.208.637.231,20 Hal ini diperoleh dari saldo awal kas Pemerintah Kabupaten ditambah/dikurangi dengan arus masuk kas dan arus keluar dari Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan, Arus Kas Aktivitas Pembiayaan, dan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Arus Kas Tahun 2023

Jenis Aktivitas	Arus Masuk (Rp)	Arus Keluar (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Arus Kas Tahun 2023:			
- Operasi	1.567.979.456.479,12	1.386.838.054.665,00	181.141.401.814,12
- Investasi Non Keuangan	199.368.552,00	347.008.780.652,45	(346.809.412.100,45)
- Pendanaan	20.000.000,00	58.831.163.012,00	(58.811.163.012,00)
- Non Anggaran	83.481.690.568,00	83.481.690.568,00	0,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas di BUD, BLUD, JKN, Bendahara Penerimaan dan BOS			(224.479.173.298,33)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan JKN			227.687.810.529,53
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, JKN, Bendahara Penerimaan dan BOS			3.208.637.231,20
Saldo Akhir terdiri dari:			
- Kas di BUD (Kasda)			362.218.868,43
- Kas di Bendahara Pengeluaran			0,00
- Kas di BLUD			391.374.384,77
- Kas di Bendahara FKTP			2.194.838.259,00
- Kas di Bendahara BOS			260.205.719
- Kas Lainnya			0,00
- Setara Kas			0,00

Penjelasan masing-masing komponen arus kas tersebut adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
181.141.401.814,12	**555.087.404.483,43**

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 menunjukkan saldo lebih sebesar Rp181.141.401.814,12 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:		
Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	28.394.827.563,25
Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	4.376.818.354,01
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	5.404.791.545,00

BPK Perwakilan Kalsel

Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah		Rp.	61.751.692.739,86
Dana Perimbangan		Rp	1.208.315.231.559,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		Rp.	0,00
Penerimaan Dana Desa		Rp.	97.150.986.586,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil		Rp.	154.329.991.387,00
Penerimaan Hibah		Rp.	34.400.000,00
Penerimaan Lainnya		Rp.	8.220.716.745,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**Rp.**	**1.567.979.456.479,12**
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:			
Pembayaran Pegawai		Rp.	462.501.391.423,00
Pembayaran Barang dan Jasa		Rp.	589.859.979.604,00
Pembayaran Bunga		Rp.	7.252.202.772,00
Pembayaran Hibah		Rp.	98.754.806.830,00
Pembayaran Bantuan Sosial		Rp.	19.167.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga		Rp.	8.943.655.185,00
Pembayaran Bagi Hasil		Rp.	2.830.448.193,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		Rp.	197.528.570.658,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp.**	**1.386.838.054.665,00**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**Rp.**	**181.141.401.814,12**

BPK Perwakilan Kalsel

Perbandingan Aktivitas Operasi-Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023

Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:			
1. Penerimaan Pajak Daerah	28.394.827.563,25	28.394.827.563,25	0,00
2. Penerimaan Retribusi Daerah	4.376.818.354,01	4.376.818.354,01	0,00
3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	0,00
4. Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah	61.751.692.739,86	61.951.061.291,86	(199.368.552,00)
5. Penerimaan Dana Perimbangan	1.208.315.231.559,00	1.208.315.231.559,00	0,00
6. Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
7. Penerimaan Dana Desa	97.150.986.586,00	97.150.986.586,00	0,00
8. Penerimaan Dana Bagi Hasil	154.329.991.387,00	154.329.991.387,00	0,00
9. Penerimaan Hibah	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00
10. Penerimaan Lainnya	8.220.716.745,00	8.220.716.745,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**1.567.979.456.479,12**	**1.568.178.825.031,12**	**(199.368.552,00)**
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:			

Uraian		LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
1.	Pembayaran Pegawai	462.501.391.423,00	462.501.391.423,00	0,00
2.	Pembayaran Barang dan Jasa	589.859.979.604,00	589.859.979.604,00	0,00
3.	Pembayaran Bunga	7.252.202.772,00	7.252.202.772,00	0,00
4.	Pembayaran Hibah	98.754.806.830,00	98.754.806.830,00	0,00
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	19.167.000.000,00	19.167.000.000,00	0,00
6.	Pembayaran Tak Terduga	8.943.655.185,00	8.943.655.185,00	0,00
7.	Pembayaran Bagi Hasil	2.830.448.193,00	2.830.448.193,00	0,00
8.	Pembayaran Bantuan Keuangan	197.528.570.658,00	197.528.570.658,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**1.386.838.054.665,00**	**1.386.838.054.665,00**	**0,00**

Terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada Aktivitas Operasi sebesar Rp199.368.552,00 yang disebabkan oleh perbedaan pengelompokan atas Pos Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan. Pada LAK dikelompokan ke Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sedangkan pada LRA dikelompokan ke Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang merupakan Hasil Penjualan Peralatan Mesin dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar Rp199.368.552,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(346.809.412.100,45)	**(482.661.656.506,00)**

Arus kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 menunjukkan saldo kurang sebesar Rp346.809.412.100,45 merupakan selisih arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan:			
Hasil Penjualan Peralatan Mesin		Rp.	165.537.352,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		Rp.	33.831.200,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya		Rp.	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**Rp.**	**199.368.552,00**
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan:			
Perolehan Tanah		Rp.	0,00
Perolehan Peralatan Dan Mesin		Rp.	55.122.728.380,00
Perolehan Gedung Dan Bangunan		Rp.	94.152.883.520,90
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		Rp.	179.002.281.236,55
Perolehan Aset Tetap Lainnya		Rp.	2.731.668.45400
Penyertaan Modal Daerah		Rp.	15.999.219.061,00
Perolehan Aset Lainnya		Rp.	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp.**	**347.008.780.652,45**
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	**Rp.**	**(346.809.412.100,45)**

BPK Perwakilan Kalsel

Perbandingan Aktivitas Investasi Non Keuangan - Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pendapatan dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.3
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2023

Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan :			
1. Hasil Penjualan Peralatan Mesin	165.537.352,00	0,00	165.537.352,00
2. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	33.831.200,00	0,00	33.831.200,00
3. Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**199.368.552,00**	**0,00**	**199.368.552,00**
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan :			
1. Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
2. Perolehan Peralatan Dan Mesin	55.122.728.380,00	55.122.728.380,00	0,00
3. Perolehan Gedung Dan Bangunan	94.152.883.520,90	94.152.883.520,90	0,00
4. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	179.002.281.236,55	179.002.281.236,55	0,00
5. Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.731.668.454,00	2.731.668.454,00	0,00
6. Penyertaan Modal Daerah	15.999.219.061,00	15.999.219.061,00	0,00
7. Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**347.008.780.652,45**	**347.008.780.652,45**	**0,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada Aktivitas Investasi sebesar Rp199.368.552,00 yang disebabkan oleh perbedaan pengelompokan atas Pos Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan. Pada LAK dikelompokan ke Arus Kas dari Aktivitas Investasi sedangkan pada LRA dikelompokan ke Lain-Lain PAD yang Sah yaitu Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp165.537.352,00 dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA sebesar Rp33.831.200,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(58.811.163.012,00)	**22.469.545.391,00**

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Tahun 2023 menunjukkan saldo sebesar (Rp58.811.163.012,00) yang merupakan selisih jumlah arus kas masuk dengan jumlah arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan:		
Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Rp.	20.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**Rp.**	**20.000.000,00**
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan:		
Pemberian Pokok Utang	Rp.	58.831.163.012,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp.**	**58.831.163.012,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**Rp.**	**(58.811.163.012,00)**

Perbandingan Aktivitas Pendanaan - Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Laporan Arus Kas dengan Pendanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.5.4
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023

Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih / (Kurang) (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan:			
1. Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan:			
1. Pembayaran Pokok Utang	58.831.163.012,00	58.831.163.012,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**58.831.163.012,00**	**58.831.163.012,00**	**0,00**

Tidak terdapat selisih antara LAK dengan LRA pada aktivitas pembiayaan baik pada arus kas masuk maupun arus kas keluarnya.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	**0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 menunjukkan saldo Rp0,00 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp.	83.481.690.568,00
Penerimaan Transfer	Rp.	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**Rp.**	**83.481.690.568,00**
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp.	83.481.690.568,00
Pengeluaran Transfer	Rp.	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**Rp.**	**83.481.690.568,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran	**Rp.**	**0,00**

BMK Perwakilan Kalsel

Penerimaan PFK dan Pengeluaran PFK sebesar Rp83.481.690.568,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.5
Penerimaan PFK dan Pengeluaran PFK Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	1.941.114.487,00
2	IWP(8%) Iuran Wajib Pegawai	12.823.886.763,00
3	BPJS Kesehatan PNS	1.581.755.649,00
4	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	1.341.129.969,00
5	PPh Pasal 21 Honor/ dll Pejabat/ PNS/ TNI/ Polri/ Pensiun	13.290.983.005,00
6	Pajak Penghasilan Pasal 22	969.638.349,00
7	Pajak Penghasilan Pasal 23	292.869.423,00
8	Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	2.502.484,00
9	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10.825.054,00
10	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	7.248.646.097,00
11	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	42.618.860.845,00
12	Taperum	303.911.000,00
13	Pph Pasal 21 Pihak Ketiga	36.053.396,00
14	IWP (3,25%) Iuran Wajib Pegawai	346.221.544,00
15	BAZNAZ	673.292.503,00
	Jumlah	**83.481.690.568,00**

BPK Perwakilan Kalsel

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(224.479.173.298,33)	**94.895.293.368,43**

Kenaikan/penurunan kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(224.479.173.298,33) dan Rp94.895.293.368,43. Rincian kenaikan/penurunan kas Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.6
Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	181.141.401.814,12	555.087.404.483,43
Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	(346.809.412.100,45)	(482.661.656.506,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(58.811.163.012,00)	22.469.545.391,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**(224.479.173.298,33)**	**94.895.293.368,43**

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, Bendahara FKTP dan Bendahara BOS

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
227.687.810.529,53	**132.792.517.161,10**

Saldo awal kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, Bendahara FKTP dan Bendahara BOS per 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp227.687.810.529,53 dan Rp132.792.517.161,10 sehingga terjadi kenaikan saldo awal kas sebesar Rp94.895.293.368,43 atau naik sebesar 71,46% dari jumlah saldo awal kas Tahun 2022.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.208.637.231,20	**227.687.810.529,53**

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.208.637.231,20 dan Rp227.687.810.529,53 sehingga terjadi penurunan saldo akhir kas sebesar Rp(224.479.173.298,33) atau turun sebesar 98,59% dari jumlah saldo akhir kas Tahun 2022. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.208.637.231,20 terdiri dari:

Tabel 5.5.7
Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Kas di BUD (Kas Daerah)	362.218.868,43	208.402.861.001,83	(.208.040.642.133,40)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	391.374.384,77	18.779.154.443,70	(18.387.780.058,93)
Kas di Bendahara FKTP	2. 194.838.259,00	319.824.928,00	1.875.013.331,00
Kas di Bendahara BOS	260.205.719,00	185.970.156,00	74.235.563,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**3.208.637.231,20**	**227.687.810.529,53**	**(224.479.173.298,33)**

BPK Perwakilan Kalsel

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan ekuitas akhir Pemerintah Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun operasional. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.735.979.070.146,75	**2.249.460.756.434,27**

Rincian nilai Ekuitas Awal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.	Aset	Rp	2.922.279.501.722,81
2.	Kewajiban	Rp	186.300.431.576,06
3.	Ekuitas	Rp	**2.735.979.070.146,75**

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
94.261.777.433,95	**267.093.290.016,35**

Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp94.362.567.112,82 berasal dari:

Pendapatan	Rp	1.727.964.769.591,45	
Beban	Rp	1.627.105.043.306,79	-
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	100.859.726.284,66	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(3.132.380.988,71)	
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	(3.465.567.862,00)	+
Surplus/Defisit-LO	Rp	**94.261.777.433,95**	

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
13.001.149.272,26	**219.425.023.696,13**

Merupakan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ekuitas Tahun 2023 dan 2022 merupakan koreksi ekuitas berupa penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp13.001.149.272,26 dan Rp219.425.023.696,13 terdiri atas:

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.6.1
Penambahan dan Pengurangan Koreksi Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Koreksi Ekuitas - Piutang	(35.372.418.460,00)	197.058.336.053,00
2.	Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	0,00	0,00
3.	Koreksi Ekuitas - Persediaan	4.211.740,00	(250.504.620,00)
4.	Koreksi Ekuitas – Investasi Non Permanen	0,00	0,00
5.	Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen	(34.957.531,26)	21.552.089.250,73
6.	Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	865.451.192,52	(5.515.722.892,00)
7.	Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi	21.528.103,00	(15.889.000,00)
8.	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	47.517.334.228,00	10.122.776.678,00
9.	Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	0,00
10.	Koreksi Ekuitas – Bukan Aset Tetap	0,00	0,00
11.	Koreksi Ekuitas – Atas Penghapusan	0,00	0,00
12.	Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal	0,00	(3.526.061.773,60)
	Total	**13.001.149.272,26**	**219.425.023.696,13**

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut:

5.6.3.1. Koreksi Ekuitas – Piutang

Koreksi Ekuitas – Piutang selama TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp35.372.418.460,00) dan Rp197.058.336.053,00. Koreksi Ekuitas – Piutang pada Tahun 2023 merupakan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan PMK No.90 Tahun 2023 Tanggal 8 September 2023 dan pemotongan Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat berdasarkan KMK No 38 Tahun 2023 Tanggal 19 September 2023 sebesar (Rp37.241.117.750,00), kurang catat Piutang pajak rokok tahun 2022 sebesar Rp1.868.694.475,00 berdasarkan Pergub No.065 Tahun 2023 dan koreksi atas kurang catat Piutang Dana Transfer Umum-DBH Pemerintah Pusat KMK No.38 Tahun 2023 sebesar 4.815,00.

5.6.3.2. Koreksi Ekuitas - Persediaan

Koreksi Ekuitas - Persediaan selama TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.211.740,00 dan (Rp250.504.620,00) dengan rincian tahun 2023 sebagai berikut :

BPK Perwakilan Kalsel

Tabel 5.6.2
Koreksi Ekuitas – Persediaan Tahun 2023

No	Nama SKPD	Uraian	2023 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Koreksi nilai untuk penerimaan dan pemakaian persediaan (Karcis).	25.500,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koreksi nilai untuk penerimaan dan pemakaian persediaan (Karcis).	797.640,00
3	Dinas Perdagangan	Koreksi nilai untuk penerimaan dan pemakaian persediaan (Karcis).	3.388.600,00
Jumlah			**4.211.740,00**

5.6.3.3. Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen

Koreksi Ekuitas – Investasi Permanen selama TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp34.957.531,26) dan Rp21.552.089.250,73. Koreksi Ekuitas – Investasi Pemanen pada tahun 2023 merupakan pengakuan kenaikan nilai investasi Tahun 2023 pada PDAM Tapin sebesar Rp70.633.517,83 dan pengakuan kenaikan Nilai Investasi Permanen Tahun 2023 pada BPR Tapin Selatan sebesar (Rp0,65), koreksi atas kelebihan pengakuan beban laba-LO dan nilai ekuitas Tahun 2023 pada BPR Tapin Selatan sebesar (Rp56.304.292,90), koreksi atas kekurangan pengakuan beban laba-LO dan kekurangan pengakuan nilai ekuitas Tahun 2023 pada PDAM Tapin sebesar (Rp3.821.690,82) dan koreksi atas kekurangan pengakuan beban Laba-LO dan kekurangan pengakuan nilai ekuitas Tahun 2023 pada PDAM Tapin sebesar (Rp45.465.074,72).

5.6.3.4. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap selama TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp865.451.192,52 dan (Rp5.515.722.892,00) yang terdiri dari:

Tabel 5.6.3
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun 2023

No	Nama SKPD	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	667.555.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(42.331.315.979,00)
3	Dinas Perhubungan	10.424.785.700,00
4	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	14.944.174.068,00
5	Dinas Pertanian	343.919.928,92
6	Sekretariat Daerah	44.615.104.301,00
7	Badan Pendapatan Daerah	389.820.000,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.828.607.000,00
9	Kecamatan Binuang	9.544.090.254,00
10	Dinas Perikanan	(303.046.272,00)
11	Dinas Tenaga Kerja	59.438.000,00
12	Dinas Perindustrian	303.046.272,00

BPK Perwakilan Kalsel

13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.188.195.335,52
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.255.784.246,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	(69.576.656,92)
17	Dinas Lingkungan Hidup	1.074.989.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.438.880.070,00
19	Kecamatan Hatungun	(460.000.000,00)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	303.046.272,00
21	Kecamatan Lokpaikat	40.020.000,00
22	RSUD Datu Sanggul	(63.231.809.347,00)
23	Sekretariat DPRD	(160.256.000,00)
Jumlah		**865.451.192,52**

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap mencerminkan koreksi atas nilai Aset Tetap karena kesalahan pencatatan nilai Aset Tetap yang terjadi pada periode sebelumnya. Penyebab terjadinya koreksi nilai Aset Tetap pada TA 2023 yaitu:

Tabel 5.6.4
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Karena Kesalahan Pencatatan Nilai Aset Tetap yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya Tahun 2023

No	Nama SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi Tambah			**1.991.996.192,52**
Koreksi atas Aset yang Bertambah Nilai/Harga			**857.055.000,00**
1	Dinas Pertanian	Koreksi tambah atas Nilai/Harga Aset Berupa Sapi Potong berdasarkan Surat Pernyataan nomor 500.6/0052/BMD/DIPERTA/2023 tanggal 31 Desember 2023	189.500.000,00
2	Dinas Pendidikan	Koreksi tambah atas Pengakuan Aset Tetap Tanah yang Tidak Tercatat Sebelumnya berdasarkan Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan No.900/3291/Disdik/2023 Tanggal 11 Desember 2023	667.555.000,00
Koreksi atas Aset Tetap yang bertambah dari hibah			**1.134.941.192,52**
1	Disperkimtan	Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pemprov Kalsel sesuai SK No : 188.44/0714/KUM/2022	1.134.941.192,52
Koreksi Kurang			**706.565.000,00**
Koreksi atas Aset Tetap yang mati dan potong darurat			**158.765.000,00**
1	Dinas Pertanian	Sapi Potong karena ternak mati dan potong darurat tahun 2023 berdasarkan Surat Pernyataan nomor 500.6/0052/BMD/DIPERTA/2023 tanggal 31 Desember 2023	158.765.000,00
Koreksi atas Aset Tetap yang dihibahkan			**364.800.000,00**
1	Sekretariat Daerah	Hibah Aset Tetap Tanah ke Kejaksaan Negeri Rantau berdasarkan SK nomor 188.45/009/KUM/2023 Tanggal 11 Januari 2023	364.800.000,00
Koreksi atas Aset yang dihapuskan			**183.000.000,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penghapusan Aset Tetap Tanah berdasarkan SK nomor 000.2.4/16/BKAD/SK/2023 tahun 2023	183.000.000,00
Jumlah			**1.285.431.192,52**

BPK Perwakilan Kalsel

5.6.3.5. Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi

Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi selama TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.528.103,00 dan (Rp15.889.000,00) yang terdiri dari:

Tabel 5.6.5
Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	0,00	(139.750.000,00)
2	RSUD Datu Sanggul	35.253.926.730,00	(1.070.820.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(140.672.648,00)	12.650.614.252,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	0,00	(154.878.320,00)
5	Badan Penanggungalangan Bencana Daerah	0,00	67.491.438,00
6	Dinas Sosial	0,00	(340.684.570,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan	69.576.656,92	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	(466.468.320,00)
9	Dinas Perhubungan	(278.043.518,00)	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	(126.333.331,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(8.141.681.080,00)	(1.062.803.958,00)
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	(182.851.250,00)	0,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	533.838.711,00
14	Dinas Perikanan	(303.046.272,00)	0,00
15	Dinas Pertanian	(349.161.928,92)	(67.491.438,00)
16	Dinas Perindustrian	303.046.272,00	(18.500.000,00)
17	Sekretariat Daerah	(25.958.530.751,00)	(9.582.735.643,00)
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(14.928.431,00)	923.284.675,00
19	Badan Pendapatan Daerah	(26.597.795,00)	0,00
20	Dinas Tenaga Kerja	(23.461.000.00)	0,00
21	Sekretariat DPRD	160.256.000,00	0,00
22	Kecamatan Binuang	(43.256.610,00)	(903.301.671,00)
23	Kecamatan Candi Laras Utara	0,00	(13.395.000,00)
24	Kecamatan Hatungun	0,00	(243.955.825,00)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(303.046.272,00)	0,00
Jumlah		**21.528.103,00**	**(15.889.000,00)**

Bpk perwakilan Kalsel

5.6.3.6. Koreksi Ekuitas - Kewajiban

Koreksi Ekuitas – Kewajiban selama TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp47.517.334.228,00 dan Rp10.122.776.678,00 yaitu koreksi atas lebih salur Tahun 2022 Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat berdasarkan PMK No.38 Tahun 2023 sebesar Rp47.507.394.392,00, pelunasan utang belanja jasa tenaga

kesehatan tahun 2021 sebesar Rp9.950.000,00 (pembayaran lebih kecil dari saldo utang belanja tahun 2021 karena kesalahan pencatatan utang) dan koreksi atas kurang catat Utang kelebihan pembayaran DBH Pemerintah Pusat sesuai KMK No.38 Tahun 2023 sebesar (Rp10.164,00).

5.6.3.7. Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal

Koreksi Ekuitas – Atas Saldo Awal selama TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp3.526.061.773,60). Koreksi Ekuitas atas Saldo Awal Tahun 2023 sebesar Rp 0,00.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.843.241.996.852,96	**2.735.979.070.146,75**

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.843.241.996.852,96 dan Rp2.735.979.070.146,75. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

BPK Perwakilan Kalsel

BAB VI
PENUTUP

Sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015 maka telah dilaksanakan berbagai perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi keuangan dan pembaharuan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

LKPD Pemerintah Kabupaten Tapin ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BPK Perwakilan Kalsel

Pj. BUPATI TAPIN

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BPK Perwakilan Kalsel

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

RINCIAN BELANJA BARANG (LRA)

Per 31 Desember 2023

Lampiran : 1

BPK Perwakilan Kalsel

NO	URAIAN	Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Tak Habis Pakai	Belanja Barang Bekas Dipakai	JUMLAH
1	**PENDIDIKAN**	**4.133.167.270,00**	**0,00**	**0,00**	**4.133.167.270,00**
	Dinas Pendidikan	4.133.167.270,00	0,00	0,00	4.133.167.270,00
2	**KESEHATAN**	**12.848.624.648,00**	**0,00**	**0,00**	**12.848.624.648,00**
	Dinas Kesehatan	12.745.070.578,00	0,00	0,00	12.745.070.578,00
	Dinas Kesehatan	7.243.977.797,00	0,00	0,00	7.243.977.797,00
	Puskesmas Tapin Utara	749.277.318,00	0,00	0,00	749.277.318,00
	Puskesmas Binuang	634.589.160,00	0,00	0,00	634.589.160,00
	Puskesmas Hatungun	273.223.957,00	0,00	0,00	273.223.957,00
	Puskesmas Baringin	534.249.637,00	0,00	0,00	534.249.637,00
	Puskesmas Margasari	435.913.204,00	0,00	0,00	435.913.204,00
	Puskesmas Bakarangan	332.549.239,00	0,00	0,00	332.549.239,00
	Puskesmas Banua Padang	446.448.736,00	0,00	0,00	446.448.736,00
	Puskesmas Tambaruntung	426.101.883,00	0,00	0,00	426.101.883,00
	Puskesmas Pandahan	233.543.992,00	0,00	0,00	233.543.992,00
	Puskesmas Lokpaikat	310.730.995,00	0,00	0,00	310.730.995,00
	Puskesmas Tambarangan	501.403.903,00	0,00	0,00	501.403.903,00
	Puskesmas Salam Babaris	271.388.689,00	0,00	0,00	271.388.689,00
	Puskesmas Piani	351.672.068,00	0,00	0,00	351.672.068,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	103.554.070,00	0,00	0,00	103.554.070,00
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**23.346.907.476,00**	**0,00**	**0,00**	**23.346.907.476,00**
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.346.907.476,00	0,00	0,00	23.346.907.476,00
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**5.376.105.118,00**	**910.000,00**	**0,00**	**5.377.015.118,00**
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.376.105.118,00	910.000,00	0,00	5.377.015.118,00
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**3.053.661.270,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053.661.270,00**
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	2.552.419.829,00	0,00	0,00	2.552.419.829,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	501.241.441,00	0,00	0,00	501.241.441,00
6	**SOSIAL**	**1.888.014.333,00**	**0,00**	**0,00**	**1.888.014.333,00**
	Dinas Sosial	1.888.014.333,00	0,00	0,00	1.888.014.333,00
7	**LINGKUNGAN HIDUP**	**3.888.224.754,00**	**0,00**	**0,00**	**3.888.224.754,00**
	Dinas Lingkungan Hidup	3.888.224.754,00	0,00	0,00	3.888.224.754,00
8	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**1.387.020.433,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387.020.433,00**
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.387.020.433,00	0,00	0,00	1.387.020.433,00
9	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**19.526.572.751,00**	**0,00**	**0,00**	**19.526.572.751,00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.526.572.751,00	0,00	0,00	19.526.572.751,00
10	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.062.928.372,00**	**0,00**	**0,00**	**2.062.928.372,00**
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.062.928.372,00	0,00	0,00	2.062.928.372,00
11	**PERHUBUNGAN**	**812.541.597,00**	**0,00**	**0,00**	**812.541.597,00**
	Dinas Perhubungan	812.541.597,00	0,00	0,00	812.541.597,00
12	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	**765.640.441,00**	**0,00**	**0,00**	**765.640.441,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	765.640.441,00	0,00	0,00	765.640.441,00

NO	URAIAN	Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Tak Habis Pakai	Belanja Barang Bekas Dipakai	JUMLAH
13	**PENANAMAN MODAL**	**1.224.470.873,00**	**0,00**	**0,00**	**1.224.470.873,00**
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.224.470.873,00	0,00	0,00	1.224.470.873,00
14	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**3.612.052.245,00**	**0,00**	**0,00**	**3.612.052.245,00**
	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.612.052.245,00	0,00	0,00	3.612.052.245,00
15	**KEBUDAYAAN**	**1.414.612.656,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414.612.656,00**
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.414.612.656,00	0,00	0,00	1.414.612.656,00
16	**PERPUSTAKAAN**	**541.527.688,00**	**0,00**	**0,00**	**541.527.688,00**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	541.527.688,00	0,00	0,00	541.527.688,00
17	**TENAGA KERJA**	**5.679.518.233,00**	**0,00**	**0,00**	**5.679.518.233,00**
	Dinas Tenaga Kerja	5.679.518.233,00	0,00	0,00	5.679.518.233,00
18	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.168.257.376,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168.257.376,00**
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.168.257.376,00	0,00	0,00	1.168.257.376,00
19	**PANGAN**	**2.073.598.264,00**	**0,00**	**0,00**	**2.073.598.264,00**
	Dinas Ketahanan Pangan	2.073.598.264,00	0,00	0,00	2.073.598.264,00
20	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.068.392.490,00**	**10.300.000,00**	**0,00**	**1.078.692.490,00**
	Dinas Perikanan	1.068.392.490,00	10.300.000,00	0,00	1.078.692.490,00
21	**PERTANIAN**	**3.971.821.905,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**3.973.221.905,00**
	Dinas Pertanian	3.971.821.905,00	1.400.000,00	0,00	3.973.221.905,00
22	**PERDAGANGAN**	**861.222.130,00**	**0,00**	**0,00**	**861.222.130,00**
	Dinas Perdagangan	861.222.130,00	0,00	0,00	861.222.130,00
23	**PERINDUSTRIAN**	**403.085.632,00**	**0,00**	**0,00**	**403.085.632,00**
	Dinas Perindustrian	403.085.632,00	0,00	0,00	403.085.632,00
24	**SEKRETARIAT DAERAH**	**20.174.290.618,00**	**0,00**	**0,00**	**20.174.290.618,00**
	Sekretariat Daerah	20.174.290.618,00	0,00	0,00	20.174.290.618,00
25	**SEKRETARIAT DPRD**	**2.975.563.890,00**	**0,00**	**0,00**	**2.975.563.890,00**
	Sekretariat DPRD	2.975.563.890,00	0,00	0,00	2.975.563.890,00
26	**PERENCANAAN**	**2.207.883.188,00**	**0,00**	**0,00**	**2.207.883.188,00**
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.207.883.188,00	0,00	0,00	2.207.883.188,00
27	**KEUANGAN**	**4.799.959.237,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799.959.237,00**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.523.382.541,00	0,00	0,00	3.523.382.541,00
	Badan Pendapatan Daerah	1.276.576.696,00	0,00	0,00	1.276.576.696,00
28	**KEPEGAWAIAN**	**1.856.687.826,00**	**0,00**	**0,00**	**1.856.687.826,00**
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.856.687.826,00	0,00	0,00	1.856.687.826,00
29	**INSPEKTORAT**	**752.897.968,00**	**0,00**	**0,00**	**752.897.968,00**
	Inspektorat	752.897.968,00	0,00	0,00	752.897.968,00
30	**KECAMATAN**	**8.156.077.815,00**	**0,00**	**0,00**	**8.156.077.815,00**
	Kecamatan Lokpaikat	781.793.171,00	0,00	0,00	781.793.171,00
	Kecamatan Salam Babaris	499.741.191,00	0,00	0,00	499.741.191,00
	Kecamatan Tapin Tengah	594.756.791,00	0,00	0,00	594.756.791,00
	Kecamatan Bungur	411.477.580,00	0,00	0,00	411.477.580,00
	Kecamatan Piani	488.551.810,00	0,00	0,00	488.551.810,00
	Kecamatan Hatungun	692.066.093,00	0,00	0,00	692.066.093,00
	Kecamatan Tapin Utara	1.188.781.264,00	0,00	0,00	1.188.781.264,00
	Kecamatan Binuang	1.367.988.782,00	0,00	0,00	1.367.988.782,00

BPK Perwakilan Kalsel

NO	URAIAN	Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Tak Habis Pakai	Belanja Barang Bekas Dipakai	JUMLAH
	Kecamatan Bakarangan	464.057.439,00	0,00	0,00	464.057.439,00
	Kecamatan Candi Laras Selatan	725.341.733,00	0,00	0,00	725.341.733,00
	Kecamatan Candi Laras Utara	374.811.171,00	0,00	0,00	374.811.171,00
	Kecamatan Tapin Selatan	566.710.790,00	0,00	0,00	566.710.790,00
31	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**2.338.427.422,00**	**0,00**	**0,00**	**2.338.427.422,00**
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.338.427.422,00	0,00	0,00	2.338.427.422,00
	TOTAL	**144.369.755.919,00**	**12.610.000,00**	**0,00**	**144.382.365.919,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 2.1

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	LRA TA 2023 (Unaudited)		Data DPMD		Selisih	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Bagi Hasil Retribusi Daerah	469.570.000,00	466.983.947,00	469.570.000,00	466.983.947,00	0,00	0,00
2	Bagi Hasil Pajak Daerah	2.363.500.000,00	2.363.464.246,00	2.363.500.000,00	2.363.464.246,00	0,00	0,00
3	Alokasi Dana Desa	259.609.814.122,00	100.377.584.072,00	259.609.814.122,00	100.377.584.072,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	0,00	97.150.986.586,00	0,00	97.150.986.586,00	0,00	0,00
	Jumlah	**262.442.884.122,00**	**200.359.018.851,00**	**262.442.884.122,00**	**200.359.018.851,00**	**-**	**0,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
RINCIAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	Desa	Bagi Hasil Pajak						Bagi Hasil Retribusi						JUMLAH
			Anggaran	Realisasi				Selisih anggaran & realisasi 2023	Anggaran	Realisasi				Selisih anggaran & realisasi 2023	
				Triwulan IV 2022	Tahap I 2023	Tahap II 2023	Jumlah			Triwulan IV 2022	Tahap I 2023	Tahap II 2023	Jumlah		
1	Binuang	A. Yani Pura	14.552.781,00	8.286.614,00	8.730.730,00	-	17.017.344,00	- 2.464.563,00	3.287.512,00	2.196.234,00	2.697.742,00	-	4.893.976,00	- 1.606.464,00	21.911.320,00
2	Binuang	Pulau Pinang Utara	37.711.001,00	4.956.095,00	22.621.081,00	15.080.721,00	42.657.897,00	- 4.946.896,00	8.519.015,00	1.313.533,00	5.110.162,00	-	6.423.695,00	2.095.320,00	49.081.592,00
3	Binuang	Pulau Pinang	45.529.994,00	9.089.888,00	25.511.524,00	17.007.682,00	51.609.094,00	- 6.079.100,00	9.607.638,00	2.409.129,00	5.763.121,00	-	8.172.250,00	1.435.388,00	59.781.344,00
4	Binuang	Mekar Sari	15.917.167,00	4.114.258,00	9.549.092,00	6.366.061,00	20.029.411,00	- 4.112.244,00	3.595.730,00	1.090.418,00	2.157.165,00	-	3.247.583,00	348.147,00	23.276.994,00
5	Binuang	Padang Sari	18.057.900,00	6.221.994,00	10.833.108,00	-	17.055.102,00	1.002.798,00	4.079.327,00	1.649.040,00	2.447.228,00	-	4.096.268,00	- 16.941,00	21.151.370,00
6	Binuang	Tungkap	323.906.751,00	4.749.594,00	11.942.053,00	-	16.691.647,00	307.215.104,00	8.820.488,00	1.258.804,00	1.972.295,00	-	3.231.099,00	5.589.389,00	19.922.746,00
7	Binuang	Pualam Sari	27.034.196,00	4.635.171,00	16.217.110,00	10.811.407,00	31.663.688,00	- 4.629.492,00	6.107.096,00	1.228.477,00	3.663.488,00	-	4.891.965,00	1.215.131,00	36.555.653,00
8	Binuang	Gunung Batu	17.032.420,00	5.389.056,00	10.218.023,00	-	15.607.079,00	1.425.341,00	3.847.669,00	1.428.283,00	2.308.279,00	-	3.736.562,00	111.107,00	19.343.641,00
9	Tapin Selatan	Tatakan	54.149.257,00	5.903.137,00	32.480.783,00	-	38.383.920,00	15.765.337,00	12.232.460,00	1.564.532,00	7.337.495,00	-	8.902.027,00	3.330.433,00	47.285.947,00
10	Tapin Selatan	Suato Tatakan	24.197.120,00	7.299.133,00	14.515.426,00	-	21.814.559,00	2.382.561,00	5.466.193,00	1.934.518,00	3.279.073,00	-	5.213.591,00	252.602,00	27.028.150,00
11	Tapin Selatan	Sawang	20.520.088,00	10.823.771,00	12.309.934,00	-	23.133.705,00	- 2.613.617,00	4.635.542,00	2.868.667,00	2.780.846,00	-	5.649.513,00	- 1.013.971,00	28.783.218,00
12	Tapin Selatan	Lawahan	16.091.577,00	-	-	-	-	16.091.577,00	3.635.130,00	-	-	-	-	3.635.130,00	-
13	Tapin Selatan	Timbaan	12.997.384,00	3.726.378,00	7.797.800,00	-	11.524.178,00	1.473.206,00	2.936.144,00	987.617,00	1.761.544,00	-	2.749.161,00	186.983,00	14.273.339,00
14	Tapin Selatan	Rumintin	24.347.712,00	10.525.560,00	14.605.751,00	-	25.131.311,00	- 783.599,00	5.500.212,00	2.789.631,00	3.299.478,00	-	6.089.109,00	- 588.897,00	31.220.420,00
15	Tapin Selatan	Cempaka	14.291.410,00	3.717.035,00	8.573.959,00	-	12.290.994,00	2.000.416,00	3.228.467,00	985.140,00	1.936.880,00	-	2.922.020,00	306.447,00	15.213.014,00
16	Tapin Selatan	Harapan Masa	12.880.813,00	3.793.435,00	7.727.880,00	-	11.521.315,00	1.359.498,00	2.909.810,00	1.005.389,00	1.745.749,00	-	2.751.138,00	158.672,00	14.272.453,00
17	Tapin Selatan	Tandui	11.743.008,00	3.817.957,00	7.045.421,00	-	10.863.378,00	879.630,00	2.652.776,00	1.011.888,00	1.591.579,00	-	2.603.467,00	49.309,00	13.466.845,00
18	Tapin Selatan	Hatiwin	13.796.889,00	3.732.748,00	8.277.344,00	-	12.010.092,00	1.786.797,00	3.116.754,00	989.305,00	1.869.874,00	-	2.859.179,00	257.575,00	14.869.271,00
19	Tapin Tengah	Pandulangan	15.443.088,00	3.774.141,00	-	-	3.774.141,00	11.668.947,00	3.488.634,00	1.000.275,00	-	-	1.000.275,00	2.488.359,00	4.774.416,00
20	Tapin Tengah	Labung	12.993.047,00	4.024.617,00	-	-	4.024.617,00	8.968.430,00	2.935.164,00	1.066.660,00	-	-	1.066.660,00	1.868.504,00	5.091.277,00
21	Tapin Tengah	Mandurian	13.598.429,00	3.655.698,00	8.158.307,00	-	11.814.005,00	1.784.424,00	3.071.921,00	968.884,00	1.842.983,00	-	2.811.867,00	260.054,00	14.625.872,00
22	Tapin Tengah	Serawi	12.689.251,00	4.793.160,00	7.612.981,00	-	12.406.141,00	283.110,00	2.866.535,00	1.270.350,00	1.719.793,00	-	2.990.143,00	- 123.608,00	15.396.284,00
23	Tapin Tengah	Pematang Karangan Hulu	13.434.483,00	3.975.547,00	8.059.972,00	5.373.315,00	17.408.834,00	- 3.974.351,00	3.034.885,00	1.053.655,00	1.820.769,00	-	2.874.424,00	160.461,00	20.283.258,00
24	Tapin Tengah	Pematang Karangan	14.462.383,00	4.864.849,00	8.676.509,00	5.784.340,00	19.325.698,00	- 4.863.315,00	3.267.091,00	1.289.351,00	1.960.046,00	1.306.698,00	4.556.095,00	- 1.289.004,00	23.881.793,00
25	Tapin Tengah	Pandahan	18.985.446,00	4.385.775,00	11.389.452,00	-	15.775.227,00	3.210.219,00	4.288.862,00	1.162.379,00	2.572.907,00	-	3.735.286,00	553.576,00	19.510.513,00
26	Tapin Tengah	Pematang Karangan Hilir	14.294.739,00	5.180.097,00	8.575.956,00	-	13.756.053,00	538.686,00	3.229.219,00	1.372.901,00	1.937.331,00	-	3.310.232,00	- 81.013,00	17.066.285,00
27	Tapin Tengah	Hiyung	15.468.103,00	3.863.963,00	9.279.742,00	-	13.143.705,00	2.324.398,00	3.494.285,00	1.024.081,00	2.096.318,00	-	3.120.399,00	373.886,00	16.264.104,00
28	Tapin Tengah	Andhika	11.924.298,00	3.687.919,00	7.154.160,00	-	10.842.079,00	1.082.219,00	2.693.730,00	977.424,00	1.616.144,00	-	2.593.568,00	100.162,00	13.435.647,00
29	Tapin Tengah	Sukaramai	13.421.236,00	4.896.468,00	8.052.027,00	5.368.018,00	18.316.513,00	- 4.895.277,00	3.031.893,00	1.297.730,00	1.818.974,00	-	3.116.704,00	- 84.811,00	21.433.217,00
30	Tapin Tengah	Tirik	13.533.852,00	3.619.841,00	8.119.574,00	5.413.049,00	17.152.464,00	- 3.618.612,00	3.057.333,00	959.381,00	1.834.233,00	1.222.822,00	4.016.436,00	- 959.103,00	21.168.900,00
31	Tapin Tengah	Kepayang	13.106.210,00	6.601.929,00	7.863.073,00	5.242.049,00	19.707.051,00	- 6.600.841,00	2.960.728,00	1.749.736,00	1.776.289,00	1.184.193,00	4.710.218,00	- 1.749.490,00	24.417.269,00
32	Tapin Tengah	Batang Lantik	11.899.433,00	3.669.861,00	7.139.246,00	4.759.497,00	15.568.604,00	- 3.669.171,00	2.688.113,00	972.638,00	1.612.775,00	-	2.585.413,00	102.700,00	18.154.017,00
33	Tapin Tengah	Mandurian Hilir	15.001.427,00	3.684.432,00	8.999.828,00	-	12.684.260,00	2.317.167,00	3.388.862,00	976.499,00	2.033.085,00	-	3.009.584,00	379.278,00	15.693.844,00
34	Tapin Tengah	Sungai Bahalang	15.212.209,00	4.961.318,00	9.126.256,00	-	14.087.574,00	1.124.635,00	3.436.478,00	1.314.918,00	2.061.646,00	-	3.376.564,00	59.914,00	17.464.138,00
35	Tapin Tengah	Papagan Makmur	9.807.415,00	3.645.225,00	6.047.401,00	-	9.692.626,00	114.789,00	2.215.524,00	966.109,00	1.366.126,00	-	2.332.235,00	- 116.711,00	12.024.861,00
36	Tapin Utara	Keramat	10.724.729,00	3.652.409,00	6.434.656,00	4.289.770,00	14.376.835,00	- 3.652.106,00	2.422.745,00	968.013,00	1.453.606,00	969.070,00	3.390.689,00	- 967.944,00	17.767.524,00
37	Tapin Utara	Antasari	13.831.346,00	4.307.048,00	8.298.011,00	5.532.008,00	18.137.067,00	- 4.305.721,00	3.124.538,00	1.141.514,00	1.874.543,00	-	3.016.057,00	108.481,00	21.153.124,00
38	Tapin Utara	Jingah Babaris	10.818.821,00	3.588.138,00	6.491.092,00	4.327.395,00	14.406.625,00	- 3.587.804,00	2.444.000,00	950.979,00	1.466.354,00	-	2.417.333,00	26.667,00	16.823.958,00
39	Tapin Utara	Banua Hanyar	11.044.904,00	4.874.847,00	6.626.698,00	4.417.798,00	15.919.343,00	- 4.874.439,00	2.495.073,00	1.292.000,00	1.496.989,00	997.992,00	3.786.981,00	- 1.291.908,00	19.706.324,00
40	Tapin Utara	Banua Halat Kiri	14.163.363,00	3.747.702,00	8.497.156,00	5.664.771,00	17.909.629,00	- 3.746.266,00	3.199.541,00	993.268,00	1.919.530,00	1.279.687,00	4.192.485,00	- 992.944,00	22.102.114,00
41	Tapin Utara	Banua Halat Kanan	12.721.378,00	3.620.831,00	7.632.251,00	5.088.167,00	16.341.249,00	- 3.619.871,00	2.873.793,00	959.644,00	1.724.146,00	-	2.683.790,00	190.003,00	19.025.039,00
42	Tapin Utara	Perintis Raya	22.303.768,00	4.718.192,00	13.379.789,00	8.919.859,00	27.017.840,00	- 4.714.072,00	5.038.480,00	1.250.481,00	3.022.530,00	-	4.273.011,00	765.469,00	31.290.851,00
43	Tapin Utara	Kakaran	11.274.189,00	3.640.819,00	6.764.224,00	4.509.482,00	14.914.525,00	- 3.640.336,00	2.546.869,00	964.941,00	1.528.056,00	-	2.492.997,00	53.872,00	17.407.522,00
44	Tapin Utara	Antasari Hilir	12.265.251,00	3.725.052,00	7.358.665,00	-	11.083.717,00	1.181.534,00	2.770.753,00	987.266,00	1.662.342,00	-	2.649.608,00	121.145,00	13.733.325,00
45	Tapin Utara	Lumbu Raya	13.377.129,00	3.672.352,00	8.025.571,00	-	11.697.923,00	1.679.206,00	3.021.929,00	973.298,00	1.812.998,00	-	2.786.296,00	235.633,00	14.484.219,00
46	Tapin Utara	Banua Hanyar Hulu	11.199.792,00	3.593.907,00	6.719.600,00	-	10.313.507,00	886.285,00	2.530.063,00	952.507,00	1.517.975,00	-	2.470.482,00	59.581,00	12.783.989,00
47	Tapin Utara	Badaun	10.633.695,00	4.458.746,00	6.380.053,00	4.253.369,00	15.092.168,00	- 4.458.473,00	2.402.180,00	1.181.719,00	1.441.271,00	-	2.622.990,00	- 220.810,00	17.715.158,00
48	Candi Laras Selatan	Margasari Hulu	11.289.358,00	5.214.360,00	6.773.322,00	4.515.548,00	16.503.230,00	- 5.213.872,00	2.550.296,00	1.381.982,00	1.530.112,00	-	2.912.094,00	- 361.798,00	19.415.324,00
49	Candi Laras Selatan	Candi Laras	12.123.448,00	6.205.797,00	7.273.611,00	-	13.479.408,00	- 1.355.960,00	2.738.719,00	1.644.746,00	1.643.128,00	-	3.287.874,00	- 549.155,00	16.767.282,00
50	Candi Laras Selatan	Baringin A.	18.265.075,00	5.153.584,00	10.957.372,00	-	16.110.956,00	2.154.119,00	4.126.129,00	1.365.874,00	2.475.299,00	-	3.841.173,00	284.956,00	19.952.129,00
51	Candi Laras Selatan	Marampiau	15.214.085,00	9.475.442,00	9.127.381,00	6.084.921,00	24.687.744,00	- 9.473.659,00	3.436.902,00	2.511.313,00	2.061.899,00	-	4.573.212,00	- 1.136.310,00	29.260.956,00
52	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hilir	11.515.372,00	5.555.996,00	6.908.885,00	4.605.924,00	17.070.805,00	- 5.555.433,00	2.601.353,00	1.472.528,00	1.560.736,00	-	3.033.264,00	- 431.911,00	20.104.069,00
53	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hulu	11.720.573,00	5.837.004,00	7.031.965,00	-	12.868.969,00	- 1.148.396,00	2.647.708,00	1.547.004,00	1.588.540,00	-	3.135.544,00	- 487.836,00	16.004.513,00
54	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas	12.630.010,00	3.906.429,00	7.577.448,00	5.051.632,00	16.535.509,00	- 3.905.499,00	2.853.153,00	1.035.336,00	1.711.766,00	-	2.747.102,00	106.051,00	19.282.611,00
55	Candi Laras Selatan	Baringin B	11.256.129,00	5.114.767,00	6.753.391,00	4.502.260,00	16.370.418,00	- 5.114.289,00	2.542.789,00	1.355.587,00	1.525.609,00	-	2.881.196,00	- 338.407,00	19.251.614,00
56	Candi Laras Selatan	Marampiau Hilir	10.997.078,00	4.963.810,00	6.598.012,00	4.398.674,00	15.960.496,00	- 4.963.418,00	2.484.269,00	1.315.578,00	1.490.508,00	-	2.806.086,00	- 321.817,00	18.766.582,00
57	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas Hulu	10.922.186,00	3.826.791,00	6.553.091,00	4.368.728,00	14.748.610,00	- 3.826.424,00	2.467.351,00	1.014.230,00	1.480.361,00	-	2.494.591,00	- 27.240,00	17.243.201,00
58	Candi Laras Selatan	Baulin	11.556.524,00	5.557.584,00	6.933.569,00	4.622.379,00	17.113.532,00	- 5.557.008,00	2.610.649,00	1.472.948,00	1.566.311,00	-	3.039.259,00	- 428.610,00	20.152.791,00
59	Candi Laras Selatan	Pabaungan Pantai	10.660.697,00	3.681.403,00	6.396.249,00	-	10.077.652,00	583.045,00	2.408.280,00	975.697,00	1.444.930,00	-	2.420.627,00	- 12.347,00	12.498.279,00
60	Candi Laras Utara	Keladan	30.948.172,00	15.595.960,00	18.564.721,00	-	34.160.681,00	- 3.212.509,00	6.991.274,00	4.133.465,00	4.193.819,00	-	8.327.284,00	- 1.336.010,00	42.487.965,00
61	Candi Laras Utara	Sungai Salai	12.823.417,00	6.931.781,00	7.693.454,00	5.128.969,00	19.754.204,00	- 6.930.787,00	2.896.844,00	1.837.158,00	1.737.971,00	-	3.575.129,00	- 678.285,00	23.329.333,00
62	Candi Laras Utara	Pariok	15.442.444,00	9.482.423,00	9.264.352,00	6.176.235,00	24.923.010,00	- 9.480.566,00	3.488.489,00	2.513.164,00	2.092.841,00	-	4.606.005,00	- 1.117.516,00	29.529.015,00

SPK pendamping tapin sel

No	Kecamatan	Desa	Bagi Hasil Pajak						Bagi Hasil Retribusi						JUMLAH
			Anggaran	Realisasi				Selisih anggaran & realisasi 2023	Anggaran	Realisasi				Selisih anggaran & realisasi 2023	
				Triwulan IV 2022	Tahap I 2023	Tahap II 2023	Jumlah			Triwulan IV 2022	Tahap I 2023	Tahap II 2023	Jumlah		
63	Candi Laras Utara	Margasari Hilir	22.692.285,00	12.893.385,00	13.612.823,00	-	26.506.208,00	- 3.813.923,00	5.126.247,00	3.417.185,00	3.075.173,00	-	6.492.358,00	- 1.366.111,00	32.998.566,00
64	Candi Laras Utara	Batalas	13.531.070,00	3.884.874,00	-	-	3.884.874,00	9.646.196,00	3.056.705,00	1.029.623,00	-	-	1.029.623,00	2.027.082,00	4.914.497,00
65	Candi Laras Utara	Rawana	11.804.395,00	5.814.514,00	7.082.242,00	-	12.896.756,00	- 1.092.361,00	2.666.644,00	1.541.044,00	1.599.897,00	-	3.140.941,00	- 474.297,00	16.037.697,00
66	Candi Laras Utara	Buas-Buas	12.692.670,00	7.018.273,00	7.615.031,00	5.076.688,00	19.709.992,00	- 7.017.322,00	2.867.308,00	1.860.080,00	1.720.256,00	-	3.580.336,00	- 713.028,00	23.290.328,00
67	Candi Laras Utara	Teluk Haur	13.025.762,00	7.320.906,00	7.814.821,00	-	15.135.727,00	- 2.109.965,00	2.942.554,00	1.940.289,00	1.765.388,00	-	3.705.677,00	- 763.123,00	18.841.404,00
68	Candi Laras Utara	Sungai Puting	33.318.665,00	4.577.359,00	19.986.548,00	13.324.366,00	37.888.273,00	- 4.569.608,00	7.526.775,00	1.213.155,00	4.515.014,00	-	5.728.169,00	1.798.606,00	43.616.442,00
69	Candi Laras Utara	Sawaja	10.796.873,00	4.293.444,00	6.477.928,00	-	10.771.372,00	25.501,00	2.439.042,00	1.137.909,00	1.463.381,00	-	2.601.290,00	- 162.248,00	13.372.662,00
70	Candi Laras Utara	Sungai Salai Hilir	14.140.804,00	7.948.626,00	8.483.625,00	5.655.750,00	22.088.001,00	- 7.947.197,00	3.194.445,00	2.106.656,00	1.916.473,00	-	4.023.129,00	- 828.684,00	26.111.130,00
71	Candi Laras Utara	Buas-Buas Hilir	13.460.596,00	7.787.054,00	8.075.635,00	-	15.862.689,00	- 2.402.093,00	3.040.784,00	2.063.834,00	1.824.307,00	-	3.888.141,00	- 847.357,00	19.750.830,00
72	Candi Laras Utara	Rawana Hulu	10.644.865,00	4.577.577,00	6.386.753,00	-	10.964.330,00	- 319.465,00	2.404.703,00	1.213.213,00	1.442.785,00	-	2.655.998,00	- 251.295,00	13.620.328,00
73	Bakarangan	Parigi Kecil	11.561.562,00	5.445.861,00	6.936.590,00	4.624.394,00	17.006.845,00	- 5.445.283,00	2.611.788,00	1.443.338,00	1.566.994,00	-	3.010.332,00	- 398.544,00	20.017.177,00
74	Bakarangan	Bakarangan	14.042.749,00	4.081.137,00	8.424.812,00	-	12.505.949,00	1.536.800,00	3.172.294,00	1.081.640,00	1.903.187,00	-	2.984.827,00	187.467,00	15.490.776,00
75	Bakarangan	Parigi	13.451.004,00	3.667.608,00	8.069.882,00	5.379.921,00	17.117.411,00	- 3.666.407,00	3.038.617,00	972.040,00	1.823.008,00	-	2.795.048,00	243.569,00	19.912.459,00
76	Bakarangan	Paul	13.806.923,00	3.687.099,00	8.283.362,00	5.522.242,00	17.492.703,00	- 3.685.780,00	3.119.020,00	977.206,00	1.871.233,00	-	2.848.439,00	270.581,00	20.341.142,00
77	Bakarangan	Gadung	11.623.281,00	3.703.677,00	6.973.609,00	4.649.073,00	15.326.359,00	- 3.703.078,00	2.625.730,00	981.600,00	1.575.357,00	-	2.556.957,00	68.773,00	17.883.316,00
78	Bakarangan	Bundung	11.784.155,00	3.752.468,00	7.070.102,00	4.713.402,00	15.535.972,00	- 3.751.817,00	2.662.072,00	994.531,00	1.597.155,00	-	2.591.686,00	70.386,00	18.127.658,00
79	Bakarangan	Tangkawang	11.777.358,00	5.687.823,00	7.066.025,00	4.710.684,00	17.464.532,00	- 5.687.174,00	2.660.536,00	1.507.466,00	1.596.234,00	-	3.103.700,00	- 443.164,00	20.568.232,00
80	Bakarangan	Waringin	13.600.171,00	3.694.742,00	8.159.353,00	-	11.854.095,00	1.746.076,00	3.072.315,00	979.232,00	1.843.219,00	-	2.822.451,00	249.864,00	14.676.546,00
81	Bakarangan	Gadung Keramat	11.686.101,00	3.737.183,00	7.011.289,00	4.674.192,00	15.422.664,00	- 3.736.563,00	2.639.921,00	990.481,00	1.583.869,00	-	2.574.350,00	65.571,00	17.997.014,00
82	Bakarangan	Masta	12.686.475,00	3.749.051,00	7.611.316,00	5.074.210,00	16.434.577,00	- 3.748.102,00	2.865.908,00	993.625,00	1.719.416,00	-	2.713.041,00	152.867,00	19.147.618,00
83	Bakarangan	Ketapang	12.017.423,00	3.610.117,00	7.210.017,00	4.806.678,00	15.626.812,00	- 3.609.389,00	2.714.768,00	956.804,00	1.628.762,00	-	2.585.566,00	129.202,00	18.212.378,00
84	Bakarangan	Tangkawang Baru	11.137.169,00	3.646.090,00	6.682.038,00	-	10.328.128,00	809.041,00	2.515.916,00	966.338,00	1.509.490,00	-	2.475.828,00	40.088,00	12.803.956,00
85	Piani	Pipitak Jaya	11.471.243,00	5.513.314,00	6.882.417,00	4.588.278,00	16.984.009,00	- 5.512.766,00	2.591.384,00	1.461.215,00	1.554.756,00	-	3.015.971,00	- 424.587,00	19.999.980,00
86	Piani	Miawa	13.277.410,00	6.543.082,00	7.965.760,00	-	14.508.842,00	- 1.231.432,00	2.999.402,00	1.734.138,00	1.799.486,00	-	3.533.624,00	- 534.222,00	18.042.466,00
87	Piani	Batu Ampar	11.500.727,00	3.746.494,00	6.900.101,00	-	10.646.595,00	854.132,00	2.598.045,00	992.948,00	1.558.751,00	-	2.551.699,00	46.346,00	13.198.294,00
88	Piani	Harakit	14.785.023,00	3.832.881,00	-	-	3.832.881,00	10.952.142,00	3.339.976,00	-	-	-	-	3.339.976,00	3.832.881,00
89	Piani	Batung	13.522.977,00	4.237.732,00	8.113.051,00	-	12.350.783,00	1.172.194,00	3.054.876,00	1.123.143,00	1.832.760,00	-	2.955.903,00	98.973,00	15.306.686,00
90	Piani	Balawaian	15.492.191,00	6.103.251,00	9.294.190,00	-	15.397.441,00	94.750,00	3.499.727,00	1.617.569,00	2.099.582,00	-	3.717.151,00	- 217.424,00	19.114.592,00
91	Piani	Baramban	18.597.693,00	7.906.717,00	11.156.877,00	7.437.918,00	26.501.512,00	- 7.903.819,00	4.201.268,00	2.095.548,00	2.520.368,00	-	4.615.916,00	- 414.648,00	31.117.428,00
92	Piani	Buniin Jaya	11.806.713,00	5.776.516,00	7.083.632,00	4.722.422,00	17.582.570,00	- 5.775.857,00	2.667.168,00	1.530.973,00	1.600.211,00	-	3.131.184,00	- 464.016,00	20.713.754,00
93	Bungur	Kalumpang	19.591.854,00	10.009.585,00	11.753.177,00	7.835.451,00	29.598.213,00	- 10.006.359,00	4.425.852,00	2.652.880,00	2.655.074,00	-	5.307.954,00	- 882.102,00	34.906.167,00
94	Bungur	Banua Padang	12.160.628,00	6.262.094,00	7.295.911,00	4.863.941,00	18.421.946,00	- 6.261.318,00	2.747.118,00	1.659.667,00	1.648.166,00	-	3.307.833,00	- 560.715,00	21.729.779,00
95	Bungur	Bungur	14.095.210,00	6.269.724,00	8.456.278,00	5.637.518,00	20.363.520,00	- 6.268.310,00	3.184.145,00	1.661.690,00	1.910.296,00	-	3.571.986,00	- 387.841,00	23.935.506,00
96	Bungur	Banua Padang Hilir	12.379.429,00	3.688.440,00	7.427.149,00	4.951.432,00	16.067.021,00	- 3.687.592,00	2.796.546,00	977.562,00	1.677.812,00	-	2.655.374,00	141.172,00	18.722.395,00
97	Bungur	Shabah	17.145.214,00	6.112.819,00	10.285.677,00	6.857.118,00	23.255.614,00	- 6.110.400,00	3.873.149,00	1.620.104,00	2.323.562,00	-	3.943.666,00	- 70.517,00	27.199.280,00
98	Bungur	Hangui	10.514.624,00	5.206.225,00	-	-	5.206.225,00	5.308.399,00	2.375.281,00	1.379.827,00	-	-	1.379.827,00	995.454,00	6.586.052,00
99	Bungur	Rantau Bujur	25.596.362,00	4.695.083,00	15.354.694,00	-	20.049.777,00	5.546.585,00	5.782.286,00	1.244.356,00	3.468.666,00	-	4.713.022,00	1.069.264,00	24.762.799,00
100	Bungur	Purut	12.105.343,00	4.736.884,00	7.262.752,00	4.841.834,00	16.841.470,00	- 4.736.127,00	2.734.629,00	1.255.435,00	1.640.675,00	-	2.896.110,00	- 161.481,00	19.737.580,00
101	Bungur	Bungur Baru	12.025.415,00	5.194.070,00	7.214.810,00	-	12.408.880,00	- 383.465,00	2.716.573,00	1.376.604,00	1.629.845,00	-	3.006.449,00	- 289.876,00	15.415.329,00
102	Bungur	Timbung	10.875.357,00	3.810.116,00	6.525.003,00	4.350.002,00	14.685.121,00	- 3.809.764,00	2.456.772,00	1.009.810,00	1.474.015,00	-	2.483.825,00	- 27.053,00	17.168.946,00
103	Bungur	Paring Guling	14.666.931,00	5.114.564,00	8.799.197,00	5.866.132,00	19.779.893,00	- 5.112.962,00	3.313.299,00	1.355.533,00	1.987.762,00	-	3.343.295,00	- 29.996,00	23.123.188,00
104	Bungur	Linuh	12.728.706,00	5.630.988,00	7.636.646,00	-	13.267.634,00	- 538.928,00	2.875.448,00	1.492.404,00	1.725.139,00	-	3.217.543,00	- 342.095,00	16.485.177,00
105	Lokpaikat	Binderang	30.919.730,00	12.653.564,00	18.547.661,00	-	31.201.225,00	- 281.495,00	6.984.849,00	3.353.625,00	4.189.966,00	-	7.543.591,00	- 558.742,00	38.744.816,00
106	Lokpaikat	Parandakan	15.763.707,00	4.238.491,00	9.457.046,00	6.304.697,00	20.000.234,00	- 4.236.527,00	3.561.063,00	1.123.344,00	2.136.372,00	-	3.259.716,00	301.347,00	23.259.950,00
107	Lokpaikat	Lokpaikat	35.440.070,00	8.573.855,00	21.258.972,00	14.172.648,00	44.005.475,00	- 8.565.405,00	8.006.006,00	2.272.363,00	4.802.458,00	-	7.074.821,00	931.185,00	51.080.296,00
108	Lokpaikat	Bataratat	12.786.309,00	4.847.176,00	7.671.196,00	5.114.131,00	17.632.503,00	- 4.846.194,00	2.888.461,00	1.284.666,00	1.732.943,00	-	3.017.609,00	- 129.148,00	20.650.112,00
109	Lokpaikat	Bitahan Baru	12.751.158,00	4.700.206,00	7.650.112,00	-	12.350.318,00	400.840,00	2.880.520,00	1.245.714,00	1.728.181,00	-	2.973.895,00	- 93.375,00	15.324.213,00
110	Lokpaikat	Puncak Harapan	12.832.672,00	6.786.439,00	7.699.004,00	-	14.485.443,00	- 1.652.771,00	2.898.935,00	1.798.636,00	1.739.225,00	-	3.537.861,00	- 638.926,00	18.023.304,00
111	Lokpaikat	Budi Mulya	11.581.278,00	5.192.177,00	6.948.416,00	-	12.140.593,00	- 559.315,00	2.616.241,00	1.376.103,00	1.569.665,00	-	2.945.768,00	- 329.527,00	15.086.361,00
112	Lokpaikat	Ayunan Papan	14.326.896,00	6.376.155,00	8.595.243,00	5.730.162,00	20.701.560,00	- 6.374.664,00	3.236.484,00	1.689.897,00	1.941.688,00	-	3.631.585,00	- 395.101,00	24.333.145,00
113	Salam Babaris	Salam Babaris	31.487.599,00	11.799.913,00	18.888.271,00	12.592.180,00	43.280.364,00	- 11.792.765,00	7.113.132,00	3.127.378,00	4.266.910,00	-	7.394.288,00	- 281.156,00	50.674.652,00
114	Salam Babaris	Suato Lama	36.043.221,00	10.420.754,00	21.620.743,00	14.413.829,00	46.455.326,00	- 10.412.105,00	8.142.259,00	2.761.853,00	4.884.183,00	-	7.646.036,00	496.223,00	54.101.362,00
115	Salam Babaris	Kambang Habang Lama	26.462.650,00	12.316.625,00	15.874.295,00	10.582.864,00	38.773.784,00	- 12.311.134,00	5.977.983,00	3.264.323,00	3.586.045,00	-	6.850.368,00	- 872.385,00	45.624.152,00
116	Salam Babaris	Pantai Cabe	21.220.037,00	12.775.236,00	12.729.764,00	8.486.510,00	33.991.510,00	- 12.771.473,00	4.793.662,00	3.385.872,00	2.875.687,00	-	6.261.559,00	- 1.467.897,00	40.253.069,00
117	Salam Babaris	Suato Baru	16.693.401,00	8.859.985,00	10.014.679,00	6.676.452,00	25.551.116,00	- 8.857.715,00	3.771.084,00	2.348.196,00	2.262.343,00	-	4.610.539,00	- 839.455,00	30.161.655,00
118	Salam Babaris	Kambang Habang Baru	56.813.067,00	3.919.335,00	34.078.542,00	22.719.028,00	60.716.905,00	- 3.903.838,00	12.834.222,00	1.038.756,00	7.698.433,00	-	8.737.189,00	4.097.033,00	69.454.094,00
119	Hatungun	Tarungin	14.564.295,00	5.437.484,00	8.737.636,00	5.825.090,00	20.000.210,00	- 5.435.915,00	3.290.113,00	1.441.117,00	1.973.855,00	-	3.414.972,00	- 124.859,00	23.415.182,00
120	Hatungun	Matang Batas	17.254.330,00	10.733.895,00	10.351.125,00	-	21.085.020,00	- 3.830.690,00	3.897.799,00	2.844.846,00	2.338.346,00	-	5.183.192,00	- 1.285.393,00	26.268.212,00
121	Hatungun	Hatungun	20.340.169,00	10.263.924,00	12.202.018,00	8.134.679,00	30.600.621,00	- 10.260.452,00	4.594.898,00	2.720.288,00	2.756.468,00	-	5.476.756,00	- 881.858,00	36.077.377,00
122	Hatungun	Burakai	14.522.652,00	8.260.727,00	8.712.658,00	5.808.439,00	22.781.824,00	- 8.259.172,00	3.280.705,00	2.189.373,00	1.968.212,00	-	4.157.585,00	- 876.880,00	26.939.409,00
123	Hatungun	Batu Hapu	19.964.814,00	12.396.943,00	11.976.879,00	-	24.373.822,00	- 4.409.008,00	4.510.104,00	3.285.611,00	2.705.609,00	-	5.991.220,00	- 1.481.116,00	30.365.042,00
124	Hatungun	Kambang Kuning	14.619.521,00	7.765.349,00	8.770.760,00	5.847.174,00	22.383.283,00	- 7.763.762,00	3.302.588,00	2.058.082,00	1.981.338,00	-	4.039.420,00	- 736.832,00	26.422.703,00
125	Hatungun	Asam Randah	17.187.449,00	7.966.169,00	10.311.009,00	-	18.277.178,00	- 1.089.729,00	3.882.690,00	2.111.305,00	2.329.284,00	-	4.440.589,00	- 557.899,00	22.717.767,00
126	Hatungun	Bagak	18.548.119,00	9.497.510,00	12.926.549,00	8.617.699,00	31.041.758,00	- 12.493.639,00	4.867.777,00	2.517.162,00	2.920.142,00	-	5.437.304,00	- 569.527,00	36.479.062,00
							-								-
Jumlah			**2.363.500.000,00**	**728.921.197,00**	**1.185.689.793,00**	**448.853.256,00**	**2.363.464.246,00**	**35.754,00**	**469.570.000,00**	**192.173.021,00**	**267.850.464,00**	**6.960.462,00**	**466.983.947,00**	**2.586.053,00**	**2.830.448.193,00**

Salinan sesuai dengan aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KAS BLUD
PER 31 DESEMBER 2023

Lampiran : 3

No	Uraian	Saldo Awal TA 2023	Saldo Bank Mandiri Per 31 Des 2023	Saldo Bank Kalsel Per 31 Des 2023	Deposito Per 31 Des 2023	Setoran Bendahara Pengeluaran ke Kas BLUD Per 31 Des 2023	Total Saldo Akhir TA 2023	Ket
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Saldo Awal	18.779.154.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		192.354.916,07	197.032.197,53	0,00	0,00	389.387.113,60	
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.987.271,17	0,00	0,00	0,00	1.987.271,17	
JUMLAH							391.374.384,77	

BPK Perwakilan kalsel

Lampiran : 4.1

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Sekolah	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Tunai Per 31 Desember 2023	Saldo Bank Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2023	Ket
		2022	2023	2023	2023	Lebih Setor 2023
1	SDN RANTAU BUJUR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SDN RANTAU BUJUR 2	110.500,00	0,00	22.604.794,00	22.604.794,00	0,00
3	SDN RANTAU KANAN 1	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SDN RANTAU KANAN 2	2.361.264,00		1.675.818,00	1.674.900,00	918,00
5	SDN RANTAU KANAN 3	0,00	0,00	74.962,00	74.962,00	0,00
6	SDN RANGDA MALINGKUNG 5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SDN RANGDA MALINGKUNG 4	167.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SDN RANGDA MALINGKUNG 3	1.726.438,00	849.451,00	334,00	849.785,00	0,00
9	SDN RANGDA MALINGKUNG 1	177.529,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00
10	SDN PUNCAK HARAPAN	49.991,00	0,00	8.141,00	8.141,00	0,00
11	SDN PULAU PINANG UTARA	2.286.897,00	0,00	955.315,00	955.315,00	0,00
12	SDN PULAU PINANG 2	180.536,00	0,00	582.390,00	582.390,00	0,00
13	SDN PULAU PINANG 1	59.700,00	0,00	2.419.941,00	2.419.941,00	0,00
14	SDN RANTAU KIWA 1	2.604.600,00	0,00	2.812.944,00	2.812.944,00	0,00
15	SDN RANTAU KIWA 2	1.066,00	0,00	282.699,00	282.699,00	0,00
16	SDN SALAM BABARIS 3	5.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17	SDN SALAM BABARIS 2	0,00	0,00	11.628,00	11.628,00	0,00
18	SDN SALAM BABARIS 1	3.022.044,00	0,00	4.626.520,00	4.626.520,00	0,00
19	SDN SABAH	3.000,00	0,00	7.288,00	7.288,00	0,00
20	SDN RUMINTIN 3	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00
21	SDN RUMINTIN 2	284.079,00	0,00	254.410,00	254.410,00	0,00
22	SDN RUMINTIN 1	1.000,00	0,00	1.506.325,00	1.506.325,00	0,00
23	SDN RAWANA HULU	1.410.754,00	0,00	40.694,00	40.694,00	0,00
24	SDN RAWANA HILIR	46.303,00	0,00	700,00	700,00	0,00
25	SDN RAWA MUNING 2	78.250,00	0,00	94.050,00	94.050,00	0,00
26	SDN RAWA MUNING 1	37.311,00	0,00	37.311,00	37.311,00	0,00
27	SDN SAWAJA	99.016,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
28	SDN PUALAMSARI 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SDN PUALAMSARI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SDN KALUMPANG 3	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SDN PANTAI CABE	457,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00
32	SDN PANDULANGAN 2	194.000,00	0,00	332.200,00	332.200,00	0,00
33	SDN PANDULANGAN 1	5.410.500,00	0,00	31.674.780,00	31.674.780,00	0,00
34	SDN PANDAHAN 2	53.700,00	2.571.515,00	0,00	2.571.515,00	0,00
35	SDN PANDAHAN 1	309.142,00		383.682,00	74.540,00	309.142,00
36	SDN PADANG SARI	8.592,00	0,00	2.118.076,00	2.118.076,00	0,00
37	SDN PABAUNGAN PANTAI	0,00	176.300,00	50.000,00	226.300,00	0,00
38	SDN PABAUNGAN HULU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SDN PABAUNGAN HILIR 2	1.258,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
40	SDN PABAUNGAN HILIR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SDN MIAWA	823.900,00	0,00	820.853,00	820.853,00	0,00
42	SDN PARIGI SIMBAR	23.919,00	0,00	192.479,00	192.479,00	0,00
43	SDN PUALAMSARI 1	40.400,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
44	SDN PIPITAK JAYA 2	40.673,00	0,00	2.091.936,00	2.091.936,00	0,00
45	SDN PIPITAK JAYA 1	832.944,00	0,00	819.944,00	819.944,00	0,00
46	SDN PERINTIS RAYA	9.961,00	0,00	44.727,00	44.727,00	0,00
47	SDN PEMATANG KARANGAN HULU	530.640,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
48	SDN PEMATANG KARANGAN HILIR 1	0,00	475.900,00	0,00	475.900,00	0,00
49	SDN PEMATANG KARANGAN	1.619.977,00	0,00	19.977,00	19.977,00	0,00
50	SDN PAUL	222,00	0,00	30.007,00	30.007,00	0,00
51	SDN PARIOK 2	5.234.000,00	411.200,00	319.844,00	731.044,00	0,00
52	SDN PARIOK 1	3.149.500,00	3.108.000,00	344,00	3.108.344,00	0,00
53	SDN PARING GULING	8.440.600,00	0,00	8.701.795,00	8.701.795,00	0,00
54	SDN MATANG BATAS	140.240,00		278.887,00	145.356,00	133.531,00
55	SDN SAWANG	234.429,00	0,00	234.429,00	234.429,00	0,00
56	SDN WARINGIN DALAM	770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SDN TUNGKAP 2	1.339.535,00	0,00	3.469.172,00	3.469.172,00	0,00
58	SDN TUNGKAP 1	103.178,00	0,00	48.245,00	48.245,00	0,00
59	SDN SWATO TATAKAN 2	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SDN SWATO TATAKAN 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SDN SWATO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BPK Perwakilan Prov. Kalsel

No	Nama Sekolah	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Tunai Per 31 Desember 2023	Saldo Bank Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2023	Ket
		2022	2023	2023	2023	Lebih Setor 2023
62	SDN SWATO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SDN SWATO 1	340.000,00	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
64	SDN SUNGAI SALAI	111.245,00	0,00	111.245,00	111.245,00	0,00
65	SDN SUNGAI RUTAS 2	2.000,00	0,00	152,00	152,00	0,00
66	SDN SUNGAI RUTAS 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SDN SERAWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SDN SUNGAI PUTING	134.505,00		290.000,00	210.000,00	80.000,00
69	SDN TAMBARANGAN 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SDN TAMBARANGAN 2	696.800,00	0,00	722.000,00	722.000,00	0,00
71	SDN TIRIK	64.122,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
72	SDN TIMBUNG	46.987,00	0,00	325.287,00	325.287,00	0,00
73	SDN TIMBAAN 2	4.382,00	0,00	4.582,00	4.582,00	0,00
74	SDN TIMBAAN 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SDN TELUK HAUR	11.417,00	0,00	98.791,00	98.791,00	0,00
76	SDN TATAKAN 3	754.600,00	0,00	1.617.200,00	1.617.200,00	0,00
77	SDN TATAKAN 2	1.062.256,00	0,00	1.066.566,00	1.066.566,00	0,00
78	SDN TATAKAN 1	368.743,00	0,00	1.339.302,00	1.339.302,00	0,00
79	SDN TARUNGIN 1	108.094,00	0,00	159.052,00	159.052,00	0,00
80	SDN TANGKAWANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SDN TANDUI 1	119,00	0,00	959.755,00	959.755,00	0,00
82	SDN TAMBARANGAN 3	1.328.396,00	747.408,00	0,00	747.408,00	0,00
83	SDN SUNGAI BAHALANG	373.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	SDN BINUANG 1	79.456,00	0,00	1.008.748,00	1.008.748,00	0,00
85	SDN BANUA HALAT KANAN	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	SDN BALAWAIAN	77.500,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
87	SDN BAKARANGAN 2	19.986,00		2.134.655,00	2.114.655,00	20.000,00
88	SDN BAKARANGAN 1	1.230.258,00	0,00	1.648.758,00	1.648.758,00	0,00
89	SDN BAGAK	139.405,00	25.000,00	139.405,00	164.405,00	0,00
90	SDN AYUNAN PAPAN	23.827,00	0,00	21.638,00	21.638,00	0,00
91	SDN ASAM RANDAH	1.000,00	0,00	740.483,00	740.483,00	0,00
92	SDN ANTASARI HILIR	1.759.884,00	64.657,00	126.874,00	191.531,00	0,00
93	SDN ANTASARI	955.420,00	0,00	789.496,00	789.496,00	0,00
94	SDN ANDHIKA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SDN A. YANI PURA 2	43.400,00	0,00	19.790,00	19.790,00	0,00
96	SDN SUNGAI SALAI HILIR	2.242.340,00	0,00	3.923.063,00	3.923.063,00	0,00
97	SDN BANUA HANYAR HULU	19.965.566,00	0,00	1.838.211,00	1.838.211,00	0,00
98	SDN BANUA PADANG	1.588.592,00	0,00	876.428,00	876.428,00	0,00
99	SDN BINDERANG	2.035.267,00	0,00	850.554,00	850.554,00	0,00
100	SDN BERINGIN B	403.444,00	0,00	497.040,00	497.040,00	0,00
101	SDN BERINGIN 2	187.780,00	24.360,00	443.108,00	467.468,00	0,00
102	SDN BERINGIN 1	6.820.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SDN BAULIN	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	SDN BATUNG	96.459,00	0,00	259.200,00	259.200,00	0,00
105	SDN BATU HAPU 2	4.060.516,00	0,00	768.150,00	768.150,00	0,00
106	SDN BATU HAPU 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SDN BATU AMPAR	17.655,00	120.500,00	2.009.540,00	2.130.040,00	0,00
108	SDN BATALAS	2.456.723,00	7.610,00	3.113.613,00	3.121.223,00	0,00
109	SDN BARAMBAN	953.476,00	0,00	2.258.083,00	2.258.083,00	0,00
110	SDN SALAM BABARIS 4	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
111	SDN BINUANG 10	123.400,00		388.400,00	265.900,00	122.500,00
112	SDN MARGASARI ULU	0,00	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
113	SDN KUPANG 2	1.959.190,00	0,00	116.884,00	116.884,00	0,00
114	SDN KUPANG 1	1.500.550,00	0,00	5.453.171,00	5.453.171,00	0,00
115	SDN KEPAYANG	18.270,00	0,00	138.507,00	138.507,00	0,00
116	SDN KEMBANG HABANG 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	SDN KEMBANG HABANG 1	79.000,00	40.131,00	138.869,00	179.000,00	0,00
118	SDN KEMBANG HABANG 3	1.145.400,00	4.508,00	1.145.400,00	1.149.908,00	0,00
119	SDN KALUMPANG 2	56.750,00	218,00	56.750,00	56.968,00	0,00
120	SDN KALUMPANG 1	1.897.350,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
121	SDN KALADAN 2	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
122	SDN KALADAN 1	121.004,00	0,00	121.004,00	121.004,00	0,00
123	SDN HIYUNG 2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	SDN HIYUNG 1	721.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SDN LABUNG 1	3.229.594,00	0,00	1.424.674,00	1.424.674,00	0,00
126	SDN LABUNG 2	2.341.657,00	0,00	2.572.794,00	2.572.794,00	0,00
127	SDN MARGASARI ILIR 2	35.425,00	0,00	31.319,00	31.319,00	0,00
128	SDN MARGASARI ILIR 1	23.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama Sekolah	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Tunai Per 31 Desember 2023	Saldo Bank Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2023	Ket
		2022	2023	2023	2023	Lebih Setor 2023
129	SDN MARAMPIAU HILIR	793.693,00	0,00	1.547.567,00	1.547.567,00	0,00
130	SDN MARAMPIAU	122.058,00	107.010,00	58,00	107.068,00	0,00
131	SDN MANDURIAN HILIR	765.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SDN MANDURIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SDN LOKPAIKAT 3	157.846,00	152.100,00	158.386,00	310.486,00	0,00
134	SDN LOKPAIKAT 1	16.489,00	0,00	589,00	589,00	0,00
135	SDN LINUH 2	90.400,00	0,00	90.400,00	90.400,00	0,00
136	SDN LAWAHAN CEMPAKA	2.010.121,00	0,00	748.509,00	748.509,00	0,00
137	SDN LAWAHAN 2	18.000,00	0,00	22.523.817,00	22.523.817,00	0,00
138	SDN LAWAHAN 1	6.000,00	0,00	588,00	588,00	0,00
139	SDN HATUNGUN 2	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	SDN HATUNGUN 1	89.706,00	4.541.649,00	540.000,00	5.081.649,00	0,00
141	SDN BINUANG 2	134.358,00	0,00	794.520,00	794.520,00	0,00
142	SDN BUAS BUAS 2	1.152.418,00	9.983.557,00	2.418,00	9.985.975,00	0,00
143	SDN BUAS BUAS 1	418.915,00	36,00	215,00	251,00	0,00
144	SDN BITAHAN BARU	425.500,00	67.500,00	2.816,00	70.316,00	0,00
145	SDN BITAHAN 2	1.268.192,00	0,00	1.317.583,00	1.317.583,00	0,00
146	SDN BITAHAN 1	5.909.272,00	0,00	200.838,00	200.838,00	0,00
147	SDN BINUANG 9	202.300,00	0,00	411.468,00	411.468,00	0,00
148	SDN BINUANG 8	29.008,00	0,00	377.509,00	377.509,00	0,00
149	SDN BINUANG 7	361.138,00	0,00	230.300,00	230.300,00	0,00
150	SDN BINUANG 6	6.895.379,00	0,00	3.449.246,00	3.449.246,00	0,00
151	SDN BINUANG 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	SDN BINUANG 4	869.632,00	0,00	404.932,00	404.932,00	0,00
153	SDN BINUANG 3	985.258,00	0,00	1.351.354,00	1.351.354,00	0,00
154	SDN BUAS BUAS HILIR	122,00	0,00	43,00	43,00	0,00
155	SDN BUNDUNG 1	29.913,00	0,00	68.192,00	68.192,00	0,00
156	SDN TANDUI 2	14.000,00	0,00	9.314,00	9.314,00	0,00
157	SDN HARAPAN MASA 2	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
158	SDN HARAPAN MASA 1	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	SDN HARAKIT	629.258,00	0,00	491.548,00	491.548,00	0,00
160	SDN HANGUI 1	100.503,00	0,00	22.500.003,00	22.500.003,00	0,00
161	SDN GUNUNG BATU	469.197,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
162	SDN GADUNG KERAMAT	0,00	0,00	244.500,00	244.500,00	0,00
163	SDN GADUNG HILIR	805.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	SDN BUNDUNG 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	SDN BUNGUR	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	SDN BUNGUR BARU	1.702.650,00	0,00	1.949.676,00	1.949.676,00	0,00
167	SDN BURAKAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	SDN CANDI LARAS	389.812,00	0,00	2.899.386,00	2.899.386,00	0,00
169	SDN A. YANI PURA 1	7.022,00	0,00	7.022,00	7.022,00	0,00
170	SDN SWATO BARU	1.560.000,00	0,00	153.150,00	153.150,00	0,00
171	SDN PARIGI KACIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SDN KEMBANG KUNING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SDN TARUNGIN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SDN LALAPIN	20.851.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SDN BALAWAIAN HILIR	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
176	SMPN 1 BAKARANGAN	157.966,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
177	SMPN 1 BINUANG	310.500,00	0,00	1.624.719,00	1.624.719,00	0,00
178	SMPN 1 BUNGUR	1.429.304,00	0,00	1.059.496,00	1.059.496,00	0,00
179	SMPN 1 CANDI LARAS SELATAN	680.248,00	676,00	453.922,00	454.598,00	0,00
180	SMPN 1 CANDI LARAS UTARA	10.749.451,00	0,00	9.524.808,00	9.524.808,00	0,00
181	SMPN 1 HATUNGUN	4.366,00	4.366,00	116.800,00	121.166,00	0,00
182	SMPN 1 LOKPAIKAT	3.996,00	0,00	10.185.818,00	10.185.818,00	0,00
183	SMPN 1 PIANI	4.164.329,00	0,00	517.867,00	517.867,00	0,00
184	SMPN 1 RANTAU	2.454.545,00	0,00	10.166.539,00	10.166.539,00	0,00
185	SMPN 1 SALAM BABARIS	3.236.793,00	0,00	299.088,00	299.088,00	0,00
186	SMPN 1 TAPIN SELATAN	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
187	SMPN 1 TAPIN TENGAH	471.964,00	0,00	576.464,00	576.464,00	0,00
188	SMPN 2 BAKARANGAN	133.313,00	85.500,00	74.713,00	160.213,00	0,00
189	SMPN 2 BINUANG	500,00	0,00	600,00	600,00	0,00
190	SMPN 2 BUNGUR	467.800,00	1.553.700,00	0,00	1.553.700,00	0,00
191	SMPN 2 CANDI LARAS SELATAN	398.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	SMPN 2 CANDI LARAS UTARA	37.688,00	0,00	93.968,00	93.968,00	0,00
193	SMPN 2 PIANI	2.163.536,00	0,00	85.546,00	85.546,00	0,00
194	SMPN 2 RANTAU	23.231,00	0,00	796.087,00	796.087,00	0,00
195	SMPN 2 SALAM BABARIS	919,00	646.477,00	0,00	646.477,00	0,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama Sekolah	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Tunai Per 31 Desember 2023	Saldo Bank Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2023	Ket
		2022	2023	2023	2023	Lebih Setor 2023
196	SMPN 2 TAPIN TENGAH	225.303,00	139,00	225.303,00	225.442,00	0,00
197	SMPN 3 CANDI LARAS UTARA	10.692,00	0,00	500.692,00	500.692,00	
Jumlah		**185.780.156,00**	**25.771.968,00**	**234.909.842,00**	**260.015.719,00**	**666.091,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran :4.2

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KAS DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN (BOP) KESETARAAN DAN PAUD
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Nama Sekolah	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Kas Tunai Per 31 Desember 2023	Saldo Bank Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2023	KET
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	P9968075 SKB SFNF KAB TAPIN	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
2	TK Negeri Pembina 1 Bakarangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	TK Negeri Pembina 1 Tapin Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TK Negeri Pembina 1 Lokpaikat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TK Negeri Pembina 2 Tapin Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	TK Negeri Pembina 1 Salam Babaris	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TK Negeri Pembina 1 Tapin Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	TK Negeri Pembina Binuang	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	TK Negeri Pembina 2 Lokpaikat	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TK Negeri Pembina Rantau	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 5.1

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
REKAPITULASI KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN FKTP
TAHUN ANGGARAN 2023

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama PKM	Saldo Awal	Pendapatan JKN	Penerimaan Jagir	Belanja JKN	Setor Jagir	Saldo Akhir
1	Tapin Utara	1.111.436,00	1.138.266.670,00	974.406,00	1.044.639.674,00	913.411,00	94.799.427,00
2	Binuang	55.160,00	1.135.609.121,00	717.670,00	1.061.399.549,00	686.225,00	74.296.177,00
3	Hatungun	3.812.975,00	359.398.878,00	224.786,00	291.883.211,00	181.004,00	71.372.424,00
4	Tambarangan	7.663.376,00	784.132.671,00	136.190,00	757.951.681,00	129.420,00	33.851.136,00
5	Salam Babaris	1.069.770,00	461.387.953,00	243.789,00	432.596.757,00	224.178,00	29.880.577,00
6	Banua Padang	9.603.045,00	583.963.038,00	421.900,00	560.964.814,00	414.404,00	32.608.765,00
7	Bakarangan	82.443.890,00	615.836.308,00	1.099.284,00	636.196.639,00	1.113.737,00	62.069.106,00
8	Pandahan	4.889.086,00	399.401.616,00	32.634,00	403.199.207,00	31.576,00	1.092.553,00
9	Tambaruntung	96.432.623,00	599.282.788,00	1.164.119,00	694.590.546,00	1.228.167,00	1.060.817,00
10	Baringin	96.853.261,00	585.877.935,00	1.138.153,00	644.144.751,00	1.189.524,00	38.535.074,00
11	Margasari	2.182.201,00	686.959.056,00	262.647,00	688.135.091,00	251.345,00	1.017.468,00
12	Lokpaikat	1.028.003,00	478.886.696,00	172.958,00	469.284.601,00	163.568,00	10.639.488,00
13	Piani	12.680.102,00	391.714.015,00	264.715,00	382.186.899,00	256.370,00	22.215.563,00
JUMLAH		**319.824.928,00**	**8.220.716.745,00**	**6.853.251,00**	**8.067.173.420,00**	**6.782.929,00**	**473.438.575,00**

Lampiran : 5.2

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KAS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
TAHUN ANGGARAN 2023

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan JKN	Penerimaan Jagir	Belanja JKN	Setor Jagir	Saldo Akhir
1	Tapin Utara	0,00	1.455.727.000,00	2.307.292,00	1.164.412.106,00	2.307.292,00	291.314.894,00
2	Bakarangan	0,00	708.796.000,00	960.085,00	587.459.658,00	960.085,00	121.336.342,00
3	Banua Padang	0,00	973.165.000,00	1.582.499,00	827.669.600,00	1.582.499,00	145.495.400,00
4	Tambaruntung	0,00	658.204.000,00	832.519,00	604.561.491,00	832.519,00	53.642.509,00
5	Pandahan	0,00	514.483.000,00	718.179,00	419.949.763,00	718.179,00	94.533.237,00
6	Lokpaikat	0,00	686.744.000,00	1.096.363,00	536.701.701,00	1.096.363,00	150.042.299,00
7	Tambarangan	0,00	1.194.941.000,00	1.748.883,00	944.723.365,00	1.748.883,00	250.217.635,00
8	Salam Babaris	0,00	553.905.000,00	740.797,00	468.325.010,00	740.797,00	85.579.990,00
9	Piani	0,00	581.993.000,00	886.999,00	523.251.395,00	886.999,00	58.741.605,00
10	Binuang	0,00	1.236.333.000,00	1.849.552,00	1.082.425.654,00	1.849.552,00	153.907.346,00
11	Hatungun	0,00	635.425.000,00	941.023,00	562.361.851,00	941.023,00	73.063.149,00
12	Baringin	0,00	953.711.000,00	1.568.779,00	799.267.297,00	1.568.779,00	154.443.703,00
13	Margasari	0,00	811.521.000,00	1.285.349,00	722.439.425,00	1.285.349,00	89.081.575,00
JUMLAH		**0,00**	**10.964.948.000,00**	**16.518.319,00**	**9.243.548.316,00**	**16.518.319,00**	**1.721.399.684,00**

Lampiran : 6.1

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2023

No	Jenis	SKPD	Uraian	Saldo Awal TA 2022	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	Realisasi Piutang s/d TA 2022	Piutang			PENGHAPUSAN PIUTANG	Saldo Akhir TA 2023	Keterangan
								Ketetapan 2023	Realisasi 2023	Piutang 2023			
1	Piutang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	-	-	-	-	123.577.700,00	123.577.700,00	-		-	
			Pajak Restoran	-	-	-	-	5.087.981.514,00	5.087.981.514,00	-		-	
			Pajak Hiburan	-	-	-	-	89.589.400,00	89.589.400,00	-		-	
			Pajak Reklame	-	-	-	-	425.321.334,40	425.321.334,40	-		-	
			Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	13.724.549.129,00	13.724.549.129,00	-		-	
			Pajak Parkir	-	-	-	-	49.577.400,00	49.577.400,00	-		-	
			Pajak Air Tanah					27.320.600,00	27.320.600,00				
			PMBLB	-	-	-	-	1.604.325.952,85	1.604.325.952,85	-		-	
			Sarang Burung Walet	-	-	-	-	9.500.000,00	9.500.000,00	-		-	
			PBBP2	16.596.951.247,00	1.167.038,00	16.598.118.285,00	583.328.704,00	2.210.895.669,00	863.684.347,00	1.347.211.322,00	4.594.520.540,00	12.767.480.363,00	
										Sub Jumlah	**4.594.520.540,00**	**12.767.480.363,00**	
2	Piutang Retribusi	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Rumah Dinas	266.585.668,00	-	266.585.668,00	14.894.000,00	145.800.000,00	142.475.000,00	3.325.000,00	-	255.016.668,00	
		Dinas Perdagangan	Retribusi Sewa Toko pada Pasar Raya Rantau	993.044.592,00	-	993.044.592,00	187.568.726,00	858.742.200,00	404.508.665,00	454.233.535,00	-	1.259.709.401,00	
			Retribusi Sewa Toko pada Pasar Keraton Rantau	2.978.435.000,00	-	2.978.435.000,00	79.518.000,00	845.712.000,00	114.636.000,00	731.076.000,00	-	3.629.993.000,00	
			Retribusi Sewa Toko Pada Pasar Binuang	204.026.250,00	-	204.026.250,00	18.757.500,00	361.620.000,00	178.503.750,00	183.116.250,00	-	368.385.000,00	
										Sub Jumlah	**-**	**5.513.104.069,00**	
3	Piutang Lain-lain PAD yang	RSUD Datu Sanggul	PT. Hasnur Riung Sinergi (BRE)	19.337.772,00	-	19.337.772,00	19.337.772,00	12.724.396,00	6.464.356,00	6.260.040,00	-	6.260.040,00	
			PT. Hasnur Riung Sinergi (EBL)	-	-	-	-	4.624.665,00	1.550.951,00	3.073.714,00	-	3.073.714,00	
			PT. Riung Mitra Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			PT. Kalimantan Prima Persada	21.003.164,00	-	21.003.164,00	21.003.164,00	48.903.096,00	42.985.865,00	5.917.231,00	-	5.917.231,00	
			BPJS	2.948.938.900,00	-	2.948.938.900,00	2.948.938.900,00	45.396.290.474,00	41.680.640.290,00	3.715.650.184,00	-	3.715.650.184,00	
			BPJS (Covid-19)	43.139.000,00	-	43.139.000,00	43.139.000,00	-	-	-	-	-	
			PT. Trakindo Utama	12.807.341,00	-	12.807.341,00	12.807.341,00	28.148.613,00	16.707.912,00	11.440.701,00	-	11.440.701,00	
			PT. Adhi Luthfiatama	18.778.884,00	-	-	-	-	-	-	-	18.778.884,00	
			PT. Hasnur Riung Sinergi(AGM)	3.039.793,00	-	3.039.793,00	3.039.793,00	16.273.443,00	10.004.911,00	6.268.532,00	-	6.268.532,00	
			PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kandangan	-	-	-	-	13.449.344,00	-	13.449.344,00	-	13.449.344,00	
			PT. Cipta Kridatama	51.649.094,00	-	51.649.094,00	51.649.094,00	237.829.141,00	142.928.298,00	94.900.843,00	-	94.900.843,00	
			BPJS Ketenaga Kerjaan	5.330.750,00	-	5.330.750,00	5.330.750,00	80.159.329,00	18.844.306,00	61.315.023,00	-	61.315.023,00	
										Sub Jumlah	**-**	**3.937.054.496,00**	
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Dana Transfer	-	-	-	0,00	-	-	4.815,00	-	4.815,00	
										Sub Jumlah	**-**	**4.815,00**	
5	Piutang Transfer Antar Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor	3.259.167.017,55	-	3.259.167.017,55	3.259.167.018,00	11.198.478.413,72	8.223.294.522,00	2.975.183.891,27	-	2.975.183.891,27	
			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.312.760.392,01	-	3.312.760.392,01	3.312.760.392,00	13.140.597.404,06	10.016.146.414,00	3.124.450.990,07		3.124.450.990,07	
			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	37.532.554.517,40	-	37.532.554.517,40	37.532.554.517,00	117.886.941.894,40	78.220.004.039,00	39.666.937.855,80	-	39.666.937.855,80	
			Pajak Air Permukaan	162.046.018,16	-	162.046.018,16	162.046.018,00	585.481.650,30	455.928.919,00	129.552.731,46	-	129.552.731,46	
			Pajak Rokok	2.416.883.790,00	1.868.694.475,00	4.285.578.265,00	4.285.578.265,00	11.047.690.718,00	8.862.511.283,00	2.185.179.435,00	-	2.185.179.435,00	
										Sub Jumlah	**-**	**48.081.304.903,60**	
6	Piutang Lainnya	Badan Keuangan dan Aset Daerah (KETAPANG)	LUEP (Piutang atas Dana Bergulir)	571.169.553,00	-	571.169.553,00	20.000.000,00	-	-	551.169.553,00	-	551.169.553,00	
		PUPR-Bidang Cipta Karya	HARMONI PERMAI; Pekerjaan PENATAAN SITE DEVELOPMENT KUBURAN MUSLIMIN DESA BUNGUR BARU KEC. BUNGUR (PAD) ; 600.1.15.4/03.PL/SPK/PSD.KM.DsBungurBaru/CK/2023 / 600.1.15.4/03.PL/SPK/PSD.KM.DsBungurBaru-AMD/CK/20							59.844.900,00	-	59.844.900,00	
			HARMONI PERMAI ; Pekerjaan PENATAAN SITE DEVELOPMENT KUBURAN MUSLIMIN AL MUBARAK KEL. KUPANG KEC. TAPIN UTARA RT. 004 (PAD) ; 600.1.15.4/03.PL/SPK/PSD.KM.AlMubarak/CK/2023 / 600.1.15.4/03.PL/SPK/PSD.KM.AlMubarak-AMD/CK/2023							59.835.000,00	-	59.835.000,00	
			DEWI KUNTI ; Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Penanganan Desa Stunting Kabupaten Tapin (PAD) ; 600.1.16.3/03.KPA.PSPBS.STUNTING/SP/CK-DPUPR/2023							462.527.010,00	-	462.527.010,00	
			NUR AZIZAH PUTRI ; Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pesantren Datu Aling-Aling Desa Tungkap Kecamatan Binuang (PAD) ; 600.1.17.2/03/SPK/SAN.PsAling.Binuang/CK/2023							59.826.600,00	-	59.826.600,00	
			ALIZKA JAYA NUSANTARA ; Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pesantren Darul Muhibbin Desa Tungkap Kecamatan Binuang (PAD) ; 600.1.17.2/03/SPK/SAN.PsDMuhibbin.Binuang/CK/2023							53.927.838,00	-	53.927.838,00	

BPK Perwakilan Kalsel

No	Jenis	SKPD	Uraian	Saldo Awal TA 2022	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	Realisasi Piutang s/d TA 2022	Piutang			PENGHAPUSAN PIUTANG	Saldo Akhir TA 2023	Keterangan
								Ketetapan 2023	Realisasi 2023	Piutang 2023			
			ADIIVA ; Pekerjaan PEMBUATAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH JL. SARANG BURUNG DESA TUNGKAP KEC. BINUANG (PAD) ; 600.1.16/03-PL/SPK/AB3.Jl.SarBuTungkap-BNG/CK/2023							59.816.700,00	-	59.816.700,00	
			ADIIVA ; Pekerjaan PEMBUATAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH JL. TELAGA ARA DESA TUNGKAP KEC. BINUANG (PAD) ; 600.1.16/03-PL/SPK/AB3.Jl.TelAraTungkap-BNG/CK/202							59.813.400,00	-	59.813.400,00	
			KARYA PRIMA ; Pekerjaan Pembangunan Sarana Penunjang IPA Tatakan Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan (DDUB DAK 2023) (PAD) ; 600.1.16.2/03.KPA.PSm_IPA.DSSTTTKN/SP/CK-DPUPR/20							296.865.600,00	-	296.865.600,00	
			INDO BORNEO PRATAMA ; Pekerjaan Penataan Site Development Kantor Desa Bundung Kec.Bakarangan (PAD) ; 600.1.15.4/03-PL/SPK/PSD.KD.Bundung/CK/2023							59.858.400,00	-	59.858.400,00	
Sub Jumlah											**-**	**1.723.485.001,00**	
JUMLAH											**4.594.520.540,00**	**72.022.433.647,60**	

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 6.2

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PENYISIHAN PIUTANG
Per 31 Desember 2023

NO	SKPD		JUMLAH	Koreksi Ekuitas	Realisasi	Piutang Setelah Realisasi	Penghapusan SK NO 188.45/063/KUM/2023	Piutang Setelah Penghapusan	Pengakuan	Jml Bln	Kualitas Piutang untuk Disisihkan				Total Penyisihan
											Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
											0,5% dari Piutang	10% dari Piutang	50% dari Piutang	100% dari Piutang	
1	**Badan Pendapatan Daerah (PBB)**	Piutang 1994	6.498.723,00	-	-	6.498.723,00	6.498.723,00	-	31-Dec-94	29				-	-
		Piutang 1995	14.076.258,00	-	-	14.076.258,00	14.076.258,00	-	31-Dec-95	28				-	-
		Piutang 1996	17.913.052,00	-	-	17.913.052,00	17.913.052,00	-	31-Dec-96	27				-	-
		Piutang 1997	12.509.825,00	-	-	12.509.825,00	12.509.825,00	-	31-Dec-97	26				-	-
		Piutang 1998	18.957.634,00	-	-	18.957.634,00	18.957.634,00	-	31-Dec-98	25				-	-
		Piutang 1999	24.115.319,00	-	-	24.115.319,00	24.115.319,00	-	31-Dec-99	24				-	-
		Piutang 2000	23.865.306,00	2.359,00	2.359,00	23.865.306,00	23.865.306,00	-	31-Dec-00	23				-	-
		Piutang 2001	21.920.276,00	-	-	21.920.276,00	21.920.276,00	-	31-Dec-01	22				-	-
		Piutang 2002	7.476.901,00	-	-	7.476.901,00	7.476.901,00	-	31-Dec-02	21				-	-
		Piutang 2003	59.247.237,00	9.513,00	9.513,00	59.247.237,00	59.247.237,00	-	31-Dec-03	20				-	-
		Piutang 2004	180.609.651,00	38.877,00	38.877,00	180.609.651,00	180.609.651,00	-	31-Dec-04	19				-	-
		Piutang 2005	476.510,00	-	-	476.510,00	476.510,00	-	31-Dec-05	18				-	-
		Piutang 2006	416.590.919,00	116.194,00	116.194,00	416.590.919,00	416.590.919,00	-	31-Dec-06	17				-	-
		Piutang 2007	95.926.473,00	110.758,00	110.758,00	95.926.473,00	95.926.473,00	-	31-Dec-07	16				-	-
		Piutang 2008	856.983.113,00	183.514,00	183.514,00	856.983.113,00	856.983.113,00	-	31-Dec-08	15				-	-
		Piutang 2009	857.931.804,00	195.991,00	195.991,00	857.931.804,00	857.931.804,00	-	31-Dec-09	14				-	-
		Piutang 2010	955.153.595,00	240.041,00	240.041,00	955.153.595,00	955.153.595,00	-	31-Dec-10	13				-	-
		Piutang 2011	1.024.267.944,00	269.791,00	269.791,00	1.024.267.944,00	1.024.267.944,00	-	31-Dec-11	12				-	-
		Piutang 2012	1.076.664.294,00		67.693.580,00	1.008.970.714,00		1.008.970.714,00	31-Dec-12	11				1.008.970.714,00	1.008.970.714,00
		Piutang 2013	971.761.416,00		68.221.074,00	903.540.342,00		903.540.342,00	31-Dec-13	10				903.540.342,00	903.540.342,00
		Piutang 2014	676.269.811,00		43.253.219,00	633.016.592,00		633.016.592,00	31-Dec-14	9				633.016.592,00	633.016.592,00
		Piutang 2015	955.373.661,00		47.738.590,00	907.635.071,00		907.635.071,00	31-Dec-15	8				907.635.071,00	907.635.071,00
		Piutang 2016	925.149.021,00		36.541.767,00	888.607.254,00		888.607.254,00	31-Dec-16	7				888.607.254,00	888.607.254,00
		Piutang 2017	1.135.714.305,00		39.625.670,00	1.096.088.635,00		1.096.088.635,00	31-Dec-17	6				1.096.088.635,00	1.096.088.635,00
		Piutang 2018	1.189.519.068,00		42.385.574,00	1.147.133.494,00		1.147.133.494,00	31-Dec-18	5			573.566.747,00		573.566.747,00
		Piutang 2019	1.228.744.548,00		44.085.258,00	1.184.659.290,00		1.184.659.290,00	31-Dec-19	4			592.329.645,00		592.329.645,00
		Piutang 2020	1.231.542.892,00		52.607.494,00	1.178.935.398,00		1.178.935.398,00	31-Dec-20	3			589.467.699,00		589.467.699,00
		Piutang 2021	1.290.350.322,00		67.407.568,00	1.222.942.754,00		1.222.942.754,00	31-Dec-21	2		122.294.275,40			122.294.275,40
		Piutang 2022	1.321.341.369,00		72.601.872,00	1.248.739.497,00		1.248.739.497,00	31-Dec-22	1		124.873.949,70			124.873.949,70
		Piutang 2023	1.347.211.322,00			1.347.211.322,00		1.347.211.322,00		0	6.736.056,61				6.736.056,61
			17.944.162.569,00	**1.167.038,00**	**583.328.704,00**	**17.362.000.903,00**	**4.594.520.540,00**	**12.767.480.363,00**			**6.736.056,61**	**122.294.275,40**	**1.755.364.091,00**	**5.437.858.608,00**	**7.447.126.980,71**
2	**Badan Pendapatan Daerah (Hotel)**	Piutang Pajak 2023	123.577.700,00	-	123.577.700,00	-	-	-	31-Dec-23	-	-	-	-	-	-
			123.577.700,00	**-**	**123.577.700,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	**Badan Pendapatan Daerah (Restoran)**	Piutang Pajak 2023	5.087.981.514,00	-	5.087.981.514,00	-	-	-	31-Dec-23	-	-	-	-	-	-
			5.087.981.514,00	**-**	**5.087.981.514,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	**Badan Pendapatan Daerah (PMBLB)**	Piutang Pajak 2023	1.604.325.952,85	-	1.604.325.952,85	-	-	-	31-Dec-23	-	-	-	-	-	-
			1.604.325.952,85	**-**	**1.604.325.952,85**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Badan Pendapatan Daerah (Parkir)**	Piutang Pajak 2023	49.577.400,00	-	49.577.400,00	-	-	-	31-Dec-23	-	-	-	-	-	-
			49.577.400,00	**-**	**49.577.400,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Badan Pendapatan Daerah (PPJ)**	Piutang Pajak 2023	13.724.549.129,00	-	13.724.549.129,00	-	-	-	31-Dec-23	-	-	-	-	-	-
			13.724.549.129,00	**-**	**13.724.549.129,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Badan Pendapatan Daerah (Reklame)**	Piutang Pajak 2023	425.321.334,40	-	**425.321.334,40**	-	-	-	31-Dec-23	-	-	-	-	-	-
			425.321.334,40	**-**	**425.321.334,40**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8	**Badan Pendapatan Daerah (Sarang Burung Walet)**	Piutang Pajak 2023	9.500.000,00	-	**9.500.000,00**	-	-	-	31-Dec-23						
			9.500.000,00												
9	**Badan Pendapatan Daerah (Hiburan)**	Piutang Pajak 2023	89.589.400,00	-	89.589.400,00	-	-	-	31-Dec-23		-	-	-	-	-
			89.589.400,00	**-**	**89.589.400,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10	**Badan Pendapatan Daerah (Air Tanah)**	Piutang Pajak 2023	27.320.600,00	-	27.320.600,00	-	-	-	31-Dec-23		-	-	-	-	-

BPKAD Kab. Tapin Kalsel

NO	SKPD		JUMLAH	Koreksi Ekuitas	Realisasi	Piutang Setelah Realisasi	Penghapusan SK NO 188.45/063/KUM/2023	Piutang Setelah Penghapusan	Pengakuan	Jml Bln	Kualitas Piutang untuk Disisihkan				Total Penyisihan
											Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
											0,5% dari Piutang	10% dari Piutang	50% dari Piutang	100% dari Piutang	
			27.320.600,00	**-**	**27.320.600,00**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		**39.076.405.599,25**	**1.167.038,00**	**21.715.571.734,25**	**17.362.000.903,00**	**4.594.520.540,00**	**12.767.480.363,00**	**-**	**-**	**6.736.056,61**	**122.294.275,40**	**1.755.364.091,00**	**5.437.858.608,00**	**7.447.126.980,71**
1	**Badan Pendapatan Daerah**	Piutang Retribusi 2009	25.553.400,00	-	-	25.553.400,00	-	-	31-Dec-09	172				25.553.400,00	25.553.400,00
	(Rumdin)	Piutang Retribusi 2010	9.011.730,00	-	-	9.011.730,00			31-Dec-10	160				9.011.730,00	9.011.730,00
		Piutang Retribusi 2011	16.895.320,00	-	-	16.895.320,00			31-Dec-11	144				16.895.320,00	16.895.320,00
		Piutang Retribusi 2012	18.843.938,00	-	-	18.843.938,00			31-Dec-12	132				18.843.938,00	18.843.938,00
		Piutang Retribusi 2013	22.727.760,00	-	-	22.727.760,00			31-Dec-13	120				22.727.760,00	22.727.760,00
		Piutang Retribusi 2014	25.165.780,00	-	-	25.165.780,00			31-Dec-14	108				25.165.780,00	25.165.780,00
		Piutang Retribusi 2015	23.717.640,00	-	-	23.717.640,00			31-Dec-15	96				23.717.640,00	23.717.640,00
		Piutang Retribusi 2016	21.807.120,00	-	-	21.807.120,00			31-Dec-16	84				21.807.120,00	21.807.120,00
		Piutang Retribusi 2017	5.523.120,00	-	576.000,00	4.947.120,00			31-Dec-17	72				4.947.120,00	4.947.120,00
		Piutang Retribusi 2018	7.604.120,00	-	576.000,00	7.028.120,00			31-Dec-18	60				7.028.120,00	7.028.120,00
		Piutang Retribusi 2019	6.753.120,00	-	594.000,00	6.159.120,00			31-Dec-19	48				6.159.120,00	6.159.120,00
		Piutang Retribusi 2020	8.187.120,00	-	576.000,00	7.611.120,00			31-Dec-20	36				7.611.120,00	7.611.120,00
		Piutang Retribusi 2021	46.948.500,00	-	7.497.000,00	39.451.500,00			31-Dec-21	24				39.451.500,00	39.451.500,00
		Piutang Retribusi 2022	27.847.000,00	-	5.075.000	22.772.000,00			31-Dec-22	12			11.386.000,00		11.386.000,00
		Piutang Retribusi 2023	3.325.000,00			3.325.000,00			31-Dec-23	0	16.625,00				16.625,00
			269.910.668,00	**-**	**14.894.000,00**	**255.016.668,00**	**-**	**-**			**16.625,00**	**-**	**11.386.000,00**	**228.919.668,00**	**240.322.293,00**
2	**Dinas Perdagangan**	Piutang Retribusi 2012	2.460.000,00	-	-	2.460.000,00			31-Dec-12	11				2.460.000,00	2.460.000,00
	(Pasar Raya Rantau)	Piutang Retribusi 2013	1.560.000,00	-	-	1.560.000,00			31-Dec-13	10				1.560.000,00	1.560.000,00
		Piutang Retribusi 2014	14.295.000,00	-	780.000,00	13.515.000,00			31-Dec-14	9				13.515.000,00	13.515.000,00
		Piutang Retribusi 2015	29.830.000,00	-	2.210.000,00	27.620.000,00			31-Dec-15	8				27.620.000,00	27.620.000,00
		Piutang Retribusi 2016	82.630.000,00	-	3.600.000,00	79.030.000,00			31-Dec-16	7				79.030.000,00	79.030.000,00
		Piutang Retribusi 2017	74.520.000,00	-	2.775.000,00	71.745.000,00			31-Dec-17	6				71.745.000,00	71.745.000,00
		Piutang Retribusi 2018	106.610.000,00	-	4.830.000,00	101.780.000,00			31-Dec-18	5				101.780.000,00	101.780.000,00
		Piutang Retribusi 2019	71.010.000,00	-	8.040.000,00	62.970.000,00			31-Dec-19	4				62.970.000,00	62.970.000,00
		Piutang Retribusi 2020	63.750.000,00	-	12.810.000,00	50.940.000,00			31-Dec-20	3				50.940.000,00	50.940.000,00
		Piutang Retribusi 2021	108.300.000,00	-	25.700.000,00	82.600.000,00			31-Dec-21	2				82.600.000,00	82.600.000,00
		Piutang Retribusi 2022	438.079.592,00		126.823.726,00	311.255.866,00			31-Dec-22	1				311.255.866,00	311.255.866,00
		Piutang Retribusi 2023													
		Januari	29.245.963,00		-	29.245.963,00			31-Dec-23	11 bln			14.622.981,50		14.622.981,50
		Februari	29.685.963,00		-	29.685.963,00			31-Dec-23	10 bln			14.842.981,50		14.842.981,50
		Maret	30.345.213,00		-	30.345.213,00			31-Dec-23	9 bln			15.172.606,50		15.172.606,50
		April	31.161.963,00		-	31.161.963,00			31-Dec-23	8 bln			15.580.981,50		15.580.981,50
		Mei	31.821.902,00		-	31.821.902,00			31-Dec-23	7 bln			15.910.951,00		15.910.951,00
		Juni	32.680.778,00		-	32.680.778,00			31-Dec-23	6 bln			16.340.389,00		16.340.389,00
		Juli	35.598.904,00		-	35.598.904,00			31-Dec-23	5 bln			17.799.452,00		17.799.452,00
		Agustus	39.781.906,00		-	39.781.906,00			31-Dec-23	4 bln			19.890.953,00		19.890.953,00
		September	43.123.407,00		-	43.123.407,00			31-Dec-23	3 bln		4.312.340,70			4.312.340,70
		Oktober	46.242.657,00		-	46.242.657,00			31-Dec-23	2 bln		4.624.265,70			4.624.265,70
		November	49.293.907,00		-	49.293.907,00			31-Dec-23	1 bln	246.469,54				246.469,54
		Desember	55.250.972,00		-	55.250.972,00			31-Dec-23	0 bln	276.254,86				276.254,86
			1.447.278.127,00	**-**	**187.568.726,00**	**1.259.709.401,00**					**522.724,40**	**8.936.606,40**	**130.161.296,00**	**805.475.866,00**	**945.096.492,80**
	Dinas Perdagangan	Piutang Retribusi 2012	64.845.000,00	-	-	64.845.000,00			31-Dec-12	11				64.845.000,00	64.845.000,00
	(Pasar Keraton Rantau)	Piutang Retribusi 2013	101.285.000,00	-	-	101.285.000,00			31-Dec-13	10				101.285.000,00	101.285.000,00
		Piutang Retribusi 2014	131.735.000,00	-	2.280.000,00	129.455.000,00			31-Dec-14	9				129.455.000,00	129.455.000,00
		Piutang Retribusi 2015	201.397.000,00	-	2.372.000,00	199.025.000,00			31-Dec-15	8				199.025.000,00	199.025.000,00
		Piutang Retribusi 2016	230.030.000,00	-	4.710.000,00	225.320.000,00			31-Dec-16	7				225.320.000,00	225.320.000,00
		Piutang Retribusi 2017	292.320.000,00	-	4.800.000,00	287.520.000,00			31-Dec-17	6				287.520.000,00	287.520.000,00
		Piutang Retribusi 2018	303.715.000,00	-	6.360.000,00	297.355.000,00			31-Dec-18	5				297.355.000,00	297.355.000,00
		Piutang Retribusi 2019	290.600.000,00	-	4.800.000,00	285.800.000,00			31-Dec-19	4				285.800.000,00	285.800.000,00
		Piutang Retribusi 2020	301.410.000,00	-	6.360.000,00	295.050.000,00			31-Dec-20	3				295.050.000,00	295.050.000,00
		Piutang Retribusi 2021	343.750.000,00	-	8.380.000,00	335.370.000,00			31-Dec-21	2				335.370.000,00	335.370.000,00
		Piutang Retribusi 2022	717.348.000,00		39.456.000,00	677.892.000,00			31-Dec-22	1				677.892.000,00	677.892.000,00
		Piutang Retribusi 2023				-									
		Januari	56.796.000,00			56.796.000,00			31-Dec-23	11 bln			28.398.000,00		28.398.000,00
		Februari	57.012.000,00			57.012.000,00			31-Dec-23	10 bln			28.506.000,00		28.506.000,00
		Maret	57.552.000,00			57.552.000,00			31-Dec-23	9 bln			28.776.000,00		28.776.000,00
		April	59.520.000,00			59.520.000,00			31-Dec-23	8 bln			29.760.000,00		29.760.000,00
		Mei	60.048.000,00			60.048.000,00			31-Dec-23	7 bln			30.024.000,00		30.024.000,00
		Juni	61.044.000,00			61.044.000,00			31-Dec-23	6 bln			30.522.000,00		30.522.000,00
		Juli	61.968.000,00			61.968.000,00			31-Dec-23	5 bln			30.984.000,00		30.984.000,00
		Agustus	62.304.000,00			62.304.000,00			31-Dec-23	4 bln			31.152.000,00		31.152.000,00
		September	62.976.000,00			62.976.000,00			31-Dec-23	3 bln		6.297.600,00			6.297.600,00
		Oktober	63.084.000,00			63.084.000,00			31-Dec-23	2 bln		6.308.400,00			6.308.400,00
		November	63.996.000,00			63.996.000,00			31-Dec-23	1 bln	319.980,00				319.980,00
		Desember	64.776.000,00			64.776.000,00			31-Dec-23	0 bln	323.880,00				323.880,00
			3.709.511.000,00	**-**	**79.518.000,00**	**3.629.993.000,00**					**643.860,00**	**12.606.000,00**	**238.122.000,00**	**2.898.917.000,00**	**3.150.288.860,00**
	Dinas Perdagangan	Piutang Retribusi 2022	204.026.250,00		18.757.500,00	185.268.750,00								185.268.750,00	185.268.750,00
	(Pasar Binuang)	Piutang Retribusi 2023													
		Januari	13.222.500,00	-	-	13.222.500,00			31-Dec-22	11	-	-	6.611.250,00	-	6.611.250,00
		Februari	13.222.500,00	-	-	13.222.500,00			31-Dec-22	10	-	-	6.611.250,00	-	6.611.250,00
		Maret	13.222.500,00	-	-	13.222.500,00			31-Dec-22	9	-	-	6.611.250,00	-	6.611.250,00

BPK Perwakilan Kepri

NO	SKPD		JUMLAH	Koreksi Ekuitas	Realisasi	Piutang Setelah Realisasi	Penghapusan SK NO 188.45/063/KUM/2023	Piutang Setelah Penghapusan	Pengakuan	Jml Bln	Kualitas Piutang untuk Disisihkan				Total Penyisihan
											Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
											0,5% dari Piutang	10% dari Piutang	50% dari Piutang	100% dari Piutang	
		April	13.683.750,00	-	-	13.683.750,00			31-Dec-22	8	-	-	6.841.875,00	-	6.841.875,00
		Mei	14.298.750,00	-	-	14.298.750,00			31-Dec-22	7	-	-	7.149.375,00	-	7.149.375,00
		Juni	14.298.750,00	-	-	14.298.750,00			31-Dec-22	6	-	-	7.149.375,00	-	7.149.375,00
		Juli	14.913.750,00	-	-	14.913.750,00			31-Dec-22	5	-	-	7.456.875,00	-	7.456.875,00
		Agustus	15.067.500,00	-	-	15.067.500,00			31-Dec-22	4	-	-	7.533.750,00	-	7.533.750,00
		September	16.143.750,00	-	-	16.143.750,00			31-Dec-22	3	-	1.614.375,00	-	-	1.614.375,00
		Oktober	16.758.750,00	-	-	16.758.750,00			31-Dec-22	2	-	1.675.875,00	-	-	1.675.875,00
		November	18.757.500,00	-	-	18.757.500,00			31-Dec-22	1	93.787,50	-	-	-	93.787,50
		Desember	19.526.250,00	-	-	19.526.250,00			31-Dec-22	-	97.631,25	-	-	-	97.631,25
			387.142.500,00	**-**	**18.757.500,00**	**368.385.000,00**	**-**	**-**			**191.418,75**	**3.290.250,00**	**55.965.000,00**	**185.268.750,00**	**244.715.418,75**
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		**5.813.842.295,00**	**-**	**300.738.226,00**	**5.513.104.069,00**	**-**	**-**			**1.374.628,15**	**24.832.856,40**	**435.634.296,00**	**4.118.581.284,00**	**4.580.423.064,55**
1	**RSUD Datu Sanggul**	PT. Hasnur Riung Sinergi (BRE)	6.260.040,00	-	-	6.260.040,00			31-Dec-23	-	31.300,20	-	-	-	31.300,20
		PT. Hasnur Riung Sinergi (EBL)	3.073.714,00			3.073.714,00			31-Dec-23	-	15.368,57	-	-	-	15.368,57
		PT. Riung Mitra Lestari	-	-	-	-			31-Dec-23	-	-	-	-	-	-
		PT. Kalimantan Prima Persada	5.917.231,00	-	-	5.917.231,00			31-Dec-23	-	29.586,16	-	-	-	29.586,16
		BPJS	3.715.650.184,00			3.715.650.184,00			31-Dec-23	-	18.578.250,92	-			18.578.250,92
		BPJS (Covid-19)	-			-			31-Dec-23	-	-	-			-
		PT. Trakindo Utama	11.440.701,00	-	-	11.440.701,00			31-Dec-23	-	57.203,51	-	-	-	57.203,51
		PT. Adhi Luthfiatama										-			
		2022	2.198.403,00	-	-	2.198.403,00			31-Dec-22	-	-	219.840,30	-	-	219.840,30
		2021	16.580.481,00			16.580.481,00			31-Dec-22		-	-	8.290.240,50		8.290.240,50
		PT. Hasnur Riung Sinergi(AGM)	6.268.532,00			6.268.532,00			31-Dec-23	-	31.342,66	-			31.342,66
		PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kandangan	13.449.344,00			13.449.344,00			31-Dec-23	-	67.246,72	-			67.246,72
		PT. Cipta Kridatama	94.900.843,00			94.900.843,00			31-Dec-23	-	474.504,22	-			474.504,22
		BPJS Ketenaga Kerjaan	61.315.023,00			61.315.023,00			31-Dec-23	-	306.575,12	-			306.575,12
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**3.937.054.496,00**	**-**	**-**	**3.937.054.496,00**	**-**	**-**			**19.591.378,06**	**219.840,30**	**8.290.240,50**	**-**	**28.101.458,86**
1	**BKAD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah)**	Piutang Lainnya (Piutang atas Dana Bergulir)		-	-	-	-	-	31-Dec-23	-	-	-	-	-	454.594.553,00
2	**PUPR-Bidang Cipta Karya**	HARMONI PERMAI; Pekerjaan PENATAAN SITE DEVELOPMENT KUBURAN MUSLIMIN DESA BUNGUR BARU KEC. BUNGUR (PAD) ; 600.1.15.4/03.PL/SPK/PSD.KM.DsBungurBaru/CK/2023 / 600.1.15.4/03.PL/SPK/PSD.KM.DsBungurBaru-AMD/CK/20	59.844.900,00			59.844.900,00			31-Dec-23	-	299.224,50	-			299.224,50
		HARMONI PERMAI ; Pekerjaan PENATAAN SITE DEVELOPMENT KUBURAN MUSLIMIN AL MUBARAK KEL. KUPANG KEC. TAPIN UTARA RT. 004 (PAD) ; 600.1.15.4/03.PL/SPK/PSD.KM.AlMubarak/CK/2023 / 600.1.15.4/03.PL/SPK/PSD.KM.AlMubarak-AMD/CK/2023	59.835.000,00			59.835.000,00			31-Dec-23	-	299.174,76	-			299.174,76
		DEWI KUNTI ; Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Penanganan Desa Stunting Kabupaten Tapin (PAD) ; 600.1.16.3/03.KPA.PSPBS.STUNTING/SP/CK-DPUPR/2023	462.527.010,00			462.527.010,00			31-Dec-23	-	2.312.635,05	-			2.312.635,05

BPK Perwakilan Kalsel

NO	SKPD		JUMLAH	Koreksi Ekuitas	Realisasi	Piutang Setelah Realisasi	Penghapusan SK NO 188.45/063/KUM/2023	Piutang Setelah Penghapusan	Pengakuan	Jml Bln	Kualitas Piutang untuk Disisihkan				Total Penyisihan
											Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
											0,5% dari Piutang	10% dari Piutang	50% dari Piutang	100% dari Piutang	
		NUR AZIZAH PUTRI ; Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pesantren Datu Aling-Aling Desa Tungkap Kecamatan Binuang (PAD) ; 600.1.17.2/03/SPK/SAN.PsAling.Binuang/CK/2023	59.826.600,00			59.826.600,00			31-Dec-23	-	299.133,00	-			299.133,00
		ALIZKA JAYA NUSANTARA ; Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pesantren Darul Muhibbin Desa Tungkap Kecamatan Binuang (PAD) ; 600.1.17.2/03/SPK/SAN.PsDMuhibbin.Binuang/CK/2023	53.927.838,00			53.927.838,00			31-Dec-23	-	269.639,19	-			269.639,19
		ADIIVA ; Pekerjaan PEMBUATAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH JL. SARANG BURUNG DESA TUNGKAP KEC. BINUANG (PAD) ; 600.1.16/03-PL/SPK/AB3.Jl.SarBuTungkap-BNG/CK/2023	59.816.700,00			59.816.700,00			31-Dec-23	-	299.083,50	-			299.083,50
		ADIIVA ; Pekerjaan PEMBUATAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH JL. TELAGA ARA DESA TUNGKAP KEC. BINUANG (PAD) ; 600.1.16/03-PL/SPK/AB3.Jl.TelAraTungkap-BNG/CK/202	59.813.400,00			59.813.400,00			31-Dec-23	-	299.067,00	-			299.067,00
		KARYA PRIMA ; Pekerjaan Pembangunan Sarana Penunjang IPA Tatakan Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan (DDUB DAK 2023) (PAD) ; 600.1.16.2/03.KPA.PSrn_IPA.DSSTTTKN/SP/CK-DPUPR/20	296.865.600,00			296.865.600,00			31-Dec-23	-	1.484.328,00	-			1.484.328,00
		INDO BORNEO PRATAMA ; Pekerjaan Penataan Site Development Kantor Desa Bundung Kec.Bakarangan (PAD) ; 600.1.15.4/03-PL/SPK/PSD.KD.Bundung/CK/2023	59.858.400,00			59.858.400,00			31-Dec-23	-	299.292,00	-			299.292,00
			1.172.315.448,00	**-**	**-**	**1.172.315.448,00**	**-**	**-**		**-**	**5.861.577,00**	**-**	**-**	**-**	**5.861.577,00**
Penyisihan Piutang Lainnya			**5.109.369.944,00**	**-**	**-**	**5.109.369.944,00**	**-**	**-**			**25.452.955,06**			**-**	**460.456.130,00**
TOTAL PENYISIHAN															**12.516.107.634,12**

BPK Perwakilan Kalsel

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

Lampiran : 7

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	PERSEDIAAN														Total Persediaan
		a							b						c	
		Barang atau Perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah							Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan operasional kegiatan pemerintah						Bahan atau Perlengkapan yg digunakan dlm proses produksi	
		APBD							APBD/APBN						APBD	
		Alat Tulis Kantor	kertas dan cover	Bahan Cetak	Bahan Komputer	Obat/Alkes Habis Pakai	Bahan Kimia	Lainnya	Obat/Alkes Habis Pakai	Obat-obatan u/ Hewan/Tanaman	Gabah/ Padi	Bahan Kimia	Bibit Ternak/ Tanaman	Lainnya	Pupuk, Obat-obatan u/ Tanaman	
1	Dinas Pendidikan	1.609.000,00	848.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.457.000,00**
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	925.000,00	-	-	1.950.000,00	-	-	142.000,00	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-	**27.017.000,00**
3	Dinas Kesehatan	-	-	-		-	-	-	7.756.741.084,62	-	-	-	-	-	-	**7.756.741.084,62**
4	RSUD Datu Sanggul	27.603.056,00	-	-		-	-	49.748.500,00	1.699.973.345,00	-	-	-	-	2.764.387.958,00	-	**4.541.712.859,00**
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.566.300,00	3.482.500,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	16.067.882.000,00	417.216.677,00	**16.493.147.477,00**
6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-		-	-	41.675.840,00	-	-	-	-	-	-	-	**41.675.840,00**
7	Bappelitbang	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8	Dinas Perhubungan	489.000,00	-	369.550,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**858.550,00**
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.999.500,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.999.500,00**
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-		-	164.774.517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**164.774.517,00**
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	193.993.557,00	-	118.656.626,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**312.650.183,00**
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	329.200,00	3.104.500,00	-	4.438.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.872.200,00**
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-		-	-	-	128.436.220,00	-	-	-	-	-	-	**128.436.220,00**
14	Dinas Sosial	1.239.000,00	1.772.500,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	148.528.500,00	-	**151.540.000,00**
15	Dinas Tenaga Kerja	973.500,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**973.500,00**
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	29.746.825,00	-	**29.746.825,00**
17	Dinas Perdagangan	733.700,00	-	11.368.991,00		-	-	-	-	-	-	-	-	4.874.477,00	-	**16.977.168,00**
18	Dinas Perindustrian	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2.844.800,00	-	**2.844.800,00**
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.265.000,00	-	169.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	243.684,00	-	**3.677.684,00**
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.104.700,00	-	2.597.261,00		-	-	-	-	-	-	-	-	828.000,00	-	**4.529.961,00**
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	375.000,00	800.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.175.000,00**
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.605.000,00	-	-		-	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	**3.725.000,00**
23	Sekretariat Daerah	1.068.400,00	799.950,00	-		-	-	12.112.575,00	-	-	-	-	-	4.234.977.000,00	-	**4.248.957.925,00**
24	Sekretariat DPRD	371.000,00	994.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.365.000,00**
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.026.000,00	-	-	2.023.500,00	1.949.850,00	-	10.028.700,00	-	-	-	-	-	-	-	**28.028.050,00**
26	Badan Pendapatan Daerah	305.080.000,00	698.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**305.778.000,00**
27	Inspektorat	1.861.000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.861.000,00**
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
29	Kecamatan Piani	1.772.575,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.772.575,00**
30	Kecamatan Lokpaikat	49.000,00	250.000,00	-	810.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.109.000,00**
31	Kecamatan Tapin Utara	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
32	Kecamatan Bakarangan	485.000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**485.000,00**
33	Kecamatan Candi Laras Selatan	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
34	Kecamatan Candi Laras Utara	6.503.550,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.503.550,00**
35	Kecamatan Hatungun		524.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**524.000,00**
36	Kecamatan Salam Babaris	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

BPK Perwakilan Kalsel

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	PERSEDIAAN														Total Persediaan
		a							b						c	
		Barang atau Perlengkapan (Supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah							Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan operasional kegiatan pemerintah						Bahan atau Perlengkapan yg digunakan dlm proses produksi	
		APBD							APBD/APBN						APBD	
		Alat Tulis Kantor	kertas dan cover	Bahan Cetak	Bahan Komputer	Obat/Alkes Habis Pakai	Bahan Kimia	Lainnya	Obat/Alkes Habis Pakai	Obat-obatan u/ Hewan/Tanaman	Gabah/ Padi	Bahan Kimia	Bibit Ternak/ Tanaman	Lainnya	Pupuk, Obat-obatan u/ Tanaman	
37	Kecamatan Tapin Tengah	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Tapin Selatan	-	260.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000,00
39	Kecamatan Binuang	261.405,00	543.588,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804.993,00
40	Kecamatan Bungur	260.000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000,00
41	Dinas Ketahanan Pangan	-	465.879,00	-	496.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-	60.962.595,00
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	3.027.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.027.000,00
43	Dinas Pertanian	-	-	-		-	-	-	-	-	-	124.358.500,00	91.130.000,00	1.300.000,00	-	216.788.500,00
44	Dinas Perikanan	4.307.500,00	1.110.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	160.940.939,00	-	166.358.439,00
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	588.000,00	370.000,00	-	720.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.678.000,00
		533.267.943,00	19.049.917,00	133.161.428,00	10.438.716,00	1.949.850,00	164.774.517,00	113.827.615,00	9.585.150.649,62	-	-	124.358.500,00	91.130.000,00	23.500.265.183,00	417.216.677,00	34.694.590.995,62

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 8

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DAFTAR INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN - DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2023

No	Kontrak							Nilai Buku per 31-12-2022	Pembayaran Tahun 2023	Perguliran Tahun 2023	Saldo Perolehan per 31-12-2023	Saldo Penyisihan	Saldo Buku per 31-12-2023	Keterangan
	Jenis Usaha	Nomor	Tanggal	Nama Penerima Ternak Guliran	Masa Kontrak Awal	Masa Kontrak Akhir	Nilai (Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Perguliran Tahun 2019													
1	Pinjaman Modal Sapi	524.2.1/04/SPK-Gul.APBD II/Teluk Pandai-Diperta/PKH/20	23/12/2019	Ilham	23/12/2019	23/12/2024	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00		16.000.000,00	berupa sapi jantan 2 ekor
	Perguliran Tahun 2020													
1	Pinjaman Modal Sapi	524.2.1/01/SPK-Gul APBD II/Harapan Bersama-Diperta/20	05/10/2020	Hairil Anwar	05/10/2020	05/10/2025	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	6.750.000,00		6.750.000,00	berupa sapi
2	Pinjaman Modal Sapi	524.2.1/01/SPK-Gul APBD II/Harapan Bersama-Diperta/20	05/10/2020	Hairil Anwar	05/10/2020	05/10/2025	6.950.000,00	6.950.000,00	-	-	6.950.000,00		6.950.000,00	berupa sapi
3	Pinjaman Modal Sapi	524.2.1/02/SPK-Gul APBD II/Harapan Bersama-Diperta/20	05/10/2020	Fitri Ramadhani	05/10/2020	05/10/2025	6.150.000,00	6.150.000,00	-	-	6.150.000,00		6.150.000,00	berupa sapi
	Perguliran Tahun 2021												-	
1	Pinjaman Modal Sapi	524.2.1/01/SPK-Gul.APBD II/Teluk Pandai-Diperta/2021	02/09/2021	Adi Yanoor	02/09/2021	02/09/2026	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00		9.000.000,00	berupa sapi
													-	
					Jumlah		**44.850.000,00**	**44.850.000,00**	**-**	**-**	**44.850.000,00**		**44.850.000,00**	

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 9

DAFTAR INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	BUMD	SALDO PER 31-12-2022 (Audited)	MUTASI INVESTASI 2023		SHARE	PERHITUNGAN NILAI INVESTASI JANGKA PANJANG TAHUN 2023 (Audited)						Keterangan
			SETORAN MODAL	SALDO BUKU		LABA (RUGI) THN BUKU 2023	PHPKDYD-LRA (Deviden Masuk 2023)	PHPKDYD-LO / (Beban Lain-lain)	EKUITAS BUMD Per 31 Desember	Penurunan/ Kenaikan Ekuitas	SALDO PER 31-12-2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6x7	10	11 = 12 - 3	12 = 10 x 6	13
1	**Bank Kalsel**	42.442.328.939,00	15.999.219.061,00	58.441.548.000,00	3,10%	245.423.221.396,00	5.404.791.545,00	-	1.641.364.000.000,00	-	58.441.548.000,00	met. biaya
2	**BPR Tapin Selatan**	7.932.008.543,65	-	7.932.008.543,65	65,05%	1.099.682.236,00	-	715.343.294,52	13.206.837.117,00	659.039.000,96	8.591.047.544,61	met.ekuitas
3	**PDAM Kab. Tapin**	96.620.228.656,80	-	96.620.228.656,80	91,32%	593.448.531,00	-	541.937.198,51	106.420.841.675,00	563.283.960,81	97.183.512.617,61	met.ekuitas
Jumlah		**146.994.566.139,45**	**15.999.219.061,00**	**162.993.785.200,45**		**247.116.352.163,00**	**5.404.791.545,00**	**1.257.280.493,03**	**1.760.991.678.792,00**	**1.222.322.961,77**	**164.216.108.162,22**	

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 10

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DATA MUTASI ASET TETAP TANAH
TAHUN 2023

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023			Saldo Akhir
			Hibah	Tukar Menukar	Mutasi antar SKPD	Koreksi (Aset tidak tercatat tahun sebelumnya)	Mutasi antar SKPD	Hibah	Penghapusan	
1	Dinas Pendidikan	27.476.281.546,00				667.555.000,00				28.143.836.546,00
2	Dinas Kesehatan	8.409.167.200,00								8.409.167.200,00
3	RSUD Datu Sanggul	4.082.347.000,00					3.442.750.000,00			639.597.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.355.842.504,11		1.230.175.000,00					183.000.000,00	140.403.017.504,11
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27.378.382.865,00								27.378.382.865,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	-								-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								-
8	Dinas Sosial	279.013.240,00								279.013.240,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.799.450.000,00								1.799.450.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	467.500.000,00								467.500.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	394.200.000,00								394.200.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	20.942.250.784,00								20.942.250.784,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-								-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.334.888.444,00	4.291.136.700,00							8.626.025.144,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	512.092.000,00								512.092.000,00
16	Dinas Perhubungan	3.857.565.360,00								3.857.565.360,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-								-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-								-

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023			Saldo Akhir
			Hibah	Tukar Menukar	Mutasi antar SKPD	Koreksi (Aset tidak tercatat tahun sebelumnya)	Mutasi antar SKPD	Hibah	Penghapusan	
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	53.842.800.337,00								53.842.800.337,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	180.516.000,00								180.516.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59.000.000,00								59.000.000,00
22	Dinas Perikanan	2.027.274.948,00								2.027.274.948,00
23	Dinas Pertanian	11.411.209.940,00								11.411.209.940,00
24	Dinas Perdagangan	20.954.263.200,00								20.954.263.200,00
25	Dinas Perindustrian	405.083.426,00								405.083.426,00
	Bupati	5.574.127.000,00								5.574.127.000,00
	Wakil Bupati	161.600.000,00								161.600.000,00
26	Sekretariat Daerah	118.819.752.863,57			3.442.750.000,00			364.800.000,00		121.897.702.863,57
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-								-
27	Sekretariat DPRD	3.261.150.000,00								3.261.150.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.409.100.000,00								1.409.100.000,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-								-
30	Badan Pendapatan Daerah	-								-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	916.800.000,00								916.800.000,00
32	Inspektorat	-								-
33	Kecamatan Lokpaikat	3.085.038.000,00	40.020.000,00							3.125.058.000,00
34	Kecamatan Piani	42.622.000,00								42.622.000,00
35	Kecamatan Hatungun	1.502.364.000,00						460.000.000,00		1.042.364.000,00
36	Kecamatan Tapin Utara	1.808.249.000,00								1.808.249.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023			Saldo Akhir
			Hibah	Tukar Menukar	Mutasi antar SKPD	Koreksi (Aset tidak tercatat tahun sebelumnya)	Mutasi antar SKPD	Hibah	Penghapusan	
37	Kecamatan Binuang	900.442.000,00								900.442.000,00
38	Kecamatan Bakarangan	176.924.000,00								176.924.000,00
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	28.498.000,00								28.498.000,00
40	Kecamatan Candi Laras Utara	36.750.000,00								36.750.000,00
41	Kecamatan Tapin Selatan	838.570.175,00								838.570.175,00
42	Kecamatan Salam Babaris	395.752.000,00								395.752.000,00
43	Kecamatan Tapin Tengah	110.946.750,00								110.946.750,00
44	Kecamatan Bungur	650.250.000,00								650.250.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.024.760.000,00								1.024.760.000,00
	Total	**468.912.824.582,68**	**4.331.156.700,00**	**1.230.175.000,00**	**3.442.750.000,00**	**667.555.000,00**	**3.442.750.000,00**	**824.800.000,00**	**183.000.000,00**	**474.133.911.282,68**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 11

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DATA MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2023

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023									Mutasi Pengurangan TA 2023										Saldo Akhir
			Belanja Modal	Beban Hutang	Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas dari				Mutasi antar SKPD	Hibah	Reklas ke					Mutasi antar SKPD	Barang Ekstrakom	Beban Hutang Barang Ekstrakom	Penghapusan	
							JIJ	Beban Hutang JIJ	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya (Aset yang belum dihibahkan)			Gedung dan Bangunan	Beban Hutang Gedung dan Bangunan	JIJ	ATB	Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat)					
1	Dinas Pendidikan	69.530.800.643,00	3.561.215.231,00	627.741.000,00										240.000.000,00			2.165.459.900,00		577.540.010,00			70.736.756.964,00
2	Dinas Kesehatan	38.592.921.582,26	5.770.199.637,00	216.895.999,00			905.000.000,00										926.886.927,00		290.910.303,00			44.267.219.988,26
3	RSUD Datu Sanggul	115.506.012.307,00	16.527.339.136,00														5.326.127.082,00		29.951.437,00		28.614.285,71	126.648.658.638,29
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.641.212.584,00	1.890.505.000,00	121.150.000,00		19.986.382,00					303.046.272,00								8.930.000,00			27.966.970.238,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.117.375.506,85	802.021.668,00	315.315.315,00									417.994.315,00	315.315.315,00	15.400.000,00		88.582.909,00		1.800.000,00			5.395.619.950,85
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.596.193.264,00	258.175.000,00		93.625.694,00												198.019.973,00		1.100.000,00			3.748.873.985,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.824.021.147,00	139.580.000,00																11.875.000,00			6.951.726.147,00
8	Dinas Sosial	1.897.463.888,00	408.417.500,00																			2.305.881.388,00
9	Dinas Tenaga Kerja	857.284.150,00	257.280.360,00	193.998.423,00							23.461.000,00									18.662.161,00		1.313.361.772,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.632.844.490,00	59.035.938,00														44.625.000,00		2.498.000,00			1.644.757.428,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	2.194.166.896,60	54.540.000,00								34.233.076,92							103.809.733,84				2.179.130.239,68
12	Dinas Lingkungan Hidup	21.047.022.740,15	2.776.616.000,00	3.827.922.160,00						65.934.000,00							651.584.250,00		62.991.150,00			27.002.919.500,15
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.887.903.530,00	458.387.304,00																11.540.000,00			4.334.750.834,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.342.210.117,00	404.370.000,00		1.020.000,00																	1.747.600.117,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.275.522.817,00	1.393.226.459,00		1.180.000,00												149.320.729,00		29.854.055,00			8.490.754.492,00
16	Dinas Perhubungan	7.288.533.541,00	923.983.546,00	1.442.494.570,00															45.260.000,00			9.609.751.657,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.748.532.071,00	1.924.407.456,00	990.000.000,00	173.808.000,00	23.180.000,00	248.900.000,00									129.850.000,00	103.109.700,00					5.875.867.827,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.318.664.346,00	2.600.449.335,00								511.126.440,00								40.913.250,00			5.389.326.871,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.021.459.842,67	263.323.117,00						492.239.459,00		194.870.000,00						151.430.164,00		53.960.285,00			3.766.501.969,67
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.380.733.331,66	276.980.000,00	54.054.054,00	9.961.000,00			199.264.000,00											2.400.000,00			2.918.592.385,66
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.442.232.650,00	185.296.671,00	41.350.000,00															21.411.691,00			2.647.467.630,00
22	Dinas Perikanan	3.940.689.196,95	394.756.000,00								303.046.272,00						191.653.500,00		45.860.000,00			4.400.977.968,95
23	Dinas Pertanian	13.918.905.879,35	1.504.326.548,00	637.270.044,00	27.300.000,00						406.856.005,84						282.991.494,00	57.694.076,92	133.402.040,00	41.933.340,00		15.978.637.526,27
24	Dinas Perdagangan	5.886.111.691,40	208.876.928,00																87.321.000,00			6.007.667.619,40
25	Dinas Perindustrian	1.081.061.336,00	67.667.117,00	142.266.665,00														303.046.272,00	6.599.550,00			981.349.296,00
	Bupati	3.296.347.581,00									152.564.900,00								6.515.900,00			3.442.396.581,00
	Wakil Bupati	328.710.371,00																				328.710.371,00
26	Sekretariat Daerah	58.091.011.634,80	3.554.901.080,00	1.629.852.882,00								108.498.000,00						1.997.264.156,00	243.533.756,00		1.300.530.000,00	59.625.939.684,80
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	958.322.033,00																				958.322.033,00
27	Sekretariat DPRD	5.773.008.345,00	1.070.809.300,00															160.256.000,00	8.000.000,00			6.675.561.645,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.899.238.020,00	1.316.853.034,00																6.870.000,00			4.209.221.054,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.629.938.725,00	371.890.000,00														155.280.030,00		7.000.000,00			4.839.548.695,00
30	Badan Pendapatan Daerah	2.594.792.576,00	691.113.000,00								389.820.000,00						51.250.000,00					3.624.475.576,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.532.816.161,00	245.591.400,00																			2.778.407.561,00
32	Inspektorat	2.770.762.799,00	491.936.597,00														227.946.324,00		32.261.878,00			3.002.491.194,00
33	Kecamatan Lokpaikat	859.214.192,00	257.170.000,00																			1.116.384.192,00
34	Kecamatan Piani	990.819.781,00	78.663.000,00	208.697.436,00													96.742.000,00					1.181.438.217,00
35	Kecamatan Hatungun	800.687.043,00	405.290.000,00									110.000.000,00					14.750.000,00		18.450.000,00			1.062.777.043,00
36	Kecamatan Tapin Utara	908.210.143,00	396.729.321,00														217.418.500,00		40.743.000,00			1.046.777.964,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023									Mutasi Pengurangan TA 2023										Saldo Akhir
			Belanja Modal	Beban Hutang	Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas dari				Mutasi antar SKPD	Hibah	Reklas ke				Mutasi antar SKPD	Barang Ekstrakom	Beban Hutang Barang Ekstrakom	Penghapusan	
							JIJ	Beban Hutang JIJ	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya (Aset yang belum dihibahkan)			Gedung dan Bangunan	Beban Hutang Gedung dan Bangunan	JIJ	ATB	Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat)					
37	Kecamatan Binuang	1.137.751.856,00	486.880.692,00	11.223.000,00													154.786.000,00		75.875.000,00	3.483.000,00		1.401.711.548,00
38	Kecamatan Bakarangan	584.359.064,00	273.058.000,00																24.260.000,00			833.157.064,00
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	704.406.025,00	231.301.000,00	199.100.000,00									102.881.000,00						16.370.000,00			1.015.556.025,00
40	Kecamatan Candi Laras Utara	779.289.537,00	351.517.140,00																			1.130.806.677,00
41	Kecamatan Tapin Selatan	747.348.499,00	230.778.000,00														20.670.000,00		22.245.000,00			935.211.499,00
42	Kecamatan Salam Babaris	389.618.000,00	431.420.000,00														14.975.000,00		13.065.000,00			792.998.000,00
43	Kecamatan Tapin Tengah	921.050.500,00		81.500.000,00																		1.002.550.500,00
44	Kecamatan Bungur	989.432.303,00	429.799.865,00																85.204.865,00			1.334.027.303,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	769.492.466,00	696.051.000,00		8.850.000,00						303.046.272,00								10.055.000,00			1.767.384.738,00
	Total	**444.426.507.203,69**	**55.122.728.380,00**	**10.740.831.548,00**	**315.744.694,00**	**43.166.382,00**	**1.153.900.000,00**	**199.264.000,00**	**492.239.459,00**	**65.934.000,00**	**2.622.070.238,76**	**218.498.000,00**	**520.875.315,00**	**555.315.315,00**	**15.400.000,00**	**129.850.000,00**	**11.233.609.482,00**	**2.622.070.238,76**	**2.076.567.170,00**	**64.078.501,00**	**1.329.144.285,71**	**496.416.977.597,98**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 12

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DATA MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN 2023

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi Penambahan TA 2023										Mutasi Pengurangan TA 2023				Saldo Akhir
			Belanja Modal	Beban Hutang	Mutasi antar SKPD	Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas dari					Mutasi antar SKPD	Reklas ke			
								Peralatan dan Mesin	Beban Hutang Peralatan dan Mesin	JIJ	Beban Hutang JIJ	KDP		KDP	Beban Hutang KDP	Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat)	
1	Dinas Pendidikan	261.819.841.550,48	16.541.615.672,00	9.518.680.734,00		1.068.411.623,00	1.779.585.453,00		240.000.000,00							983.000.000,00	289.985.135.032,48
2	Dinas Kesehatan	54.873.670.793,31	2.783.310.950,00	1.664.953.850,00						123.154.200,00	6.481.800,00	1.484.112.000,00					60.935.683.593,31
3	RSUD Datu Sanggul	65.192.028.889,45	668.930.000,00										58.945.090.247,00			3.602.253.642,45	3.313.615.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.779.672.399,55	55.627.452.759,00	16.451.075.373,00		668.728.200,00	1.169.486.800,00					273.264.891.045,00	38.323.119.108,00	3.638.943.033,00	2.069.004.967,00		359.930.239.468,55
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.197.246.111,00	58.694.100,00	332.952.900,00		7.215.000,00	7.881.000,00	417.994.315,00	315.315.315,00								12.337.298.741,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	24.640.000,00														24.640.000,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	379.684.245,00															379.684.245,00
8	Dinas Sosial	1.519.744.500,00	73.500.000,00			8.258.000,00											1.601.502.500,00
9	Dinas Tenaga Kerja	2.231.931.000,00															2.231.931.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.919.664.644,00															1.919.664.644,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.681.773.789,00															4.681.773.789,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	29.078.661.056,00	1.835.531.042,00			99.241.659,00	49.780.000,00										31.063.213.757,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.614.989.000,00				381.935.000,00											9.996.924.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	776.115.000,00															776.115.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.349.259.054,00	1.104.600.547,00	129.601.608,00		96.348.068,00	5.405.406,00										6.685.214.683,00
16	Dinas Perhubungan	59.801.943.700,96	3.326.254.102,00	329.879.688,00	10.424.785.700,00					261.688.870,00				1.095.022.500,00	228.129.688,00		72.821.399.872,96
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.161.587.650,00															7.161.587.650,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.754.611.000,00			16.927.753.630,00											184.839.000,00	18.497.525.630,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	119.741.436.391,00	7.461.918.085,00	4.845.587.115,00	1.060.914.246,00	408.908.700,00	672.599.300,00							5.142.638.085,00	2.857.621.315,00	390.835.000,00	125.800.269.437,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.833.835.885,00		35.867.000,00	14.944.174.068,00		105.450.000,00								99.234.000,00		24.820.092.953,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.439.152.472,00	171.274.000,00			14.541.000,00	9.860.000,00										14.634.827.472,00
22	Dinas Perikanan	14.617.493.127,00	603.869.333,00	858.506.676,00			36.418.018,00										16.116.287.154,00
23	Dinas Pertanian	50.811.021.485,51	1.044.485.732,00	2.611.131.252,00		74.759.000,00	250.447.000,00										54.791.844.469,51
24	Dinas Perdagangan	145.349.756.454,60	999.905.660,90	1.055.412.572,00		85.922.524,00	132.895.462,00										147.623.892.673,50
25	Dinas Perindustrian	2.589.184.200,00															2.589.184.200,00
	Bupati	36.692.035.630,97											14.545.458.530,00				22.146.577.100,97
	Wakil Bupati	638.700.000,00															638.700.000,00
26	Sekretariat Daerah	213.029.981.237,22	676.680.100,00	4.606.445.502,00	59.465.638.087,00	312.609.764,00	264.963.105,00						2.382.295.100,00			452.501.000,00	275.521.521.695,22
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	23.318.500,00															23.318.500,00
27	Sekretariat DPRD	14.282.700.370,00				56.760.000,00	132.440.000,00										14.471.900.370,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3.813.568.000,00	138.029.100,00			140.900.000,00											4.092.497.100,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi Penambahan TA 2023										Mutasi Pengurangan TA 2023				Saldo Akhir
			Belanja Modal	Beban Hutang	Mutasi antar SKPD	Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas dari					Mutasi antar SKPD	Reklas ke			
								Peralatan dan Mesin	Beban Hutang Peralatan dan Mesin	JIJ	Beban Hutang JIJ	KDP		KDP	Beban Hutang KDP	Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat)	
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.772.716.000,00			1.828.607.000,00	842.876.735,00											9.444.199.735,00
30	Badan Pendapatan Daerah	-															-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.719.739.000,00															6.719.739.000,00
32	Inspektorat	1.312.986.545,00				348.572.000,00											1.661.558.545,00
33	Kecamatan Lokpaikat	1.097.809.413,00															1.097.809.413,00
34	Kecamatan Piani	972.669.000,00				453.130.000,00	382.784.086,00										1.808.583.086,00
35	Kecamatan Hatungun	1.396.505.655,00	125.700.000,00	345.680.000,00		380.968.000,00	361.300.000,00										2.610.153.655,00
36	Kecamatan Tapin Utara	1.339.113.975,00															1.339.113.975,00
37	Kecamatan Binuang	5.323.611.570,00	465.418.000,00	17.330.000,00	9.544.090.254,00		127.180.940,00										15.477.630.764,00
38	Kecamatan Bakarangan	1.228.055.000,00				325.491.000,00											1.553.546.000,00
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	656.264.000,00	256.798.288,00	160.583.000,00		81.201.000,00	18.499.000,00	102.881.000,00									1.276.226.288,00
40	Kecamatan Candi Laras Utara	4.199.697.500,00				29.460.000,00											4.229.157.500,00
41	Kecamatan Tapin Selatan	1.883.196.617,00		237.935.000,00													2.121.131.617,00
42	Kecamatan Salam Babaris	2.331.395.600,00															2.331.395.600,00
43	Kecamatan Tapin Tengah	496.210.000,00				147.279.000,00											643.489.000,00
44	Kecamatan Bungur	1.680.384.100,00				338.028.300,00	5.336.700,00										2.023.749.100,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	676.649.189,00	188.916.050,00													363.055.000,00	502.510.239,00
	Total	**1.238.106.251.300,05**	**94.152.883.520,90**	**43.201.622.270,00**	**114.195.962.985,00**	**6.371.544.573,00**	**5.512.312.270,00**	**520.875.315,00**	**555.315.315,00**	**384.843.070,00**	**6.481.800,00**	**274.749.003.045,00**	**114.195.962.985,00**	**9.876.603.618,00**	**5.253.989.970,00**	**6.001.123.642,45**	**1.642.429.415.248,50**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 13

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DATA MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN 2023

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi Penambahan TA 2023									Mutasi Pengurangan TA 2023								Saldo Akhir
			Belanja Modal	Beban Hutang	Kapitalisasi	Beban Kapitalisasi	Hibah	Tukar Menukar	Mutasi antar SKPD	Reklas dari		Mutasi antar SKPD	Reklas ke						Penghapusan	
										Peralatan dan Mesin	KDP		Peralatan dan Mesin	Beban Hutang Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Beban Hutang Gedung dan Bangunan	KDP	Beban Hutang KDP		
1	Dinas Pendidikan	2.500.000,00																		2.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.214.392.040,00	2.318.154.200,00	6.481.800,00									905.000.000,00		123.154.200,00	6.481.800,00				4.504.392.040,00
3	RSUD Datu Sanggul	843.969.100,00	387.109.231,00									843.969.100,00								387.109.231,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.902.575.515.729,51	145.106.315.810,55	127.024.923.852,08	2.584.289.360,00	2.944.562.130,00		14.292.525.425,00			18.838.152.717,00	4.128.243.143,00					8.572.914.479,00	32.655.098.060,00	1.273.256.465,00	2.166.736.772.877,14
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	34.722.878.978,00	25.967.884.300,00	6.551.550.300,00	96.195.000,00	257.102.200,00	1.134.941.192,52		3.053.254.143,00	15.400.000,00										71.799.206.113,52
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	425.172.000,00																		425.172.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.821.665.100,00																		9.821.665.100,00
8	Dinas Sosial	-																		-
9	Dinas Tenaga Kerja	-																		-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-																		-
11	Dinas Ketahanan Pangan	100.108.000,00																		100.108.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.213.279.268,00							1.074.989.000,00											2.288.268.268,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.274.000,00																		73.274.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73.798.741.220,00	2.396.113.498,00		38.890.427.501,00															115.085.282.219,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-																		-
16	Dinas Perhubungan	389.939.000,00	261.688.870,00	139.875.000,00											261.688.870,00					529.814.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	248.900.000,00										248.900.000,00							-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.736.738.000,00																		16.736.738.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.282.762.710,00		1.851.480.000,00		149.010.800,00														23.283.253.510,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	974.644.100,00		199.264.000,00										199.264.000,00						974.644.100,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	750.000,00																		750.000,00
22	Dinas Perikanan	276.475.000,00		172.650.000,00																449.125.000,00
23	Dinas Pertanian	9.914.006.008,00																		9.914.006.008,00
24	Dinas Perdagangan	5.088.447.525,00																		5.088.447.525,00
25	Dinas Perindustrian	150.129.000,00				384.621.000,00														534.750.000,00
	Bupati	-																		-
	Wakil Bupati	-																		-
26	Sekretariat Daerah	3.939.609.500,00	198.000.000,00		33.424.000,00				843.969.100,00											5.015.002.600,00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12.500.000,00																		12.500.000,00
27	Sekretariat DPRD	681.963.600,00																		681.963.600,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	79.369.770,00																		79.369.770,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-																		-
30	Badan Pendapatan Daerah	-																		-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.089.750,00																		35.089.750,00
32	Inspektorat	-																		-
33	Kecamatan Lokpaikat	296.304.411,00	225.000.000,00																	521.304.411,00
34	Kecamatan Piani	-																		-

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2023	Mutasi Penambahan TA 2023									Mutasi Pengurangan TA 2023								Saldo Akhir
			Belanja Modal	Beban Hutang	Kapitalisasi	Beban Kapitalisasi	Hibah	Tukar Menukar	Mutasi antar SKPD	Reklas dari		Mutasi antar SKPD	Reklas ke						Penghapusan	
										Peralatan dan Mesin	KDP		Peralatan dan Mesin	Beban Hutang Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Beban Hutang Gedung dan Bangunan	KDP	Beban Hutang KDP		
35	Kecamatan Hatungun	-																		-
36	Kecamatan Tapin Utara	3.048.229.854,00	1.017.567.577,00																	4.065.797.431,00
37	Kecamatan Binuang	2.744.743.093,00	539.047.750,00	4.816.250,00																3.288.607.093,00
38	Kecamatan Bakarangan	-																		-
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	-																		-
40	Kecamatan Candi Laras Utara	-																		-
41	Kecamatan Tapin Selatan	1.187.804.490,00	336.500.000,00																	1.524.304.490,00
42	Kecamatan Salam Babaris	-																		-
43	Kecamatan Tapin Tengah	149.900.000,00																		149.900.000,00
44	Kecamatan Bungur	13.000.000,00																		13.000.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-																		-
	Total	**2.093.793.901.246,51**	**179.002.281.236,55**	**135.951.041.202,08**	**41.604.335.861,00**	**3.735.296.130,00**	**1.134.941.192,52**	**14.292.525.425,00**	**4.972.212.243,00**	**15.400.000,00**	**18.838.152.717,00**	**4.972.212.243,00**	**1.153.900.000,00**	**199.264.000,00**	**384.843.070,00**	**6.481.800,00**	**8.572.914.479,00**	**32.655.098.060,00**	**1.273.256.465,00**	**2.444.122.117.136,66**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 14

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DATA MUTASI ASET TETAP LAINNYA
TAHUN 2023

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023				Saldo Akhir
			Belanja Modal	Kapitalisasi	Koreksi Nilai	Koreksi (Aset Tidak Tercatat Tahun Sebelumnya)	Reklas ke			Koreksi	
							Peralatan dan Mesin	Aset Lain-lain (Aset Kondisi Rusak Berat)	ATB		
1	Dinas Pendidikan	19.258.201.797,00	2.109.379.070,00					475.200.000,00			20.892.380.867,00
2	Dinas Kesehatan	1.450.000,00									1.450.000,00
3	RSUD Datu Sanggul	-	42.324.925,00						42.324.925,00		-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	298.216.068,00	1.020.000,00								299.236.068,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.023.747.000,00									1.023.747.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	135.185.000,00									135.185.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.523.500,00									6.523.500,00
8	Dinas Sosial	855.000,00									855.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	-									-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-									-
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.150.000,00									1.150.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	207.317.000,00						1.085.000,00			206.232.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.000.000,00		198.900.000,00							200.900.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.806.900,00									1.806.900,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	843.000,00									843.000,00
16	Dinas Perhubungan	-									-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-									-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-									-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	15.000.000,00	492.239.459,00				492.239.459,00				15.000.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	437.734.000,00	15.000.000,00								452.734.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.276.556.177,00	71.705.000,00								1.348.261.177,00
22	Dinas Perikanan	-									-

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023				Saldo Akhir
			Belanja Modal	Kapitalisasi	Koreksi Nilai	Koreksi (Aset Tidak Tercatat Tahun Sebelumnya)	Reklas ke			Koreksi	
							Peralatan dan Mesin	Aset Lain-lain (Aset Kondisi Rusak Berat)	ATB		
23	Dinas Pertanian	563.926.000,00			10.000.000,00	179.500.000,00		5.236.000,00		158.765.000,00	589.425.000,00
24	Dinas Perdagangan	-									-
25	Dinas Perindustrian	-									-
	Bupati	-									-
	Wakil Bupati	-									-
26	Sekretariat Daerah	6.671.500,00									6.671.500,00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-									-
27	Sekretariat DPRD	316.830.500,00									316.830.500,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	308.328.250,00									308.328.250,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.640.800,00									16.640.800,00
30	Badan Pendapatan Daerah	-									-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.785.880,00									18.785.880,00
32	Inspektorat	12.324.500,00									12.324.500,00
33	Kecamatan Lokpaikat	-									-
34	Kecamatan Piani	-									-
35	Kecamatan Hatungun	-									-
36	Kecamatan Tapin Utara	-									-
37	Kecamatan Binuang	-									-
38	Kecamatan Bakarangan	-									-
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	-									-
40	Kecamatan Candi Laras Utara	-									-
41	Kecamatan Tapin Selatan	-									-
42	Kecamatan Salam Babaris	-									-
43	Kecamatan Tapin Tengah	76.000,00									76.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023				Saldo Akhir
			Belanja Modal	Kapitalisasi	Koreksi Nilai	Koreksi (Aset Tidak Tercatat Tahun Sebelumnya)	Reklas ke			Koreksi	
							Peralatan dan Mesin	Aset Lain-lain (Aset Kondisi Rusak Berat)	ATB		
44	Kecamatan Bungur	-									-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	808.000,00									808.000,00
	Total	**23.910.976.872,00**	**2.731.668.454,00**	**198.900.000,00**	**10.000.000,00**	**179.500.000,00**	**492.239.459,00**	**481.521.000,00**	**42.324.925,00**	**158.765.000,00**	**25.856.194.942,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 15

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DATA MUTASI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN 2023

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023						Mutasi Pengurangan TA 2023		Saldo Akhir
			Reklas dari				Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas ke		
			Gedung dan Bangunan	Beban Hutang Gedung dan Bangunan	JIJ	Beban Hutang JIJ			Gedung dan Bangunan	JIJ	
1	Dinas Pendidikan	-									-
2	Dinas Kesehatan	1.484.112.000,00							1.484.112.000,00		-
3	RSUD Datu Sanggul	-									-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293.678.097.062,00	3.638.943.033,00	2.069.004.967,00	8.572.914.479,00	32.655.098.060,00	94.217.000,00	196.857.000,00	273.264.891.045,00	18.838.152.717,00	48.802.087.839,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	52.807.000,00									52.807.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	-									-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-									-
8	Dinas Sosial	-									-
9	Dinas Tenaga Kerja	-									-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-									-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-									-
12	Dinas Lingkungan Hidup	101.954.800,00						199.472.550,00			301.427.350,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-									-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-									-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-									-
16	Dinas Perhubungan	-	1.095.022.500,00	228.129.688,00							1.323.152.188,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-									-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.085.000,00									46.085.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	319.363.250,00	5.142.638.085,00	2.857.621.315,00							8.319.622.650,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	437.812.000,00		99.234.000,00			49.284.000,00				586.330.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-									-
22	Dinas Perikanan	-									-
23	Dinas Pertanian	-									-

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023						Mutasi Pengurangan TA 2023		Saldo Akhir
			Reklas dari				Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas ke		
			Gedung dan Bangunan	Beban Hutang Gedung dan Bangunan	JIJ	Beban Hutang JIJ			Gedung dan Bangunan	JIJ	
24	Dinas Perdagangan	-									-
25	Dinas Perindustrian	-									-
	Bupati	-									-
	Wakil Bupati	-									-
26	Sekretariat Daerah	607.072.000,00					28.505.000,00				635.577.000,00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-									-
27	Sekretariat DPRD	-									-
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.178.101.000,00									2.178.101.000,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-									-
30	Badan Pendapatan Daerah	-									-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-									-
32	Inspektorat	-									-
33	Kecamatan Lokpaikat	-									-
34	Kecamatan Piani	-									-
35	Kecamatan Hatungun	-									-
36	Kecamatan Tapin Utara	-									-
37	Kecamatan Binuang	-									-
38	Kecamatan Bakarangan	-									-
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	-									-
40	Kecamatan Candi Laras Utara	-									-
41	Kecamatan Tapin Selatan	-									-
42	Kecamatan Salam Babaris	-									-
43	Kecamatan Tapin Tengah	-									-
44	Kecamatan Bungur	-									-

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023						Mutasi Pengurangan TA 2023		Saldo Akhir
			Reklas dari				Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas ke		
			Gedung dan Bangunan	Beban Hutang Gedung dan Bangunan	JIJ	Beban Hutang JIJ			Gedung dan Bangunan	JIJ	
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-									-
	Total	**298.905.404.112,00**	**9.876.603.618,00**	**5.253.989.970,00**	**8.572.914.479,00**	**32.655.098.060,00**	**172.006.000,00**	**396.329.550,00**	**274.749.003.045,00**	**18.838.152.717,00**	**62.245.190.027,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 16

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
TAHUN 2023

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	Akm Peny 31 Des 2022	Beban Penyusutan	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang				Akm Penyusutan 31 Des 2023
				Mutasi Antar SKPD	Kapitalisasi	Mutasi Antar SKPD	Hibah	Reklas ke Aset Lainnya	Penghapusan	
1	Dinas Pendidikan	217.192.742.198,81	22.640.295.128,00	-	-	-	-	3.148.459.900,00	-	236.684.577.426,81
2	Dinas Kesehatan	63.247.665.831,05	10.635.407.877,21	-	-	-	-	880.441.165,00	-	73.002.632.543,26
3	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	94.675.262.482,00	12.830.334.242,00	-	-	32.703.898.204,55	-	8.825.135.486,74	28.614.285,71	65.947.948.747,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.279.333.698.858,34	149.331.091.921,45	303.046.272,00		338.397.508,00	-	-	457.662.138,00	1.428.171.777.405,79
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	21.322.813.016,85	2.272.802.511,00	-	-	-	-	88.582.909,00	-	23.507.032.618,85
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.819.328.172,00	222.617.124,00	-	-	-	-	217.759.973,00	-	2.824.185.323,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.288.084.258,00	1.345.108.375,00	-	-	-	-	-	-	9.633.192.633,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	731.700.224,00	157.103.415,00	303.046.272,00			-	237.706.732,00	-	954.143.179,00
9	Dinas Sosial	1.830.134.093,00	395.300.415,00	-	-	-	-	-	-	2.225.434.508,00
10	Dinas Tenaga Kerja	2.212.355.610,00	191.358.889,00	23.461.000,00	-	-	-	-	-	2.427.175.499,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.099.716.646,00	146.078.442,00	-	-	-	-	44.252.917,00	-	3.201.542.171,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.943.781.738,60	233.043.308,00	34.233.076,92		103.809.733,84	-	-	-	5.107.248.389,68
13	Dinas Lingkungan Hidup	24.834.280.918,15	2.993.521.461,00	-	-	-	-	651.584.250,00	-	27.176.218.129,15
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.851.718.329,00	1.022.974.797,00	-	-	-	-	-	-	4.874.693.126,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.470.319.080,00	7.883.354.255,00	-	-	-	-	-	-	13.353.673.335,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.231.165.383,00	777.952.912,00	-	-	-	-	124.002.381,00	-	7.885.115.914,00
17	Dinas Perhubungan	26.960.535.461,00	4.403.205.491,00	278.043.518,00			-	-	-	31.641.784.470,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.586.957.569,00	962.371.121,00	-	-	-	-	97.889.483,00	-	3.451.439.207,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.705.067.760,00	2.389.939.153,00	8.236.411.067,00	-	-	-	184.839.000,00	-	29.146.578.980,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	86.039.575.970,00	8.452.548.362,67	32.802.961,00	-		-	390.835.000,00	-	94.134.092.293,67
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.322.858.848,99	810.826.265,67	-	-	-	-	-	-	5.133.685.114,66
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.812.309.365,00	979.581.559,00	-	-	-	-	-	-	4.791.890.924,00
23	Dinas Perikanan	13.051.523.171,95	960.624.864,00	303.046.272,00	-	-	-	191.653.500,00	-	14.123.540.807,95
24	Dinas Pertanian	34.896.350.451,43	3.985.829.917,00	406.856.005,84	-	57.694.076,92	-	282.991.494,00	-	38.948.350.803,35
25	Dinas Perdagangan	76.952.971.383,00	8.983.688.964,40	-	-	-	-	-	-	85.936.660.347,40
26	Dinas Perindustrian	2.615.765.777,00	229.603.905,00	-	-	303.046.272,00	-	-	-	2.542.323.410,00
27	Sekretariat Daerah	128.241.115.127,05	21.857.184.191,00	32.706.067.153,55	2.190.088.563,45	9.018.096.844,00	108.498.000,00	-	1.658.092.722,00	174.209.767.469,05
28	Sekretariat DPRD	12.454.606.687,00	1.955.563.483,00	-	-	160.256.000,00	-	-	-	14.249.914.170,00
29	Kecamatan Piani	1.643.438.684,00	426.531.635,00	-	-	-	-	87.262.000,00	-	1.982.708.319,00
30	Kecamatan Lokpaikat	1.277.181.863,00	177.790.613,00	-	-	-	-	-	-	1.454.972.476,00
31	Kecamatan Tapin Utara	1.897.280.714,00	438.715.296,00	-	-	-	-	217.418.500,00	-	2.118.577.510,00
32	Kecamatan Bakarangan	1.698.351.557,00	388.673.422,00	-	-	-	-	-	-	2.087.024.979,00
33	Kecamatan Candi Laras Selatan	931.829.974,00	613.841.398,00	-	-	-	-	-	-	1.545.671.372,00
34	Kecamatan Candi Laras Utara	1.987.008.151,00	288.594.454,00	-	-	-	-	-	-	2.275.602.605,00

No	SKPD	Akm Peny 31 Des 2022	Beban Penyusutan	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang				Akm Penyusutan 31 Des 2023
				Mutasi Antar SKPD	Kapitalisasi	Mutasi Antar SKPD	Hibah	Reklas ke Aset Lainnya	Penghapusan	
35	Kecamatan Hatungun	1.403.383.127,00	200.300.303,00	-	-	-	110.000.000,00	14.750.000,00	-	1.478.933.430,00
36	Kecamatan Salam Babaris	1.852.487.052,00	231.355.350,00	-	-	-	-	12.167.188,00	-	2.071.675.214,00
37	Kecamatan Tapin Tengah	1.168.052.942,00	266.243.474,00	-	-	-	-	-	-	1.434.296.416,00
38	Kecamatan Tapin Selatan	2.243.191.041,00	331.308.693,00	-	-	-	-	20.670.000,00	-	2.553.829.734,00
39	Kecamatan Binuang	2.905.002.538,00	1.056.184.091,00	43.256.610,00	-	-		154.786.000,00	-	3.849.657.239,00
40	Kecamatan Bungur	2.209.194.232,00	463.657.400,00	-	-	-	-	-	-	2.672.851.632,00
41	Inspektorat	3.529.470.146,00	558.825.543,00	-	-	-	-	227.946.324,00	-	3.860.349.365,00
42	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.732.099.836,00	439.013.836,00	-	-	-	-	-	-	6.171.113.672,00
43	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.391.798.589,00	846.983.044,00	14.928.431,00	-	-	-	151.308.656,00	-	4.102.401.408,00
44	Badan Pendapatan Daerah	2.022.246.387,00	144.197.163,00	-	-	-	-	24.652.205,00	-	2.141.791.345,00
45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.557.267.451,00	657.774.111,00	-	-	-	-	-	-	8.215.041.562,00
	Total	**2.195.173.688.694,22**	**276.579.302.175,40**	**42.685.198.639,31**	**2.190.088.563,45**	**42.685.198.639,31**	**218.498.000,00**	**16.277.095.063,74**	**2.144.369.145,71**	**2.455.303.117.223,62**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran 17.1

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAGIHAN JANGKA PANJANG - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
PER 31 DESEMBER 2023

No	Jenis Usaha	Nomor & Tanggal	Uraian Pelanggaran	Nama Debitur	Saldo per 31-12-2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo per 31-12-2023
						Tambah	Kurang	
1	LHP Riksus Inspektorat Kab Tapin	700/06-LHP-Riksus Tim/INSP/2008 Tgl 14-04-2008	Pemotongan Dana Operasional Puskesmas dan Biaya Lainnya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	Birom Nurcahya NIP.140 152 699 (Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Tapin)	28.614.507,00	-	-	28.614.507,00
2	Keputusan Bupati Tapin tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara	46//S/II/06/2020 Tanggal 30 Juni 2020	Kerugian Daerah pada pengelolaan keuangan TA 2007 di Setda Kabupaten Tapin	Abdul Hamid (Mantan Bendahara Pengeluaran)	1.535.885.785,00	-	-	1.535.885.785,00
JUMLAH					**1.564.500.292,00**		**-**	**1.564.500.292,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran 17.2

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
TAGIHAN JANGKA PANJANG - TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2023

No	Jenis Usaha	Nomor & Tanggal	Uraian Pelanggaran	Nama Debitur	Saldo per 31-12-2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo per 31-12-2023
						Tambah	Kurang	
1	LHP Audit BPK RI TA 2006	TA 2006	Pengeluaran honorarium tim/panitia yg diberikan lebih dari kegiatan sebesar Rp 84.000.000,-		80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
2	LHP Audit BPK RI TA 2006	TA 2006	Realisasi untuk kegiatan muspida tidak sesuai ketentuan		245.642.714,00	-	-	245.642.714,00
3	LHP Audit BPK RI TA 2006	TA 2006	Realisasi biaya upah pungut PAD pada Dispenda tidak sesuai ketentuan		335.249.200,00	-		335.249.200,00
JUMLAH					**660.891.914,00**			**660.891.914,00**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 18

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DATA MUTASI ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN 2023

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023	Saldo Akhir
			Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas dari		Penghapusan	
					Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya		
1	Dinas Pendidikan	-						-
2	Dinas Kesehatan	-						-
3	RSUD Datu Sanggul	503.300.000,00				42.324.925,00	468.125.000,00	77.499.925,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	422.461.500						422.461.500,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	520.235.000,00						520.235.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	16.160.000,00						16.160.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	644.508.986,00	127.760.000,00					772.268.986,00
8	Dinas Sosial	-						-
9	Dinas Tenaga Kerja	-						-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-						-
11	Dinas Ketahanan Pangan	110.260.000,00						110.260.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	87.355.000,00						87.355.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.000.000,00						38.000.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	70.000.000,00					70.000.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-						-
16	Dinas Perhubungan	233.482.482,00						233.482.482,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	205.050.000,00	268.408.559,00		129.850.000,00			603.308.559,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	138.817.514,00						138.817.514,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.000.000,00						6.000.000,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	370.185.342,00						370.185.342,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.850.000,00						47.850.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023	Saldo Akhir
			Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas dari		Penghapusan	
					Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya		
22	Dinas Perikanan	49.395.000,00						49.395.000,00
23	Dinas Pertanian	116.500.000,00						116.500.000,00
24	Dinas Perdagangan	34.788.000,00						34.788.000,00
25	Dinas Perindustrian	36.688.000,00						36.688.000,00
	Bupati	-						-
	Wakil Bupati	-						-
26	Sekretariat Daerah	167.490.000,00	321.556.531,00					489.046.531,00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	19.000.000,00						19.000.000,00
27	Sekretariat DPRD	1.050.000.000,00						1.050.000.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.536.285.049,40						1.536.285.049,40
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	186.960.000,00	102.650.899,00					289.610.899,00
30	Badan Pendapatan Daerah	287.786.100,00						287.786.100,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	393.775.000,00						393.775.000,00
32	Inspektorat	-						-
33	Kecamatan Lokpaikat	-						-
34	Kecamatan Piani	-		20.724.000,00				20.724.000,00
35	Kecamatan Hatungun	-						-
36	Kecamatan Tapin Utara	-						-
37	Kecamatan Binuang	-						-
38	Kecamatan Bakarangan	-						-
39	Kecamatan Candi Laras Selatan	-						-
40	Kecamatan Candi Laras Utara	-						-
41	Kecamatan Tapin Selatan	-	45.045.045,00					45.045.045,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	Nama SKPD	Saldo Awal TA 2023	Mutasi Penambahan TA 2023				Mutasi Pengurangan TA 2023	Saldo Akhir
			Kapitalisasi	Beban Hutang Kapitalisasi	Reklas dari		Penghapusan	
					Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya		
42	Kecamatan Salam Babaris	-	33.900.000,00					33.900.000,00
43	Kecamatan Tapin Tengah	-						-
44	Kecamatan Bungur	-						-
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-						-
	Total	**7.222.332.973,40**	**969.321.034,00**	**20.724.000,00**	**129.850.000,00**	**42.324.925,00**	**468.125.000,00**	**7.916.427.932,40**

BPK Perwakilan Kalsel

Lampiran : 19

PEMERTINTAH KABUPATEN TAPIN
RINCIAN AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2023

No	SKPD	NAMA ASET	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2022	BEBAN AMORTISASI		MUTASI KURANG (PENGHAPUSAN)	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2023
				Semester I	Semester II		
1	**RSUD Datu Sanggul**		**497.641.666,00**	**3.291.667,00**	**2.366.667,00**	**468.125.000,00**	**35.175.000,00**
		Software	129.395.000,00	-	-	129.395.000,00	-
		Software	166.845.000,00	-	-	166.845.000,00	-
		Software	171.885.000,00	-	-	171.885.000,00	-
		Software	6.323.333,00	451.667,00	-	-	6.775.000,00
		Software	23.193.333,00	2.840.000,00	2.366.667,00	-	28.400.000,00
2	**Dinas PUPR**		**170.494.208,00**	**28.327.250,00**	**28.327.250,00**	**-**	**227.148.708,00**
		Software	49.995.000,00	-	-	-	49.995.000,00
		Software	97.455.208,00	23.389.250,00	23.389.250,00	-	144.233.708,00
		Software	23.044.000,00	4.938.000,00	4.938.000,00	-	32.920.000,00
3	**Dinas Perkimtan**		**324.644.917,00**	**51.023.500,00**	**51.023.500,00**	**-**	**426.691.917,00**
		Software	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
		Kajian	314.644.917,00	51.023.500,00	51.023.500,00	-	416.691.917,00
4	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**599.217.578,00**	**11.815.150,00**	**24.591.150,00**	**-**	**635.623.878,00**
		Software	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
		Software	5.732.486,00	-	-	-	5.732.486,00
		Kajian	500.625.000,00	-	-	-	500.625.000,00
		Kajian	72.860.092,00	11.815.150,00	11.815.150,00	-	96.490.392,00
		Kajian	-	-	12.776.000,00	-	12.776.000,00
5	**Dinas Ketahanan Pangan**		**110.260.000,00**	**-**	**-**	**-**	**110.260.000,00**
		Kajian	35.745.000,00	-	-	-	35.745.000,00
		Kajian	35.745.000,00	-	-	-	35.745.000,00
		Kajian	38.770.000,00	-	-	-	38.770.000,00
6	**Dinas Lingkungan Hidup**		**62.403.333,00**	**7.485.500,00**	**-**	**-**	**69.888.833,00**
		Software	12.500.000,00	-	-	-	12.500.000,00
		Software	49.903.333,00	7.485.500,00	-	-	57.388.833,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	NAMA ASET	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2022	BEBAN AMORTISASI		MUTASI KURANG (PENGHAPUSAN)	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2023
				Semester I	Semester II		
7	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**1.600.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.600.000,00**
		Software	1.600.000,00	-	-	-	1.600.000,00
8	**Dinas Perhubungan**		**180.539.363,00**	**13.811.248,00**	**13.811.249,00**	**-**	**208.161.860,00**
		Kajian	85.169.363,00	13.811.248,00	13.811.249,00	-	112.791.860,00
		Software	95.370.000,00	-	-	-	95.370.000,00
9	**Dinas Kominfo**		**113.580.000,00**	**-**	**-**	**-**	**113.580.000,00**
		Software	71.000.000,00	-	-	-	71.000.000,00
		Software	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
		Software	12.913.333,00	-	-	-	12.913.333,00
		Software	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00
		Software	12.666.667,00	-	-	-	12.666.667,00
10	**Dinas Perizinan dan PTSP**		**138.817.514,00**	**-**	**-**	**-**	**138.817.514,00**
		Software	55.500.000,00	-	-	-	55.500.000,00
		Software	49.456.250,00	-	-	-	49.456.250,00
		Software	24.750.000,00	-	-	-	24.750.000,00
		Software	3.037.088,00	-	-	-	3.037.088,00
		Software	3.037.088,00	-	-	-	3.037.088,00
		Software	3.037.088,00	-	-	-	3.037.088,00
11	**Dinas Pemuda dan Olahraga**		**6.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**6.000.000,00**
		Software	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00
12	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**		**226.496.333,00**	**17.440.000,00**	**14.940.000,00**	**-**	**258.876.333,00**
		Software	27.500.000,00	2.500.000,00	-	-	30.000.000,00
		Software	37.053.333,00	7.940.000,00	7.940.000,00	-	52.933.333,00
		Kajian	1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	8.750.000,00
		Kajian	1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	8.750.000,00
		Kajian	22.433.000,00	-	-	-	22.433.000,00
		Kajian	87.010.000,00	-	-	-	87.010.000,00
		Kajian	49.000.000,00	-	-	-	49.000.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	NAMA ASET	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2022	BEBAN AMORTISASI		MUTASI KURANG (PENGHAPUSAN)	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2023
				Semester I	Semester II		
13	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**		**33.875.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**-**	**38.175.000,00**
		Software	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
		Software	11.350.000,00		-	-	11.350.000,00
		Software	7.525.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-	11.825.000,00
14	**Dinas Perdagangan**		**28.588.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**-**	**30.988.000,00**
		Software	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
		Software	14.788.000,00	-	-	-	14.788.000,00
		Software	5.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	8.200.000,00
15	**Sekretariat Daerah**		**152.215.001,00**	**10.250.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**172.465.001,00**
		Software	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
		Software	4.083.333,00	500.000,00	416.667,00	-	5.000.000,00
		Software	4.166.667,00	500.000,00	333.333,00	-	5.000.000,00
		Software	18.366.667,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-	24.166.667,00
		Software	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
		Software	55.990.000,00	-	-	-	55.990.000,00
		Software	32.666.667,00	4.900.000,00	4.900.000,00	-	42.466.667,00
		Software	8.941.667,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-	11.841.667,00
		Software	19.000.000,00	-	-	-	19.000.000,00
16	**Sekretariat DPRD**		**740.000.001,00**	**57.916.667,00**	**54.583.333,00**	**-**	**852.500.001,00**
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	NAMA ASET	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2022	BEBAN AMORTISASI		MUTASI KURANG (PENGHAPUSAN)	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2023
				Semester I	Semester II		
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		Kajian	24.583.333,00	416.667,00	-	-	25.000.000,00
		Kajian	21.666.667,00	2.500.000,00	833.333,00	-	25.000.000,00
		Kajian	21.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	-	25.000.000,00
		Kajian	17.916.667,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	22.916.667,00
		Kajian	37.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	47.500.000,00
		Kajian	17.083.333,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	22.083.333,00
		Kajian	12.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	17.500.000,00
		Kajian	12.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	17.500.000,00
		Kajian	12.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	17.500.000,00
		Kajian	13.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	18.750.000,00
		Kajian	13.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	18.750.000,00
		Kajian	13.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	18.750.000,00
		Kajian	13.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	18.750.000,00
		Kajian	13.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	18.750.000,00
		Kajian	6.666.667,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	11.666.667,00
		Kajian	6.666.667,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	11.666.667,00
		Kajian	6.666.667,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	11.666.667,00
		Kajian	12.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	27.500.000,00
		Kajian	11.250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	26.250.000,00

BPK Perwakilan Kalsel

No	SKPD	NAMA ASET	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2022	BEBAN AMORTISASI		MUTASI KURANG (PENGHAPUSAN)	AKUMULASI AMORTISASI 31 Des 2023
				Semester I	Semester II		
17	**Bappelitbang**		**1.481.816.968,00**	**-**	**-**	**-**	**1.481.816.968,00**
		Software	19.762.000,00	-	-	-	19.762.000,00
		Software	60.090.300,00	-	-	-	60.090.300,00
		Software	190.635.000,00	-	-	-	190.635.000,00
		Kajian	90.775.000,00	-	-	-	90.775.000,00
		Kajian	361.075.000,00	-	-	-	361.075.000,00
		Kajian	111.180.000,00	-	-	-	111.180.000,00
		Kajian	79.860.000,00	-	-	-	79.860.000,00
		Kajian	101.200.000,00	-	-	-	101.200.000,00
		Kajian	88.000.000,00	-	-	-	88.000.000,00
		Kajian	42.523.000,00	-	-	-	42.523.000,00
		Kajian	36.365.000,00	-	-	-	36.365.000,00
		Kajian	36.365.000,00	-	-	-	36.365.000,00
		Kajian	36.225.000,00	-	-	-	36.225.000,00
		Kajian	36.000.000,00	-	-	-	36.000.000,00
		Kajian	34.300.000,00	-	-	-	34.300.000,00
		Kajian	34.230.000,00	-	-	-	34.230.000,00
		Kajian	27.860.000,00	-	-	-	27.860.000,00
		Kajian	15.585.000,00	-	-	-	15.585.000,00
		Kajian	15.585.000,00	-	-	-	15.585.000,00
		Kajian	15.525.000,00	-	-	-	15.525.000,00
		Kajian	14.700.000,00	-	-	-	14.700.000,00
		Kajian	14.670.000,00	-	-	-	14.670.000,00
		Kajian	11.940.000,00	-	-	-	11.940.000,00
		Kajian	2.166.667,00	-	-	-	2.166.667,00
		Kajian	866.667,00	-	-	-	866.667,00
		Kajian	2.166.667,00	-	-	-	2.166.667,00
		Kajian	2.166.667,00	-	-	-	2.166.667,00

BPK Perwakilan Kalsel